

## Mengawal Ketahanan Perekonomian Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

*Safeguarding Domestic Economic Resilience Amid  
Global Economic Uncertainty*



# Mengawal Ketahanan Perekonomian Indonesia di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

## *Safeguarding Domestic Economic Resilience Amid Global Economic Uncertainty*

Perekonomian Indonesia pada 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat dan kinerja yang lebih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus dengan cadangan devisa yang meningkat. Nilai tukar rupiah juga mengalami apresiasi, namun masih kompetitif. Di sektor keuangan, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski sempat terjadi tekanan di pasar keuangan sebagai dampak krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika Serikat (AS). Perbaikan kinerja makroekonomi yang terus berlanjut serta berbagai langkah kebijakan struktural yang telah ditempuh selama ini, mendorong peningkatan peringkat Indonesia mencapai *Investment Grade*.

Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang ditempuh Bank Indonesia selama 2011, melalui koordinasi dengan Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Upaya tersebut dituangkan melalui perumusan dan penerapan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, Bank Indonesia juga mendorong pemberdayaan sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta melakukan kerjasama internasional, yang ditopang oleh penguatan kapabilitas internal dan strategi komunikasi yang efektif. Penguatan *good governance* dalam meningkatkan kinerja Bank Indonesia juga menjadi perhatian pada 2011. Sebagai tanggung jawab sosial, Bank Indonesia terus melanjutkan kegiatan Bank Indonesia *Social Responsibility*.

*The economy of Indonesia demonstrated solid resilience and improved performance in 2011 amid widespread global economic uncertainty. Domestic economic growth achieved 6.5%, the highest in the past decade, accompanied by low inflation at 3.79%. The Indonesian Balance of Payments (BoP) posted a surplus with burgeoning foreign exchange reserves. The rupiah exchange rate appreciated but remained competitive. Furthermore, in the financial sector, financial system stability was maintained despite pressures mounting on financial markets as a result of the unresolved crises befalling the euro area and the United States (US). Macroeconomic performance continued to improve, which together with the panoply of structural policy measures introduced ensured Indonesia's rating status was upgraded to Investment Grade.*

*The accomplishments mentioned above are linked to the efforts undertaken by Bank Indonesia in 2011, through coordination with the Government and other relevant stakeholders. Efforts were channelled through the BI policymaking process in the monetary sector, banking and the payment system. In addition, Bank Indonesia encouraged real and MSME sector empowerment, and initiated international coordination bolstered by stronger internal capacity as well as an effective communications strategy in order to buoy policy efficacy. Strengthening good governance to boost performance at Bank Indonesia was also a priority in 2011. As part of its corporate social responsibility program, Bank Indonesia continued to implement activities associated with Bank Indonesia Social Responsibility.*

## Highlights



Pertumbuhan ekonomi  
mencapai

*Economic growth reached*

6,5%



Inflasi pada level yang  
rendah sebesar

*Inflation was a mild*

3,79%



Bank Indonesia mendorong efisiensi perbankan  
dan kompetisi yang sehat melalui kebijakan  
transparansi **Suku Bunga Dasar Kredit**.

*Bank Indonesia has promoted banking efficiency and  
sound competition in the banking industry through  
**Prime Lending Rate** policies.*



Pertumbuhan kredit  
Bank Umum mencapai

*Credit growth achieved*

24,59%

*lebih tinggi dari tahun sebelumnya  
higher than previous year*



# BANK INDONESIA

## Daftar Isi Contents

- 5** Laporan Gubernur  
*Governor's Foreword*
- 9** Status, Tujuan dan Tugas  
*Status, Objectives, and Tasks*
- 11** Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis  
*Mission, Vision and Strategic Values*
- 12** Sekilas Perjalanan Sejarah  
*Brief History*
- 15** Profil Dewan Gubernur  
*Board of Governors Profile*
- 18** Peristiwa Penting 2011  
*The 2011 Event Highlight*
- 20** Kebijakan Strategis 2011  
*The 2011 Strategic Policies*

22

**Tata Kelola Bank Indonesia**  
*Governance of Bank Indonesia*

- 25** Dewan Gubernur  
*Board of Governors*
- 25** Proses Pengambilan Keputusan Bank Indonesia  
*Bank Indonesia Decision-Making Process*

- 26** Kode Etik  
*Code of Ethics*
- 27** Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)  
*The Bank Indonesia Supervision Body (BSBI)*
- 27** Akuntabilitas dan Transparansi  
*Accountability and Transparency*
- 28** Hubungan dengan Pemerintah  
*Relationship with the Government*
- 29** Perencanaan Strategis  
*Strategic Planning*
- 31** Manajemen Risiko  
*Risks Management*
- 32** Audit Internal  
*Internal Audit*

34

**Kilas Balik 2011**  
*The 2011 Flashback*

- 37** Kebijakan Moneter yang Efektif  
*Effective Monetary Policy*
- 47** Boks: Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia  
*Box: Bank Indonesia Crisis Management Protocol*

- 51** Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien  
*A Stable, Sound and Efficient Banking System*

- 67** Sistem Pembayaran yang Aman dan Efisien  
*A Secure and Efficient Payment System*

- 70** Boks: Bank Indonesia Percepat Penyelesaian Transaksi Kliring melalui "Si Kilat"  
*Box: Bank Indonesia Expedites Clearing Transaction Settlement through Express Clearing*

- 74** Boks: Layanan Kas Bank Indonesia di Daerah Terpencil dan Terdepan NKRI  
*Box: Bank Indonesia Cash Services in Remote and Borderland Areas*

- 77** Dukungan Terhadap Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM  
*Empowering the Real Sector and MSME*

- 80** Boks: Bantuan Teknis Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan UMKM  
*Box: Bank Indonesia's Technical Assistance to Develop MSME*

- 83** Manajemen Intern Bank Indonesia  
*Bank Indonesia's Internal Management*

- 91** Kerjasama Internasional  
*International Cooperation*

- 99** Komunikasi dan Edukasi Publik  
*Communication and Public Education*

- 105** Bank Indonesia dan Komunitas  
*Bank Indonesia and Community*

108

**Strategi dan Prioritas ke Depan**  
*Strategy and Priorities Ahead*

- 110** Outlook Perekonomian Indonesia  
*Indonesian Economic Outlook*

- 112** Arah Kebijakan Bank Indonesia 2012  
*Bank Indonesia's Policy Direction in 2012*

114

**Informasi Tambahan**  
*Additional Information*

- 115** Daftar Singkatan  
*Abbreviation*

- 118** Daftar Istilah  
*Glossary*

- 122** Daftar Kontak  
*Contact Lists*

127

**Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2011**  
*The 2011 Bank Indonesia Annual Financial Statements*



# Laporan Gubernur

## Governor's Foreword



Tahun 2011 adalah tahun dengan berbagai catatan keberhasilan namun juga penuh dinamika dan sarat dengan berbagai tantangan. Di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian nasional berhasil terlindungi.

*2011 was a year that witnessed a number of successes but was also replete with a range of arduous challenges to confront and overcome. In the midst of global economic shocks, the national economy was successfully protected.*

Darmin Nasution



## Laporan Gubernur Governor's Foreword

Di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global selama 2011, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa perekonomian nasional sepanjang 2011 tetap berkinerja baik. Jalinan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak merupakan elemen penting dalam mencapai keberhasilan tersebut. Untuk itu, atas nama Dewan Gubernur, saya menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat perbankan, kalangan pengusaha, akademisi, media massa dan berbagai pihak lain, yang telah memberikan dukungan kepada pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia.

Saya melihat tahun 2011 ini adalah sebuah tahun yang menarik. Sebuah tahun dengan berbagai catatan keberhasilan, namun juga penuh dinamika dan sarat dengan berbagai tantangan. Kesemuanya menjadikan kita semakin matang dalam mengelola perekonomian. Ketidakpastian atas resolusi krisis fiskal Eropa dan kecemasan terhadap stagnasi global, menjadi pemicu gejolak di pasar keuangan global selama 2011. Di tengah persistensi gejolak global tersebut, perekonomian nasional berhasil terlindungi. Lebih jauh, daya tahan sektor keuangan dan perekonomian nasional semakin teruji ketangguhannya. Bahkan kita patut berbangga hati karena sekali lagi Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu mempertahankan tingginya pertumbuhan ekonomi sepanjang 2011. Pencapaian ini semakin lengkap dengan inflasi yang berhasil dicapai pada level yang rendah.

Kita patut bergembira karena perekonomian Indonesia berhasil terlindungi dari dampak rambatan krisis global, baik melalui jalur perdagangan maupun jalur pasar keuangan. Kondisi ini merupakan dampak basis permintaan domestik dalam struktur perekonomian yang kuat, serta kemampuan perbankan kita yang semakin baik dalam mengelola risiko, dengan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya. Respon suku bunga telah dan akan terus diarahkan agar sasaran inflasi yang rendah dan

*Amid ubiquitous uncertainty that marred the global economy throughout 2011, we are grateful to God Almighty that the domestic economy performed well during the past year. Close, interwoven coordination among the various parties has been crucial to our recent achievements. To this end, on behalf of the Board of Governors, I would like to extend my heartfelt appreciation and gratitude to all government officials, the House of Representatives, the banking community, the business community, academics, the mass media and others who have supported task implementation at Bank Indonesia.*

*I personally regard this past year of 2011 an interesting one. It was a year that witnessed a number of successes but was also replete with a range of arduous challenges to confront and overcome; all of which led to greater maturity in terms of economic management. Uncertainty over fiscal crisis resolution in Europe and dismay regarding global stagnation were the two main triggers of shocks stemming from global financial markets in 2011. Notwithstanding, the national economy was successfully protected in the midst of such persistent global shocks. Furthermore, the resilience of the domestic financial sector and national economy was efficaciously tested. In fact, we have reason to feel proud because, once again, Indonesia was one of only a handful of countries that maintained robust economic growth in 2011, complemented by low and stable inflation.*

*We are pleased that the economy of Indonesia was successfully protected from contagion through the trade and financial market channels stemming from the global crisis. This was primarily attributable to a strong domestic demand base in the economy, coupled with enhanced risk management in the banking sector and a sustainable intermediation function. The interest rate response was and will continue to steer inflation within a low and stable target corridor. Policy implemented through*

stabil tercapai. Kebijakan melalui suku bunga tentu saja akan terus dilengkapi dengan kebijakan makroprudensial.

Bank Indonesia juga mampu menjaga keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional, bahkan telah terjadi sejumlah pencapaian signifikan. Peluncuran sistem kliring nasional dengan beberapa setelmen perhari, pensahan UU transfer dana, serta terhubungnya pelayanan dua bank nasional terbesar, merupakan pencapaian yang patut kita apresiasi.

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mereduksi berbagai inefisiensi yang telah menghambat perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan. Hanya dengan pertumbuhan yang berkualitas maka masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah nyata di sekeliling kita dapat kita atasi bersama. Masyarakat mendambakan perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, tapi juga berperan secara efisien dalam pembiayaan perekonomian. Kita tidak bisa berdiam diri, dan menganggap industri perbankan kita sudah mencapai kondisi keseimbangan sementara negara lain terus berbenah diri untuk menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Ini merupakan prasyarat peningkatan daya saing guna menghadapi tantangan yang sudah sangat nyata di depan kita, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

*the interest rate will continue to be supplemented by macroprudential policy.*

*Bank Indonesia also upheld the security and reliability of the national payment system, with the achievement of several notable accomplishments. The uninterrupted operation of the national clearing system with the enormity of daily settlements, enactment of the fund transfer bill and the new interoperability of services between the two largest national banks are all monumental achievements that we sincerely appreciate.*

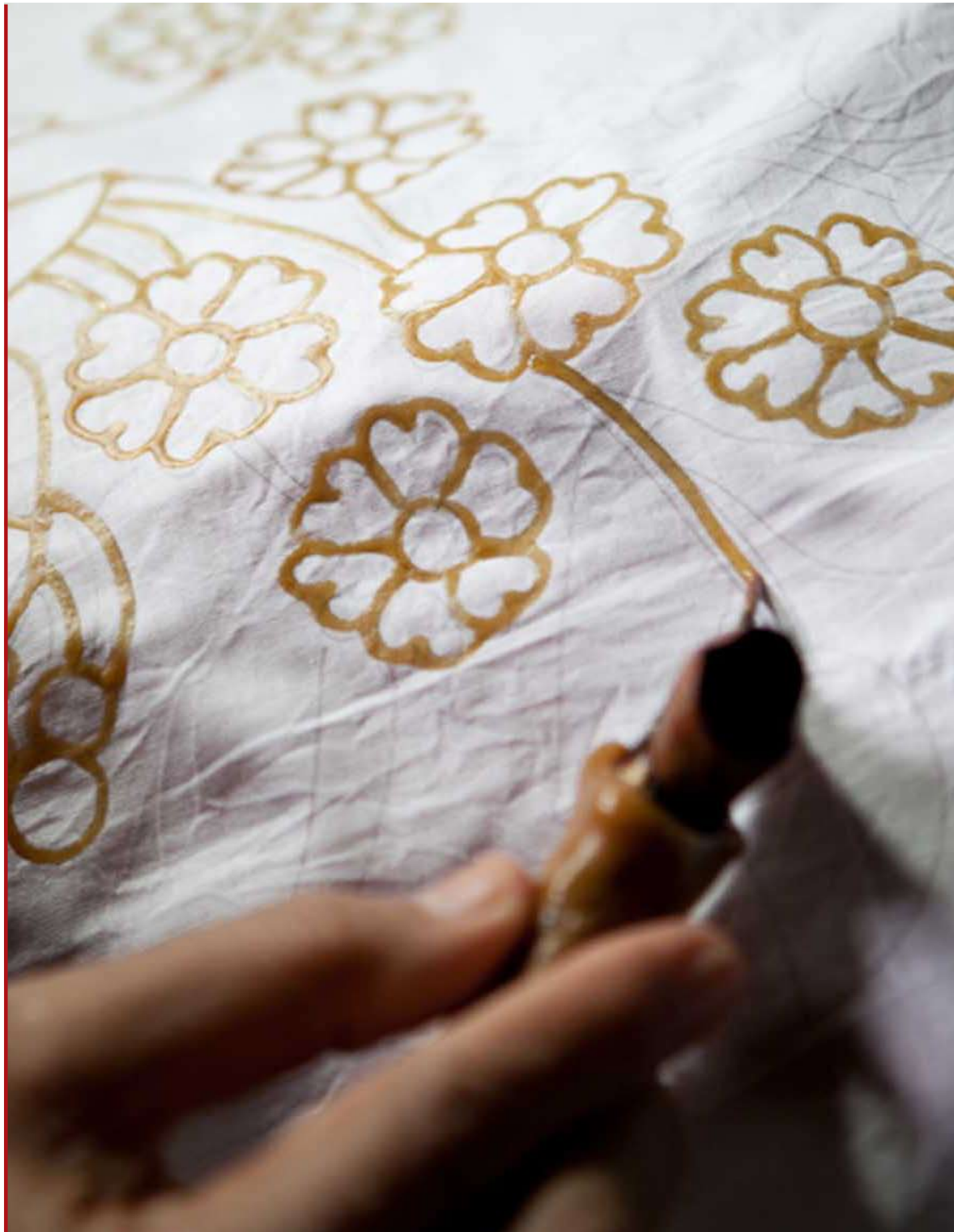
*A number of policies were introduced to reduce inefficiencies that have deprived the economy of stronger and more sustainable growth. Only when quality growth is achieved can we overcome the very tangible problems of poverty and unemployment that surround us. The general public not only yearns for a sound and solid banking sector, but one that also plays an efficient role in financing the economy. We cannot remain silent and rest on our laurels while other countries continue to develop their respective banking sectors, seeking a more appropriate balance to ensure a sound, solid and competitive banking industry. This is prerequisite to boosting domestic competitiveness ahead of the very real future challenge awaiting us, namely the ASEAN Economic Community 2015.*



DARMIN NASUTION

Gubernur Bank Indonesia Governor of Bank Indonesia





# Status, Tujuan dan Tugas

## *Status, Objectives and Tasks*

### Status

Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksana Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri, di dalam maupun di luar pengadilan.

### Tujuan

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari dua aspek. Pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, yang tercermin pada laju inflasi. Kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia dan batas-batas tanggung jawabnya. Pencapaian tujuan tunggal dilakukan Bank Indonesia dengan menerapkan kebijakan moneter berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

### Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Bank Indonesia mengemban tiga tugas yang juga dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia yaitu:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- Mengatur dan mengawasi Bank

Pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya dilakukan secara saling mendukung guna mencapai tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

### Status

*As stipulated by Law, Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia and is the legal entity that is duly authorized to perform legal acts. As a legal public entity, Bank Indonesia has the power to establish regulations as an execution of the Law that legally binds the public within the limits of its task and authority. As a legal civil entity, Bank Indonesia may act for and on behalf of itself both within and outside of the court of law.*

### Objectives

*In its capacity as a Central Bank, Bank Indonesia has a single objective to achieve and to maintain the stability of the Rupiah. Two aspects which reflect the stability of the Rupiah are stability of rupiah against goods and services as well as against foreign currencies. The first aspect is reflected in the inflation rate, while the second aspect is reflected in the development of exchange rate against foreign currencies. The formulation of these primary goals seeks to emphasize the targets that Bank Indonesia must achieve as well as its responsibility limits. To achieve this goal, Bank Indonesia implements monetary policy in a continuous, consistent, and transparent manner, in addition to taking into account the government's overall economic policy.*

### Tasks

*To achieve its established goals, Bank Indonesia assumes three core tasks recognized as Bank Indonesia's Three Pillars, which are:*

- To formulate and to implement monetary policy*
- To regulate and to maintain an effective payment system*
- To regulate and to supervise Banks*

*These three tasks are inter-related and therefore are simultaneously implemented to support the achievement of Bank Indonesia's objectives effectively and efficiently.*



# Misi, Visi, dan Nilai-nilai Strategis

*Mission, Vision, and Strategic Values*

## Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

## Mission

*To achieve and to maintain Rupiah stability by achieving monetary stability and promoting financial system stability towards Indonesia's long-term sustainable development.*

## Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

## Vision

*To be recognized, domestically and internationally, as a credible central bank, through the strength of our strategic values and the achievement of low and stable inflation rate.*

## Nilai-nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, terdiri atas "Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan".

## Strategic Values

*The values that serve as the foundation for Bank Indonesia, its management and staffs to conduct and carry out the tasks, which consist of "Competency, Integrity, Transparency, Accountability and Cohesiveness".*



# Sekilas Perjalanan Sejarah

## Brief History

### 1828

De Javasche Bank (DJB) didirikan pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.

*De Javasche Bank (DJB) was established by the government of the Dutch East Indies to serve as a Circulation Bank to print and circulate money.*

### 1953

Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi DJB sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang kebijakan moneter, kebijakan perbankan dan kebijakan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan beberapa fungsi bank komersial dan berperan sebagai kasir pemerintah.

*The Principle Act on Bank Indonesia marked the birth of Bank Indonesia as the Indonesian Central Bank to replace the DJB, with three main tasks in the monetary, banking and payment system sectors. In addition, Bank Indonesia also carried out various commercial bank functions previously performed by DJB as well as served as the government's payment agent.*

### 1968

Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

*The Act of Central Bank regulated the position and tasks of Bank Indonesia as the Central Bank, separated from commercial bank activities. In addition to the three main tasks of the Central Bank, Bank Indonesia was also assigned to support the government as an agent of development in promoting real sector production and development as well as expanding employment opportunities to improve public welfare.*

### 1999

Undang-undang Bank Indonesia menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia dipertegas kembali, yaitu sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar pemerintah.

*This year marked the new chapter in Bank Indonesia's history whereby the Act of Bank Indonesia established Bank Indonesia's single objective of achieving and maintaining the Rupiah's value. Bank Indonesia's position as the Central Bank of the Republic of Indonesia was reaffirmed more specifically as a state institution that performs its task and authorities independently from the government.*

### 2004

Kelembagaan Bank Indonesia diperkuat melalui amandemen Undang Undang Bank Indonesia, dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*.

*Bank Indonesia was institutionally strengthened through the amendment of the Act concerning Bank Indonesia that focused on vital aspects pertaining to Bank Indonesia's tasks and authority, including strengthening governance.*

### 2008

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui perluasan akses pendanaan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

*As part of its efforts to maintain financial system stability, the government issued Government Regulation in lieu of Law No. 2 concerning the Second Amendment of Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. The amendment sought to intensify the banking industry's resilience in response to the global crisis by expanding access to funding for banks that experienced short-term liquidity difficulties.*

### 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

*Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2008 concerning the Second Amendment to Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia was established as the Act of Bank Indonesia.*

### 2011

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dan di bidang perbankan. UU Transfer Dana memberikan basis legal yang kuat bagi Bank Indonesia dalam kegiatan transfer dana. Sementara UU OJK mengatur pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan ke OJK sejak 2013.

*Endorsement of Act No 3, 2011, concerning the transfer of funds and Act No 21, 2011, on the Financial Services Authority (FSA) affected Bank Indonesia task implementation for the payment system and banking sector. The Fund Transfer Act provides a solid legal basis for Bank Indonesia when transferring funds. Meanwhile, the FSA Act legislates the handing over of bank supervision activity from Bank Indonesia to the Financial Services Authority in 2013.*



# Profil Dewan Gubernur

## Board of Governors Profile



Dari kiri ke kanan / From left to right: Ronald Waas, Halim Alamsyah, Muliaman D. Hadad, Darmin Nasution

Hartadi A. Sarwono, Ardhayadi M., Budi Mulya



Profil Dewan Gubernur  
*Board of Governors Profile*

**Darmin Nasution**

Gubernur *Governor*

Mulai bergabung di Bank Indonesia pada 27 Juli 2009 sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2009 s.d. 2014. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009. Dengan kekosongan jabatan Gubernur Bank Indonesia, sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Deputy Gubernur Senior Darmin Nasution, juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, Darmin Nasution dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 1 September 2010.

*Darmin Nasution joined Bank Indonesia on 27th July 2009 as Senior Deputy Governor for 2009 to 2014 based on Presidential Decree No. 57/P, dated 17th July 2009. When the position of Governor became vacant, Senior Deputy Governor Darmin Nasution became acting governor pursuant to Bank Indonesia regulations.*

*According to Presidential Decree No. 95/P, dated 21st August 2010, Darmin Nasution was installed as the Governor of Bank Indonesia on 1st September 2010.*

**Hartadi A. Sarwono**

Deputi Gubernur *Deputy Governor*

Mulai bergabung dengan Bank Indonesia sebagai staf pada 1980. Untuk periode 1997 s.d. 2000, Hartadi A. Sarwono menjabat sebagai Deputy Direktur di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Pada 2000 dipercaya sebagai Direktur di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Selanjutnya, pada 2003 menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo. Hartadi A. Sarwono diangkat pertama kali sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia periode 2003 s.d. 2008 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/M Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003. Hartadi A. Sarwono diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua kali sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu periode 2008 s.d. 2013 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008, dan dilantik tanggal 26 Juni 2008.

*Hartadi A. Sarwono joined Bank Indonesia as a member of staff in 1980. For the period from 1997 to 2000, Hartadi A. Sarwono was appointed Deputy Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy. In 2000 he was entrusted with the position of Director in the same directorate. Subsequently, in 2003 he was appointed as Head of Bank Indonesia's Representative office in Tokyo. Hartadi A. Sarwono was first named Deputy Governor of Bank Indonesia for the period from 2003 to 2008 in line with Presidential Decree No. 102/M, dated 13th June 2003. Hartadi A. Sarwono earned his second incumbency as Deputy Governor for the period from 2008 to 2013 in compliance with Presidential Decree No. 43/P dated 10th June 2008 and was appointed on 26th June 2008.*

**Muliaman D. Hadad**

Deputi Gubernur *Deputy Governor*

Mengawali kariernya di Bank Indonesia pada 1986 sebagai staf di Kantor Bank Indonesia Mataram. Pada 2003 diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada 2005. Muliaman D. Hadad pertama kali diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006. Muliaman D. Hadad kembali diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan kedua kalinya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan dilantik pada tanggal 29 Desember 2011.

*Muliaman D. Hadad began his career with Bank Indonesia in 1986 as a member of staff at the Mataram office of Bank Indonesia. In 2003 he was nominated Head of the Financial System Stability Bureau and subsequently named Director of the Directorate of Banking Research and Regulation in 2005. Muliaman D. Hadad was originally installed as Deputy Governor of Bank Indonesia in line with Presidential Decree No. 69/P dated 22nd December 2006 and then reappointed for a second term according to Presidential Decree No. 75/P, dated 21st December 2011, taking up the position on 29th December 2011.*

**Ardhayadi Mitroatmodjo**

Deputi Gubernur *Deputy Governor*

Memulai karier di Bank Indonesia pada 1978 sebagai programer/asisten manajer di Direktorat Teknologi Informasi. Selanjutnya pada 2004 s.d. 2007 sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia London. Terakhir menjabat sebagai Direktur Pengawasan Bank pada 2007, sebelum diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 dan dilantik pada 29 November 2007.

*Ardhayadi Mitroatmodjo began his career at Bank Indonesia in 1978 as a programmer/assistant manager in the Directorate of Information Technology. From 2004 until 2007 he served as Head of Bank Indonesia's Representative office in London. Finally, Ardhayadi Mitroatmodjo performed his duties as Director of Bank Supervision in 2007 before promotion to Deputy Governor of Bank Indonesia based on Presidential Decree No. 95/P dated 6th October 2007. He was sworn in to office on 29th November 2007.*

**Budi Mulya**

Deputi Gubernur *Deputy Governor*

Mulai berkariier sebagai staf di Urusan Riset dan Ekonomi Statistik Bank Indonesia pada 1980. Selama kariernya di Bank Indonesia, Budi Mulya pernah menjabat sebagai *Senior Researcher* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London pada periode 1991 s.d. 1994 dan ditugaskan sebagai *Managing Director* Bank Ekspor Indonesia periode 1999 s.d. 2003. Dalam periode 2003 s.d. 2006 diangkat sebagai Direktur Pengelolaan Moneter dan selanjutnya sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat selama 2006 s.d. 2007. Budi Mulya diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 dan dilantik pada 29 November 2007.

*Budi Mulya began his career at Bank Indonesia as a member of staff in Research and Economic Statistics in 1980. During his illustrious career at Bank Indonesia, Budi Mulya has served as Senior Researcher at Bank Indonesia's Representative office in London for the period from 1991 to 1994 and was assigned as Managing Director to Bank Ekspor Indonesia in 1999 to 2003. From 2003 to 2006 he held the position of Director of Monetary Management and then served from 2006 to 2007 as the Director of Strategic Planning and Public Relations. Budi Mulya was sworn in as Deputy Governor on 29th November 2007 in accordance to Presidential Decree No. 95/P dated 6th October 2007.*

**Halim Alamsyah**

Deputi Gubernur *Deputy Governor*

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1982 sebagai staf analis kredit di Urusan Kredit Koperasi, dan mengabdikan sebagian besar kariernya di bidang moneter. Selama berkariier di Bank Indonesia, Halim Alamsyah pernah menjabat Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada 2002, Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter pada 2003, Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat pada 2005, dan Direktur Direktorat Statistik dan Moneter pada 2006. Terakhir menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada 2007 s.d. 2010. Halim Alamsyah diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 dan dilantik pada 17 Juni 2010.

*Halim Alamsyah began his career at Bank Indonesia in 1982 as a credit analyst in Corporate Credit Affairs and has subsequently devoted the majority of his career to working in the monetary field. During his time at Bank Indonesia, Halim Alamsyah served as Director of the Centre for Education and Central Bank Studies in 2002, Director of the Directorate of Economic Research and Monetary Policy in 2003, Director of the Directorate of Strategic Planning and Public Relations in 2005, and Director of the Directorate of Economic and Monetary Statistics in 2006. In his final position before nomination as Deputy Governor, Halim Alamsyah was selected as Director of the Directorate of Banking Research and Regulation from 2007 to 2010. Halim Alamsyah was sworn in as Deputy Governor on 17th June 2010 based on Presidential Decree No. 63/P dated 1st June 2010.*

**Ronald Waas**

Deputi Gubernur *Deputy Governor*

(sejak Desember 2011 *Since December 2011*)

Mulai bekerja di Bank Indonesia pada tahun 1981. Pada periode 2004 s.d. 2007, menjabat sebagai Direktur Direktorat Teknologi Informasi dan sebagai Direktur Unit Khusus Manajemen Informasi selama periode 2007 s.d. 2009. Terakhir menjabat sebagai Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran pada 2009 s.d. 2011 sebelum diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 dan dilantik pada 29 Desember 2011.

*Ronald Waas joined Bank Indonesia in 1981. From 2004 to 2007 he served as Director of the Directorate of Information Technology and Director of the Special Unit on Information Management from 2007 until 2009. He was named Director of the Directorate of Accounting and the Payment System from 2009 to 2011 before being installed as Deputy Governor on 29th December 2011 pursuant to Presidential Decree No. 75/P dated 21st December.*



*The late*  
**S. Budi Rochadi** (almarhum *deceased*)  
Deputi Gubernur (meninggal pada 11 Juli 2011)  
*Deputy Governor (passed away on July 11, 2011)*

Memulai karier di Bank Indonesia pada 1975. Pada 1996 diangkat sebagai Kepala Urusan Pengawasan Bank dan pernah menjabat sebagai Pemimpin Bank Indonesia Semarang, Pemimpin Bank Indonesia Medan, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo. Terakhir menjabat sebagai Direktur Senior Pengawasan Bank sebelum diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dilantik pada 11 Januari 2007. S. Budi Rochadi tidak sampai menyelesaikan tugasnya sebagai Deputy Gubernur karena meninggal dunia pada 11 Juli 2011.

*S. Budi Rochadi started his career at Bank Indonesia in 1975. In 1996 he was promoted to Head of Bank Supervision and served as Commissioner of Bank Indonesia's branch offices in Semarang and Medan before moving to Tokyo to head up Bank Indonesia's Representative Office. He was appointed Senior Director of Bank Supervision prior to his incumbency as Deputy Governor of Bank Indonesia based on Presidential Decree No. 69/P dated 22nd December 2006. S. Budi Rochadi was instated as Deputy Governor on 11th January 2007 but did not complete his term due to his untimely passing on 11th July 2011.*



# Peristiwa Penting 2011

## The 2011 Event Highlight

### Januari January

Moody's Investors Service menaikkan peringkat *Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia menjadi Ba1, satu *notch* sebelum memasuki posisi *rating investmet grade*, dengan *outlook* stabil.

Moody's Investors Service upgraded Indonesia's *Sovereign Credit Rating* to Ba1, one notch belows investment grade, with a stable outlook.

### Februari February

Fitch Ratings menegaskan peringkat utang Indonesia atau *long-term foreign and local currency issuer default ratings* (IDRs) pada *rating* BB+ dan merevisi *outlook* keduanya menjadi positif.

Fitch Ratings affirmed Indonesia's debt rating or long-term foreign and local currency issuer default ratings (IDRs) at BB+ and revised the both outlooks to positive.

### April April



- Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi dan UKM, menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Standard and Poor's (S&P) menaikkan *long-term foreign currency rating* Indonesia menjadi BB+ dengan *outlook* positif.
- The Governor of Bank Indonesia signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Minister of Cooperatives and the MSME on the development of cooperatives as well as micro, small and medium enterprises (MSME).
- Standard and Poor's (S&P) upgraded Indonesia's long-term foreign currency rating to BB+ with a positive outlook.

### Juli July



Deputi Gubernur Bank Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menandatangani Naskah Kerjasama mengenai pembentukan Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia.

The Deputy Governor of Bank Indonesia, the Chairman of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre, and the Dean of the Faculty of Law, University of Indonesia (FHUI) signed a joint agreement concerning the establishment of an anti-money laundering research centre in Indonesia known as Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia.

### Agustus August

- Bank Indonesia meluncurkan Info Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai *Microsite* baru pengganti Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI).
- Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menandatangani Kesepakatan Bersama Edukasi Keuangan dalam Rangka Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

### Oktober October



Bank Indonesia secara resmi mengeluarkan dan mengedarkan Uang Kertas Rupiah Desain Baru pecahan Rp 20.000 Tahun Emisi (TE) 2004, Rp 50.000 TE 2005 dan Rp 100.000 TE 2004.

Bank Indonesia issued and circulated newly designed banknotes of the denominations: Rp 20,000 issued in 2004, Rp 50,000 issued in 2005 and Rp 100,000 issued in 2004.

- Deputi Gubernur Bank Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa Bank Indonesia dengan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bank Indonesia launched a new *microsite* containing information on micro, small and medium enterprises (MSME) as part of the official Bank Indonesia website to replace Indonesian Business Data and Information (IBDI) system.
- The Governor of Bank Indonesia and the Minister of Manpower and Transmigration signed a memorandum of understanding on financial education in order to empower Indonesian migrant workers (TKI).
- The Deputy Governor of Bank Indonesia signed a joint scholarship program with The University of Indonesia, The Bogor Agricultural Institute, The State University of Jakarta and The UIN Syarif Hidayatullah.

### September September

Perpustakaan Bank Indonesia menerima sertifikat ISO 90001:20008.

The Bank Indonesia Library received ISO 90001:20008 accreditation.

### November November

Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perhubungan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyusunan Kebijakan dan Standar Interkoneksi dan Interoperabilitas Uang Elektronik di Sektor Transportasi.

The Governor of Bank Indonesia, Minister of Transportation and Minister of Communications and Information Technology signed a joint agreement on formulating of policy and standards for the interconnectivity and interoperability of electronic money in the transportation sector.

### Desember December



- Muliaman D. Hadad dan Ronald Waas resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
- Indonesia memperoleh peringkat *Investment Grade* dari Fitch Ratings.
- Bank Indonesia meluncurkan Buku Generic Model BPR Apex dan Model Bisnis BPR.
- Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung, menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi penanganan tindak pidana perbankan dan petunjuk pelaksanaannya
- Muliaman D. Hadad and Ronald Waas officially appointed as Deputy Governors of Bank Indonesia.
- Indonesia attained Investment Grade rating from Fitch Ratings.
- Bank Indonesia released guidelines of a generic Apex bank model and a rural bank business model.
- The Governor of Bank Indonesia, the Chief of Indonesian National Police and the Indonesian Attorney General signed an agreement on the joint handling of criminal activity in the banking sector and its guidelines.



# Kebijakan Strategis 2011

## *The 2011 Strategic Policies*

### Triwulan I-2011

- Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 6,75% pada Februari 2011.
- Bank Indonesia menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas secara bertahap, yaitu dari 1% menjadi 5% pada Maret 2011, dan menjadi 8% pada Juni 2011.
- Bank Indonesia menerbitkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit untuk mendorong efisiensi perbankan serta menciptakan iklim persaingan yang sehat dan disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

### Triwulan II-2011

Bank Indonesia memperpanjang masa wajib pegang (*minimum holding period*) Sertifikat Bank Indonesia dari satu bulan (28 hari) menjadi enam bulan (182 hari).

### *Quarter I-2011*

- *Bank Indonesia raised BI rate by 25 bps to 6.75% in February 2011.*
- *Bank Indonesia incrementally raised the minimum statutory reserve requirement for foreign exchange from 1% to 5% in March 2011 and to 8% in June 2011.*
- *Bank Indonesia issued policy regarding the publication of prime lending rates in order to increase banking efficiency as well as to create sound competition and market discipline.*

### *Quarter II-2011*

*Bank Indonesia extended the minimum holding period of Bank Indonesia Certificates from one month (28 days) to six months (182 days).*

### Triwulan III-2011

Bank Indonesia menerbitkan kebijakan mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) serta melakukan pemantauan kegiatan DHE dan DULN, yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2012.

### Triwulan IV-2011

- Bank Indonesia menurunkan BI rate pada Oktober dan November 2011 masing-masing sebesar 25 bps dan 50 bps.
- Bank Indonesia menurunkan batas bawah koridor suku bunga Pasar Uang Antar Bank *overnight* dari 100 bps menjadi 150 bps di bawah BI rate.

### *Quarter III-2011*

*Bank Indonesia issued policy concerning foreign exchange proceeds from exports and withdrawals on foreign exchange offshore debt, and monitor both activities commencing 2nd January 2012.*

### *Quarter IV-2011*

- *Bank Indonesia reduced BI rate in October and November 2011 by 25 bps and 50 bps respectively.*
- *Bank Indonesia lowered the overnight interest rate corridor on the interbank money market from 100 bps to 150 bps below the BI rate.*





# Tata Kelola Bank Indonesia

## *Governance of Bank Indonesia*

Bank Indonesia menyadari bahwa kredibilitas jangka panjang hanya dapat terwujud jika prinsip-prinsip *good governance* terus ditegakkan, seiring dengan komitmen untuk selalu meningkatkan kapabilitas diri. Untuk itu, Bank Indonesia secara

konsisten berupaya memperbaiki diri serta menerapkan sistem tata kerja dan pengorganisasian yang sehat, bersih, efektif dan akuntabel, guna menjadi lembaga yang semakin bermanfaat bagi masyarakat luas.

*Bank Indonesia acknowledged that long-term credibility is only possible through the implementation of good governance, in harmony with the commitment to continuously self improve. To this end,*

*Bank Indonesia consistently strives to improve and apply a sound, ethical, effective and accountable working system and organisation that benefits the wider community.*





## Dewan Gubernur

Sesuai dengan amanat Pasal 36 Undang-Undang tentang Bank Indonesia (UU BI), dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan empat hingga tujuh orang Deputy Gubernur. Masa kerja Dewan Gubernur selama lima tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu periode berikutnya.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Gubernur merekomendasikan calon Deputy Gubernur kepada Presiden setelah melalui proses seleksi secara transparan, akuntabel dan objektif. Presiden selanjutnya menyampaikan rekomendasi tersebut kepada DPR-RI. Persetujuan DPR RI terhadap usulan calon anggota Dewan Gubernur dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test*, menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta moral dan akhlak.

Pembagian tugas anggota Dewan Gubernur diatur berdasarkan pembedaan terkait moneter, perbankan dan stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran serta manajemen intern.

## Proses Pengambilan Keputusan Bank Indonesia

Proses pengambilan keputusan Bank Indonesia yang tertinggi dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG). Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RDG bersifat prinsipil dan strategis, yang berdampak baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia. Pengambilan keputusan RDG dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, Gubernur Bank Indonesia menetapkan keputusan akhir.

Sesuai UU BI, RDG diselenggarakan minimal satu bulan sekali untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter (RDG Bulanan). Hasil RDG Bulanan berupa kebijakan BI rate merupakan cerminan *stance* kebijakan moneter ke depan. RDG Bulanan dapat dihadiri menteri sebagai wakil dari pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Dalam rangka transparansi, jadwal RDG Bulanan untuk satu tahun berikutnya diumumkan melalui *website* Bank Indonesia setiap akhir tahun. Selain itu, hasil RDG Bulanan serta latar belakang pertimbangan

## Board of Governors

Pursuant to article 36 of the Bank Indonesia Act (UU BI), the Board of Governors heads Bank Indonesia task implementation. The Board consists of one governor, one senior deputy governor and four to seven deputy governors. The tenure of the Board is five years with reappointment possible in the subsequent period.

The governor, senior deputy governor and deputy governors are nominated and appointed by the President in agreement with the House of Representatives (DPR-RI). The governor is responsible for recommending candidate deputy governors through a selection process that is transparent, accountable and objective. The president subsequently forwards the recommendations to the House to compile the members of the Board through fit and proper tests, involving vision, experience, expertise or competence as well as integrity and character.

The division of tasks among the Board is based on monetary, banking and financial system stability as well as the payment system and internal management.

## Bank Indonesia Decision-Making Process

The Bank Indonesia decision-making process is conducted at the highest level at the Board of Governors' Meeting. The policies determined at the meeting are principal and strategic in nature, affecting Bank Indonesia internally as well as externally. The decision-making process is performed through deliberation to reach consensus. However, the governor has the final decision if consensus is not reached.

In accordance to the Bank Indonesia Act, the meeting is held at least once a month in order to determine general monetary policy (Monthly Meeting). The outcome of the monthly meeting is the BI policy rate that reflects monetary policy stance looking ahead. Ministers representing the government can attend the monthly meeting with the right to speak but not to vote. The schedule of monthly meetings for the upcoming year is published on the official Bank Indonesia website at the end of each year in order to promote transparency. Furthermore, the minutes of each monthly meeting as well as the considerations behind any adjustments to the



Tata Kelola Bank Indonesia  
*Governance of Bank Indonesia*

ditetapkannya kebijakan BI rate diumumkan di media massa dan melalui *website* Bank Indonesia pada hari yang sama dengan RDG Bulanan.

Selain penyelenggaraan RDG Bulanan, sesuai UU BI juga dilakukan RDG minimal satu kali dalam satu minggu (RDG Mingguan). RDG Mingguan dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis lain, baik di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran serta pagedaran uang, maupun kebijakan internal.

Dalam upaya meningkatkan kualitas keputusan Dewan Gubernur, dibentuk sejumlah komite yang melakukan pertemuan berkala yang menghasilkan rekomendasi mengenai beberapa kebijakan strategis, untuk selanjutnya diajukan ke RDG. Beberapa komite yang ada di Bank Indonesia adalah Komite Kebijakan Moneter, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, Komite Internasional, Komite Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, serta Komite Sumber Daya Manusia. Komite-komite tersebut beranggotakan beberapa anggota Dewan Gubernur serta para pimpinan satuan kerja terkait.

Selain kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis, Bank Indonesia juga mengambil kebijakan operasional. Anggota Dewan Gubernur menentukan kebijakan operasional berdasarkan pembidangan masing-masing. Kebijakan operasional dapat pula ditentukan Pemimpin Satuan Kerja, sesuai pendelegasian tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Kode Etik

Untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, nilai integritas menjadi faktor penting untuk dijaga. Upaya menjaga integritas Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Indonesia diwujudkan dalam aturan kode etik bagi Pegawai dan Dewan Gubernur. Aspek yang diatur dalam aturan kode etik mencakup nilai-nilai *good governance*, pencegahan benturan kepentingan, profesionalitas serta hubungan dengan stakeholder internal maupun eksternal.

Untuk lebih mempertajam dan mengkinikan aturan kode etik sesuai dengan kondisi saat ini, pada 2011 Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap aturan kode etik Dewan Gubernur. Infrastruktur pendukung

*policy rate are published immediately in the media and through the official Bank Indonesia website on the same day as the meeting.*

*In addition to holding monthly meetings, in line with the Bank Indonesia Act, weekly meetings are also held. Weekly meetings are held to evaluate prevailing monetary policy or set other principal and strategic policies like monetary, banking and payment system as well as the circulation of currency and internal policy.*

*Several committees were established that hold regular meetings to generate policy recommendations to be submitted to the Board of Governors in order to enhance the quality of the decisions made by the Board. The committees currently include the Monetary Policy Committee, the Financial System Stability Committee, the Banking Regulation and Supervision Committee, the International Committee, the Strategic Planning and Performance Management Committee as well as the Human Resources Committee. The committees are staffed by members of the Board as well as the heads of related work units.*

*In addition to principal and strategic policies, Bank Indonesia also institutes operational policy. Members of the Board set operational policy based on their respective fields. Furthermore, operational policy can also be set by the heads of work units in line with the delegation of Bank Indonesia's tasks and authority.*

Code of Ethics

*Integrity is a pivotal factor of maintaining credibility at Bank Indonesia in terms of policy credibility and task implementation. The integrity of human resources is maintained at Bank Indonesia through a code of ethics applicable to all employees and members of the Board. The aspects contained within the code of ethics cover good governance, conflicts of interest, professionalism and relationships with internal and external stakeholders.*

*In 2011 Bank Indonesia refined its code of ethics for the Board of Governors in order to hone and update the rules contained within according to current conditions. Infrastructure supporting the effective implementation of*

efektivitas implementasi kode etik diperkuat dengan keberadaan Majelis Kehormatan Etik (MKE). Untuk menjaga obyektivitas kerja MKE, mayoritas keanggotaan MKE berasal dari pihak eksternal Bank Indonesia yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Tugas BSBI adalah membantu DPR-RI dalam menjalankan fungsi pengawasan bidang tertentu terhadap Bank Indonesia. BSBI terdiri atas satu ketua merangkap anggota dan empat anggota yang dipilih DPR-RI dan diangkat Presiden. Masa jabatan anggota BSBI adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Fungsi pengawasan BSBI di bidang tertentu mencakup telaahan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, anggaran operasional dan investasi, serta prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia. BSBI menyampaikan laporan kepada DPR-RI setiap triwulanan atau setiap saat apabila diminta DPR.

Akuntabilitas dan Transparansi

Bank Indonesia memiliki kewajiban akuntabilitas dan transparansi. Terkait akuntabilitas, Dewan Gubernur menempatkan rapat dengan DPR-RI sebagai sarana untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta menerima masukan-masukan DPR. Bank Indonesia juga menyampaikan laporan akuntabilitas secara tertulis kepada DPR-RI dan pemerintah di awal tahun anggaran, mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang tahun sebelumnya. Laporan tertulis tersebut juga memaparkan rencana kebijakan dan penetapan sasaran untuk tahun berjalan. Disampaikan pula laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia secara triwulanan. Berbagai laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan DPR-RI dalam menilai kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur. Bank Indonesia juga mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta Neraca Keuangan Mingguan dalam Berita Negara dan *website* Bank Indonesia, sebagai bentuk akuntabilitas anggaran.

*the code of ethics was strengthened by the presence of the Majelis Kehormatan Etik (MKE) or the Honorary Council of Ethics. The majority of Council members were chosen from outside of Bank Indonesia based on their credibility and integrity in order to maintain work objectivity.*

The Bank Indonesia Supervision Body (BSBI)

*The Bank Indonesia Supervision Body (BSBI) was formed in an effort to foster accountability, independence, transparency and credibility. The task of BSBI is to assist the House of Representatives (DPR-RI) perform its supervision function in specific areas over Bank Indonesia. BSBI consists of a chairman and four other members chosen by the House and appointed by the President. The tenure of members is three years with the possibility of re-election in the subsequent period.*

*The supervision function of BSBI includes analysing Bank Indonesia's annual financial statement, investment and operational budgets and the decision-making procedure for operational activity excluding monetary policy and asset management. BSBI submits its findings to the House of Representatives on a quarterly basis or by request of the House.*

Accountability and Transparency

*Bank Indonesia is obliged to ensure accountability and transparency. Referring to accountability, the Board of Governors regularly meets with the House of Representatives as a way to discuss Bank Indonesia's task and authority, as well as receive input from the House. Bank Indonesia also submits a written accountability report to the House of Representatives and the government at the beginning of each fiscal year concerning task implementation and Bank Indonesia authority in the previous year. This written report also sets out the policy plan and targets for the upcoming year. A quarterly report on Bank Indonesia task implementation and authority is also submitted. These reports are used by the House when assessing the performance of Bank Indonesia and the corresponding Board of Governors. Bank Indonesia also publishes its annual financial statement, after inspection by the Audit Board, and its weekly balance sheet in the state gazette as well as on the official Bank Indonesia website, as a form of budgetary accountability.*



Tata Kelola Bank Indonesia  
*Governance of Bank Indonesia*

Dalam rangka transparansi, Bank Indonesia menyediakan *website* [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) yang memuat informasi lengkap mengenai kegiatan dan kebijakan Bank Indonesia. Informasi yang dapat diakses antara lain jadwal RDG Bulanan, penetapan BI rate dan dasar pertimbangannya, serta berbagai ketentuan Bank Indonesia. Laporan dan hasil kajian berbagai bidang tugas Bank Indonesia juga dapat diakses melalui *website* Bank Indonesia. *Website* Bank Indonesia juga menyediakan Info UMKM dan *Investor Relations Unit*, yang bermanfaat bagi pengusaha dan calon investor. Penyediaan data-data tersebut merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Bank Indonesia terus meningkatkan interaksi dan keterbukaan dengan pihak eksternal untuk memperoleh masukan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, seperti berdiskusi dengan Perbankan dan Himbara sebelum menerbitkan ketentuan perbankan baru. Bank Indonesia juga menerima kunjungan dari berbagai instansi dalam dan luar negeri dalam rangka diskusi mengenai kondisi perekonomian terkini dan kebijakan Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan pelayanan informasi publik melalui Gerai Info, perpustakaan dan museum, terbuka untuk umum yang ingin memperoleh informasi mengenai Bank Indonesia dan tugas-tugasnya.

Hubungan dengan Pemerintah

Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah, baik dalam rangka koordinasi kebijakan maupun hubungan kerja operasional. Dalam rangka koordinasi kebijakan, Bank Indonesia dan pemerintah mengarahkan agar masing-masing kebijakan dapat bersinergi dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Bentuk koordinasi antara lain berupa keikutsertaan Bank Indonesia dalam sidang kabinet serta berkontribusi dengan memberikan masukan kepada pemerintah. Masukan antara lain mengenai rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Dalam hubungan kerja operasional, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dan memberikan remunerasi atas saldo kas pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat

*Bank Indonesia publishes its own official website (www.bi.go.id) containing comprehensive information on the numerous activities and policies of Bank Indonesia in order to bolster transparency. Information is accessible regarding the schedule of the monthly Board of Governors’ Meetings, the BI rate and its basic determinants, as well as the array of Bank Indonesia regulations. Reports and reviews on the various tasks performed by Bank Indonesia are also accessible through the official Bank Indonesia website. The website further provides information on MSME and the Investor Relations Unit, which benefits the business community as well as potential investors. Bank Indonesia makes this data available in order to support economic activity.*

*Bank Indonesia continuously enhances interaction with and openness to external parties as inputs for policymaking, for instance discussions with the banking community and Himbara (the state-owned banks association) prior to promulgating new banking regulations. Bank Indonesia also receives visits from numerous domestic and foreign institutes in order to discuss the latest economic conditions and Bank Indonesia policy. In addition, Bank Indonesia also provides a public information service through Info Counters, the library and museum, which are open to the general public who wish to access information on Bank Indonesia and its tasks.*

Relationship with the Government

*Bank Indonesia collaborates with the government through policy coordination and an operational working relationship. In terms of policy coordination, Bank Indonesia and the government guide their respective policies towards the synergetic achievement of macroeconomic targets. Coordination, among others, takes the form of Bank Indonesia participation at cabinet meetings as well as contributing ideas and inputs to the government. Inputs cover a range of topics including the annual state budget as well as other policies that fall under the auspices of Bank Indonesia.*

*In their operational working relationship, Bank Indonesia holds the government’s cash and provides remuneration against the government’s cash balance. Bank Indonesia can receive offshore loans on behalf of the government,*

menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Namun demikian, Bank Indonesia dilarang memberi kredit kepada pemerintah.

Di bidang hukum, Bank Indonesia berperan aktif dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait bidang tugasnya, baik sebagai nara sumber maupun anggota tim penyusun. Beberapa RUU yang dibahas bersama pemerintah selama 2011 adalah RUU Transfer Dana (yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2011), RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, RUU Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU Pengelolaan Keuangan Haji, serta RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (Tipiti).

Bank Indonesia juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (UU). Kerjasama antara lain dengan Kementerian Keuangan dalam rangka Implementasi UU Perbendaharaan Negara terkait *Treasury Single Account* dan UU Pajak Penghasilan, dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka implementasi UU UMKM, dan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka implementasi UU ITE.

Dalam hukum internasional, Bank Indonesia bersama departemen teknis terkait, aktif dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) khususnya *working group security interest, insolvency law, dan arbitration*. Hasil dari sidang-sidang dimaksud menjadi masukan berharga dalam pengembangan dan pembangunan sistem hukum nasional. Terkait perdagangan sektor jasa khususnya sub sektor jasa perbankan, Bank Indonesia ikut serta dalam pembahasan dengan instansi terkait baik dalam forum nasional maupun dengan menghadiri sidang terkait World Trade Organisation, ASEAN, APEC, serta kerjasama bilateral maupun regional.

Perencanaan Strategis

Bank Indonesia memiliki sistem manajemen strategi yang dituangkan dalam Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK). Tahapan (siklus) manajemen

*administer them and settle invoices and other financial liabilities to foreign parties. Nevertheless, Bank Indonesia is not permitted to allocate credit to the government.*

*Legally, Bank Indonesia plays an active role in formulating draft bills in line with its area of expertise, either as a member of the select committee or by providing other resources. A number of draft bills were discussed with the government in 2011 including a draft bill for the transfer of funds (which was subsequently ratified to become Act No 3, 2011), a draft bill on creating legislation, a draft bill on preventing and eradicating terrorism funding, a draft bill to amend the law on information and electronic transactions (ITE), a draft bill to manage financial aspects of the Hajj pilgrimage, as well as a draft bill on cyber crime (Tipiti).*

*Bank Indonesia also cooperated with a number of agencies involved in implementing the new legislation. In the reporting year, Bank Indonesia cooperated with the Ministry of Finance to enact the Treasury Act concerning the Treasury Single Account and the Income Tax Act, with the Ministry of Cooperatives and MSME to implement the MSME Act, and with the Ministry of Communications and Information Technology to implement the ITE Act.*

*Under international law, Bank Indonesia in conjunction with relevant technical agencies played an active role at the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), particularly in terms of working groups on security interest, insolvency law and arbitration. The outcomes of such meetings are subsequently used as valuable inputs in the development of the national legal system. In relation to trade in the services sector, particularly the banking services sub-sector, Bank Indonesia participated in discussions with related institutes at national forums and by attending international meetings hosted by the World Trade Organisation, ASEAN, APEC, as well as bilateral and regional cooperation.*

Strategic Planning

*Bank Indonesia applies a strategic management system as stipulated in the Planning, Budgeting and Performance Management System (SPAMK). The phases (cycles)*



Tata Kelola Bank Indonesia  
Governance of Bank Indonesia

Melalui Forstra, Bank Indonesia menetapkan arah kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

Through Forstra, Bank Indonesia determines policy and strategy direction for the upcoming year.



strategi terdiri dari perumusan, implementasi, *review* dan evaluasi strategi. Perumusan strategi diawali dengan menyelenggarakan Forum Strategis (Forstra) sebagai media komunikasi strategi antara Dewan Gubernur dengan seluruh Pemimpin Satuan Kerja dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Arah kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam peta strategi dan diterjemahkan lebih operasional dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), program kerja dan alokasi anggaran.

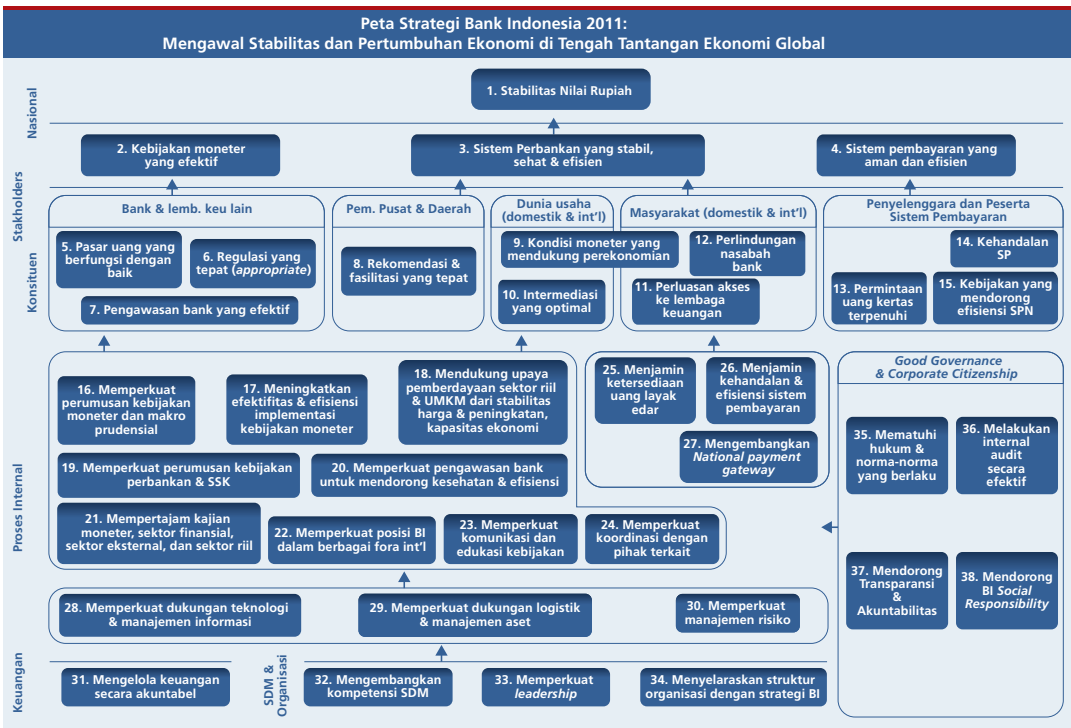
Peta strategi, IKU dan anggaran yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi acuan dan ukuran kinerja yang disepakati antara Pemimpin Satuan Kerja dan anggota Dewan Gubernur. *Review* dan evaluasi strategi dilakukan setiap semester guna menilai pencapaian target IKU setiap Satuan Kerja. Dalam upaya mengetahui persepsi yang obyektif dari masyarakat mengenai kinerja Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, setiap tahun dilakukan survei kinerja Bank Indonesia.

Peta strategi Bank Indonesia 2011 menunjukkan bahwa dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, diperlukan kebijakan moneter yang efektif, sistem perbankan yang stabil, sehat dan efisien serta sistem pembayaran yang aman dan efisien. Berbagai upaya Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran didukung kapabilitas internal yang kuat, baik berupa SDM dan organisasi, teknologi dan manajemen informasi, logistik dan manajemen aset yang kuat serta anggaran yang cukup. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat pelaksanaan *governance* dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia.

of the management strategy include formulation, implementation, review and strategic evaluation. Strategy formulation commences with organising the Strategic Forum (Forstra) as a medium to communicate the strategy between the Board of Governors and all heads of work units in order to determine policy direction and strategy for the upcoming year. The direction of monetary, banking and payment system policy is subsequently transformed into a Strategy Map and then translated into operational guidelines in the form of Key Performance Indicators (KPI), work programs and budget allocation.

The Strategy Map, KPI and budget are subsequently used as a reference and method to measure performance, agreed by the heads of work units and members of the Board. Strategy review and evaluation is conducted on a semesterly basis by assessing the key performance indicators of each work unit. Furthermore, an annual performance survey is conducted in an effort to gauge the objective perception of the general public regarding the performance of Bank Indonesia task implementation.

The Strategy Map of Bank Indonesia for 2011 indicates that in order to achieve rupiah stability, effective monetary policy is required along with a stable, sound and efficient banking system as well as a payment system that is secure and well run. The range of efforts undertaken in the monetary sector, banking and the payment system are supported by strong internal capacity from human resources and the organisation, up-to-date technology and information management, logistics and asset management and an adequate budget. In addition, Bank Indonesia also reemphasised good governance to support core task implementation at Bank Indonesia.



Manajemen Risiko

Bank Indonesia menerapkan fungsi Manajemen Risiko untuk melengkapi prinsip pengawasan melekat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, berdasarkan tata kelola yang baik. Secara umum, pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, sebagai bagian akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan sekaligus mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan fungsi ini juga ditujukan untuk mengelola risiko sebagai bagian pelaksanaan fungsi manajerial kegiatan, sehingga tingkat risiko yang dihadapi dapat diantisipasi dan dikendalikan pada batas yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, Bank Indonesia mengidentifikasi tujuh jenis risiko yang dihadapi sepanjang tahun 2011. Ketujuh risiko tersebut adalah risiko Strategi, risiko Operasional, risiko Hukum, risiko Likuiditas, risiko Kredit/ Investasi, risiko Pasar, serta risiko Reputasi. Sebagaimana bank sentral pada umumnya, risiko Reputasi merupakan risiko utama. Risiko ini diukur antara lain dengan tingkat kepercayaan dan atau kepuasan masyarakat terhadap tata kelola pengambilan kebijakan, efektivitas implementasi

Risk Management

Bank Indonesia applies risk management to complement oversight principles inherent in implementation activity based on good governance. In general, the implementation of risk management at Bank Indonesia aims to enhance decision-making quality as well as the effective and efficient use of resources, a part of accountability, to achieve the objectives set. This aims to establish risk management as a part of managerial activity, thereby ensuring that the level of risk faced can be anticipated and controlled within the accepted norms, which is therefore accountable.

In broad terms, Bank Indonesia identified seven types of risk faced in 2011, namely strategic risk, operational risk, legal risk, liquidity risk, credit/investment risk, market risk and reputation risk. As is the case with other central banks, reputation risk is the principal risk faced, which can be measured by the level of confidence and/ or public satisfaction in policymaking, the effectiveness of policy implementation as well as overall operational effectiveness. Similar to strategic risk, reputation risk



kebijakan maupun efektivitas operasional kegiatan Bank Indonesia. Risiko Reputasi, seperti halnya risiko Strategi, diidentifikasi bersifat transfersal yaitu risiko ditransmisikan oleh kejadian-kejadian risiko lainnya khususnya risiko Operasional.

Sepanjang tahun 2011, perubahan lingkungan eksternal baik luar maupun dalam negeri, memengaruhi strategi Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. Indikator-indikator risiko yang bersumber dari luar negeri antara lain berupa meningkatnya akses likuiditas pasar keuangan sebagai dampak dari perkembangan pasar keuangan Eropa dan penurunan *sovereign rating* sejumlah negara kawasan Uni Eropa. Peningkatan volatilitas harga minyak dan pangan dunia serta perkembangan sosio-politik, khususnya ketidakpastian arah kebijakan fiskal maupun moneter Uni Eropa, juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan.

Faktor dalam negeri yang ditengarai memengaruhi penilaian risiko strategi Bank Indonesia antara lain (i) penetapan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang memengaruhi strategi organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia; (ii) arah kebijakan bidang energi khususnya harga minyak dan Tarif Tenaga Listrik (TTL); serta (iii) dampak perubahan/anomali iklim terhadap produk pangan/pertanian maupun kelancaran distribusi. Berbagai potensi imbas yang tidak diinginkan dari risiko-risiko di atas diatasi melalui peningkatan koordinasi, yang dilakukan baik secara internal di Bank Indonesia, maupun berkoordinasi dengan institusi/otoritas lain. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terdapat peningkatan kualitas dan sinergi kebijakan lintas sektoral dan kebijakan makroekonomi nasional, dengan mempertimbangkan pula komitmen kebijakan ekonomi dan keuangan baik di regional maupun forum internasional.

Audit Internal

Sebagai salah satu elemen pelaksanaan *governance*, Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan audit intern yang meliputi kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Kegiatan audit intern dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan audit intern dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan

*has been identified as transferable; hence it can be transmitted by other incidences of risk, particularly operational risk.*

*Changes in the external environment domestically and internationally during 2011 influenced Bank Indonesia’s strategy. International indicators of risk, among others, included a surge in excess liquidity on financial markets as a result of developments on the financial markets in Europe and a downgraded sovereign rating for a number of countries in the euro zone. Escalating international oil and food price volatility coupled with socio-political issues, in particular uncertainty regarding the fiscal and monetary policy stance of the European Union, also required attention.*

*Domestic factors affecting the assessment of strategic risk at Bank Indonesia, among others, included the following: (i) promulgation of the Financial Services Authority Act affected the organisation strategy, management of human resources and decision-making process at Bank Indonesia; (ii) the direction of energy policy, particularly oil prices and the electricity tariff; as well as (iii) the impact of climate change/anomalies on food and agricultural produce as well as on the distribution network. The array of undesirable effects stemming from the risks outlined above can be overcome through greater coordination, internally at Bank Indonesia and externally through inter-agency/authority coordination. Such coordination is expected to raise the quality of and encourage synergy between cross-sectoral policy and national macroeconomic policy, paying due regard to existing economic and financial commitments agreed regionally or through international fora.*

Internal Audit

*As one element of implementing good governance, Bank Indonesia routinely conducts an internal audit consisting of assurance and consultation. The internal audit is designed to provide value added in the accomplishment of organisational goals. The internal audit is performed using a systematic approach when assessing and revising*

menyempurnakan efektivitas proses tata kelola organisasi (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), serta pengendalian intern (*internal control*).

Selama 2011, Bank Indonesia melakukan audit umum, audit aplikasi teknologi informasi, serta audit *Information Security Management System* ISO 27001:2005. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan audit kinerja terhadap beberapa aspek seperti kegiatan efektivitas pelaksanaan *Separation of Duties* (SoD) dalam pengadaan alat tulis kantor, pemeliharaan perangkat teknologi informasi, dan efektivitas pengolahan uang kertas.

Bank Indonesia juga melakukan kegiatan konsultasi sistem pengendalian intern untuk meningkatkan pola kemitraan pada pelaksanaan audit. Kegiatan mencakup pemberian rekomendasi seperti perumusan peraturan dan ketentuan, implementasi ketentuan, serta tindak lanjut hasil audit intern maupun ekstern. Kegiatan konsultasi juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja terkait dengan permasalahan pengendalian intern.

Seiring dengan upaya untuk menjamin terpenuhinya kualitas dalam pelaksanaan tugas audit intern, telah diterapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Hasil asesmen independen oleh PT SGS Indonesia sebagai Badan Sertifikasi Indonesia menunjukkan bahwa audit intern Bank Indonesia selama 2011 telah dilakukan secara konsisten sehingga layak untuk tetap menyandang sertifikat ISO 9001:2008. Selain itu, sejumlah upaya ditempuh melalui pengembangan kebijakan dan prosedur kerja yang lebih mengedepankan otomasi mekanisme kerja dengan memberdayakan sistem informasi. Hal tersebut bertujuan guna menyikapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di Bank Indonesia serta ekspektasi dari *stakeholder*.

Mengantisipasi berbagai perkembangan ke depan dan mendukung efektivitas pelaksanaan audit, secara berkesinambungan telah dilakukan upaya peningkatan kualitas auditor intern melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi audit. Pada 2011, Bank Indonesia memiliki 30 kepemilikan sertifikasi internasional (CIA, CISA, CCSA, CGAP, Sertifikasi ISO 9001:2008 *Lead QMS Auditor*, dan Sertifikasi ISO 9001:2000 *Internal QMS Auditor*) dan 43 kepemilikan sertifikasi nasional *Qualified Internal Auditor* (QIA).

*the efficacy of processes like good governance, risk management and internal control.*

*Bank Indonesia conducted a general audit in 2011 as well as auditing the application of information technology and auditing the Information Security Management System ISO 27001:2005. Furthermore, Bank Indonesia also conducted a performance audit on a number of aspects like implementation of Separation of Duties (SoD) in the procurement of office stationery, maintaining IT equipment and effectively managing banknotes.*

*Bank Indonesia also undertook consultation activity for the internal control system in order to enhance partnerships when conducting the audit. Activities include providing recommendations, for instance in the formulation of rules and regulations, implementing the regulations, and follow-up actions after the internal or external audit has been completed. Consultation activity is also provided in the form of socialisation activities, workshops and training in order to meet the requirements of each work unit in relation to problems with internal control.*

*The ISO 9001:2008 quality management system was introduced in line with efforts to guarantee quality in the implementation of the internal audit. The results of independent assessments by PT SGS Indonesia, as the Indonesian Certification Board, demonstrated that the internal audit conducted at Bank Indonesia in 2011 was consistent and deserving of ISO 9001:2008 accreditation. Additionally, efforts were taken to develop policy and work procedures that emphasise automated work mechanisms by enriching the information system. This aims to address the development and dynamics present at Bank Indonesia as well as the expectations of the stakeholders.*

*The quality of internal auditors was enhanced through audit training and certification in anticipation of future developments as well as to support effective audit implementation and audit continuity. In 2011, Bank Indonesia employed 30 internationally accredited auditors (CIA, CISA, CCSA, CGAP, ISO 9001:2008 Lead QMS Auditor and ISO 9001:2000 Internal QMS Auditor) and 43 nationally accredited Qualified Internal Auditors (QIA).*





# Kilas Balik 2011

## *The 2011 Flashback*

Ketahanan perekonomian Indonesia selama tahun 2011 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Perekonomian tumbuh tinggi dan didukung oleh surplus NPI yang relatif besar, penguatan nilai tukar rupiah, serta inflasi yang terkendali di level rendah. Di samping fundamental ekonomi yang kuat, respons kebijakan yang tepat mampu menopang ketahanan

perekonomian nasional. Kebijakan fiskal masih terkelola dengan baik dan tetap berkesinambungan dengan defisit APBN yang terjaga dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang dalam tren menurun. Selain itu, berbagai kebijakan Bank Indonesia selama 2011 juga ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakstabilan ekonomi global.

*Economic resilience in Indonesia was well maintained during 2011 amid widespread uncertainty overshadowing the global economy. Robust economic growth was achieved on the back of a relatively large surplus in the balance of payments, rupiah appreciation as well as the low level of inflation. On top of solid economic fundamentals, an appropriate policy response further bolstered national*

*economic resilience. Fiscal policy was well managed and sustainable with a controlled budget deficit and the ratio of government debt to GDP following a downward trend. In addition, a variety of Bank Indonesia policies were introduced in 2011 designed to preserve macroeconomic and financial system stability amid ubiquitous global economic uncertainty.*



## 01

## Kebijakan Moneter yang Efektif

## Effective Monetary Policy

Pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,5%, lebih tinggi dari 2010 sebesar 6,1%. Hal yang menggembirakan, pertumbuhan ekonomi 2011 yang merupakan angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir itu disertai dengan pencapaian inflasi yang rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga makin berkualitas karena ditopang oleh peningkatan investasi dan ekspor sebagai mesin pertumbuhan.

Tahun 2011, investasi langsung asing di Indonesia (*Foreign Direct Investment*/FDI) naik USD 13,8 miliar menjadi USD 18,2 miliar, sementara neraca perdagangan mencatat surplus USD 35,3 miliar, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami surplus sebesar USD 11,9 miliar. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa meningkat menjadi USD 110,1 miliar pada akhir 2011, setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Surplus NPI berpengaruh pada apresiasi rupiah tahun 2011, yang menguat rata-rata sebesar 3,56% menjadi Rp 8.786 per dolar AS dari Rp 9.080 per dolar AS pada 2010. Penguatan rupiah itu sejalan dengan pergerakan mata uang regional sehingga daya saing Indonesia masih kompetitif. Selain itu, apresiasi rupiah juga ditopang oleh tingginya minat investor asing berinvestasi di pasar domestik sebagai dampak kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.

Sepanjang 2011, inflasi Indonesia berhasil dikendalikan pada level rendah. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) 2011, inflasi tercatat sebesar 3,79%, menurun signifikan dari tahun sebelumnya 6,96%, dan berada di bawah sasaran inflasi 2011 yang ditetapkan sebesar  $5\% \pm 1\%$ . Penurunan inflasi IHK didukung oleh terjaganya inflasi inti (*core inflation*) pada level yang rendah, turunnya inflasi bahan pangan (*volatile food prices*), dan stabilnya harga barang strategis yang diatur pemerintah (*administered prices*). Penurunan inflasi terjadi di seluruh wilayah Indonesia dengan inflasi terendah di Pulau Jawa

*The domestic economy achieved 6.5% growth in 2011, which exceeded the 6.1% posted in 2010. Encouragingly, economic expansion in 2011, which represents the strongest growth in the past decade, was accompanied by low inflation. Furthermore, economic growth in Indonesia also improved in quality on the back of gains in investment and exports as drivers of the domestic economy.*

*In 2011, Foreign Direct Investment (FDI) to Indonesia surged from USD 13.8 billion to USD 18.2 billion, while the trade balance reflected a USD 35.3 billion surplus. Accordingly, the Indonesia Balance of Payments (BoP) recorded a surplus amounting to USD 11.9 billion. Consequently, foreign exchange reserves swelled to USD 110.1 billion at year-end 2011, equivalent to 6.4 months of imports and government foreign debt repayments.*

*The surplus balance of payments was also attributable to rupiah appreciation in 2011, strengthening on average by 3.56% to Rp 8,786 per US dollar from Rp 9,080 in 2010. Appreciation of the rupiah was in harmony with shifts in other regional currencies following the conducive global economic climate, thus ensuring that Indonesia remained competitive. In addition, rupiah appreciation was further supported by widespread interest in domestic markets from foreign investors due to solid economic fundamentals in Indonesia.*

*Inflation in Indonesia was successfully maintained at a low level throughout 2011. According to the Consumer Price Index (CPI) for 2011, inflation averaged a level of 3.79%, down significantly from 6.96% and below the inflation target for 2011 set at  $5\% \pm 1\%$ . The drop in inflation was bolstered by low core inflation, a decline in inflation of volatile food prices, as well as stable administered prices. Inflation declined in all regions of the Indonesian archipelago, with the lowest reported on the island of Java and the highest recorded in eastern Indonesia. Lower inflation is expected to expedite the convergence process*



## Kebijakan Moneter yang Efektif

### Effective Monetary Policy

dan tertinggi di Kawasan Timur Indonesia. Inflasi yang rendah ini diharapkan dapat membantu mempercepat penurunan inflasi menuju level yang setara dengan tingkat inflasi negara-negara mitra dagang.

Di tengah pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi selama 2011, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan pada Semester II-2011. Tantangan tersebut bersumber dari berlarutnya penyelesaian krisis utang dan kekhawatiran terhadap prospek pemulihan ekonomi di negara maju yang kemudian mengakibatkan terjadinya penyesuaian aliran modal asing jangka pendek. Meskipun demikian, krisis global tersebut tidak berdampak signifikan pada kinerja ekspor, terutama komoditas berbasis sumber daya alam. Diversifikasi pasar ekspor melalui perdagangan intra-regional di kawasan Asia turut berperan dalam menjaga kinerja ekspor. Sementara itu, ketahanan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga yang didukung oleh kuatnya fundamental sektor keuangan dalam menyerap risiko dan terjeganya stabilitas makroekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada 2011 tidak terlepas dari respons kebijakan yang tepat, baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia. Kebijakan fiskal tetap dioptimalkan memberikan stimulus bagi perekonomian, namun tetap berkesinambungan dengan menjaga defisit APBN dan mengelola rasio utang pemerintah terhadap PDB yang dalam tren menurun. Kebijakan Bank Indonesia selama 2011 ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Strategi kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasaran yang ditetapkan melalui bauran kebijakan moneter, yakni kebijakan suku bunga, nilai tukar rupiah, dan makroprudensial melalui pengendalian likuiditas dan pengelolaan aliran modal (*capital flow*).

Bauran kebijakan moneter didukung oleh strategi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengurangi ketidakpastian pasar. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjeganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

*towards the levels of inflation found in trading partner countries.*

*Amid the favourable economic achievements accomplished in 2011, the domestic economy also faced a number of challenges in Semester II-2011. These challenges stemmed from a protracted debt crisis resolution process as well as concerns over the outlook of the economic recovery in developed countries, which ultimately led to corrections in short-term foreign capital flows. Notwithstanding, the global crisis had no significant impact upon the performance of domestic exports, especially natural-resource based commodities. Export market diversification through intra-regional trade in the Asian region helped maintain export performance. Meanwhile, the resilience of the Indonesian financial system was preserved thanks to solid fundamentals in the financial sector in terms of absorbing risk and maintaining macroeconomic stability.*

*Robust economic growth in 2011 was inextricably linked to an appropriate policy response from the government and Bank Indonesia. Fiscal policy was optimised to provide economic stimuli but remained sustainable thanks to a managed budget deficit as well as managing the ratio of government debt to GDP, which followed a downward trend. Bank Indonesia policy in 2011 was geared towards maintaining macroeconomic and financial system stability amid global economic instability. Monetary policy strategy was directed towards steering inflation towards its target through a policy mix, incorporating interest rate policy, exchange rate policy and macroprudential policy, by controlling liquidity and managing capital flows.*

*The monetary policy mix was buttressed by a communication strategy to manage inflation expectations, enhance the efficacy of monetary policy transmission and reduce market uncertainty. Furthermore, Bank Indonesia also reinforced policy coordination with the government at the regional and local levels in order to help achieve robust economic growth coupled with maintained macroeconomic and financial system stability.*

## a. Kebijakan Bank Indonesia

Secara umum, kebijakan moneter selama 2011 diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju sasaran yang ditetapkan, didukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah tingginya volatilitas aliran modal asing. Pada Semester I-2011, kebijakan moneter difokuskan untuk mengatasi tekanan inflasi yang meningkat akibat gangguan pasokan dan tingginya harga pangan melalui pengelolaan ekspektasi inflasi, aliran modal asing dan ekspek likuiditas. Selanjutnya, pada Semester II-2011 Bank Indonesia menempuh strategi kebijakan moneter yang cenderung longgar untuk mendorong pertumbuhan mengingat tekanan inflasi yang mereda serta potensi perlambatan ekonomi domestik akibat peningkatan ketidakpastian ekonomi global.

### • Kebijakan Suku Bunga

Sejak April 2010 hingga Januari 2011, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) pada level 6,5%. Namun, sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan naiknya ekspektasi inflasi, pada Februari 2011 BI rate dinaikkan 25 bps menjadi 6,75%. Peningkatan ekspektasi inflasi terutama dipicu oleh inflasi harga pangan (*volatile food*) menyusul kenaikan harga komoditas internasional, serta rencana pemerintah di bidang harga komoditas strategis. Ekspektasi inflasi yang relatif masih tinggi itu mendorong Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 6,75% sampai September 2011.

Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan suku bunga pada Oktober dan November 2011 melalui penurunan BI rate, masing-masing sebesar 25 bps dan 50 bps sehingga pada akhir 2011 menjadi 6,0%. Kebijakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan tekanan inflasi ke depan yang semakin rendah, sekaligus mengurangi dampak negatif prospek ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kebijakan moneter yang memasuki fase longgar diperkuat dengan penurunan batas bawah koridor suku bunga fasilitas simpanan *overnight* Bank Indonesia (*deposit facility*) dari 100 bps menjadi 150

## a. Bank Indonesia Policy

*In broad terms, monetary policy in 2011 was directed towards steering inflation within its target corridor, as well as supporting macroeconomic and financial system stability amid volatile flows of foreign capital. In Semester I-2011, monetary policy tended to focus on overcoming inflationary pressures that emerged due to disruptions in the supply chain as well as soaring food prices by managing inflation expectations, foreign capital flows and excess liquidity. Subsequently, in Semester II-2011 Bank Indonesia began to adopt a looser monetary policy stance in order to catalyse growth as inflationary pressures subsided as well as to combat a potential domestic economic slowdown stemming from greater uncertainty surrounding the global economy.*

### • Interest Rate Policy

*From April 2010 until January 2011, Bank Indonesia held its policy rate (BI rate) at a level of 6.5%. Nonetheless, as an anticipatory measure to control higher inflation expectations, the BI rate was raised by 25 bps to 6.75% in February 2011. Higher inflation expectations were triggered by volatile food inflation following international commodity price hikes as well as the government's plans for strategic commodity prices. Relatively high inflation expectations prompted Bank Indonesia to hold the BI rate at a level of 6.75% up until September 2011.*

*Bank Indonesia loosened its interest rate policy in October and November 2011 through a reduction in the benchmark rate, respectively by 25 bps and 50 bps, thus the BI rate was 6.0% at year-end 2011. This policy stance was taken with the consideration of less intense inflationary pressures looking ahead, while concomitantly easing the impact of an unpropitious global economic outlook on the domestic economy.*

*Looser monetary policy was bolstered by a reduction in the lower limit of the interest rate corridor on the Bank Indonesia overnight deposit facility from 100 bps to 150 bps below the BI rate.*



Kebijakan Moneter yang Efektif  
Effective Monetary Policy

bps di bawah BI rate. Adapun batas atas koridor suku bunga fasilitas pinjaman *overnight (lending facility)* tidak mengalami perubahan, tetap sebesar 200 bps di atas BI rate. Kebijakan itu bertujuan mendorong kegiatan di pasar uang antarbank di tengah besarnya eksekusi likuiditas.

• Kebijakan Nilai Tukar

Strategi kebijakan nilai tukar selama 2011 turut mendukung pengendalian inflasi serta tercapainya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Strateginya dilakukan melalui monitoring dan komunikasi yang lebih intensif dengan pelaku pasar, disertai langkah stabilisasi secara terukur guna menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar valas.

Pada Semester I-2011, Bank Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan nilai tukar rupiah seiring derasnya aliran masuk modal asing. Di tengah ekspektasi inflasi yang meningkat, penguatan nilai tukar rupiah dapat meredam tekanan inflasi, khususnya terhadap barang-barang impor (*imported inflation*). Penguatan nilai tukar rupiah tersebut sejalan dengan penguatan mata uang regional sehingga tidak mengganggu daya saing produk domestik di pasar global.

Memasuki Semester II-2011, Bank Indonesia menempuh upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons atas meningkatnya tekanan depresiasi rupiah. Gejolak pasar keuangan global telah mendorong investor mengalihkan investasinya dari aset negara-negara berkembang (*emerging markets*) ke instrumen keuangan yang dianggap lebih aman (*safe haven*). Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia melakukan operasi moneter melalui dua langkah sekaligus (*Operation Twin*) yakni menjual valas di pasar dengan rupiah dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar dengan rupiah hasil penjualan valas. Langkah tersebut berhasil menjaga nilai tukar rupiah, menyediakan likuiditas rupiah yang cukup di pasar dan menstabilkan harga SBN.

*The upper ceiling on the overnight lending facility did not change, remaining at 200 bps above the BI rate. This policy aimed to stimulate activity on the interbank money market (PUAB) amid a plenitude of excess liquidity.*

• Exchange Rate Policy

*The exchange rate policy in 2011 helped to control inflation and achieve macroeconomic and financial system stability. This strategy was implemented through more intensive monitoring and communication activity with market players, accompanied by a measured stabilisation course of action to maintain a balance between supply and demand on the foreign exchange market.*

*In Semester I-2011, Bank Indonesia provided more space for rupiah appreciation in line with the inundation of foreign capital inflows. Amid rising inflation expectations, rupiah appreciation helped dampen inflationary pressures, in particular imported inflation. Rupiah appreciation was in harmony with other currencies in the region, thereby avoiding undermining the competitiveness of domestic products on international markets.*

*Entering Semester II-2011, Bank Indonesia endeavoured to stabilise the rupiah exchange rate in response to depreciatory pressures. Shocks on global financial markets encouraged investors to diversify their investments away from emerging markets in favour of safe-haven instruments. Against this inauspicious backdrop, Bank Indonesia conducted twin monetary operations through the sale of foreign exchange for rupiah and the subsequent purchase of tradable government securities (SBN) using the rupiah obtained from the sale of foreign exchange. This measure successfully maintained the rupiah exchange rate, thus providing adequate rupiah liquidity on the market and stabilising SBN prices.*

• Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial untuk menjaga daya tahan sistem keuangan guna menunjang kebijakan moneter. Melalui kebijakan tersebut, Bank Indonesia fokus pada pengendalian likuiditas perekonomian, dan pengelolaan aliran modal asing.

Pengendalian likuiditas perekonomian semakin penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi global. Kebijakan ini mempertimbangkan adanya penempatan likuiditas perbankan dalam instrumen operasi moneter yang naik cukup signifikan sebesar 24,5%, dari Rp 371,7 triliun pada 2010 menjadi Rp 462,9 triliun pada 2011.

Dalam mengendalikan likuiditas perbankan, Bank Indonesia tetap fokus pada kebijakan perpanjangan profil jatuh tempo Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang diterapkan sejak Maret 2010. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan SBI berjangka waktu sembilan bulan, untuk menggantikan SBI berjangka waktu tiga dan enam bulan.

Kebijakan perpanjangan profil jatuh tempo SBI diperkuat dengan pengurangan jumlah penawaran SBI di pasar primer dan penggunaan instrumen operasi moneter lain yang berjangka waktu panjang yaitu *Term Deposit* (TD) dan *Reverse Repo* SBN (RR SBN). Eksekusi likuiditas yang sebelumnya ditempatkan di SBI secara bertahap diserap melalui instrumen TD, yang bersifat *non-tradable*, dan instrumen RR SBN yang lebih aktif ditransaksikan sepanjang 2011. Selama 2011, instrumen TD lebih banyak ditransaksikan untuk jangka waktu enam bulan. Sementara itu, RR SBN lebih diaktifkan untuk tenor di atas dua bulan. Upaya Bank Indonesia dalam mengendalikan likuiditas perbankan mampu memperpanjang rata-rata harian penempatan seluruh instrumen operasi moneter, dari sebelumnya rata-rata 76 hari pada 2010 menjadi rata-rata 87 hari pada 2011.

• Macroprudential Policy

*Bank Indonesia issued macroprudential policy to maintain the resilience of the financial system in order to buttress monetary policy. Through this policy, Bank Indonesia focused on controlling liquidity in the economy as well as managing foreign capital flows.*

*Controlling liquidity in the economy became increasingly important in terms of stimulating economic growth amid the global economic slowdown. This policy took into consideration the significant 24.5% increase in bank liquidity placed in monetary instruments from Rp 371.7 trillion in 2010 to Rp 462.9 trillion in 2011.*

*To control bank liquidity, Bank Indonesia remained focused on policy to extend the maturity profile of Bank Indonesia Certificates (SBI), determined in March 2010. This policy was implemented through the introduction of a 9-month SBI to replace the existing 3 and 6-month SBI.*

*The policy to extend the maturity profile of Bank Indonesia certificates was reinforced by a reduction in the number of bids for SBI on the primary market as well as the utilisation of other long-term monetary instruments, like term deposits (TD) and reverse repo SBN (RR SBN). Non-tradable term deposits gradually absorbed the excess liquidity that had previously been placed in SBI. Furthermore, reverse repo SBN transactions were more active in 2011. Six-month term deposits were favoured during 2011, as were RR SBN with tenors exceeding two months. Efforts by Bank Indonesia to control bank liquidity managed to extend the average duration of placements in monetary instruments overall from 76 days in 2010 to 87 in 2011.*



## Kebijakan Moneter yang Efektif

### Effective Monetary Policy

Kebijakan untuk memperpanjang profil jatuh waktu instrumen moneter juga memberikan dampak positif terhadap pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*). Dampak positif tersebut tercermin pada bertambahnya transaksi antarbank serta berkurangnya segmentasi di pasar uang antarbank. Selain itu, mulai aktifnya penggunaan instrumen RR SBN juga mendorong terciptanya pasar SBN yang lebih dalam. Sepanjang 2011, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN sebesar Rp 47,3 triliun, sehingga pada akhir tahun posisi SBN milik Bank Indonesia menjadi Rp 65,9 triliun. Penggunaan SBN sebagai *underlying instrument* RR SBN juga sejalan dengan rencana Bank Indonesia untuk menggantikan SBI dengan SBN sebagai instrumen moneter.

Untuk memperkuat kebijakan makroprudensial dalam rangka pengendalian akses likuiditas, Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) valas. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menaikkan rasio GWM valas secara bertahap, dari 1% menjadi 5% pada Maret 2011, dan menjadi 8% pada Juni 2011.

Kebijakan makroprudensial lain yang ditempuh oleh Bank Indonesia adalah pengelolaan aliran modal asing melalui perpanjangan masa wajib pegang minimum (*minimum holding period*) SBI dari satu bulan (28 hari) menjadi enam bulan (182 hari). Tujuannya untuk meminimalisasi dampak negatif aliran modal asing jangka pendek serta mencegah pembalikan modal seketika (*sudden capital reversal*) dari nonresiden di SBI.

Kebijakan pengelolaan aliran modal asing juga ditempuh melalui pemantauan kegiatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN). Kebijakan tersebut diberlakukan mulai 2 Januari 2012. Pemantauan kegiatan DHE dan DULN dilakukan untuk mendukung kebijakan Lalu Lintas Devisa (LLD), khususnya memantau aliran dana internasional, baik kegiatan perdagangan maupun investasi. Dalam monitoring DHE dan DULN, eksportir dan debitur diwajibkan melaporkan

*Policy to extend the maturity profile of monetary instruments also had the propitious impact of financial deepening, as reflected by additional interbank transactions as well as a reduction in interbank money market segmentation. In addition, the active utilisation of RR SBN also helped create a deeper SBN market. In 2011, Bank Indonesia purchased SBN to the tune of Rp 47.3 trillion; hence the year-end position for SBN owned by Bank Indonesia totalled Rp 65.9 trillion. The use of SBN as an underlying instrument of RR SBN was also part of Bank Indonesia's plan to replace SBI with SBN as a monetary instrument.*

*Additionally, Bank Indonesia adjusted the minimum statutory reserve requirement for foreign exchange to reinforce macroprudential policy in order to control excess liquidity. This policy was implemented through a gradual increase in the minimum statutory reserve requirement from 1% to 5% in March 2011 and then to 8% in June 2011.*

*Another macroprudential policy introduced by Bank Indonesia was the management of foreign capital inflows by extending the minimum holding period on SBI from 1 month (28 days) to 6 months (182 days). The goal of this policy is to minimise the adverse impacts of short-term foreign capital inflows as well as prevent a sudden capital reversal by non-residents on SBI.*

*Foreign capital inflows were further managed by monitoring foreign exchange proceeds from exports (DHE) and foreign exchange from offshore borrowing (DULN). This policy is effective as of 2nd January 2012. DHE and DULN are monitored in order to support the flow of foreign exchange (LLD), particularly monitoring international flows of funds for trade and investment. In order to monitor DHE and DULN, exporters and borrowers are required to report their foreign exchange*



perolehan devisanya melalui bank devisa dalam negeri kepada Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan LLD, dalam mendukung kegiatan pemantauan DHE dan DULN. Selain itu juga dilakukan penyiapan sistem DHE dengan mengembangkan portal pertukaran data antar-instansi terkait (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik/BPS, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak), pengembangan aplikasi monitoring DHE, dan pengembangan aplikasi pelaporan LLD Bank termasuk Rincian Transaksi Ekspor (RTE). Untuk meningkatkan efektivitas sistem pemantauan, Bank Indonesia juga menjalin kerja sama pertukaran data ekspor impor antar-instansi terkait yaitu dengan Kementerian Keuangan dan BPS pada 10 Agustus 2011.

Bank Indonesia senantiasa melakukan berbagai kajian untuk mendukung perumusan berbagai kebijakan moneter, salah satunya mengenai mobilitas aliran modal asing, termasuk pemetaan perilaku dan aktivitas investor asing di pasar uang domestik. Hasil kajian digunakan sebagai bahan asesmen indikasi dini pembalikan arah arus modal asing dan memitigasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Selain kajian mengenai ketahanan sistem keuangan, Bank Indonesia juga melakukan kajian mengenai pengendalian inflasi. Hal tersebut diperlukan untuk menyikapi perkembangan harga minyak dan harga

*earnings through domestic foreign exchange banks to Bank Indonesia.*

*Bank Indonesia issued regulations pertinent to LLD in order to support DHE and DULN monitoring activity. In addition, a DHE system was prepared through the development of a data exchange portal among the relevant institutions (Bank Indonesia, BPS-Statistics Indonesia, the Directorate General for Customs and Excise, and the Directorate General for Taxation), as well as the development of a DHE monitoring application and bank LLD reporting application, including a breakdown of export transactions (RTE). Bank Indonesia also initiated cooperation on 10th August 2011 with the Ministry of Finance and BPS-Statistics Indonesia centred on an import/export data exchange program in order to enhance the effectiveness of the monitoring system.*

*Bank Indonesia conducted a number of studies to enrich the formulation of monetary policy, one of which being the mobility of foreign capital flows, including mapping the behaviour and activity of foreign investors on the domestic money market. The outcomes of the studies were used to assess early indications of a sudden capital reversal as well as mitigate any detrimental effects that may emerge. On top of the studies conducted regarding financial system resilience, Bank Indonesia also researched inflation control, which was required to address soaring oil and food prices commencing at the outset of 2011.*



## Kebijakan Moneter yang Efektif

### Effective Monetary Policy

pangan dunia yang semakin melambung mulai awal 2011. Kajian tersebut mencakup penyiapan sejumlah skenario yang akan dilakukan pemerintah di bidang energi dan program pangan, serta dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain melakukan kajian yang diterapkan melalui berbagai kebijakan, Bank Indonesia juga melakukan kajian untuk memperkuat *framework* kebijakan moneter melalui pendalaman kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF) *Flexible*. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diyakini bahwa bank sentral akan efektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi apabila memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku sektor keuangan secara keseluruhan. Hasil kajian diwujudkan dalam bentuk *blue print* Kerangka Penyempurnaan ITF *Flexible*. Melalui *blue print* tersebut, kerangka kebijakan moneter ITF ke depan akan diperkaya dengan memperhitungkan dinamika sektor keuangan. Dengan demikian, dalam merumuskan strategi kebijakan moneter, Bank Indonesia dituntut untuk semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan guna memastikan perekonomian dan sistem keuangan berada dalam kondisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan.

Berbagai kajian Bank Indonesia didukung penyediaan data dan informasi yang komprehensif, terpercaya, akurat, terkini dan mudah diakses, serta sesuai standar internasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus menyempurnakan penyusunan statistik melalui berbagai jenis survei untuk mengetahui kondisi terkini sektor riil, eksternal, keuangan, dan moneter.

Dalam upaya memperoleh gambaran dini mengenai beberapa indikator ekonomi, antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan nilai tukar, Bank Indonesia melakukan berbagai survei sektor riil. Beberapa survei yang dilakukan antara lain survei konsumen, survei penjualan eceran dan survei kegiatan dunia usaha, survei harga properti residensial, survei perbankan dan survei proyeksi indikator makro ekonomi. Untuk meningkatkan kualitas asesmen mengenai kondisi perekonomian, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan penghubung (*liaison*) yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari sumber data.

*The review incorporated a number of scenarios for the government in terms of energy and food programs, as well as their affect on inflation and economic growth.*

*In addition to the studies implemented through a number of policies, Bank Indonesia also conducted research to strengthen the monetary policy framework by deepening the flexible Inflation Targeting Framework (ITF). Based on the studies conducted, it was found that a central bank will effectively maintain macroeconomic stability if it has the capacity to control behaviour in the financial sector as a whole. The results of this study manifested in the form of a blueprint for a flexible ITF. According to this blueprint, the future ITF monetary policy framework will be enriched by taking into account the dynamics of the financial sector. Therefore, in the formulation of a monetary policy strategy, Bank Indonesia is required to bolster financial system stability in order to ensure the economy and financial system remain stable from a macroeconomic as well as financial sector standpoint.*

*Studies conducted by Bank Indonesia are supported by the availability of up-to-date, comprehensive, accurate and trusted data and information pursuant to international standards that is easily accessible. Consequently, Bank Indonesia continues to refine its statistical information through several types of survey in order to reveal the latest conditions in the real sector as well as the latest external, financial and monetary conditions.*

*In an effort to observe the most recent developments in a number of economic indicators, among others, Gross Domestic Product (GDP), inflation and the exchange rate, Bank Indonesia also surveys the real sector. The surveys include a consumer survey, a retail sales survey and survey of activity in the business community, a survey of residential property prices, a survey of banks and a survey of projected macroeconomic indicators. In order to ameliorate the assessment quality of economic conditions, Bank Indonesia also conducts liaison activities aimed at extracting data and information directly from the source.*

Selain untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, data dan informasi yang akurat juga ditujukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada *stakeholders*. Untuk itu, Bank Indonesia mendiseminasikan data, hasil analisis serta laporan hasil survei kepada *stakeholders* melalui situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### b. Koordinasi Kebijakan dengan Pemerintah

Dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah. Koordinasi kebijakan yang dilakukan antara lain dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Koordinasi dengan pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi diperlukan mengingat dinamika inflasi di Indonesia masih diwarnai oleh pengaruh guncangan di sisi pasokan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan mendasar dalam kegiatan ekonomi nasional, seperti masih rendahnya keterhubungan antardaerah, ketergantungan produktivitas pangan terhadap faktor cuaca, dan berbagai kendala struktural lainnya. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah di bidang harga komoditas strategis, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan cukai rokok, kerap diikuti kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Untuk itu, Bank Indonesia dan pemerintah perlu memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi guna menciptakan sinergi yang lebih baik antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral. Koordinasi diwujudkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI) untuk tingkat pemerintah pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk tingkat pemerintah daerah.

Selama 2011, kegiatan TPI difokuskan pada pemantauan potensi tekanan inflasi dari bahan pangan dan energi bersubsidi serta mengusulkan berbagai rekomendasi pengendalian harga pada kedua komoditas tersebut. Rekomendasi pengendalian harga antara lain meliputi rekomendasi terkait kebijakan perberasan dan kebijakan di bidang energi seperti harga BBM bersubsidi dan TTL. Rekomendasi terkait kebijakan perberasan meliputi operasi pasar, kebijakan pengamanan pasokan dan tinjauan terhadap kebijakan

*In addition to aiding the Bank Indonesia policy formulation process, accurate data and information also help provide an optimal service to the stakeholders. To this end, Bank Indonesia disseminates data as well as the results of analyses and surveys to its stakeholders through the official website of Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).*

### b. Policy Coordination with the Government

*Bank Indonesia actively collaborates with the government in order to buoy robust economic growth as well as maintain macroeconomic and financial system stability as a whole. Policy coordination is predominantly found in the guise of inflation control and maintaining financial system stability.*

*Coordination with the government in order to control inflation is necessary recalling that the dynamics of inflation in Indonesia remain marred by the effects of shocks on the supply side. Such conditions are inseparable from the fundamental problems associated with national economic activity, for instance weak interregional connectedness, high dependence of food productivity on the weather and a number of other structural constraints. In addition, a number of government policies concerning the prices of strategic goods, like fuel, electricity and excise duty on cigarettes, were frequently followed by significant increases in inflation. Therefore, Bank Indonesia and the Government must redouble efforts to strengthen coordination in terms of controlling inflation in order to create improved synergy between monetary, fiscal and sectoral policy. Greater coordination has been realised through the establishment of the Inflation Control Team (TPI) at the central level and Regional Inflation Control Teams (TPID) at the local level.*

*Throughout 2011, TPI activity focused on monitoring potential inflationary pressures stemming from foodstuffs and subsidised energy as well as proposing price control recommendations for these two commodities. Price control recommendations, among others, include those relating to the national rice policy as well as energy, for instance the price of subsidised fuels and the basic electricity tariff. The recommendations proposed with respect to the rice policy cover market operations, policy*



## Kebijakan Moneter yang Efektif *Effective Monetary Policy*

Harga Pokok Pembelian Beras (HPP) oleh pemerintah. Sedangkan rekomendasi kebijakan di bidang energi meliputi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalkan dampak lanjutan kenaikan harga BBM dan TTL, pengaturan waktu implementasi kebijakan dan strategi komunikasi dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.

Disamping koordinasi untuk pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi bertujuan untuk merespons dampak krisis global terhadap pasar keuangan domestik, yang diwujudkan melalui kesepakatan Bank Indonesia dan pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia mempersiapkan Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang merupakan bagian dari PMK Nasional. Dalam rangka harmonisasi dengan PMK Nasional, Bank Indonesia berperan sebagai sekretariat penghubung antarprotokol di tingkat nasional. Untuk kegiatan *surveillance*, Bank Indonesia mengidentifikasi risiko, melakukan asesmen, merumuskan tingkat tekanan, serta memberikan indikasi apabila kondisi tidak normal. Selanjutnya Bank Indonesia menginformasikan kondisi tersebut kepada pemerintah dan institusi terkait dan/atau Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FK SSK) serta menyusun rekomendasi kebijakan yang memerlukan koordinasi antar institusi ataupun secara nasional.

*to secure supply and a review of the cost of rice bought by the government. Meanwhile, energy policy recommendations include measures required to minimise the second-round effects of raising fuel prices and electricity tariffs, the timing of policy implementation and an effective communication strategy to guide public inflation expectations.*

*In addition to policy coordination to control inflation, Bank Indonesia also collaborates with the government to maintain financial system stability. Such coordination aims to respond to the impact of the global crisis on domestic financial markets and is realised through an agreement between Bank Indonesia and the Government. To this end, Bank Indonesia prepared a Crisis Management Protocol (CMP) that forms part of the national CMP. Bank Indonesia functions as the inter-protocol liaison secretariat at the national level in order to ensure harmonisation with the national crisis management protocol. In terms of surveillance activity, Bank Indonesia identifies risk, conducts assessments, defines the level of pressure and provides warnings when abnormal conditions occur. Furthermore, Bank Indonesia informs the government and relevant institutions and/or the Coordination Forum for Financial System Stability regarding such information as well as offers policy recommendations that require inter-institutional or national coordination.*

# Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia *Bank Indonesia Crisis Management Protocol*

Pengalaman dari krisis yang terjadi sebelumnya, baik di Indonesia maupun di negara lain, menunjukkan bahwa penanganan krisis menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lama. Pengalaman juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak bisa sepenuhnya terbebas dari risiko yang dapat mengarah pada terjadinya suatu krisis.

*Experience from past crises in Indonesia and abroad has demonstrated that crisis resolution incurs large-scale socio-economic costs and a prolonged recovery period. Experience also gives lesson that the Indonesian economy is not fully free from risk that can prompt a crisis.*

Meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional, tingginya ketidakpastian ekonomi global dapat menimbulkan kerentanan, seperti pembalikan modal asing secara masif pada Semester II-2011. Untuk itu, kewaspadaan sangat diperlukan mengingat pembalikan modal asing sering tidak dapat diduga dan diperkirakan secara tepat sebelumnya. Bank Indonesia melakukan identifikasi sumber-sumber kerentanan serta membangun suatu mekanisme untuk pencegahan dan penanganan krisis.

*Although a number of policies have been instituted in order to reinforce domestic economic resilience, widespread uncertainty in the global economy can trigger vulnerabilities, like the massive and sudden capital reversal reported in Semester II-2011. To this end, vigilance is crucial considering that a foreign capital reversal is often unexpected and is difficult to predict. Bank Indonesia identified a number of sources of vulnerability and developed a mechanism to prevent and resolve a crisis.*

Bank Indonesia telah menyusun Protokol Manajemen Krisis (PMK) sebagai suatu kerangka dan mekanisme yang baku dan terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan krisis nilai tukar dan krisis perbankan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Secara garis besar, PMK bertujuan untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan guna mendukung stabilitas makroekonomi. Selain itu, PMK juga ingin memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan tepat waktu dan efektif, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

*Bank Indonesia produced its Crisis Management Protocol (CMP) as a standardised and integrated framework and mechanism to prevent and resolve an exchange rate crisis as well as a banking crisis as stipulated in the Bank Indonesia Board of Governors Regulations. In general, CMP aims to strengthen monetary and financial system stability, thereby supporting macroeconomic stability. In addition, CMP also ensures the decision-making process is timely and effective, and provides legal assurance for every action and policy taken to prevent and resolve a crisis.*



Kebijakan Moneter yang Efektif  
Effective Monetary Policy

PMK Bank Indonesia merupakan bagian dari PMK Nasional yang sedang dibangun. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia lebih fokus pada PMK yang terkait dengan krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Sementara itu, Pemerintah membangun PMK yang terkait dengan krisis pasar keuangan, krisis fiskal, dan krisis lembaga keuangan bukan bank. Pada waktunya berbagai bagian PMK tersebut perlu diintegrasikan dan dikoordinasikan secara erat ke dalam PMK Nasional dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis perekonomian secara keseluruhan.

Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) sebagai landasan hukum untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis secara nasional. Mengingat sampai saat ini RUU JPSK masih dalam proses, pada Juli 2010 otoritas/ lembaga yang berwenang di sektor keuangan yang terdiri atas Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyepakati nota kesepahaman untuk koordinasi dalam rangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Nota kesepahaman tersebut antara lain mengamanatkan agar masing-masing institusi terkait menyusun PMK yang saling menunjang dalam upaya pencegahan potensi dan penanganan terjadinya krisis sektor keuangan.

PMK Bank Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu tata kelola yang baik, pengutamaan pencegahan dan percepatan penanganan krisis, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif. Prinsip tata kelola yang baik mencakup aspek: (i) pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia serta implementasinya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing satuan kerja; (ii) akuntabilitas (*accountability*) yaitu respons kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip pengutamaan pencegahan dan penanganan krisis dimaksudkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam kondisi krisis dapat dipercepat, namun dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik

*Bank Indonesia's CMP is part of the National CMP under development. In this regard, Bank Indonesia tends to focus more on crisis management protocol that relates to exchange rate and banking crises. In contrast, the government is developing a CMP relating to financial market crises, fiscal crises and non-bank financial institution crises. In time, the various elements of CMP will need to be integrated and coordinated at the national level under a holistic framework of crisis prevention and resolution.*

*One current effort undertaking by the government is a draft bill regarding a financial sector safety net (RUU JPSK) as a legal basis for crisis prevention and resolution policymaking at the national level. The draft bill is currently in the legislative process, therefore, in July 2010 the authorities/institutions with jurisdiction over the financial sector, namely Bank Indonesia, the Ministry of Finance and the Deposit Insurance Corporation (DIC), signed a memorandum of understanding (MoU) concerning coordination to maintain financial system stability. The MoU mandated that each institution be required to establish a mutually supportive crisis management protocol to prevent and resolve potential crises in the financial sector.*

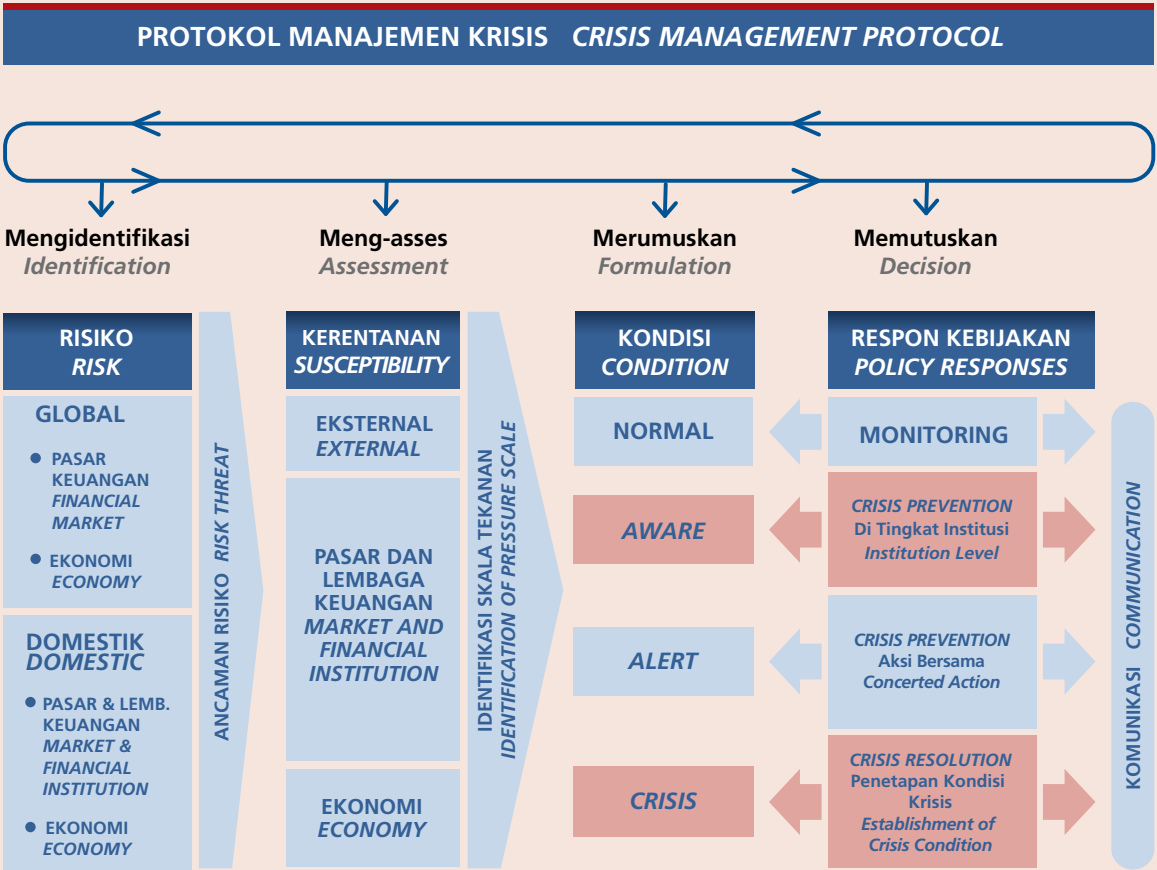
*Bank Indonesia's CMP is based on several principles, namely good governance, prioritising crisis prevention and resolution, as well as effective coordination and communication. The principles of good governance include aspects of: (i) responsibility, namely policy to prevent and resolve a crisis that is in accordance with the task and authority of Bank Indonesia, and its implementation that is in line with the tasks and authorities of each respective work unit; (ii) accountability, namely that the policy response taken is accountable. The principle of prioritising crisis prevention and resolution aims to expedite the decision-making process under crisis conditions, while continuing to promote good governance. The principle of coordination is based on the assumption that Bank Indonesia's CMP is part of the national*

(*governance*). Sementara itu, prinsip koordinasi didasari pemikiran bahwa PMK Bank Indonesia merupakan bagian dari PMK Nasional. Adapun prinsip komunikasi yang efektif ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dalam upaya mendukung pemulihan perekonomian dari kondisi krisis.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan PMK sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi antar-otoritas. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta tindakan bersama yang efektif, transparan dan akuntabel dengan didukung oleh data dan informasi yang memadai dan akurat. Dukungan data dan informasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran data dan informasi mengenai indikator-indikator makro dan mikro ekonomi serta data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing otoritas.

*crisis management protocol. The principle of effective communications aims to boost public confidence in efforts that support an economic recovery from crisis conditions.*

*In its implementation, the success of CMP is largely determined by the effectiveness of inter-authority coordination, which is required to support policy synchronisation and harmonisation as well as joint actions that are effective, transparent and accountable thanks to the availability of complete data and information. Support from accurate data and information is achieved through the exchange of data and information on macro and microeconomic indicators and other information required in the implementation of each respective authority's tasks.*





## 02

Sistem Perbankan yang Stabil,  
Sehat dan Efisien*A Stable, Sound and Efficient Banking System***Bank Umum**

Perbankan Indonesia mencatat kinerja yang positif selama 2011. Meskipun dihadapkan pada perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia yang tumbuh hingga 6,5% pada 2011 memberikan peluang bagi perbankan untuk melanjutkan kinerja positif tahun sebelumnya. Kinerja positif tersebut ditunjukkan oleh optimalnya fungsi intermediasi perbankan, permodalan yang kuat, dan sumber pendanaan yang memadai.

Optimalnya fungsi intermediasi perbankan tidak hanya didukung oleh penyaluran kredit konsumsi, tetapi juga disertai meningkatnya penyaluran kredit produktif. Kredit modal kerja tumbuh 21,41% (yoy) dan kredit investasi tumbuh 33,21% (yoy), sementara kredit konsumsi naik 24,21% (yoy). Secara sektoral, peningkatan kredit juga terjadi pada sektor-sektor ekonomi produktif.

Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan didukung pula oleh penurunan suku bunga kredit perbankan dan penerapan prinsip kehati-hatian bank yang cukup efektif dalam memperkuat penyerapan risiko. Suku bunga kredit selama 2011 tercatat turun rata-rata sebesar 31 bps. Penurunan terbesar terjadi pada kredit modal kerja sebesar 61 bps, diikuti oleh kredit investasi sebesar 34 bps, sementara kredit konsumsi secara rata-rata justru meningkat sebesar 18 bps. Penerapan prinsip kehati-hatian bank juga mampu mendorong rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan - NPL*) secara gross jauh di bawah ambang batas ketentuan (*indicative threshold*) sebesar 5%.

Kinerja perbankan yang baik tidak lepas dari kuatnya permodalan, tercermin dari rasio kecukupan modal yang berada jauh di atas persyaratan minimum. Kondisi ini ditopang pula dengan ketersediaan likuiditas yang memadai. Dana yang dihimpun perbankan melalui simpanan masyarakat mampu tumbuh melebihi angka

**Commercial Banks**

*Banks in Indonesia posted positive performance throughout 2011. Despite facing a global economic slowdown, the 6.5% growth recorded by the economy of Indonesia in 2011 provided opportunities for the banking sector to build on the positive performance achieved during the preceding year. Such buoyant performance was reflected by an optimal bank intermediation function, strong capital and adequate sources of funds.*

*The optimal bank intermediation function was not merely supported by the extension of consumption loans; it was also accompanied by greater allocation of productive loans. Working capital credit expanded by 21.41% (yoy) with investment credit achieving growth totalling 33.21% (yoy), while consumption loans increased by 24.21% (yoy). Sectorally, more credit was allocated to productive economic sectors.*

*Improvements in the bank intermediation function were also supported by lower lending rates offered by banks as well as the application of prudential principles, which was sufficiently effective in strengthening risk absorption. Lending rates declined by an average of 31 bps in 2011, with the largest declines affecting working capital credit (61 bps), followed by investment credit (34 bps), while rates on consumption loans actually increased by 18 bps. Additionally, the application of prudential principles managed to push gross non-performing loans far below the indicative threshold of 5%.*

*Consummate bank performance was also linked to adequate capital, as reflected by the capital adequacy ratio that remained well in excess of the minimum requirement. Such conditions were further underpinned by the availability of adequate liquidity. Funds collected by the banks through public deposits exceeded the growth*



Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien  
*A Stable, Sound and Efficient Banking System*

pertumbuhan DPK pada 2010. Kecukupan likuiditas perbankan juga dikonfirmasi dari rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* yang tetap terjaga pada level di atas 100%, yaitu sebesar 133,4%.

Selain mampu mengelola risiko, industri perbankan nasional juga membukukan peningkatan keuntungan yang cukup besar. *Return on Asset* (ROA) perbankan Indonesia mencapai 3,0%, lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN yang rata-rata hanya membukukan ROA sebesar 1,14%.

Kinerja dan terjaganya ketahanan perbankan selain didukung kondusifnya iklim usaha, juga didukung oleh serangkaian kebijakan dan upaya yang ditempuh Bank Indonesia. Kebijakan perbankan Bank Indonesia difokuskan pada upaya untuk menjaga ketahanan perbankan dan mengarahkan perbankan agar berperan dalam pembiayaan perekonomian secara efektif dan efisien.

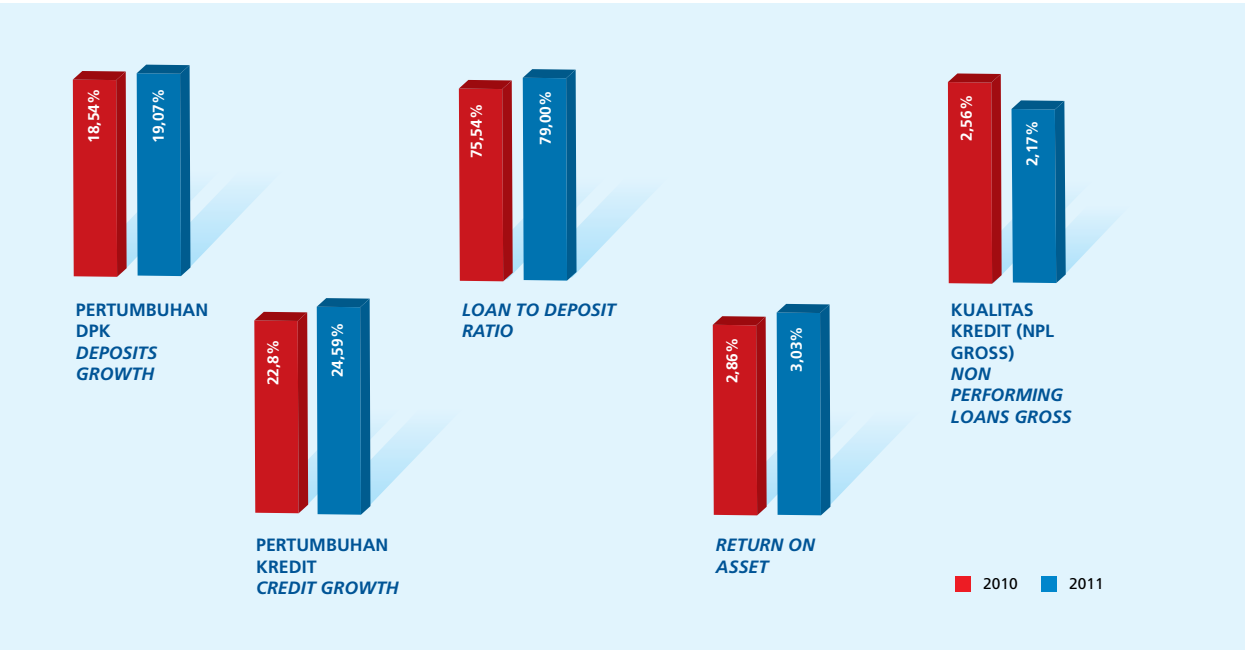
Bank Indonesia terus menyempurnakan kebijakan kualitas tata kelola perbankan baik dari sisi pengendali bank maupun prosedur pengelolaannya, dalam upaya menjaga ketahanan perbankan. Pada 2011 Bank Indonesia menyempurnakan aturan mengenai uji kemampuan dan

*figures posted for deposits in 2010. Sufficient bank liquidity was further corroborated by the ratio of liquid assets to non-core deposits, which was maintained at a level in excess of 100%, more specifically 133.4%.*

*As well as managing risk, the national banking industry also posted a significant increase in profit. The Return on Assets (ROA) of the banking industry in Indonesia was 3.0%, which was higher than that reported in other ASEAN member countries, averaging 1.14%.*

*The performance and maintained resilience of the domestic banking industry was not only supported by a conducive business climate but also by the full panoply of policies issued by Bank Indonesia. Bank Indonesia's banking policy focused on efforts to maintain banking industry resilience and encourage banks to play a greater role in effectively and efficiently financing the economy.*

*Bank Indonesia continued to improve its policy of banking governance by regulating the banks and their management procedures in order to maintain banking sector resilience. In 2011, Bank Indonesia refined its regulations concerning fit and proper tests, applied*



kepatutan (*fit and proper test*), menerapkan aturan prinsip kehati-hatian bagi bank yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain dan menerapkan aturan manajemen risiko bagi bank yang melakukan layanan nasabah prima.

Dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan dalam pengelolaan bank, Bank Indonesia mewajibkan perbankan menerapkan strategi *anti-fraud*. Untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan mengenai fungsi kepatuhan bank umum. Selain itu, Bank Indonesia memberlakukan aturan perhitungan pemenuhan modal minimum agar lebih sesuai dengan risiko yang ditanggung oleh perbankan.

Bank Indonesia terus meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi secara efektif dan efisien melalui kebijakan yang mewajibkan perbankan mengumumkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Keterbukaan terhadap informasi SBDK akan mendorong kompetisi yang sehat sehingga mendorong perbankan untuk menetapkan suku bunga kredit secara efisien. Penyaluran kredit perbankan juga diimbangi dengan peningkatan aspek prudensial dengan mewajibkan bank memelihara GWM yang besarnya dikaitkan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Melalui aturan tersebut, penyaluran kredit diarahkan pada koridor rasio LDR yang sehat. Peran perbankan juga ditumbuhkan melalui program inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang bertujuan memperluas akses masyarakat khususnya yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.

Terjaganya ketahanan perbankan didukung penguatan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, khususnya dalam melakukan pendeteksian dini (*early warning system*). Seiring dengan semakin kompleksnya usaha dan profil risiko perbankan, Bank Indonesia menerapkan aturan pengawasan bank secara terkonsolidasi dengan pendekatan berbasis risiko. Melalui aturan tersebut, tingkat kesehatan dan risiko bank tidak hanya diukur secara individu, namun dikonsolidasikan dengan anak perusahaan yang dikendalikan oleh bank.

*prudential principles to banks that subcontract out a part of their business and applied risk-management to banks that serve prime customers.*

*Bank Indonesia mandated that all banks adopt an anti-fraud strategy in an effort to prevent criminal activity in the management of a bank. Furthermore, Bank Indonesia also refined its regulations pertaining to the compliance function of commercial banks in order to ensure that the policies, procedures and business activities of a bank are in line with prevailing regulations. In addition, Bank Indonesia imposed regulations on the calculation of minimum capital requirements, making it more congruous with the actual risk faced by the banking industry.*

*Bank Indonesia continued to expand the banks' role in effectively and efficiently financing the domestic economy through policies that require banks to announce their prime lending rate. The open publication of prime lending rates has promoted healthy competition in the banking industry and spurred banks to more efficiently determine their lending rates. Bank credit allocation was also offset by an improvement in prudential aspects by requiring banks to maintain a minimum statutory reserve based on the loan to deposit ratio (LDR). Through this regulation, credit allocation is steered towards a sounder LDR corridor. The role of the banking industry also expanded through financial inclusion activities that aim to broaden public access to financial services, in particular those strata of society that remain unbanked.*

*Banking industry resilience was well maintained as a result of tight bank supervision by Bank Indonesia, in particular the early warning system. Bank Indonesia applied consolidated, risk-based bank supervision in line with increasingly complex bank business activity and the bank risk profile. Using this approach, the level of bank soundness and risk faced not only be measured individually but also consolidated with any subsidiaries of the parent bank.*



## Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien A Stable, Sound and Efficient Banking System

Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan.

*Bank Indonesia coordinated with the Indonesian National Police and the Indonesian Attorney General regarding the handling of criminal activity in the banking sector.*



Penguatan pengawasan bank juga ditempuh melalui penyempurnaan aturan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank. Ketentuan itu mengatur pengurus dan pemegang saham pengendali bank untuk mengelola bank secara lebih baik, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan bank. Aturan tersebut juga memberikan konsekuensi tegas berupa tindakan pengawasan oleh Bank Indonesia (*supervisory action*) apabila perbaikan oleh manajemen bank tidak sesuai dengan komitmen rencana tindak (*action plan*) dan melebihi batasan waktu yang ditetapkan.

Bank Indonesia juga menyempurnakan laporan berkala yang disampaikan oleh bank agar informasi perbankan dapat diperoleh secara lebih cepat dan menyeluruh. Penyempurnaan tersebut untuk mendukung pemantauan sistem keuangan yang dilakukan secara rutin oleh Bank Indonesia.

Berbagai kebijakan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bank. Aturan tersebut juga ditujukan untuk memberikan perlindungan nasabah yang lebih baik, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Untuk mendukung perumusan kebijakan perbankan, Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian tentang perilaku bank dan perannya dalam pembiayaan

*Tighter bank supervision was also achieved by refining the regulation that determines a bank's status and follow-up supervisory actions. Accordingly, this regulates bank executives and controlling shareholders to better manage their respective banks, including resolving any outstanding issues. The regulation also delineates the explicit consequences to be imposed by Bank Indonesia in the form of supervisory actions in the event the bank's management fails to adhere to their prior commitments as described in the agreed upon action plan or if the actions exceed the agreed timeframe.*

*Bank Indonesia also refined the periodic reports submitted by banks ensuring that the information contained within can be obtained more rapidly and comprehensively. The refinements also aided the routine monitoring process conducted by Bank Indonesia on the financial system.*

*The array of banking policies, coupled with enhanced bank surveillance, was not only implemented by Bank Indonesia in order to improve bank resilience and competitiveness. The new regulations also afford better customer protection, especially in terms of maintaining public confidence in the banking industry.*

*Bank Indonesia conducted a range of research on bank behaviour and the role banks can play in economic development financing in order to support the banking*

perekonomian, salah satunya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Penelitian juga dilakukan untuk mengembangkan indikator kebutuhan likuiditas perbankan, perusahaan dan rumah tangga, serta penelitian yang berhubungan dengan permodalan bank.

Untuk meningkatkan integritas industri perbankan, Bank Indonesia membantu penegakan hukum dengan menindaklanjuti dugaan tindak pidana perbankan (*tipibank*) yang terjadi di Bank Umum dan BPR. Pada 2011, Bank Indonesia melakukan investigasi terhadap 68 kasus dugaan *tipibank*, 33 kasus diantaranya telah dilaporkan kepada penegak hukum. Selain itu, dukungan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan memberikan keterangan ahli dan saksi ahli sebanyak 116 kali. Keberhasilan dalam pengungkapan kasus *tipibank* tidak lepas dari koordinasi yang efektif antar-instansi terkait. Koordinasi tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dalam rangka mengimplementasikan perlindungan kepada konsumen perbankan, Bank Indonesia melaksanakan mediasi sejak 2006. Pada 2011, jumlah sengketa yang dilaporkan meningkat sebesar 83% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah mediasi perbankan seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi mediasi, di tengah semakin kompleksnya produk dan layanan perbankan. Semakin tingginya pengetahuan nasabah tentang alternatif penyelesaian sengketa permasalahan perbankan melalui mediasi, salah satunya didukung oleh program edukasi Bank Indonesia.

*policy formulation process. Some of the research also took into account environmental aspects. Research was also conducted in order to develop indicators identifying the liquidity requirement in the banking sector, the household sector and the corporate sector, as well as research on bank capital.*

*Bank Indonesia helped bolster law enforcement by following up allegations of criminal activity at commercial banks and rural banks (*tipibank*) in order to improve the integrity of the banking industry. In 2011, Bank Indonesia investigated 68 cases of suspected *tipibank*, 33 cases of which were handed over to law enforcement. In addition, further support was provided by Bank Indonesia in the form of expert testaments and expert witnesses as many as 116 times. Success in the disclosure of white-collar crime was also linked to effective inter-institutional coordination pursuant to a memorandum of understanding signed between Bank Indonesia, the National Police Department and the Attorney General that covers the coordinated handling of criminal activity in the banking sector.*

*Furthermore, Bank Indonesia has played the role of mediator since 2006 in order to better implement bank customer protection principles. In 2011, the number of disputes reported increased by 83% compared to the preceding year as a result of greater public understanding regarding the role of mediation amid increasingly complex bank products and services. The bank education program provided by Bank Indonesia has helped bank customers to become more informed about this alternative dispute resolution process through mediation.*



## Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien A Stable, Sound and Efficient Banking System



Jumlah sengketa yang diselesaikan melalui proses mediasi Bank Indonesia terus meningkat. Selama 2011, Bank Indonesia menyelesaikan mediasi terhadap 61 sengketa dan 38 sengketa dalam proses penyelesaian. Sisa kasus lainnya dapat diselesaikan oleh bank yang bersangkutan atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya persyaratan mediasi sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku.

Bank Indonesia terus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelayanan mediasi dengan melakukan publikasi dan edukasi di berbagai media bersama dengan perbankan. Terhadap maraknya penggunaan rekening perbankan sebagai sarana penipuan melalui *short message service* (SMS), Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut. Melalui *Working Group Mediasi Perbankan* yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, perbankan sepakat menyediakan pusat komunikasi (*call centre*) untuk menerima pengaduan nasabah. Bank Indonesia juga membuka layanan *hotline* untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mempercepat tindak lanjut aduan. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan regulator telekomunikasi yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan beberapa operator seluler untuk mencegah penyalahgunaan melalui media SMS. Hasilnya, sejumlah rekening yang diduga digunakan oleh pelaku kejahatan dapat diblokir sehingga sebagian besar dana nasabah dapat diselamatkan.

*The number of disputes settled through Bank Indonesia's mediation process continued to rise. In 2011, Bank Indonesia mediated 61 disputes with 38 progressing to the settlement process. The remaining cases were resolved by the respective banks involved or could not be followed up further because they fell short of the conditions required to enter the mediation process as stipulated in prevailing regulations.*

*Bank Indonesia continued to create public awareness regarding the mediation service offered through publications and education across various media in conjunction with the banking industry. In addition, Bank Indonesia worked closely with the relevant authorities to combat the rise of criminal deception targeting bank accounts through the Short Message Service (SMS). Through the Bank Mediation Working Group facilitated by Bank Indonesia, the banking industry agreed to provide a call centre to receive customer complaints. Bank Indonesia also set up a hotline in order to improve its service to the general public and expedite the complaint follow-up procedure. Furthermore, Bank Indonesia also collaborated with the telecommunications regulator, the Indonesian Telecommunication Regulatory Authority, and a number of cellular operators to prevent misuse through SMS. Consequently, a number of accounts suspected of being used by the perpetrators of such crimes were blocked with the majority of the funds returned to their rightful owners.*



Bank Indonesia secara kontinyu melakukan program edukasi masyarakat melalui Gerakan Indonesia Menabung agar memiliki gambaran mengenai keuntungan dan risiko mengenai berbagai produk keuangan. Gerakan Indonesia Menabung diwujudkan melalui program penyediaan tabungan berbiaya administrasi rendah (TabunganKu). Sebanyak 70 bank umum dan sejumlah BPR berpartisipasi dalam program TabunganKu. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, program tersebut berhasil menjaring 2,1 juta rekening dengan nominal tabungan sebesar Rp 2,4 triliun (posisi Desember 2011).

Bank Indonesia juga melakukan berbagai program edukasi. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Indonesia memperkenalkan budaya menabung melalui pendidikan sejak dini. Hal ini diwujudkan dengan mengintegrasikan pendidikan keuangan dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar dan pertama.

Selain itu, program edukasi juga dilakukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tujuannya agar TKI memahami perencanaan keuangan dan dapat mengelolanya menjadi usaha produktif. Bank Indonesia juga menyediakan menu Informasi dan Edukasi Konsumen dalam situs Bank Indonesia untuk mendukung diseminasi informasi mengenai edukasi perbankan.

*Bank Indonesia continued to roll out its public education program through the National Savings Movement (Gerakan Indonesia Menabung), providing a clearer picture to the general public regarding the benefits and risks involved with a number of financial products. The National Savings Movement includes the provision of low-cost savings accounts known as MySavings (TabunganKu). As many as 70 commercial banks and a number of rural banks participate in the MySavings program and over the past two years the program has successfully netted 2.1 million new accounts with nominal savings totalling Rp 2.4 trillion (as of December 2011).*

*Bank Indonesia also undertook a number of education programs. Conjointly with the Ministry of Education and Culture, Bank Indonesia promoted a culture of saving through early childhood education, which is integrated with financial education on the primary curriculum.*

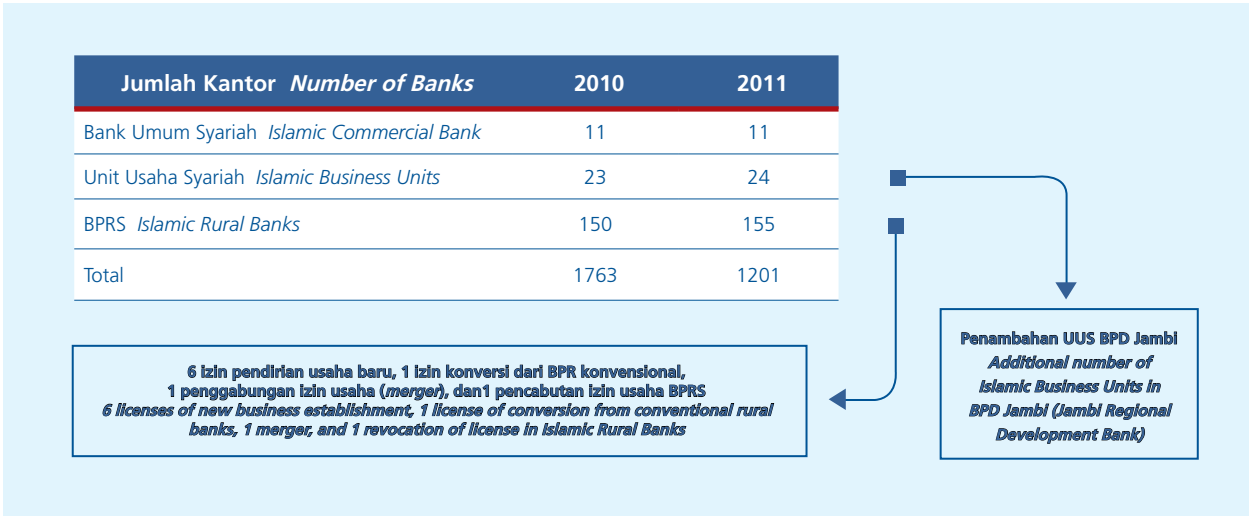
*In addition, a joint education program is also provided for Indonesian migrant workers under the auspices of the Ministry of Manpower and Transmigration. The aim of the program is to help migrant workers plan their finances, thus providing them with a potentially productive business opportunity. Bank Indonesia also provides consumer information and education on its official website in order to help the dissemination of information on financial education.*



Perbankan Syariah

Perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) juga menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin pada peningkatan pangsa perbankan syariah. Aset perbankan syariah pada 2011 meningkat 48,6% (yoy) dari 2010 sehingga pangsaanya meningkat 4,0% dari total industri perbankan.

Selain mengalami peningkatan aset, jumlah bank dan jaringan kantor perbankan syariah juga meningkat.



Sumber pendanaan perbankan syariah didukung peningkatan DPK yang dihimpun BUS dan UUS (51,8% yoy) serta BPRS (30,7% yoy). Dari segi kepemilikan, pangsa DPK yang berasal dari institusi/korporasi lebih besar (50,7%) dari pangsa DPK individu. Perkembangan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang semakin besar terhadap perbankan syariah, khususnya ditunjukkan oleh institusi/korporasi. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi, DPK masih menjadi sumber pendanaan yang dominan bagi perbankan syariah. Selain DPK, sumber pendanaan pada BPRS yang memberikan kontribusi cukup signifikan adalah pendanaan bank lain, sejalan meningkatnya pemanfaatan pola kerjasama BPRS dengan bank-bank umum syariah. Sumber pendanaan pada UUS selain DPK juga disumbangkan oleh pendanaan dari bank induk.

Islamic Banks

Islamic banks (Islamic commercial banks, Islamic business units and Islamic rural banks) also performed well in 2011, as reflected by the growing market share of Islamic banks. The assets of the Islamic banking industry increased by 48.6% (yoy) in 2011 over the preceding year, thereby bringing the corresponding market share to 4.0% of the total banking industry.

In addition to growth in assets, the number of Islamic banks and their office network also expanded.

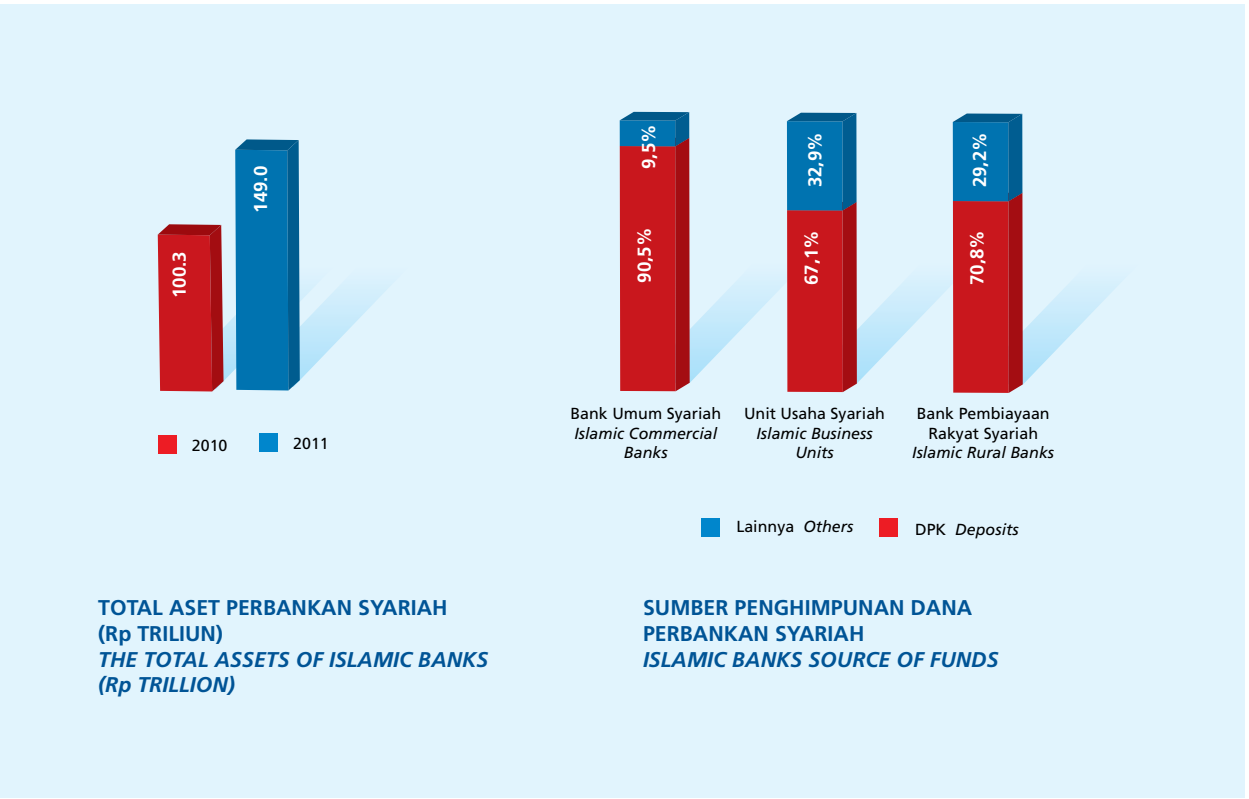
The primary source of funds for Islamic banks stemmed from deposits by Islamic commercial banks and Islamic business units (51.8% yoy) as well as Islamic rural banks (30.7% yoy). In terms of ownership, the share of corporate/institutional deposits (50.7%) exceeded that of individual deposits, which reflects a growing level of confidence in Islamic banks, particularly from institutions and the corporate sector. With solid growth figures, deposits remained the dominant source of funds for Islamic banks. In addition to deposits, Islamic rural banks tended to rely on funding from other banks in line with their unique form of cooperation with Islamic commercial banks. Notwithstanding, Islamic business units were more inclined to shore up deposits with contributions from their parent bank.

Fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan optimal. Pembiayaan masih menjadi pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan pada Bank Indonesia, bank lain atau surat-surat berharga. Peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut tercermin pada tingginya laju pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Pada 2011, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah tumbuh sebesar 50,0% (yoy), lebih tinggi dari 2010 yang sebesar 44,9%. Sejalan dengan ekspansi pembiayaan tersebut, Financing to Deposit Ratio dipertahankan pada tingkat yang optimal sebesar 89,9%.

Perkembangan yang menggembirakan juga tercermin pada jenis pembiayaan perbankan syariah yang diprioritaskan untuk segmen Mikro, Kecil dan Menengah (MKM). Proporsi pembiayaan MKM tercatat sebesar Rp 71,8 triliun atau 70,0% dari pembiayaan perbankan syariah (BUS dan UUS). Penyaluran pembiayaan MKM oleh perbankan syariah pada umumnya mengandalkan pola linkage antara bank umum dan BPRS, atau

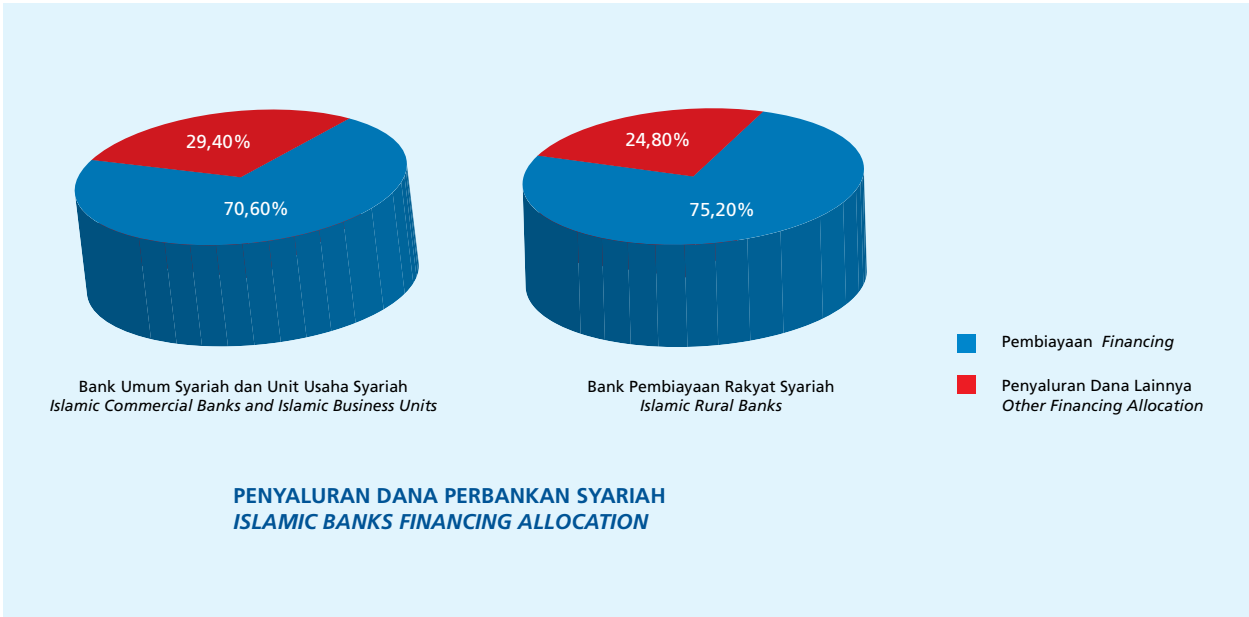
The Islamic bank intermediation function was optimal. Financing remained the cardinal choice for Islamic bank placements compared to placements at Bank Indonesia, other banks or in securities. The increase in financing allocation was reflected by robust financing growth at Islamic banks. In 2011, financing allocated by Islamic banks increased by 50.0% (yoy), which exceeded growth posted in the previous year amounting to 44.9%. In harmony with this explosion in financing, the Financing to Deposit Ratio was maintained at an optimal level of 89.9%.

Impressive performance was further demonstrated by the types of financing prioritised by the Islamic banking industry, namely financing to micro, small and medium enterprises (MSME). The proportion of MSME financing reached Rp 71.8 trillion or 70.0% of total Islamic bank financing (Islamic commercial banks and Islamic business units). The allocation of MSME financing by Islamic banks relied primarily on a linkage program between





Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien  
*A Stable, Sound and Efficient Banking System*



dengan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan. Sejumlah bank syariah juga berpartisipasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan kepemilikan rumah yang menjadi program pemerintah. Dengan melakukan pola kemitraan tersebut, perbankan syariah memiliki kesempatan untuk membiayai sektor riil.

Semakin berkembangnya industri perbankan syariah mendorong Bank Indonesia untuk meningkatkan ketahanan industri perbankan syariah dan mengembangkan infrastruktur pendukungnya. Peningkatan ketahanan juga didukung upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan syariah. Kegiatan tersebut diberikan kepada pegawai perbankan syariah dan pengawas Bank Indonesia. Tidak hanya kepada pelaku di industri perbankan syariah, Bank Indonesia juga memberikan peningkatan kompetensi bagi kalangan akademisi. Melalui program *Training for Trainers* kepada tenaga pengajar, diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perbankan syariah dapat diteruskan kepada pelajar dan mahasiswa. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang kompeten bagi industri perbankan syariah juga ditempuh melalui program *link & match*. Program ini dilakukan untuk menghubungkan antara perbankan syariah sebagai *end user* dan lembaga pendidikan/universitas sebagai penyedia SDM dalam proses perekrutan SDM perbankan syariah.

*conventional commercial banks and Islamic rural banks, or other financial institutions like cooperatives and finance companies. A number of Islamic banks also participated in a government program to extend small business loans (KUR) and mortgages. Through this commitment the Islamic banking industry has the opportunity to finance the real sector.*

*As the Islamic banking industry continues to develop, Bank Indonesia is forced to enhance industry resilience and develop supporting infrastructure. Enhancing the quality of human resources, namely employees at Islamic banks as well as supervisors from Bank Indonesia, has improved Islamic banking industry resilience overall. Notwithstanding, Bank Indonesia also sought to enhance the competence of academics through a Training-for-Trainers program aimed at teaching staff, which is expected to continue expanding the knowledge base and understanding of students and pupils regarding Islamic banking. Efforts to up skill competent human resources in the Islamic banking industry also came in the form of a link & match program. This program was implemented to connect Islamic banks as the end user with educational institutions and universities as the providers of human resources through a recruitment drive.*

Pengembangan industri perbankan syariah juga dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pendukungnya. Salah satunya dengan memperkuat aspek likuiditas perbankan syariah melalui kontribusi aktif Bank Indonesia dalam keanggotaan International Islamic Liquidity Management (IILM). IILM berperan sebagai penyedia likuiditas global bagi perbankan syariah.

Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia mengembangkan produk perbankan syariah. Disamping itu, juga dikembangkan produk komoditi syariah yang pertama kali diluncurkan oleh Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange). Pemanfaatan produk perdagangan komoditi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah sebagai *underlying transaction* dalam pengaturan manajemen likuiditas.

Pengembangan industri perbankan syariah juga dilakukan melalui pendekatan layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Sebagai kelanjutan *Market Development Strategic Plan* (MDSP) yang telah dirumuskan pada 2008, Bank Indonesia mendorong pengembangan pasar perbankan syariah melalui perluasan jaringan layanan dan kualitas layanan. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong sinergi antara bank syariah dan bank konvensional induk/grupnya. Hal ini antara lain dilaksanakan melalui sistem *delivery channel* produk perbankan syariah di kantor bank konvensional induknya, seperti dilakukan oleh BRI Syariah dan BNI Syariah.

Untuk lebih mengenalkan layanan perbankan syariah, Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan secara intensif melalui berbagai media komunikasi tersebut dikemas dalam program iB Campaign yang melibatkan media cetak serta elektronik. Sosialisasi didorong bukan hanya kepada segmen pasar *consumer retail*, namun juga kepada pasar korporasi dan sektor UMKM produktif. Melalui pendekatan berbasis komunitas, perbankan syariah menyelenggarakan *business gathering* dan *focus group* antara lain dengan pelaku industri sektor properti, pertambangan, bisnis waralaba (*franchise*), dan dengan komunitas perusahaan emiten.

*Islamic banking industry development was further reinforced through the development of supporting infrastructure. For example, aspects of liquidity in the Islamic banking industry were strengthened through the active contribution of Bank Indonesia as a member of International Islamic Liquidity Management (IILM). IILM functions as a provider of global liquidity to the Islamic banking industry.*

*In addition, Bank Indonesia cooperates with the National Islamic Council and the Indonesian Institute of Accountants to develop Islamic banking products. Furthermore, an Islamic banking product was developed to be launched and traded initially on the Jakarta Futures Exchange. Utilising this tradable commodity will benefit Islamic banks as an underlying transaction for liquidity management.*

*The Islamic banking industry also matured through a service-oriented approach to the general public. As a continuation of the Market Development Strategic Plan (MDSP) formulated in 2008, Bank Indonesia nurtured Islamic banking industry development by expanding the service network and enhancing service quality. Such efforts were undertaken to promote synergy between Islamic banks and their conventional parent bank/ group, and were implemented through an Islamic banking product delivery channel system located at the corresponding conventional parent bank, similar to that conducted by BRI Syariah and BNI Syariah.*

*To ensure greater familiarity with Islamic banking services, Bank Indonesia continued to organise socialisation and educational activities for members of the general public. Such activities fall under the umbrella of the iB Campaign and were conducted intensively through a number of print and electronic communications media. Socialisation activities were not only aimed at the consumer retail market segment but also the corporate sector and productive MSME. Through a community-based approach, Islamic banks organised business gatherings and focus groups attended by players in the property sector, mining, franchise businesses and corporate issuers.*



## Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien *A Stable, Sound and Efficient Banking System*

Upaya pengembangan industri perbankan syariah didukung pula dengan penyempurnaan infrastruktur pengawasan Bank Indonesia. Pada 2011, Bank Indonesia menyempurnakan sistem pelaporan Bank Umum Syariah guna mengakomodasi perubahan beberapa ketentuan diantaranya (i) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS), (ii) perkembangan produk perbankan Syariah, (iii) penyempurnaan aturan kualitas aktiva dan restrukturisasi, serta (iv) penyesuaian ketentuan Basel II. Selain itu, Bank Indonesia juga mempersiapkan aplikasi *early warning system* BPRS sebagai alat bantu bagi pengawas bank dalam mendeteksi secara dini kinerja BPRS. Untuk mempertajam kualitas pengawasan (*quality assurance*), Bank Indonesia mengimplementasikan sistem panel sebagai bagian dari sistem pengawasan perbankan syariah.

### Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kinerja BPR selama 2011 cukup baik yang didukung oleh peningkatan modal BPR. Modal disetor BPR mengalami peningkatan sebesar 16,38%, yang berasal dari pemupukan laba ditahan maupun setoran modal dalam bentuk *fresh money*.

Dari sisi kelembagaan, jumlah BPR saat ini mencapai 1.669 BPR terdiri dari 1.388 BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), 247 BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah (PD) dan 34 BPR berbadan hukum koperasi. Jumlah tersebut menurun sebanyak 37 BPR dari tahun 2010, yang disebabkan antara lain karena pencabutan izin usaha 14 BPR dan merger 55 BPR menjadi 7 BPR hasil merger. Sementara jangkauan pelayanan BPR semakin luas dengan bertambahnya jaringan kantor cabang BPR dari 1.088 kantor pada Desember 2010 menjadi 1.223 pada Desember 2011, atau tumbuh sebesar 12,41%.

Skala usaha BPR juga semakin meningkat dengan pertumbuhan aset mencapai 21,99%. Pertumbuhan aset tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan ekspansi kredit BPR di sisi aktiva dan peningkatan penghimpunan dana BPR di sisi pasiva. Dari sisi penyaluran kredit, selama 2011 BPR mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 21,44%, sementara dari sisi penghimpunan dana, BPR mampu meningkatkan dana pihak ketiganya

*Efforts to develop the Islamic banking industry were also supported by refinements to the supervisory infrastructure of Bank Indonesia. In 2011, Bank Indonesia refined its reporting system for Islamic commercial banks by accommodating changes in a number of regulations as follows: (i) Islamic Accountancy Standards (PSAKS); (ii) Islamic banking product development; (iii) amendments to asset quality and restructuring; and (iv) adjustments to Basel II regulations. In addition, Bank Indonesia has also prepared an Islamic rural banks' early warning system as a tool that help bank supervisors detect performance in advance. Furthermore, Bank Indonesia implemented a panel system in order to hone the quality of supervision (quality assurance) as part of the overall Islamic banking oversight system.*

### Rural Banks (BPR)

*Rural banks performed well in 2011 on the back of an increase in capital. The paid-up capital of rural banks experienced a 16.38% increase stemming from an accumulation of retained earnings and fresh money.*

*Institutionally, the total number of rural banks is currently 1,669, consisting of 1,388 limited liability companies (PT), 247 regional companies (PD) and 34 cooperatives companies. The total is down by 37 rural banks compared to 2010 as a result of 14 rural banks having their license revoked, while a further 55 rural banks merged into just seven. Nevertheless, rural bank service coverage has expanded with the branch office network growing from 1,088 in December 2010 to 1,223 in December 2011, representing an increase of 12.41%.*

*The business scale of rural banks also increased with asset growth reaching 21.99%, primarily attributable to credit growth on the asset side and greater fund accumulation on the liabilities side. In terms of credit allocation, rural banks achieved 21.44% credit growth in 2011, while deposits increased by 22%. Improvements in rural bank performance were also evidenced by a decline in non-performing loans (NPL) to 3.67% (net), which is an*

sebesar 22%. Indikator kinerja BPR juga ditunjukkan dari perbaikan kualitas kredit yang tercermin dari penurunan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi 3,67% (netto), membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,25%.

Kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diarahkan pada penguatan kapasitas industri agar mampu mengembangkan bisnis sehingga dapat bersaing dengan pelaku bisnis lain di pasar keuangan mikro. Sebagai salah satu bentuk dukungan pengembangan bisnis BPR, pada 2011 Bank Indonesia meluncurkan acuan bagi pelaku industri untuk pendirian dan pengelolaan serta pengembangan BPR. Acuan tersebut diwujudkan dalam bentuk buku Model Bisnis BPR. Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja dan perilaku industri BPR selama lima tahun terakhir, Bank Indonesia menerjemahkan model bisnis BPR dalam enam aspek utama yang secara signifikan memengaruhi kinerja dan keberlangsungan usaha BPR. Keenam aspek tersebut meliputi kepemilikan, permodalan, lokasi dan wilayah operasional, strategi bisnis, manajemen dan kebijakan SDM, serta hubungan dengan masyarakat.

Selain menerbitkan buku Model Bisnis BPR, Bank Indonesia juga mempublikasikan Buku Model BPR Apex Generik. Penerbitan buku tersebut guna memberikan panduan dan pemahaman bagi industri perbankan dan masyarakat mengenai kerjasama BPR Apex. Buku tersebut berisi pedoman umum dalam menginisiasi pembentukan dan pelaksanaan operasional lembaga BPR Apex. Lembaga Apex merupakan bentuk kerjasama antara bank umum yang berperan sebagai bank induk dan BPR sebagai anggota kerjasama Apex. Kehadiran lembaga Apex sekaligus sebagai bentuk sinergi dalam melayani UMKM, sehingga meminimalisasi persaingan usaha yang tidak sehat antara Bank Umum dan BPR.

Saat ini, buku Model BPR Apex Generik ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan BPR Apex bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas penancangan program BPD Regional Champion (BRC) dimana BPD didorong sebagai *agent of regional development*. Untuk memantapkan fungsinya sebagai BRC, BPD didorong untuk berfungsi sebagai BPR Apex bagi BPR di wilayah kerjanya.

*improvement over the 4.25% posted in the previous year. The development policy for rural banks focused on industry capacity building to enable business development that ensures competitiveness with other micro finance businesses.*

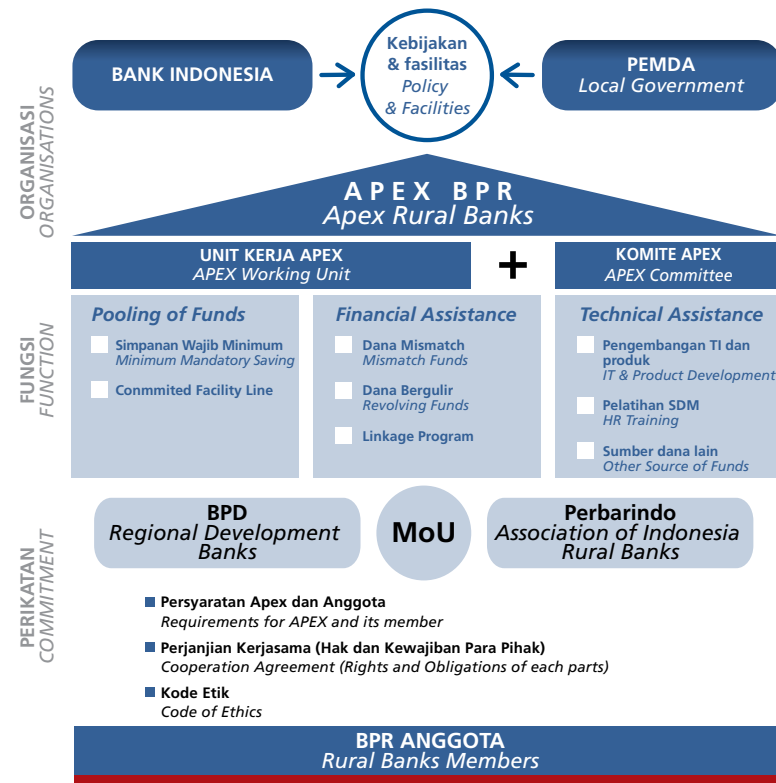
*One form of support for rural bank business development in 2011 was Bank Indonesia's highly publicised launch of guidelines for industry players regarding the establishment, management and development of rural banks. The guidelines are presented in the form of a Rural Bank Business Model. Based on observations on the performance and behaviour of the rural banking industry over the past five years, Bank Indonesia translated the rural bank business model into six salient aspects that significantly affect the performance and sustainability of rural banks. The six aspects cover ownership, capital, location and operational area, business strategy, management and human resource policy, as well as public relations.*

*In addition to publishing the Rural Bank Business Model book, Bank Indonesia also released a book on Generic Apex Rural Banks, which provides guidance and understanding for the banking industry and the general public concerning working with Apex banks. This book contains general guidelines to establish and operate an Apex bank, which in itself is a form of cooperation between a commercial bank acting as the parent bank and rural banks as its members. The presence of Apex banks will concomitantly boost synergy when serving the MSME sector, thereby minimising unhealthy business competition between commercial banks and rural banks.*

*Currently, the book on Generic Apex Rural Banks comprises a set of guidelines on setting up an Apex bank aimed specifically at regional development banks (BPD). This represents a follow-up action after announcing the BPD Regional Champion (BRC) program, where regional development banks are nurtured as agents of regional development. Accordingly, regional development banks are encouraged to function as Apex bank for the rural banks found in their respective jurisdictions.*



## Sistem Perbankan yang Stabil, Sehat dan Efisien A Stable, Sound and Efficient Banking System



**Model Kerjasama Apex BPR**  
Cooperation Model of APEX Rural Banks

Sinergi antara Bank Umum sebagai BPR Apex dengan BPR memberikan manfaat bagi kedua pihak. Bagi Bank Umum, kerjasama tersebut memberikan manfaat: (i) memperluas pelayanan melalui jaringan kantor BPR, (ii) menyalurkan pembiayaan melalui *linkage program*, (iii) menciptakan produk dan jasa bersama untuk menjangkau dan melayani nasabah yang lebih luas, (iv) memanfaatkan *pooling funds* BPR sebagai sumber dana kelolaan, dan (v) menghasilkan *fee based income* dari pemanfaatan transaksi oleh BPR melalui jaringan ATM bank umum.

Keberadaan BPR Apex memberikan manfaat bagi BPR sebagai anggotanya melalui: (i) penyediaan dukungan finansial khususnya dalam kondisi *mismatch* likuiditas dan bantuan teknis, (ii) penyediaan jasa sistem pembayaran khususnya dalam rangka pemindahan dana antar nasabah

*Synergy between commercial banks as Apex banks and rural banks is mutually beneficial. For a commercial bank, the benefits are five-fold as follows: (i) extending services through the rural bank office network; (ii) allocating credit through a linkage program, (iii) creating joint products and services to reach and serve a broader customer base; (iv) exploiting pooled funds from rural banks as a source of managed funds; and (v) generating fee-based income from transactions by rural banks on the commercial bank's ATM network.*

*The presence of Apex banks also provides benefits to rural banks as its members by: (i) providing financial support, particularly in terms of a liquidity mismatch and technical assistance; (ii) providing payment system services, in particular to transfer funds among the customers of*

BPR anggota APEX, (iii) pemanfaatan produk/jasa berbasis teknologi informasi (seperti ATM) dan pemasaran produk/jasa lainnya, serta (iv) pengembangan BPR (*competency building*) melalui pendampingan dan pelatihan.

Untuk mewujudkan industri BPR yang berdaya saing, kecukupan permodalan BPR menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian Bank Indonesia. Kondisi perekonomian dan peta persaingan lembaga keuangan yang telah jauh berubah, menjadi pertimbangan Bank Indonesia mengevaluasi aturan persyaratan modal disetor minimum pendirian BPR yang berlaku saat ini. Untuk itu, Bank Indonesia mengkaji pembagian wilayah sebagai dasar penentuan modal disetor minimum. Pembagian wilayah pendirian BPR dilakukan dengan menganalisis potensi ekonomi dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah tersebut. Dengan demikian, persyaratan modal disetor minimum akan sesuai dengan kebutuhan riil kegiatan BPR di wilayah tersebut.

*member rural banks; (iii) utilising IT-based products and services (like ATMs) and marketing other products and services; and (iv) competency building through guidance and training.*

*The capital adequacy of rural banks is an important factor in the realisation of a competitive rural banking industry, which has become a concern of Bank Indonesia. Significant changes in economic conditions and the competitive landscape of financial institutions must be taken into consideration by Bank Indonesia when evaluating the prevailing requirements for establishing a new rural bank in terms of minimum paid-up capital. To this end, Bank Indonesia looked at dividing up territory as a basis for determining paid-up capital. Territory was divided according to economic potential and the level of competition among financial institutions. Consequently, the minimum requirement for paid up capital is in harmony with the real conditions faced by rural banks in each area of operation.*



## 03

Sistem Pembayaran yang  
Aman dan Efisien*A Secure and Efficient Payment System***Sistem Pembayaran**

Sepanjang 2011, keandalan sistem pembayaran tetap terjaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal itu tercermin pada tingginya transaksi sistem pembayaran dan tidak adanya gangguan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Selama 2011, nilai dan volume transaksi sistem pembayaran mencapai Rp 71,55 ribu triliun dan 2,63 miliar transaksi, meningkat masing-masing 23,21% dan 22,66% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilayani oleh sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dengan tingkat ketersediaan sistem mencapai 99,9%. Sepanjang tahun tidak terdapat gangguan signifikan yang mengakibatkan penyelenggaraan sistem terhenti. Keberhasilan layanan sistem pembayaran juga teruji saat terjadi peningkatan transaksi pembayaran, yang mencapai puncaknya menjelang hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.

Pengesahan Undang-Undang (UU) Transfer Dana pada 23 Maret 2011 memberikan basis legal yang kuat bagi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana. Sebelum adanya UU tersebut, beberapa ketentuan yang bersifat umum hanya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. UU tersebut merupakan ketentuan yang komprehensif di bidang transfer dana serta memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi penyelenggara transfer dana.

Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah meningkatkan layanan bagi pengguna transfer dana melalui SKNBI. Sejak 7 Januari 2011, Bank Indonesia telah memberikan layanan transfer dana yang lebih cepat, yang dikenal dengan Si Kilat atau kliring kilat. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima hasil transfer secara lebih cepat.

**The Payment System**

*In 2011, the reliability of the payment system was maintained in support of financial system stability. This was reflected by the high level of transactions processed through the payment system and the lack of any disruptions.*

*The value and volume of transactions processed through the payment system in 2011 achieved Rp 71,55 thousand trillion and 2,63 billion transaction, increased 23,21% and 22,66% from the previous year. This increase was absorbed and processed by the Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) system, the Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) and the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI), with a 99.9% level of availability. No significant disruptions were noted during the reporting year. The performance of the payment system was tested further as transactions increased leading up to religious festivities and New Year celebrations.*

*Approval of the Fund Transfer Act on 23rd March 2011 provided a solid legal basis for Bank Indonesia in the transfer of funds. Prior to the new law, a number of general regulations were incorporated in Bank Indonesia regulations. However, the new law contains comprehensive legislation for the transfer of funds and clarifies the rights and responsibilities of those involved with the transfer of funds.*

*In the operation of the payment system, Bank Indonesia has also improved services for those wishing to transfer funds through the national clearing system. Since 7th January 2011, Bank Indonesia has provided a faster fund transfer system known as Si Kilat or express clearing. Consequently, less time is required for members of the general public to receive their fund transfers.*



## Sistem Pembayaran yang Aman dan Efisien *A Secure and Efficient Payment System*

Untuk memperluas jasa transfer dana, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan bagi nasabah BPR untuk melakukan kliring. Pada tahap awal, diterapkan *pilot project* kliring kredit oleh BPR di Jawa Timur melalui BPR Apex. Dengan perluasan fasilitas kliring transfer dana ini, BPR diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing dalam memberikan jasa layanan pembayaran kepada masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk meningkatkan aspek keamanan dalam transaksi sistem pembayaran, sebagaimana yang telah dilakukan pada kartu kredit, Bank Indonesia mulai mengimplementasikan teknologi chip dan penerapan PIN minimum enam digit pada kartu ATM/Debit. Implementasi *chip* pada kartu ATM/Debit dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan industri perbankan, baik dari sisi bisnis maupun sisi teknis, termasuk perhitungan biaya investasinya.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, pada 2011 Bank Indonesia merintis upaya interkoneksi pembayaran retail yakni Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik. Preferensi masyarakat yang berbeda terhadap pemilihan jenis alat pembayaran dan perbedaan sistem yang digunakan membutuhkan adanya sistem yang saling terkoneksi. Interkoneksi tersebut diwujudkan melalui pembentukan *National Payment Gateway* (NPG) dan interoperabilitas uang elektronik.

Dalam mewujudkan interkoneksi tersebut, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran masih meneruskan penyusunan model bisnis dan teknis pengembangan NPG yang sesuai dengan kebutuhan industri sistem pembayaran di Indonesia. Pada tahap awal, upaya untuk mewujudkan interkoneksi dilakukan dengan mendorong dua perbankan besar, Bank Mandiri dan Bank Central Asia, untuk saling mengkoneksikan layanan ATM mereka. Interkoneksi ATM tersebut mulai beroperasi pada awal tahun 2012. Interkoneksi ATM serupa diharapkan diikuti oleh seluruh pelaku industri kartu ATM di Indonesia.

Untuk mendorong tercapainya standardisasi uang elektronik, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran menyusun model bisnis dan menyiapkan lembaga pendukung pengelola standar teknis dan bisnis. Pada tahap awal, implementasi interkoneksi uang

*Bank Indonesia also furnished the customers of rural banks with the opportunity to utilise the clearing system in order to expand fund transfer services. In the preliminary phase, a pilot project was set up dealing with credit clearing by rural banks in East Java through an Apex bank. This expansion in clearing activity is expected to boost rural bank competitiveness in terms of extending payment services to the general public, while simultaneously catalysing economic growth at the local level.*

*Additionally, Bank Indonesia began to roll out chip technology and apply six-digit personal identification numbers (PIN) on ATM/debit cards in order to ameliorate security of the payment system in a similar fashion to that implemented for credit cards. The implementation of chip technology for ATM/debit cards will be gradual in harmony with how prepared the banking industry is from a business and technical perspective, including the cost of investment incurred.*

*In 2011 Bank Indonesia pioneered efforts to augment the interconnectedness of retail payments in order to boost payment system efficiency, namely through card-based payment instruments and electronic money. The various individual preferences of the general public when choosing which type of card to use as well as the different processing systems necessitate a national interconnected system. This interconnectedness is achieved through a National Payment Gateway (NPG) as well as electronic money interoperability.*

*In conjunction with the payment system industry, Bank Indonesia continued to prepare a business model and technically develop the NPG in line with the needs of the industry in Indonesia. During the initial phase, the drive towards interconnectedness will be achieved with the help of two large banks, namely Bank Mandiri and Bank Central Asia, by linking their ATM networks together. Interconnected ATMs will commence operation at the beginning of 2012 and it is hoped that all ATM card operators in Indonesia will follow suit shortly thereafter.*

*Bank Indonesia together with the payment system industry are developing a business model and preparing the necessary supporting institutions to manage technical standards in order to achieve electronic money standardisation. During the preliminary phase,*

Melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, diwujudkan interkoneksi uang elektronik di sektor transportasi.

*The implementation of interconnection and interoperable electronic money in the transportation sector was made possible through coordination between Bank Indonesia, the Ministry of Transportation, the Ministry of Communications and Information Technology and the Presidential Working Unit for Development Supervision and Control.*



elektronik dilakukan pada sektor transportasi karena terkait dengan kebutuhan masyarakat dan telah terbukti keberhasilannya di beberapa negara maju.

Sebagai upaya mewujudkan interkoneksi uang elektronik di sektor transportasi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Koordinasi tersebut dituangkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama pengembangan uang elektronik pada 14 November 2011. Implementasi Kesepakatan Bersama tersebut ditandai dengan mulai dikembangkannya sistem pembelian tiket secara elektronik. Pembelian tiket secara elektronik diberlakukan untuk tiket bis TransYogya, kereta api Prameks dan bis Trans Batik Solo, serta kereta komuter di wilayah Jabodetabek. Selain itu, uang elektronik telah digunakan untuk bis Trans Pakuan Bogor.

Area lain yang menjadi *concern* Bank Indonesia adalah perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna alat pembayaran. Perlindungan konsumen merupakan penyeimbang dalam setiap pengembangan yang dilakukan oleh industri pembayaran. Respons terhadap pengaduan maupun keluhan masyarakat atas praktik menyimpang penyelenggaraan jasa pembayaran menjadi masukan bagi Bank Indonesia untuk melakukan penyempurnaan aturan mengenai industri APMK, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen kartu kredit.

*interoperable electronic money will be introduced in the transportation sector in line with the needs of commuters and the existing successes noted in other countries that have adopted such a system.*

*In an effort to ensure the adoption of interoperable electronic money in the transportation sector, Bank Indonesia coordinates with the Ministry of Transportation, the Ministry of Communications and Information Technology, and the Presidential Working Unit for Development Supervision and Control. The details of the coordination are contained within a memorandum of understanding (MoU) signed on 14th November 2011 to develop electronic money. Implementation of the MoU was marked by the development of an electronic ticket sales system. Electronic tickets are now available on TransYogya buses, Prameks trains and Trans Batik Solo buses, as well as commuter trains in the Jabodetabek area. In addition, electronic money is also being used on Trans Pakuan Bogor buses.*

*Another area of concern for Bank Indonesia is customer protection for users of payment instruments. Customer protection acts as a counterweight to any development in the payment industry. The response to customer complaints and grievances regarding the practical delivery of payment servicers is a valuable input for Bank Indonesia to possibly refine regulations pertaining to the card-based payment industry in relation to aspects of customer protection for users of credit cards.*



# Bank Indonesia Percepat Penyelesaian Transaksi Kliring melalui “Si Kilat”

## Bank Indonesia Expedites Clearing Transaction Settlement through Express Clearing

Si Kilat, atau kliring kilat, adalah layanan transfer dana melalui kliring yang lebih cepat, yang diluncurkan Bank Indonesia pada 7 Januari 2011. Layanan diberikan untuk meningkatkan pelayanan instrumen pembayaran nontunai bagi masyarakat melalui SKNBI. Penyelesaian transaksi untuk transfer dana pada SKNBI yang semula hanya dilakukan dua kali setelmen ditambah menjadi empat kali setelmen per hari. Setelmen transfer dana dilakukan setiap dua jam sekali pada pukul 10.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB dan 16.00 WIB. Tambahan waktu tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan waktu penyelesaian setelmen yang lebih cepat bagi masyarakat dan bank peserta SKNBI.

Bagi masyarakat, penambahan frekuensi layanan kliring dapat mempercepat pengiriman dan penerimaan dana. Biaya yang dikeluarkan untuk transaksi juga rendah. Bank Indonesia hanya mengenakan biaya sebesar Rp 1.000 per transaksi kepada bank pengirim. Dengan pengenaan biaya Bank Indonesia yang rendah, pengenaan biaya oleh bank kepada nasabah seharusnya tidak mahal. Bagi perbankan, penambahan frekuensi layanan kliring memberikan manfaat dari sisi optimalisasi pengelolaan likuiditas harian.

*Express clearing (Si Kilat) is a faster fund transfer service through the national clearing system launched by Bank Indonesia on 7th January 2011. This service improves non-cash payment instruments for the general public through the national clearing system. Transaction settlement in the national clearing system, which was previously conducted just twice, is now performed four times daily. Transfer settlement is now conducted every two hours at 10:00 WIB, 12:00 WIB, 14:00 WIB and 16:00 WIB. The two additional time slots are expected to meet the more rapid settlement requirements of the general public and participating banks in the national clearing system.*

*For the general public, a greater clearing settlement frequency will reduce the time required to send or receive funds. The cost of the service is also low with Bank Indonesia imposing a nominal fee of just Rp 1,000 per transaction on the sending bank. The imposition of a small fee by Bank Indonesia should ensure that the banks do not charge their own customers exorbitant fees. From the banks' standpoint, greater settlement frequency will help optimise daily liquidity management.*



## Pengedaran Uang

Sepanjang 2011, terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar (ULE) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap ULE tersebut tetap dapat dipenuhi. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang kartal tercermin pada peningkatan pertumbuhan uang kartal yang diedarkan (UYD). Terdapat kenaikan tambahan kebutuhan uang sebesar 49,2%, yaitu dari Rp 36,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 54,2 triliun pada tahun 2011. Adapun pertumbuhan UYD meningkat dari 12,1% pada tahun 2010 menjadi 16,9% pada tahun 2011.

Memperhatikan arti penting uang bagi masyarakat, kebijakan Bank Indonesia di bidang pengedaran uang mengacu pada tiga pilar utama. Pilar pertama yaitu peningkatan kualitas uang yang beredar dan pemenuhan permintaan uang sesuai kebutuhan. Pilar kedua berupa peningkatan efisiensi operasional kas di Bank Indonesia dan perbankan. Pilar ketiga adalah pengembangan layanan kas dengan mengikutsertakan peran perbankan dan pihak terkait lainnya.

Sebagai implementasi pilar pertama khususnya untuk meningkatkan kualitas uang yang beredar, Bank Indonesia menyempurnakan unsur pengaman dan desain uang. Penyempurnaan dilakukan terhadap uang kertas pecahan besar, yaitu Rp 20.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, yang telah diterbitkan pada 1 Agustus 2011. Dengan penyempurnaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengenali ciri keaslian uang rupiah sehingga mempersempit ruang gerak pemalsuan uang.

Disamping melakukan penyempurnaan unsur pengaman dan desain uang, Bank Indonesia juga meningkatkan penanggulangan peredaran uang palsu, baik secara represif dan preventif. Upaya secara represif dilakukan melalui kerja sama dengan POLRI dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan uang. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi keaslian uang rupiah antara lain melalui pameran dan memanfaatkan kegiatan budaya daerah. Selain itu, Bank Indonesia memasukkan materi keaslian uang rupiah dalam kurikulum pendidikan SMU sederajat.

## Money in Circulation

*The public requirement for money fit for circulation increased in 2011 in line with increasingly robust domestic economic growth. Notwithstanding, this increase in demand was successfully met. Greater public demand for currency was reflected by the increase in currency in circulation. The demand for currency increased by 49.2%, from Rp 36.3 trillion in 2010 to Rp 54.2 trillion in 2011. Furthermore, the amount of money in circulation grew by 12.1% in 2010 and 16.9% in 2011.*

*Noting the importance of money to the general public, Bank Indonesia's policy in this area refers to three main pillars. The first pillar is concerned with raising the quality of money in circulation and meeting the demand. The second pillar concerns boosting the efficiency of operational cash at Bank Indonesia and in the banking industry as a whole. Finally, the third pillar covers the development of cash services by engaging the banking community as well as other relevant parties.*

*In the implementation of the first pillar, in particular augmenting the quality of money in circulation, Bank Indonesia refined the built-in elements of security as well as banknote design. These refinements affected large denomination banknotes, namely Rp 20,000, Rp 50,000 and Rp 100,000, issued on 1st August 2011. Consequently, genuine rupiah banknotes should be easier to recognise by members of the general public, thereby reducing opportunities for counterfeiters to ply their trade.*

*In addition to redesigning banknotes, Bank Indonesia also introduced repressive and preventative countermeasures to the circulation of counterfeit money. Repressive measures were undertaken in collaboration with the National Police Department to expose cases of counterfeit money. Preventative measures were conducted through socialisation activities concerning genuine rupiah banknotes in the form of exhibitions and taking advantage of local cultural events. Furthermore, Bank Indonesia also included material regarding the authenticity of rupiah banknotes in the high school curriculum.*



Sistem Pembayaran yang Aman dan Efisien  
*A Secure and Efficient Payment System*

Untuk mengetahui kondisi dan kualitas uang di berbagai wilayah Indonesia, Bank Indonesia melakukan survei pemantauan kualitas uang yang beredar. Survei dilakukan di 10 wilayah kerja Bank Indonesia yaitu Jakarta, Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, dan Denpasar. Hasil survei selanjutnya menjadi masukan bagi Bank Indonesia dalam menyusun kebijakan pengedaran uang dan sekaligus sebagai barometer mengukur efektivitas kegiatan pengedaran uang Bank Indonesia.

Dalam rangka memenuhi permintaan uang sesuai kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia melakukan pengadaan bahan uang dan pencetakan uang. Pengadaan bahan uang dan pencetakan uang didasarkan pada rencana kebutuhan uang (RKU). Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan RKU antara lain proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, cadangan persediaan uang, pemusnahan uang kartal dan perilaku masyarakat antara lain preferensi dalam penggunaan alat pembayaran.

Sebagai implementasi pilar kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional kas di Bank Indonesia dan perbankan, Bank Indonesia mempertajam strategi efisiensi operasional kas dengan menyempurnakan Ketentuan Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia yang diberlakukan April 2011. Ketentuan ini memberikan akses yang lebih luas kepada bank umum dalam menyetorkan kelebihan likuiditas rupiah, dengan tetap memperhatikan optimalisasi transaksi uang kartal antarbank.

Strategi lain yang ditempuh yaitu pemantauan terhadap kegiatan pengolahan uang dan layanan nasabah oleh perbankan dan perusahaan *Cash in Transit* (CIT). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perbankan dan perusahaan CIT dalam menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat sesuai standar yang ditetapkan Bank Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia sebagai implementasi pilar ketiga dilakukan dalam rangka optimalisasi layanan kas di kantor Bank Indonesia maupun di luar kantor Bank Indonesia. Salah satu kegiatan pengembangan layanan kas dilakukan dengan melibatkan pihak terkait. Kegiatan

*Bank Indonesia conducted a monitoring survey in order to probe the quality and condition of money in circulation in various regions of Indonesia. The survey was undertaken in 10 cities, namely Jakarta, Makassar, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin and Denpasar. The results of the survey were used as an input in the policymaking decision process for money in circulation and used as a barometer to measure the efficacy of money circulated by Bank Indonesia.*

*Bank Indonesia procured the materials and printed its banknotes in order to meet demand in line with the public requirement. The procurement of materials and printing of banknotes are undertaken based on the plan of required money (RKU). A number of factors must be considered when formulating RKU, among others, projected economic growth, the level of inflation, money reserves, the destruction of money no longer fit for circulation and the growing propensity to use card-based payment instruments.*

*In the implementation of the second pillar, namely boosting the efficiency of operational cash at Bank Indonesia and in the banking industry overall, Bank Indonesia sharpened its cash efficiency strategy by amending the regulation concerning rupiah deposits and withdrawals by commercial banks at Bank Indonesia, effective from April 2011. This regulation provides greater access to commercial banks to deposit their excess liquidity, paying due regard to optimising interbank currency transactions.*

*Another strategy implemented is to monitor money management and customer services at banks and Cash in Transit (CIT) firms. This strategy aims to build the capacity of banks and CIT firms in terms of maintaining the quality of money in circulation pursuant to the standards set by Bank Indonesia.*

*Bank Indonesia policy regarding the implementation of pillar three is conducted in order to optimise cash services at Bank Indonesia as well as those available outside of Bank Indonesia. One such activity is to develop cash services involving relevant third parties, the objective*

dilakukan untuk meningkatkan penyediaan rupiah dan layanan kas di wilayah terpencil dan terdepan NKRI. Kebijakan dimaksudkan untuk menjamin penyediaan uang rupiah layak edar dan layanan kas serta menjaga eksistensi rupiah. Kegiatan layanan kas di daerah terpencil dan terdepan NKRI dilakukan dengan menggunakan armada Bank Indonesia atau transportasi umum lain, ataupun melalui kerjasama dengan Kepolisian Perairan (Polair) dan TNI Angkatan Laut (TNI-AL).

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam pengedaran uang berjalan relatif baik diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap ULE cenderung puas (4,67 dari skala 1-6).

*of which is to ameliorate rupiah availability in remote and borderland areas of Indonesia. This policy aims to guarantee rupiah availability fit for circulation as well as cash services in order to maintain rupiah viability. Cash services in remote and borderland areas are provided using the Bank Indonesia armada or other means of transportation, for example through cooperation with the Maritime Police and the Indonesian Navy.*

*Bank Indonesia implemented its task well in terms of circulating money, which is gauged by the public satisfaction index, with a score of 4.67 on a scale of 1-6.*



## Layanan Kas Bank Indonesia di Daerah Terpencil dan Terdepan NKRI

*Bank Indonesia Cash Services in Remote and Borderland Areas*

Layanan kas keliling untuk penukaran rupiah sangat berguna untuk masyarakat, demikian kata Maarist, Camat Kepulauan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Keberadaan Bank Indonesia di kepulauan tersebut pada tanggal 24-30 Juni 2011 dimaksudkan untuk menyediakan layanan kas keliling bagi masyarakat di daerah terpencil dan terdepan NKRI. Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah.

Selain di Miangas, kegiatan kas keliling bersama dengan TNI AL dilakukan di wilayah lainnya. Wilayah tersebut meliputi wilayah Marore, Melonguane dan Lirung (Sulawesi Utara dan perbatasan dengan Phillipina) serta Natuna dan Anambas (Kepri dan perbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, China). Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kepolisian Air (PolAir) dalam melakukan kegiatan kas keliling dan sosialisasi ciri keaslian uang rupiah di kepulauan Seribu (DKI Jakarta).

Kerjasama dengan TNI AL dan PolAir bertujuan untuk meningkatkan jangkauan penyediaan uang rupiah ke daerah terpencil dan terdepan NKRI yang tidak dapat ditempuh dengan sarana transportasi reguler. Kegiatan tersebut mempertimbangkan Bank Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan ekonomi, antara lain menjaga eksistensi uang rupiah sebagai *legal tender* di seluruh wilayah NKRI termasuk di daerah terpencil dan terdepan NKRI. Di sisi lain, TNI AL memiliki

*According to the Head of Miangas Island in North Sulawesi, Maarist, mobile cash services are vital to the general public in remote areas. The presence of Bank Indonesia from 24-30 June 2011 brought mobile cash services to the residents of this remote island. At the same time, Bank Indonesia coordinated with the Indonesian Navy to socialise the characteristics of genuine rupiah banknotes.*

*In addition to Miangas, mobile cash services were brought to a number of other areas with the help of the Indonesian Navy, namely Marore, Melonguane and Lirung (North Sulawesi bordering the Philippines) as well as Natuna and Anambas (Riau Islands bordering Singapore, Malaysia, Vietnam, China). Bank Indonesia also collaborated with the Maritime Police to bring mobile cash services and socialisation activities to the Thousand Islands just off the north coast of Jakarta.*

*Working with the Indonesian Navy and Maritime Police helped extend the outreach of available rupiah to remote islands and the borderlands of Indonesia, which would be impossible using other forms of regular transportation. Such activities were organised paying due regard to Bank Indonesia's mandate to maintain economic sovereignty, among others, by preserving the existence of the rupiah as a form of legal tender in all regions of the Indonesian archipelago, including remote and borderland areas.*

tugas dan kewajiban untuk menjaga kedaulatan pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah NKRI termasuk di wilayah terdepan NKRI.

Berkat kerjasama dan koordinasi yang erat dengan instansi terkait, kegiatan rintisan distribusi dan pengamanan uang di daerah terpencil dan terdepan NKRI dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Kegiatan dimaksud juga mendapatkan apresiasi sangat positif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

*On the other hand, the Indonesian Navy is responsible for maintaining security and defending sovereignty throughout Indonesia, including the borderlands.*

*Thanks to close cooperation and coordination with the relevant institutions, pilot schemes to secure the distribution of cash are possible in remote and borderland areas. The general public and local governments in affected areas tend to warmly welcome such activities.*



**Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menyediakan kegiatan layanan kas di daerah terpencil dan terdepan NKRI.**

*Bank Indonesia coordinates with the Indonesian Navy to provide cash services in remote and borderland areas.*



## 04

# Dukungan Terhadap Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM

## *Empowering the Real Sector and MSME*

Pentingnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, mendorong Bank Indonesia untuk turut mengembangkan sektor UMKM. Dukungan terhadap pengembangan sektor riil dan UMKM ditujukan kepada pelaku UMKM dan perbankan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha UMKM memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan dan perbankan tertarik untuk membiayai sektor UMKM.

Dari sisi UMKM, peningkatan kelayakan dan kemampuan UMKM menjadi fokus perhatian Bank Indonesia, agar UMKM layak dibiayai oleh perbankan (*bankable*). Untuk itu, kemampuan sektor UMKM dalam mengelola bisnis dan mengembangkan usaha perlu ditingkatkan. Bank Indonesia mengembangkan kluster UMKM di beberapa daerah dan memberikan bantuan teknis pelatihan kepada Konsultan Keuangan Mitra Bank. Aspek pengembangan sektor UMKM lain yang menjadi perhatian adalah permodalan UMKM. Selama ini, permodalan sering menjadi kendala bagi pengembangan sektor UMKM karena rendahnya akses sektor UMKM terhadap pendanaan. Kendala ini tidak terlepas dari keterbatasan jaminan yang dapat disediakan oleh sektor UMKM sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh pendanaan dan faktor persepsi risiko terhadap bisnis UMKM.

Mempertimbangkan kendala keterbatasan jaminan sektor UMKM, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian dan instansi terkait lainnya memfasilitasi pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Dengan keberadaan lembaga tersebut, risiko sebagian pendanaan yang diberikan kepada pelaku UMKM akan ditanggung oleh PPKD dan sebagian lainnya ditanggung oleh pemberi dana. Pada 2011, PPKD yang telah berdiri adalah PT. Jamkrida Jatim di Provinsi Jawa Timur dan

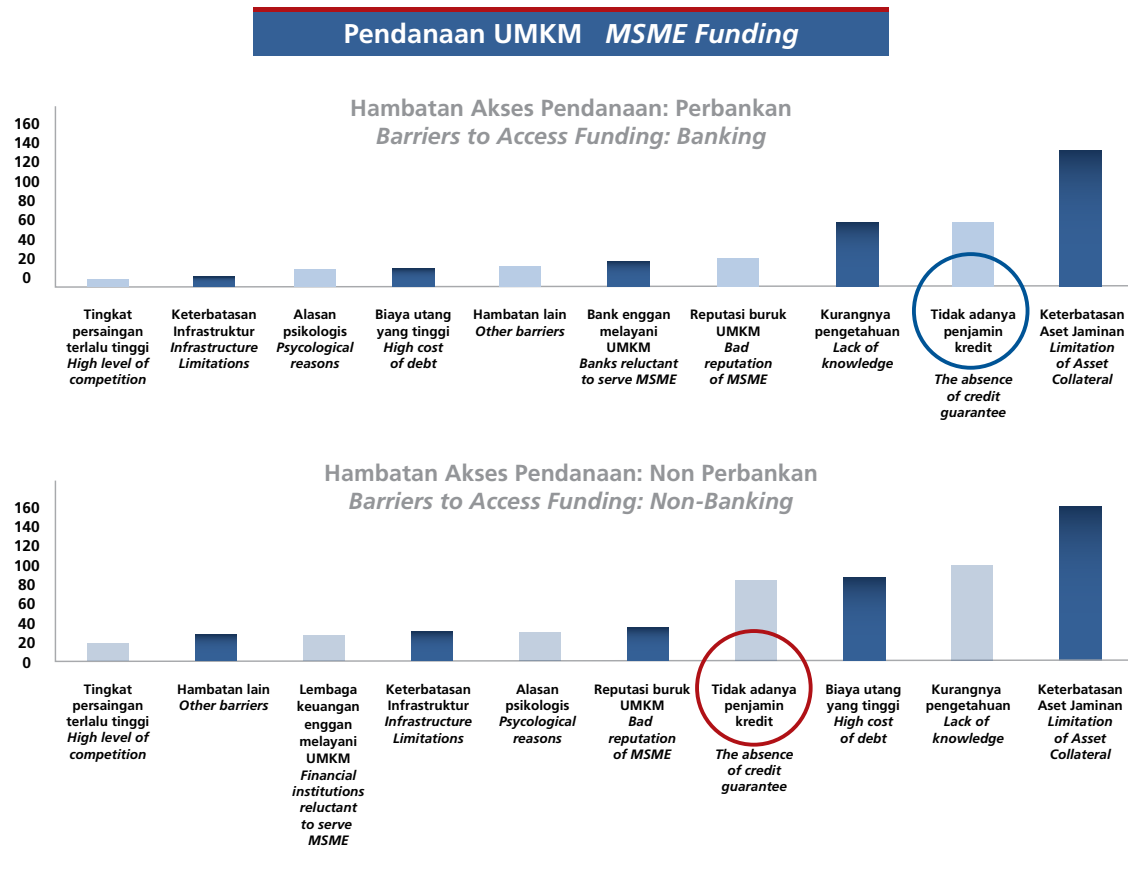
*The importance of micro, small and medium enterprises (MSME) in terms of stimulating economic growth and creating new employment opportunities cannot be understated; therefore, Bank Indonesia continues to develop the MSME sector. MSME and real sector developmental support is targeted at small business owners and the banking community, thereby providing MSME with broader access to banking services and concomitantly piquing the interest of the banking industry to finance the MSME sector.*

*From a MSME standpoint, improving the feasibility and capacity of micro, small and medium enterprises is the overarching focus of Bank Indonesia in order to ensure the bankability of MSME. To this end, the ability of the MSME sector to manage and develop its businesses must be enhanced. In this vein, Bank Indonesia developed MSME clusters in a number of locales and continues to provide technical assistance and training to its corresponding financial consultant partner banks. Another area of concern regarding MSME sector development is capital. Hitherto, capital has often been cited as the number one developmental constraint in the MSME sector due to low MSME access to funding. This constraint is inextricably linked to the lack of collateral available to MSME as one of the key requirements when applying for funding as well as the risk perception associated with MSME.*

*Considering the collateral constraints besieging the MSME sector, Bank Indonesia regularly coordinates with the relevant ministries and agencies to facilitate regional credit guarantee corporations (PPKD). These institutions bear part of the risk inherent with funding the MSME sector, while the providers of funds also bear some of the risk. In 2011, the following PPKD were established PT. Jamkrida Jatim in East Java and PT. Jamkrida Bali Mandara on the island of Bali. These PPKD complement the other two*



Dukungan Terhadap Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM  
Empowering the Real Sector and MSME



PT. Jamkrida Bali Mandara di Provinsi Bali. Keberadaan PPKD tersebut sekaligus melengkapi dua lembaga penjaminan kredit lain yang berskala nasional yakni Jamkrindo dan Askrindo.

Selain mengupayakan akses penjaminan kredit, Bank Indonesia juga mendukung program penyaluran kredit pemerintah kepada UMKM. Kredit pemerintah yang telah disalurkan diantaranya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terkait KUR, sebagai mitra kerja pemerintah dalam Komite Kebijakan KUR, Bank Indonesia turut memfasilitasi program kerja untuk meningkatkan penyaluran KUR terutama pada sektor prioritas (Pertanian, Perikanan,

national credit guarantee corporations, namely Jamkrindo and Askrindo.

In addition to promoting greater access to credit guarantees, Bank Indonesia also advocates government credit allocation programs aimed at the MSME sector. Government credit that has already been allocated includes the Food Security and Energy Credit Scheme (KKPE), the Biofuel Development and Plantation Revitalisation Credit Scheme (KPEN-RP), the Animal Husbandry Credit Scheme for Cows (KUPS) and the Cooperatives Credit Scheme (KUR).

Regarding KUR, as the government's partner on the KUR Policy Committee, Bank Indonesia facilitates work programs to increase the allocation of KUR to priority sectors (agriculture, fisheries, forestry and processing).

Kehutanan dan Pengolahan). Kegiatan dilakukan melalui fasilitasi dan sosialisasi KUR serta turut serta dalam perumusan kebijakan dan ketentuan KUR.

Kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pemberdayaan sektor riil dan UMKM juga diupayakan dari sisi perbankan. Kebijakan dilakukan dengan menerbitkan ketentuan yang memberikan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain dukungan dari sisi ketentuan, Bank Indonesia juga memberikan bantuan teknis pelatihan kepada SDM perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Untuk mengintensifkan interaksi perbankan dengan pelaku UMKM, Bank Indonesia menyelenggarakan bazaar intermediasi. Kebutuhan informasi mengenai UMKM juga dipenuhi melalui layanan informasi UMKM di website Bank Indonesia.

Berbagai kebijakan yang diimplementasikan mendorong perkembangan pendanaan perbankan terhadap sektor UMKM. Realisasi kredit UMKM tahun 2011 mencapai Rp 85,6 triliun dengan pertumbuhan kredit sebesar 21,7% (ytd). Perkembangan tersebut sekaligus membuktikan bahwa sektor UMKM menjadi sektor yang layak untuk dibiayai pengembangannya.

Selanjutnya guna mendukung penerapan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor riil dan UMKM, Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan penelitian di sektor riil dan UMKM (research-based policy). Selama 2011, Bank Indonesia melakukan penelitian yang cukup beragam antara lain identifikasi potensi produk unggulan, tata niaga hingga pola pembiayaan yang efektif.

Activities include facilitating and socialising KUR as well as formulating KUR policy and regulations.

Bank Indonesia's policy to empower the real sector and MSME was also pursued on the banking side. Regulations were promulgated that incentivise the banking industry to allocate credit to the MSME sector paying due regard to prudential principles. In addition to regulatory support, Bank Indonesia also provided technical assistance and training to the human resources of micro finance institutions. Furthermore, Bank Indonesia regularly hosts an intermediation bazaar that aims to intensify interaction between the banking community and MSME players. Moreover, the demand for information on MSME is met through the MSME information service on Bank Indonesia's official website.

Several policies implemented in 2011 encouraged the flow of bank funding to the MSME sector. Credit extended to the MSME sector in 2011 reached Rp 85.6 trillion with solid growth amounting to 21.7% (ytd). Such impressive performance is evidence that financing MSME sector development is becoming more feasible.

In support of applying policy oriented towards real sector and MSME development, Bank Indonesia undertook a number of research activities in the applicable sectors (research-based policy). In 2011, Bank Indonesia conducted a broad range of research, among others to identify potential flagship products, as well as an effective trade system and viable pattern of financing.



# Bantuan Teknis Bank Indonesia dalam Rangka Pengembangan UMKM

## Bank Indonesia's Technical Assistance to Develop MSME

Pemberian Bantuan Teknis oleh Bank Indonesia dilakukan melalui pelatihan, pengembangan kluster dan penyediaan informasi dalam rangka pengembangan UMKM.

1. Pemberian pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan dan kemampuan UMKM, sekaligus meningkatkan keahlian perbankan tentang UMKM. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pelatihan kepada bank dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Pelatihan kepada perbankan khususnya BPR dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM BPR. Sasaran penerima program adalah komisaris, direksi dan pejabat operasional BPR berskala kecil yang memiliki keterbatasan dalam peningkatan kompetensi SDM. Sebagai *pilot project*, pada 2011 pelatihan diikuti oleh 58 BPR di Jabodetabek dengan materi pelatihan Manajemen Risiko Kredit. Program yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil sehingga direncanakan akan diperluas baik jangkauan daerah maupun jumlah BPR peserta. Untuk mengembangkan SDM BPR, Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbarindo dan Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro (LSPLKM) menyempurnakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) BPR yang disesuaikan dengan kebutuhan industri BPR. Pelatihan kepada KKMB dilakukan dalam rangka akselerasi akses UMKM kepada perbankan bekerjasama dengan kementerian teknis terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koperasi dan UKM. Pelatihan yang diberikan adalah materi dasar yang difokuskan pada aspek keuangan dan perbankan. Dalam upaya mendorong eksistensi KKMB tersebut telah diberikan pelatihan kepada sekitar 1.220 peserta yang tersebar hampir di seluruh Kantor Bank Indonesia.

*Technical assistance is provided by Bank Indonesia through training, cluster development and the provision of information in order to develop micro, small and medium enterprises (MSME).*

1. *Training aims to increase the feasibility and capability of MSME, while broadening bank understanding of the MSME sector. Training is provided to banks and the banks' financial consultant partners (KKMB). The banking sector, particularly rural banks, is trained in order to enhance the quality of human resources at rural banks. The target market of such training includes commissioners, directors and operations officers of small rural banks that face limitations in terms of augmenting the competence of their human capital. As a pilot scheme, in 2011 as many as 58 rural banks in the Jabodetabek area participated in credit risk management training. This program was successful enough to be extended to more rural banks in more areas. Bank Indonesia, in conjunction with the rural bank association (Perbarindo) and the Professional Certification Agency for Microfinance Institutions (LSPLKM), refined the National Standards for Work Competence (SKKNI) applicable to rural banks in line with industry requirements in order to develop the human resources of rural banks. Training offered to KKMB is designed to accelerate MSME access to banks working with related technical agencies like the Ministry of Marine Affairs and Fisheries as well as the Ministry of Cooperatives and SME. Training incorporates material focused on banking and financial aspects. In an effort to nurture the existence of KKMB, training has been provided to around 1,220 participants in total at nearly all Bank Indonesia branch offices nationwide.*



2. Pengembangan kluster merupakan salah satu upaya pengembangan sektor riil dan UMKM yang dilakukan dalam bentuk kluster nasional dan kluster daerah. Program kluster nasional, meliputi dua jenis komoditas penyumbang inflasi yaitu komoditas cabai merah dan bawang merah serta komoditas lain yaitu jarak. Adapun program pengembangan kluster daerah meliputi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan. Kegiatan intervensi/bantuan teknis dilakukan melalui sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), fasilitasi peningkatan budidaya melalui pelatihan *Good Agriculture Practices* (GAP), pelaksanaan sekolah lapang, pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT), pameran, bazaar intermediasi perbankan, studi banding, fasilitasi kemitraan dan penguatan kelompok.
3. Penyediaan informasi sebagai sarana publikasi mengenai karakteristik dan potensi UMKM kepada UMKM, perbankan dan *stakeholders* lainnya melalui media elektronik dan bazaar intermediasi. Penyediaan informasi melalui media elektronik telah diintegrasikan melalui *website* Bank Indonesia yaitu Menu INFOUMKM yang telah di-*launching* pada 17 Agustus 2011. Secara garis besar menu Info UMKM mencakup informasi berbagai program kerja sama pemberdayaan ekonomi antara Bank Indonesia dengan instansi pemerintah, perkembangan perkreditan baik berupa laporan maupun statistik kredit UMKM, komoditi unggulan, program kluster/sentra UMKM, profil UMKM yang layak dibiayai oleh perbankan, penelitian sektor riil dan UMKM nasional maupun regional/daerah, kisah sukses pembiayaan para pelaku UMKM serta *hyperlink* dengan *website* kementerian lain terkait dengan pemberdayaan sektor riil dan UMKM.

2. *Cluster development is one effort to evolve the real sector and MSME through the expansion of national and regional clusters. The national cluster program comprises of two types of commodities that contribute to inflation, namely cayenne pepper and shallots as well as other commodities. The regional cluster development program encompasses the manufacturing sector and the agricultural sector, including livestock, forestry and fisheries. Intervention and technical assistance is provided through socialisation activities, Focus Group Discussions (FGD), improved cultivation practices through Good Agriculture Practices (GAP), establishment of farmer field schools, Training of Trainers (ToT), exhibitions, bank intermediation bazaars, benchmarking studies, partnerships and group strengthening.*
3. *Bank Indonesia provides information as a means of publicising the characteristics and potential of MSME to the sector, the banking industry and other stakeholders through electronic media and intermediation bazaars. The provision of information through electronic media is integrated with the official Bank Indonesia website, found by clicking the INFOUMKM Menu, launched on 17th August 2011. In general, clicking the MSME Info menu will access information on a variety of collaborative economic enrichment programs run by Bank Indonesia together with government agencies, credit performance in the form of reports and statistics on MSME credit, leading commodities, MSME cluster programs/centres, profiles of bankable MSME, research on the real sector and MSME at the national and regional levels, testimonials from MSME regarding their experience with financing as well as links to other related ministries mandated to assist the real sector and MSME development.*



## 05

# Manajemen Intern Bank Indonesia

*Bank Indonesia Internal Management*

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia didukung oleh serangkaian langkah dan penguatan kapabilitas internal. Hal tersebut mencakup penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi, efektivitas pengelolaan keuangan internal, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.

*The implementation of Bank Indonesia's tasks is supported by a series of procedures as well as reinforcing internal capabilities. This includes strengthening human resources and the organisation, effective internal financial management, as well as information system development and management.*

## Penguatan SDM dan Organisasi

Kinerja organisasi yang optimal tidak terlepas dari pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif. Pengelolaan tersebut dijalankan melalui sejumlah program kerja yang dirumuskan berdasarkan strategi Bank Indonesia 2011. Terdapat dua program kerja prioritas di bidang organisasi dan SDM, yaitu kelanjutan implementasi Budaya Berbasis Kinerja danantisipasi pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## *Strengthening Human Resources and the Organisation*

*Optimal organisational performance is linked to effective human resources and organisational management achievable through a number of work programs based on Bank Indonesia's strategy for 2011. There are two standout programs in the field of human resources and the organisation, namely continuing the implementation of a performance-based culture as well as anticipating the establishment of the Indonesian Financial Services Authority (FSA).*

Fokus kegiatan utama pada program implementasi Budaya Berbasis Kinerja antara lain penyempurnaan organisasi Bank Indonesia, pelaksanaan pemenuhan SDM, dan pengembangan kompetensi SDM. Sedangkan fokus kegiatan utama pada program anitisipasi pendirian OJK adalah penyiapan *contingency plan* terhadap struktur organisasi dan SDM Perbankan.

*The main focus of the program to implement a performance-based culture includes, among others, refining the Bank Indonesia organisation as well as developing competent human resources. Meanwhile, in preparation for the FSA a contingency plan has been formulated pertaining to organisational structure and human resources in the banking industry.*

Dalam upaya mewujudkan organisasi yang lebih profesional, Bank Indonesia menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi Bank Indonesia di Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia di daerah. Penyempurnaan organisasi dilakukan dengan mengevaluasi kriteria kompetensi perilaku, kompetensi teknis, serta kriteria tugas dan persyaratan jabatan. Selain itu, juga dilakukan penyempurnaan kajian reorientasi Kantor Bank Indonesia, pematangan pedoman penyusunan proses bisnis seluruh level, dan kajian penyempurnaan struktur level atas. Bank

*In an effort to create a more professional organisation, Bank Indonesia harmonises the organisational structure with Bank Indonesia's strategy at the head office and local branch levels. Organisational adjustments are taken after evaluating behavioural and technical competence, as well as the job requirements and duties. Furthermore, a reorientation review for Bank Indonesia local branch offices was conducted, business processes were developed for all levels, and the high level organisation structure*



Manajemen Intern Bank Indonesia  
*Bank Indonesia Internal Management*

Indonesia juga melanjutkan evaluasi terhadap sistem pemeringkatan jabatan.

Untuk melaksanakan tugas yang semakin berkembang, Bank Indonesia melakukan rekrutmen sesuai dengan rencana. Hasil dari rekrutmen tersebut, jumlah pegawai di Bank Indonesia pada akhir 2011 naik 102 orang menjadi 7.692 orang. Proporsi dominan pada pegawai tetap yaitu 5.416 orang, dan selebihnya adalah pegawai tidak tetap sebanyak 2.276 orang.

Selanjutnya, dalam rangka membangun SDM yang kontributif dan kompetitif, Bank Indonesia mengimplementasikan pengelolaan SDM pada berbagai kegiatan, termasuk pengembangan kompetensi pegawai. Berdasarkan hasil asesmen, secara umum SDM Bank Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas.

Dalam rangka pengembangan kompetensi, 872 pegawai telah mengikuti PMK DN (Peningkatan Mutu dan Ketrampilan Dalam Negeri) selama 2011. Pegawai yang mengikuti PMK LN (Peningkatan Mutu dan Ketrampilan Luar Negeri) berjumlah 566 pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai untuk program tertentu dilakukan antara lain melalui program sertifikasi dan pelatihan kompetensi teknis.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai sektor perbankan, Bank Indonesia menyelenggarakan sertifikasi perbankan melalui berbagai tahapan dari *grade 1* s.d.7 yang diikuti oleh 623 pegawai di berbagai level. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sektor moneter, dilakukan sertifikasi moneter *grade* dasar, menengah dan lanjut diikuti oleh 245 pegawai. Sementara di sektor sistem pembayaran, diselenggarakan enam jenis pelatihan kompetensi teknis sistem pembayaran yang diikuti oleh 233 pegawai.

Upaya peningkatan kompetensi juga dilakukan melalui kegiatan *In House Training* (IHT) berskala internasional. Pada 2011, diselenggarakan empat jenis IHT sertifikasi internasional yaitu *Chartered Financial Analyst* (CFA), *Financial Risk Manager* (FRM), *Certified Information System Auditor* (CISA) dan *Association of Certified Anti-Money Laundry Specialist* (ACAMS), yang diikuti oleh 189

*was also reviewed. Bank Indonesia also continued its assessment of the job grading system.*

*Bank Indonesia pushed forward with recruitment as planned in order to continue implementing its increasingly diversified tasks. As a result of the recruitment drive, the total number of employees at Bank Indonesia at year-end 2011 increased by 102 to 7,692. The majority of employees, more specifically 5,416, was made up of permanent staff with the remaining 2,276 consisting of temporary staff.*

*Bank Indonesia implemented human resource management for a number of activities, like competence building, in order to nurture competitive human resources that can contribute positively. Based on the results of the assessments, human resources at Bank Indonesia were deemed sufficiently competent in carrying out their tasks effectively.*

*In 2011 as many as 872 staff members participated in PMK DN (Improving Skills and Quality Domestically) in order to build competence. In contrast, 566 members of staff attended PMK LN (Improving Skills and Quality Abroad). Staff competence building is achieved through certification programs and technical competence training.*

*Bank Indonesia organises banker certification programs with grades from 1 to 7 in order to ameliorate the competence of employees in the banking industry. A total of 623 bankers from various levels attended this program in 2011. Meanwhile, 245 employees attended basic, intermediate and advanced grade monetary certification programs in order to boost the competence of employees in the monetary sphere. In terms of the payment system, six forms of technical competence training were provided to a total of 233 staff members.*

*International scale In-House Training (IHT) is also used to help enhance the competence of human resources. In 2011, four kinds of internationally certified IHT were organised, namely Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM), Certified Information System Auditor (CISA) and Association of Certified Anti-Money Laundry Specialist (ACAMS) with total 189*

pegawai. Selama 2011, 24 pegawai telah memperoleh sertifikasi internasional antara lain FRM, CPA, CISA, CFA, ACAMS dan *Wealth Management*. Sampai dengan akhir 2011, jumlah pegawai Bank Indonesia yang telah bersertifikasi internasional sebanyak 79 pegawai.

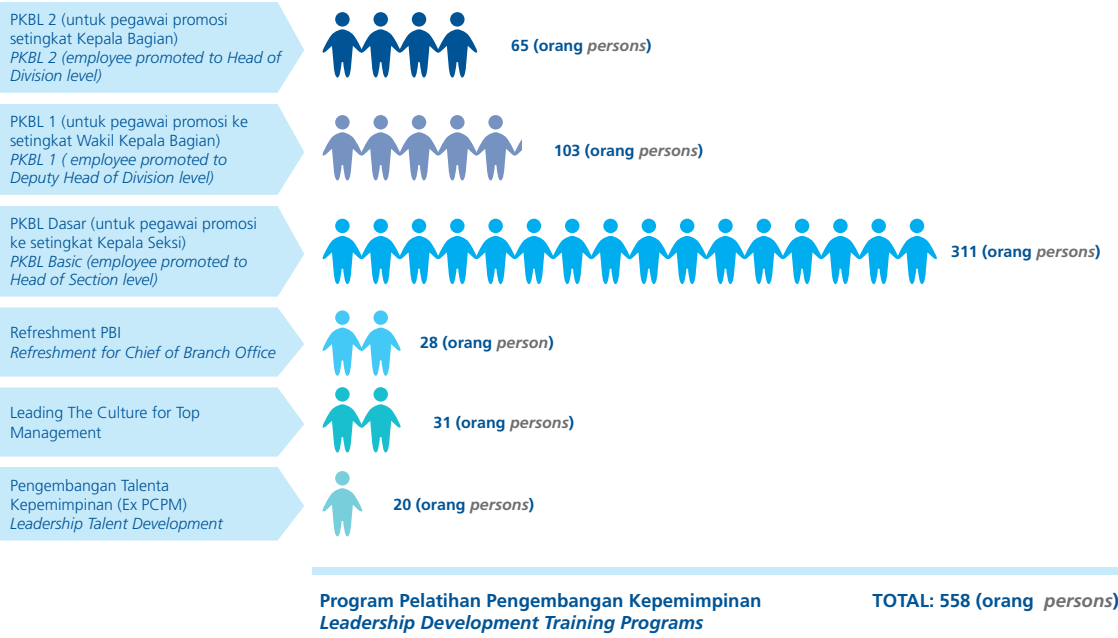
Dalam rangka meningkatkan basis akademis pegawai sesuai kebutuhan dan strategi Bank Indonesia, dilakukan Program Tugas Belajar (PTB). Sepanjang 2011, tiga pegawai selesai menempuh pendidikan S3 dan 58 pegawai selesai menempuh pendidikan S2. Adapun pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar sampai akhir 2011 sebanyak 188 pegawai yaitu 35 pegawai mengambil program S3 dan 153 pegawai mengambil program S2 yang tersebar di delapan negara. Selain itu, terdapat program penugasan kepada 33 pegawai di sembilan institusi dalam dan luar negeri. Sedangkan pada program *attachment*, sebanyak 127 pegawai menjalani program di 15 institusi di luar negeri.

Untuk memperkuat kepemimpinan di Bank Indonesia, pada 2011 telah dilakukan enam jenis pelatihan pengembangan kepemimpinan yang diikuti oleh 558 pegawai. Bagi pejabat Bank Indonesia, diberikan peningkatan keterampilan *coaching* dan *counseling* melalui program *Coaching and Counseling for Leader* (CCL).

*employees participated in IHT. In 2011, 24 graduated to become internationally accredited FRM, CPA, CISA, CFA, ACAMS and Wealth Managers. Up to the end of 2011, as many as 79 Bank Indonesia employees had been internationally certified.*

*A Task Learning Program (PTB) was also arranged in order to broaden the academic base of Bank Indonesia employees in line with Bank Indonesia's strategy and requirement. In 2011, three employees completed their doctoral degrees and 58 completed master's degrees. Meanwhile, 188 employees remained in education at the end of 2011, with 35 employees reading for their doctoral degree and 153 reading for a master's degree, the majority of which were scattered around eight countries. In addition, 33 employees were handed assignments at nine domestic and foreign institutions. The Bank Indonesia attachment program successfully placed 127 employees at 15 institutions overseas.*

*Six forms of leadership training were provided to 558 employees in order to strengthen leadership at Bank Indonesia during the reporting period. Coaching and counselling is provided to all officials at Bank Indonesia through the Coaching and Counselling for Leaders (CCL) program.*





Manajemen Intern Bank Indonesia  
*Bank Indonesia Internal Management*

Dengan adanya program ini diharapkan peserta yang mengikutinya dapat menjadi konselor (*coach*) di satuan kerja masing-masing sehingga diharapkan mereka dapat mengatasi permasalahan kepegawaian.

Dalam kerangka besar mewujudkan Budaya Berbasis Kinerja, kesiapan organisasi menjadi salah satu persyaratan utama. Berbagai upaya penyelarasan organisasi satuan kerja menuju *strategy-focused organisation* selama 2011 dilakukan di seluruh sektor. Di sektor moneter, dilakukan penyempurnaan mekanisme kerja, terutama untuk memperkuat proses perumusan kebijakan Bank Indonesia yang lebih komprehensif dan memperkuat fungsi protokol manajemen krisis. Selain itu juga dilakukan penambahan fungsi *monitoring* dan *law enforcement* dalam rangka implementasi kebijakan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Di sektor perbankan, penguatan organisasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan saat ini dan merespon rencana implementasi OJK. Fokus penyempurnaan organisasi meliputi fungsi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Asistensi Pengawasan Bank Umum (APBU). Di sektor sistem pembayaran, penyalarsan organisasi sebagai respon diterbitkannya Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Transfer Dana. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap fungsi dan mekanisme kerja pengedaran uang agar pelaksanaannya efektif.

Di sektor manajemen intern, penyempurnaan organisasi dilakukan untuk mengintegrasikan fungsi pengelolaan sistem informasi sebagai *strategic support function* dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu juga dilakukan efisiensi unit kerja melalui perampingan organisasi, penyalarsan fungsi dan *refocusing*, terutama di area pengelolaan aset dan museum.

Sementara untuk Kantor Bank Indonesia (KBI) dilakukan dalam rangka reorientasi KBI, khususnya penguatan peran Kantor Koordinator Bank Indonesia (KKBI). Penguatan peran KKBI bertujuan untuk mengintegrasikan tugas-tugas KBI di wilayah kerjanya untuk mendukung pencapaian stabilitas harga, penyehatan perbankan, kelancaran sistem pembayaran, serta efektivitas dan efisiensi manajemen intern. Penguatan juga ditujukan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan upaya-upaya pemberian saran kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di wilayah

*This program is expected to ensure successful participants can counsel (coach) their respective work units, thereby overcoming any employee issues.*

*Organisational readiness is a key requirement in the realisation of a performance-based culture. Several efforts to create a strategy-focused organisation were undertaken in 2011 in all sectors. The work mechanism was adjusted in the monetary sector, primarily to strengthen the comprehensive policymaking process and reinforce the function of crisis management protocol. Furthermore, additional monitoring and law enforcement were put in place in order to implement policy concerning the flow of foreign exchange.*

*In the banking sector, organisational strengthening was directed towards meeting the current needs and responding to the FSA implementation plan. The focus of organisational reform was Financial System Stability (FSS) and Supervision Assistance for Commercial Banks (APBU). In terms of the payment system, the organisation was aligned in response to the introduction of new regulations on currency and the transfer of funds. Accordingly, Bank Indonesia assessed the function and work mechanism for circulating money in order to boost the efficacy of implementation.*

*Referring to internal management, the organisation was refined to integrate the function of information system management as a strategic support function by utilising more efficient human resources. Furthermore, the efficiency of work units was enhanced through organisational streamlining, as well as realigning the function and refocusing, particularly in the area of asset management and the Bank Indonesia museum.*

*Bank Indonesia branch offices (KBI) were also subjected to reorientation, especially in terms of expanding the role played by Bank Indonesia Branch Offices Coordinator (KKBI). This aims to integrate the tasks of KBI in their respective areas of operation, hence supporting price stability, bank soundness, the smooth operation of the payment system, as well as effective and efficient internal management. In addition, such endeavours also sought to integrate and guide efforts to provide recommendations*

kerjanya untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Internal

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2011 *audited* terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp 11.297 miliar. Kondisi tersebut terutama disebabkan peningkatan penerimaan pengelolaan valuta serta berkurangnya kerugian selisih kurs. Dari sisi pengeluaran, terdapat pula kenaikan sebesar Rp 8.528 miliar, terutama disebabkan peningkatan biaya OPT serta biaya Jasa Giro Pemerintah. Meskipun peningkatan penerimaan lebih besar dibandingkan peningkatan pengeluaran, defisit Bank Indonesia meningkat dari Rp 21.159 miliar menjadi Rp 25.149 miliar. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari adanya perhitungan penerimaan Pajak Penghasilan yang menurun dari Rp 6.823 miliar (2010) menjadi Rp 64 miliar (2011).

Beberapa tantangan eksternal yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Bank Indonesia adalah meluasnya risiko utang negara (*sovereign risk*) di kawasan Eropa dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berpotensi mengurangi penerimaan cadangan valuta. Tantangan eksternal tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya operasi moneter Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Dalam mengelola cadangan valuta, Bank Indonesia memperkuat aspek manajemen risiko serta memperluas pasar dan diversifikasi instrumen penempatan cadangan valuta. Strategi pengelolaan cadangan valuta tetap didasarkan pada prinsip keamanan dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memenuhi pendapatan yang optimal. Ekonomi global yang diperkirakan masih diwarnai ketidakpastian mendorong Bank Indonesia untuk menyelesaikan penyusunan *road map* pengelolaan cadangan valuta dalam rangka memperkuat strategi pengelolaan cadangan valuta.

*to local government and other relevant parties in order to catalyse economic growth at the local level.*

Effective Internal Financial Management

An Rp 11,297 billion increase in revenues was posted according to the audited 2011 Bank Indonesia Annual Financial Report, primarily attributable to sound foreign exchange management and fewer exchange rate losses. In terms of spending, an increase of Rp 8,528 billion was reported on the back of higher Open Market Operation costs and higher costs associated with the government account. Despite a larger increase in revenues compared to spending, the Bank Indonesia deficit swelled from Rp 21,159 billion to Rp 25,149 billion. The growing deficit was due to a decline in tax revenues from Rp 6,823 billion (2010) to Rp 64 billion (2011).

*The external challenges confronted by financial management at Bank Indonesia include sovereign debt risk in the euro zone and a slowdown in the global economy with the potential to undermine the accrual of foreign exchange reserves. These challenges also have the potential to exacerbate the cost of monetary operations for Bank Indonesia in terms of maintaining rupiah exchange rate stability.*

*In managing foreign exchange reserves, Bank Indonesia reinforced aspects of risk management, expanded the market and diversified foreign exchange reserve instruments. The management strategy for foreign exchange reserves was still based on principles of security and availability to ensure optimal revenues. Widespread uncertainty in the global economy encouraged Bank Indonesia to complete a road map for foreign exchange reserve management in order to strengthen the forex reserve management strategy.*



## Manajemen Intern Bank Indonesia

### *Bank Indonesia Internal Management*

Dengan strategi pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia berhasil memenuhi semua kewajiban negara dalam valuta asing dan memperoleh penerimaan (*nominal income*) dari pengelolaan cadangan devisa yaitu sebesar USD 2,6 miliar atau ekuivalen Rp 23,3 triliun atau 122,4% dari target yang ditetapkan. Di samping itu, nilai aktiva bersih cadangan devisa juga naik sebesar 4.49% di tahun 2011. Jumlah cadangan devisa meningkat selama 2011, yaitu USD 96.2 miliar pada 2010 menjadi USD 110.12 miliar di 2011 atau meningkat sebesar 14.47% (yoy).

Selanjutnya Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta menjaga sustainabilitas keuangan. Salah satu upaya melalui percepatan pelaksanaan program konsolidasi *Asset* dan *Liability* (ALM) antara Bank Indonesia dan pemerintah. Prinsip utama konsolidasi tersebut adalah tetap memperhatikan kondisi keuangan Bank Indonesia dan pemerintah. Upaya lain yakni mempersiapkan proses menuju implementasi *Performance-Based Budgeting* (PBB) secara bertahap. Pada 2011, implementasi PBB telah mencapai tahap penyelarasan antara proses penyusunan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI), Sasaran Strategis Bank Indonesia, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Kerja dan Produk yang dihasilkan. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan penyempurnaan dalam penetapan *Standard Cost*, serta infrastruktur pendukungnya.

## Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia membutuhkan dukungan sistem informasi yang handal dan prima. Sebagai acuan dalam penyediaan sistem informasi, Bank Indonesia menyusun Bank Indonesia *Information System Strategy Plan* (BI-ISSP) 2011–2014. Penyusunan BI-ISSP tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka (*framework*) *Enterprise Architecture* yang merupakan penggambaran kebutuhan bisnis, yang selanjutnya diterjemahkan dalam arsitektur informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi.

Pengembangan sistem informasi di bidang moneter pada 2011 salah satunya ditujukan untuk mendukung kebijakan monitoring DHE. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan sistem aplikasi pemantauan lalu

*With its forex reserve management strategy, Bank Indonesia successfully fulfilled all national liabilities in foreign exchange and earned a nominal income totalling USD 2.6 billion from forex reserve management; equivalent to Rp 23.3 trillion or 122.4% of the target set. Additionally, the net asset value of foreign exchange reserves increased in 2011 by 4.49%. Total foreign exchange reserves swelled from USD 96.2 billion in 2010 to USD 110.12 billion in 2011, up 14.47% (yoy).*

*Bank Indonesia undertook a number of efforts to raise accountability in financial management as well as maintain financial sustainability. One such effort was to expedite the asset and liability consolidation program between Bank Indonesia and the government. The overarching principle of such consolidation is to consider the financial condition of Bank Indonesia and the government. Furthermore, preparations were made towards the gradual implementation of Performance-Based Budgeting (PBB). In 2011, the implementation of PBB reached a phase of harmonisation between the Bank Indonesia annual budget (ATBI), the strategic goals of Bank Indonesia, key performance indicators (IKU), as well as the subsequent work program and products generated. The next phase includes refining and setting Standard Costs, as well as supporting infrastructure.*

## Information System Management and Development

*Bank Indonesia task implementation requires the support of a reliable information system. Bank Indonesia developed the Bank Indonesia Information System Strategy Plan (BI-ISSP) 2011–2014 as a reference for the provision of an information system. BI-ISSP was formulated using the Enterprise Architecture Framework, which illustrates the needs of the business that are subsequently translated into an information architecture, application architecture and technology architecture.*

*One of the aims of information system development in the monetary sector during 2011 was to support the monitoring of DHE, which was realised in the form of an application system to monitor the flow of foreign*

lintas devisa hasil ekspor (LLDHE) secara *national wide*, sebagai sarana pertukaran data dan informasi antara Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Biro Pusat Statistik (BPS). Dengan adanya sarana tersebut, akan diperoleh data dan informasi LLDHE yang lebih lengkap, seragam dan berkualitas, guna mendukung pelaksanaan pengelolaan lalu lintas devisa. Sarana pertukaran informasi antar lembaga juga diwujudkan melalui dukungan Bank Indonesia dalam menyediakan data dan informasi terkait indikator moneter pada aplikasi *Dashboard* Binagraha yang dikembangkan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan BI-RTGS dan BI-SSSS Next Generation (NG) secara *multiyears* sampai dengan tahun 2013. Pengembangan BI-RTGS dan BI-SSSS NG dilakukan untuk meningkatkan *performance* dan *security* layanan transfer dana. Selain itu, dilakukan penyempurnaan integrasi BI-RTGS dan BI-SSSS dengan menggunakan teknologi terkini. Sedangkan dalam bidang pengawasan perbankan, dilakukan pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) secara *multiyears*. SIP dikembangkan untuk mengakomodasi implementasi Basel II serta meningkatkan kualitas data dan informasi pengawasan perbankan berbasis risiko.

Di bidang manajemen intern, dilakukan pengembangan aplikasi E-Procurement yang bertujuan meningkatkan tata kelola dan transparansi proses pengadaan di Bank Indonesia. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan sistem aplikasi Proyeksi dan Penyusunan Anggaran (PPA) yang merupakan langkah awal penerapan *Performance-Based Budgeting* (PBB). Penyempurnaan PPA bertujuan meningkatkan tata kelola sumber daya dan kualitas pelaporan keuangan Bank Indonesia kepada *stakeholders*, khususnya DPR dan BSBI.

*exchange proceeds from exports (LLDHE) nationwide, as a means of exchanging data and information between Bank Indonesia, the Directorate General for Taxation, the Directorate General for Customs and Excise and BPS-Statistics Indonesia. This forum helps to provide more comprehensive and diversified, high-quality information and data regarding LLDHE to support the management of forex flows. This inter-agency forum to exchange information was realised with the support of Bank Indonesia providing data and information on monetary indicators through the Binagraha Dashboard developed by the Presidential Working Unit for Development Supervision and Control (UKP4).*

*Bank Indonesia is currently developing the next generation multilayer BI-RTGS and BI-SSSS systems through to 2013. BI-RTGS and BI-SSSS development aims to enhance the performance and security of fund transfer services. In addition, the latest technology has been used to help integrate the BI-RTGS and BI-SSSS systems. Meanwhile, a multiyear Banking Information System (BIS) has been developed to buttress bank oversight. BIS was developed to accommodate Basel II implementation as well as raise the quality of data and information pertaining to risk-based bank supervision.*

*Regarding internal management, an E-Procurement application was developed to enhance good governance and transparency in the procurement process at Bank Indonesia. In addition, the budgeting projection system was refined to include performance-based budgeting in the preliminary phase. Refining the budgeting procedure aims to raise the quality of resource management and financial reporting by Bank Indonesia to its stakeholders, in particular the House of Representatives and the Supervision Body.*



## 06

# Kerjasama Internasional

## *International Cooperation*

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai kerjasama internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral. Melalui berbagai kerjasama tersebut, dibahas upaya-upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Sebagai anggota berbagai forum kerjasama internasional, Bank Indonesia berhasil menorehkan beberapa pencapaian penting pada 2011, termasuk diterimanya beberapa rekomendasi yang diusulkan.

Di forum bilateral dengan Jepang, rekomendasi Bank Indonesia untuk memperpanjang kerjasama *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) telah diterima. Perjanjian perpanjangan BSA tersebut telah ditandatangani pada Agustus 2011 senilai USD12 miliar untuk periode dua tahun. BSA merupakan fasilitas keuangan yang disediakan Pemerintah Jepang dalam US dolar untuk membantu mengatasi kesulitan neraca pembayaran Indonesia.

Selanjutnya, melalui pertemuan bilateral antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tercapai kesepakatan untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama pengawasan perbankan lintas batas (*cross border banking supervision*). Pertemuan tersebut juga sepakat untuk menjajagi kemungkinan kerjasama penyediaan dukungan likuiditas bagi perbankan di kedua negara.

Dalam forum regional, Indonesia memperoleh giliran sebagai ketua ASEAN selama 2011. Sejalan dengan peran tersebut, dalam forum kerjasama antar bank sentral di ASEAN, Bank Indonesia juga berperan sebagai ketua. Forum kerjasama bank sentral ASEAN tersebut meliputi ASEAN Central Bank Governors' Meeting (ACGM) dan ASEAN Central Bank Deputy Governors' Meeting (ACDM), yang diselenggarakan pada awal April 2011. Dalam fungsinya sebagai ketua, Bank Indonesia mengkoordinasikan arah kerjasama keuangan ASEAN selama 2011 dan memfasilitasi pertemuan antar bank

*As part of its mandate, Bank Indonesia actively participates in international, regional and multilateral cooperation. Through this cooperation, efforts are discussed on how to maintain economic and financial system stability. As a member of several international cooperation fora, Bank Indonesia chalked up a number of important achievements in 2011, and received an array of proposed recommendations.*

*At bilateral forum with Japan, Bank Indonesia recommended to extend the existing Bilateral Swap Arrangement (BSA). The agreement to extend the BSA was signed in August 2011 and valued at USD12 billion over two years. The BSA is a financial facility offered by the Japanese Government denominated in US dollars to help overcome difficulties in the Indonesian balance of payments.*

*In addition, through a bilateral meeting between Bank Indonesia and Bank Negara Malaysia, agreement was reached to expand and strengthen cross-border banking supervision. At this meeting, it was also agreed to assess the possibility of joint liquidity support for banks in the two countries.*

*At regional fora, it was Indonesia's rotation to chair ASEAN in 2011. In line with this role, Bank Indonesia also chaired joint fora among central banks in ASEAN, including the ASEAN Central Bank Governors' Meeting (ACGM) and ASEAN Central Bank Deputy Governors' Meeting (ACDM), hosted at the beginning of April 2011. In its function as chair, Bank Indonesia coordinated the direction of financial cooperation among ASEAN member nations for 2011 and facilitated meetings between the central banks. In addition, the governor of Bank Indonesia together with the governors of the central banks of*



## Kerjasama Internasional International Cooperation

**Pertemuan bilateral antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama pengawasan perbankan lintas batas.**

*Bilateral meeting between Bank Indonesia and Bank Negara Malaysia to expand and strengthen cross-border banking supervision.*



sentral. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia bersama Gubernur Bank Sentral Kamboja dan Vietnam berperan membentuk Troika Gubernur yang mewakili para gubernur bank sentral ASEAN dalam ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM). Kamboja merupakan ketua ASEAN di 2010 sedangkan Vietnam di 2012.

Bank Indonesia juga berperan aktif sebagai *Co-Chair* dari ASEAN Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS). WC-PSS bertugas menyiapkan sistem pembayaran dan setelmen negara-negara ASEAN dalam menyongsong MEA 2015. Kegiatan WC-PSS mencakup penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan baik untuk pengembangan maupun koordinasi dalam rangka harmonisasi sistem pembayaran dan setelmen di ASEAN. Selama 2011 WC-PSS telah menghasilkan kajian pada lima bidang yaitu (i) pengembangan/penyelenggaraan *cross border trade settlement*, (ii) *cross border money remittance*, (iii) *cross border retail payment*, (iv) *cross border capital market settlement*, dan (v) *standardization in payment & settlement systems*.

Dalam forum kerjasama keuangan antar-negara di kawasan ASEAN+3, Bank Indonesia bersama Jepang menjadi *Co-Chair*. Pada forum ini dilakukan pembahasan Chiang-Mai Initiative Multilateralization (CMIM), yang merupakan *financial safety net* bagi negara-negara ASEAN+3. Di tahun 2011, Bank Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN+3 lainnya juga berhasil menyusun panduan operasional implementasi CMIM. Selain itu juga berhasil dioperasionalkan ASEAN+3

*Cambodia and Vietnam formed Governor Troika to represent ASEAN central bank governors at the ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM). Cambodia was the chair of ASEAN in 2010, while Vietnam will assume the chairmanship in 2012.*

*Bank Indonesia also played an active role as co-chair of the ASEAN Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS). WC-PSS is tasked with preparing the payment and settlement system in ASEAN member countries ahead of the inauguration of the ASEAN Economic Community in 2015. WC-PSS activity covers policy research and recommendations for development and coordination in order to synergise the payment and settlement system in ASEAN. In 2011, WC-PSS produced five working papers on the following subjects: (i) developing/implementing cross-border trade settlement; (ii) cross-border money remittance; (iii) cross-border retail payment; (iv) cross-border capital market settlement; and (v) standardization in payment & settlement systems.*

*Bank Indonesia co-chaired a joint financial forum with Japan for countries in ASEAN+3. Chiang-Mai Initiative Multilateralization (CMIM) was discussed at the forum, which constitutes a financial safety net for ASEAN+3 member countries. In 2011, Bank Indonesia in conjunction with other ASEAN+3 member countries successfully compiled a set of operational guidelines for the implementation of CMIM. Furthermore, the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) was*

Macroeconomic Research Office (AMRO) yang berfungsi melakukan *surveillance* kondisi perekonomian ASEAN+3. Proses operasionalisasi tersebut mencakup penyiapan kantor, pemenuhan sumber daya manusia, dan penyusunan anggaran.

Lebih lanjut, melalui The South East Asian Central Banks Network (SEACEN), Bank Indonesia mendukung implementasi *pilot project* Colleges of Supervisors (COS) pada skala regional, yang disepakati pada 2010. Pembentukan COS bertujuan memfasilitasi komunikasi antar pengawas bank dalam rangka mengantisipasi risiko sistemik pada bank yang aktif beroperasi dan dominan di kawasan SEACEN. Disamping itu, seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi bank sentral kawasan, misalnya terkait *capital flow*, Bank Indonesia juga aktif dalam forum *SEACEN Expert Group on Capital Flows*. Kegiatan-kegiatan dalam forum tersebut sangat bermanfaat dalam mendukung upaya *surveillance* kawasan melalui perbaikan kualitas dan pertukaran informasi *capital flow* antar negara anggota.

Guna mengantisipasi dampak krisis keuangan global, Bank Indonesia bersama anggota EMEAP (Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks) lainnya telah melakukan berbagai inisiatif, di antaranya melalui penguatan *Crisis Management and Resolution Framework* (CMRF). Upaya penguatan ini dilakukan melalui penyempurnaan *surveillance*, pertukaran informasi, dan penerapan manajemen risiko yang lebih terstruktur. Selain itu, partisipasi aktif Bank Indonesia juga diwujudkan dengan menjadi *Deputy Chair* pada EMEAP Working Group on Payments and Settlement System (WG-PSS). Dalam kapasitasnya sebagai *Deputy Chair*, Bank Indonesia terlibat dalam pengembangan dan pengawasan sistem pembayaran di kawasan, yang pada gilirannya mendukung kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas keuangan di kawasan EMEAP.

Di tingkat multilateral, khususnya pada forum G20, Bank Indonesia terlibat dalam pembahasan di jalur finansial bersama Kementerian Keuangan. Isu yang dibahas meliputi (i) *framework for strong sustainable and balanced growth*; (ii) *international monetary sector reforms*; (iii) *financial sector reforms*; (iv) *commodity market*; dan (v) *global partnership for financial inclusion*. Bank

*also operationalized to conduct surveillance on economic conditions in ASEAN+3. The operationalization process included preparing office space, providing human resources and agreeing a budget.*

*Through The South East Asian Central Banks Network (SEACEN), Bank Indonesia supported the implementation of the Colleges of Supervisors (COS) pilot project on a regional scale as agreed in 2010. COS aim to facilitate communication among bank supervisors in order to anticipate systemic risk at banks that actively operate in and dominate the SEACEN jurisdiction. Additionally, in line with the increasing severity of the challenges faced by central banks in the region, for instance relating to capital flows, Bank Indonesia is also actively involved with the SEACEN Expert Group on Capital Flows. The activities associated with this forum are extremely beneficial to regional surveillance through improvements in quality and information exchange regarding capital flows between member countries.*

*In anticipation of fallout from the global financial crisis, Bank Indonesia together with the other members of EMEAP (Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks) initiated, among others, the Crisis Management and Resolution Framework (CMRF). This was achieved through improved surveillance, information exchange and more structured risk management. Furthermore, Bank Indonesia actively participated as Deputy Chair for the EMEAP Working Group on Payments and Settlement System (WG-PSS). In its capacity as Deputy Chair, Bank Indonesia was involved in developing and supervising payment systems in the region, which in turn helped ensure the smooth operation of payment systems and financial stability in the EMEAP region.*

*Multilaterally, specifically the G20 forum, Bank Indonesia is involved in discussions on the financial channel together with the Ministry of Finance. The issues discussed include (i) a framework for strong, sustainable and balanced growth; (ii) international monetary sector reforms; (iii) financial sector reforms; (iv) the commodity market; and (v) global partnerships for financial*



## Kerjasama Internasional *International Cooperation*

Indonesia terlibat aktif menyampaikan berbagai usulan dalam forum G20 untuk kemudian disepakati. Usulan tersebut diantaranya (i) perlunya mempertimbangkan kondisi spesifik setiap negara dalam setiap asesmen kebijakan suatu negara, (ii) perlunya kesetaraan antara negara maju dan berkembang terkait kontribusi untuk mengurangi *global imbalance*, dan (iii) penyampaian *non-paper* bersama China, Jepang, Korea dan Singapura, mengenai CMIM sebagai salah satu model kolaborasi IMF dengan Regional Financial Arrangement dalam rangka penguatan Global Financial Safety Net. Bank Indonesia juga mengusulkan pada Study Group Commodity, untuk mendalami dampak dari kebijakan moneter yang terlalu akomodatif di negara maju. Kebijakan yang terlalu akomodatif ini diyakini sebagai salah satu penyebab peningkatan volatilitas harga komoditas. Usulan ini diterima sebagai satu sub-bab khusus untuk mendalami hubungan antar harga komoditas dan kebijakan moneter yang akomodatif.

Sebagai anggota Basel Committee For Banking Supervision (BCBS), selama tahun 2011 Bank Indonesia juga berperan dalam penyusunan berbagai kerangka pengaturan bank secara global. Kerangka pengaturan meliputi (i) peningkatan kualitas Tier 1 *capital* salah satunya melalui persyaratan *predominant common equity* pada Tier 1 *capital*, simplifikasi Tier 2 *capital* serta penghapusan modal Tier 3 dan modal inovatif Tier 1; (ii) mitigasi *pro cyclical* melalui usulan *countercyclical capital framework* meliputi usulan penerapan *forward looking provisioning*, persyaratan *capital conservation buffer* dan *countercyclical capital buffer*; (iii) penerapan *leverage ratio* sebagai ukuran untuk membatasi pembentukan *leverage* di sektor perbankan; (iv) peningkatan persyaratan permodalan untuk exposure *counterparty credit risk* (CCR); (v) penerapan *global liquidity standards* yang akan mensyaratkan penerapan dua rasio likuiditas *standard* yaitu *liquidity coverage ratio* (untuk melihat stabilitas likuiditas jangka pendek) dan *net stable funding ratio* (untuk melihat stabilitas likuiditas jangka panjang) serta usulan penerapan empat *liquidity monitoring tools*; serta (vi) revisi *framework* Basel II untuk pilar 1, 2 dan 3 yang terutama terkait dengan perlakuan dan persyaratan modal dan bobot risiko yang lebih tinggi untuk transaksi *trading book*, derivatif dan sekuritisasi.

*inclusion. Bank Indonesia actively proposed a number of recommendations at the G20 forum for future approval. The proposals submitted include, among others: (i) the need to consider the specific conditions of each respective country in each policy assessment; (ii) the need for equality between developed and developing countries relating to their contributions to reducing global imbalances; and (iii) delivering non-paper in conjunction with China, Japan, Korea and Singapore, regarding CMIM as an IMF collaboration model with Regional Financial Arrangements in order to strengthen the Global Financial Safety Net. Bank Indonesia also proposed a Study Group Commodity to explore the impact of overly accommodative monetary policy in advanced countries. Excessively accommodative monetary policy is believed to be one reason for the escalation in commodity price volatility. These proposals were accepted as a sub-chapter in the case of investigating the relationship between commodity prices and accommodative monetary policy.*

*As a member of the Basel Committee For Banking Supervision (BCBS), Bank Indonesia played an active role in 2011 formulating a global regulatory framework, including the following: (i) raising the quality of Tier 1 capital, among others, through predominant common equity requirements for Tier 1 capital, simplifying Tier 2 capital and eradicating Tier 3 capital and Tier 1 innovative capital; (ii) mitigating pro cyclical by compiling a countercyclical capital framework involving the application of forward-looking provisioning, capital conservation buffer requirements and a countercyclical capital buffer; (iii) applying a leverage ratio as a measure to limit leverage in the banking sector; (iv) improving capital requirements for exposure to counterparty credit risk (CCR); (v) applying global liquidity standards that require the application of two liquidity ratio standards, namely the liquidity coverage ratio (to monitor short-term liquidity stability) and the net stable funding ratio (to monitor long-term liquidity stability) as well as the proposed implementation of four liquidity monitoring tools; and (vi) revising the Basel II framework for pillars 1, 2 and 3, primarily relating to the implementation of capital requirements and a higher risk weighting for trading book transactions, derivatives and securitisation.*

Di forum IMF, isu-isu yang dibahas antara lain perkembangan ekonomi dan stabilitas keuangan global, *international monetary system*, *surveillance* dan *capital flow*. Untuk mencegah krisis ekonomi global yang semakin dalam, negara anggota IMF termasuk Indonesia mengusulkan penguatan *surveillance* IMF. Bank Indonesia juga mendorong fleksibilitas bagi otoritas kebijakan untuk mengendalikan aliran modal yang mengalir deras ke negara berkembang.

Sementara itu, pertemuan BIS selama tahun 2011 membahas isu-isu global antara lain (i) peningkatan aset-aset bank sentral di Asia dan implikasinya terhadap ekonomi global, (ii) peran bank sentral dalam pasar hutang pemerintah yang semakin kompleks, serta (iii) dampak *sovereign risk* terhadap pendanaan perbankan. Bank Indonesia berkontribusi selama pembahasan isu-isu strategis terkait risiko suku bunga dalam sistem keuangan, kerangka kebijakan makroprudensial, *exit strategy* dari kebijakan mengatasi krisis, serta peran bank sentral ke depan.

Selain berpartisipasi dalam forum kelembagaan internasional, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan institusi dan para ahli ekonomi dunia dalam penyelenggaraan seminar internasional. Salah satu seminar internasional tersebut adalah mengenai Keuangan Syariah pada 20-21 April 2011 dengan tema “*Can the Indonesia Islamic Finance Sustain The High Growth Regime Up to 2015 and Beyond?*” Seminar tersebut antara lain membahas peran perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan stabilitas keuangan, peran pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan perbankan syariah, dan harmonisasi perbedaan pandangan aspek syariah di berbagai negara.

Bank Indonesia juga menyelenggarakan seminar bekerja sama dengan OECD pada 27 Juli 2011 yang bertemakan “*BI-OECD Regional Seminar on Financial Literacy Towards a National Strategy on Financial Education*”. Seminar dimaksudkan sebagai upaya melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga *financial inclusion* dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Selain seminar internasional, Bank Indonesia juga menyelenggarakan “*D-8 Islamic Microfinance Workshop*” pada tanggal 11 November 2011, yang sekaligus

*At the IMF, the issues discussed included economic development and global financial stability, the international monetary system, surveillance and capital flows. IMF member countries, including Indonesia, encouraged the IMF to strengthen surveillance in order to prevent a further deepening of the global economic crisis. Bank Indonesia also endorsed monetary authority flexibility in the management of capital flows that inundated developing countries.*

*BIS meetings in 2011 discussed global issues, including (i) expanding the assets of central banks in Asia and its implications on the global economy; (ii) the central banks’ role on the increasingly complex government debt market; and (iii) the impact of sovereign risk on bank funding. Bank Indonesia contributed to the discussions on issues relating to interest rate risk in the financial system, a macroprudential policy framework, an exit strategy from the policies to overcome the crisis and the role of central banks looking ahead.*

*In addition to participating at international forums, Bank Indonesia also cooperated with global agencies and economists to host international seminars. One such international seminar concerning Islamic Finance was held on 20-21 April 2011 with the theme “Can the Indonesia Islamic Finance Sustain the High Growth Regime Up to 2015 and Beyond?” This seminar discussed the role of Islamic banks in terms of supporting economic development and financial stability, the role of the government and Bank Indonesia in supporting the development of Islamic banks as well as harmonising the differing views on Islamic finance in several countries.*

*Bank Indonesia hosted a seminar in conjunction with OECD on 27th July 2011, entitled “BI-OECD Regional Seminar on Financial Literacy Towards a National Strategy on Financial Education”. The seminar was held in order to educate the general public, thereby ensuring that financial inclusion permeates all strata of Indonesian society.*

*In addition to international seminars, Bank Indonesia also hosted the “D-8 Islamic Microfinance Workshop” on 11th November 2011, representing the “The 2nd D-8*



Kerjasama Internasional  
International Cooperation

merupakan “*The 2nd D-8 Working Group on The Development of Islamic Financial Services Industry*”. Acara tersebut diselenggarakan melalui kerjasama Bank Indonesia dengan *Developing Eighth (D-8) Countries*, Kementerian Luar Negeri dan BRI Syariah. Workshop tersebut antara lain membahas beberapa isu terkait kebijakan, konsep dan praktek Islamic *microfinance* yang ada di Indonesia maupun dari negara-negara *Developing Eight* lainnya.

Seminar internasional lain yang diselenggarakan pada 9 Desember 2011 berjudul “*The Intensifying Global Economic Turmoil: How Should Emerging Economies Respond?*” Dalam seminar tersebut didiskusikan antara lain mengenai perkembangan dan tantangan ekonomi global 2011 dan outlook 2012, serta kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dan bank sentral di negara berkembang (*emerging market*) dalam merespon kondisi ekonomi global saat ini.

*Workshop* lain yang diselenggarakan yaitu *workshop “Managing Regional and Global Governance (MRGG) in Asia: Opportunities and Challenges for the ASEAN Economic Community”*, pada 3 Oktober 2011. *Workshop* tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the German Development Institute/ Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), dan DEFINIT.

Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar berskala internasional dengan fokus pada pengembangan kompetensi. Informasi selengkapnya ada pada tabel berikut.

*Working Group on The Development of Islamic Financial Services Industry”. This program was arranged through cooperation between Bank Indonesia and Developing Eight (D-8) Countries, the Ministry of Foreign Affairs and the Islamic arm of Bank Rakyat Indonesia (BRI). A number of pertinent issues were discussed at the workshop, including policy as well as the concept and practice of Islamic microfinance in Indonesia and other Developing Eight member countries.*

*Another international seminar was hosted on 9th December 2011 entitled “The Intensifying Global Economic Turmoil: How Should Emerging Economies Respond?” The issues discussed included development, the global economic challenges for 2011 as well as the outlook for 2012, and policy required by governments and central banks in emerging market countries in response to current global economic conditions.*

*A workshop on “Managing Regional and Global Governance (MRGG) in Asia: Opportunities and Challenges for the ASEAN Economic Community” was also hosted on 3rd October 2011. This workshop was the result of collaboration between Bank Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) and DEFINIT.*

*Bank Indonesia also hosted an array of international seminars focusing on developing competence. A comprehensive list is presented in the following table.*

SEMINAR INTERNATIONAL 2011    *INTERNASIONAL SEMINARS 2011*

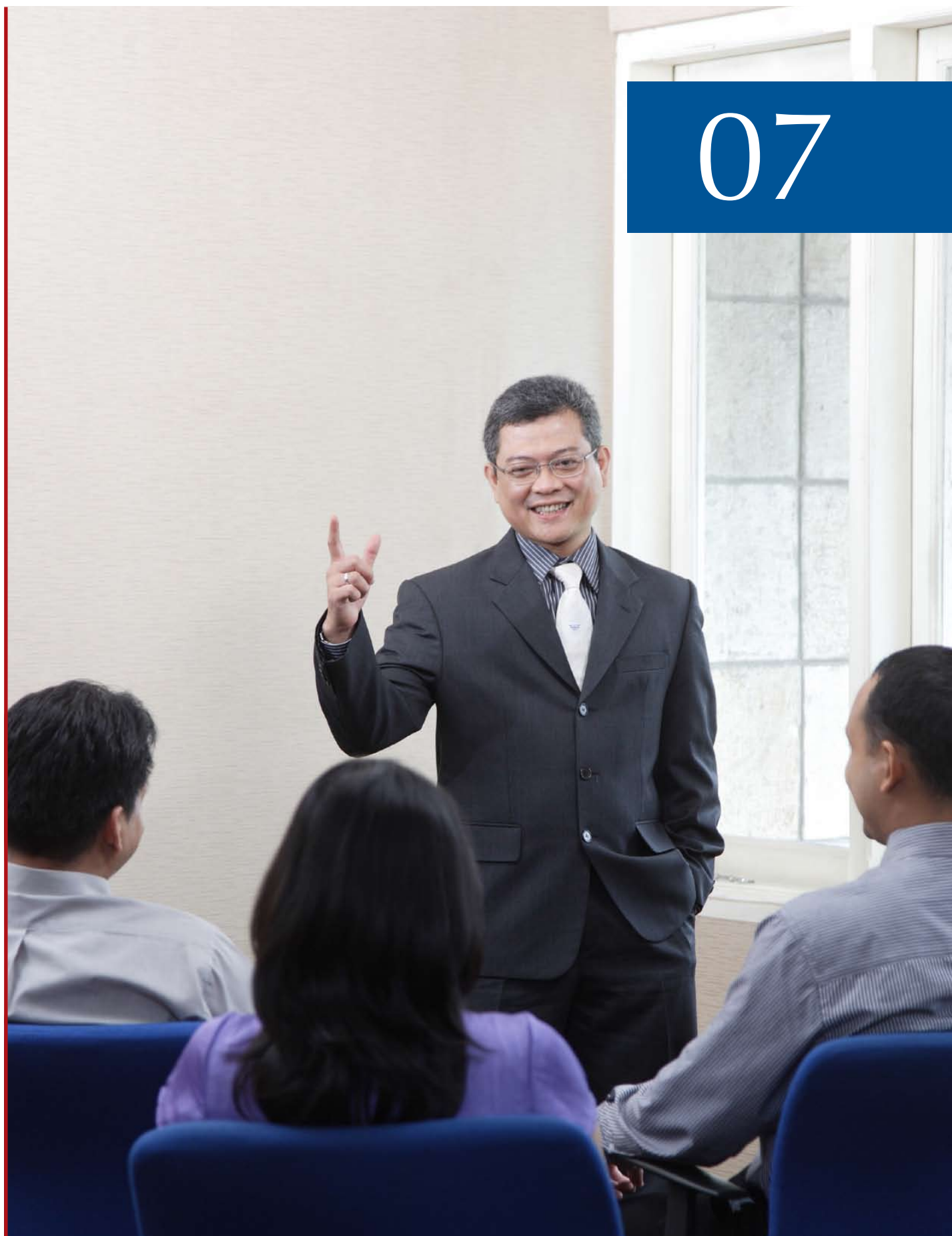
No	Seminar	Tgl. Pelaksanaan Date	Tempat Venue	Jumlah Peserta Number of Participants	
				BI	Overseas
1	BI-SEACEN Research Workshop on Policy Responses & Adjustment in the Course of Exchange Rate Appreciation	18-19 Juli	Bali	5	15
2	BI-SEACEN Research Workshop on Policy Responses & Adjustment in the Course of Exchange Rate Appreciation	19-22 Juli	Bali	27	7
3	Deutsche Bundesbank on Banking Supervision & Financial Stability, Bank Rating & Stress Testing	26-28 Juli	Bali	34	0
4	10th Meeting of SEACEN-CPSS Advanced Course On Payment and Settlement System for Emerging Economies	16-20 Oktober	Jakarta	5	36
5	10th Meeting of SEACEN Director of Payment and Settlement System and SEACEN Conference of DOPSS of Asia Pasific Central Banks	20-22 Oktober	Jakarta	2	37
6	BI-SEACEN Workshop in Simulation of Payment and Settlement Systems	20-22 Oktober	Jakarta	3	15
7	Seminar on Monetary Operations, Financial Stability, Crisis Management, Payment & Securities Settlement Systems	1-3 November	Bali	32	0
8	BI-APEC FRTI Seminar on Consolidated Supervision & Risk Integration	21-25 November	Bali	7	28



## 07

# Komunikasi dan Edukasi Publik

## Communication and Public Education



Untuk mendukung kredibilitas kebijakan, Bank Indonesia memperkuat penyusunan sejumlah kebijakan dengan strategi komunikasi yang baik. Strategi komunikasi tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman, persepsi, dan perilaku *stakeholders* terhadap kebijakan Bank Indonesia. Dua di antara sejumlah komunikasi aktif yang dilakukan selama 2011 adalah komunikasi mengenai bauran kebijakan (*policy mix*) dan mengenai peran bank sentral dalam mengantisipasi risiko sistemik yang semuanya diharapkan dapat menjaga keyakinan publik.

Bank Indonesia menjalankan strategi tersebut dengan mengelompokkan masyarakat ke dalam berbagai segmen yang masing-masing membutuhkan informasi, saluran, maupun cara berkomunikasi yang berbeda. Sejauh ini Bank Indonesia memiliki segmen kelompok *stakeholders* utama, antara lain pemerintah, parlemen, perbankan, wartawan, pengamat, dan investor/analisis pasar yang membutuhkan komunikasi yang spesifik sekaligus dalam rangka koordinasi. Sebagaimana bank sentral lainnya, Bank Indonesia berkomunikasi dengan lebih menekankan pada pendekatan dialogis.

Pendekatan komunikasi dan koordinasi tersebut dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, dan sosialisasi secara formal. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas), Forum Penghubung Antar Lembaga Negara (8 lembaga negara dan Sekretariat Negara), serta Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan pemerintah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi informasi program dan pencapaian kinerja. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan komunikasi intensif dengan para pengamat sehingga mereka memiliki pemahaman yang mumpuni dalam berperan sebagai *opinion leader* publik. Selanjutnya, agar pemberitaan di berbagai media mendukung edukasi kebijakan, interaksi dengan wartawan diperbesar. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas kesempatan wartawan untuk melakukan

*Bank Indonesia reinforced its policymaking process with a solid communications strategy to support policy credibility. The communications strategy is directed towards building understanding as well as guiding the perception and behaviour of stakeholders concerning Bank Indonesia policy. Two salient aspects of the active communications undertaken in 2011 include socialising the policy mix and the role of the central bank in anticipating systemic risk, which is expected to bolster public confidence.*

*Bank Indonesia followed this strategy by categorising the general public into different segments that respectively require different information, channels and methods of communication. Hitherto, Bank Indonesia's main stakeholders include the government, parliament, the banking industry, journalists, observers and investors/ market analysts that require specific, yet coordinated, communications. Similar to other central banks, Bank Indonesia emphasises dialogue in its communications strategy.*

*This coordination and communications approach is applied through formal coordinated meetings, discussions, seminars and socialisation activities under the auspices of Bakohumas (the government's coordinating body for public relations), the Inter-Agency Liaison Forum (eight state agencies and the State Secretary), as well as hearings with the government and the House of Representatives. These activities aim to share information on program performance and achievements. Furthermore, Bank Indonesia continued intensive communication with observers, thereby ensuring deep and qualified understanding of their role as leaders of public opinion. In addition, interaction with journalists was broadened to help guarantee that the notices published in various media actually supported the education policy. These efforts were undertaken by extending the opportunities for*

## Komunikasi dan Edukasi Publik

### *Communications and Public Education*

liputan dan mengikuti berbagai program komunikasi reguler Bank Indonesia dengan media.

Strategi komunikasi oleh Bank Indonesia kepada masyarakat umum dilakukan dengan menambahkan dan menyempurnakan berbagai informasi dan menu baru di situs Bank Indonesia. Penyempurnaan tersebut meliputi pembuatan *minisite* Informasi dan Edukasi Konsumen, Info UMKM, Jakarta *InterBank Offered Rate* (Jibor), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), dan Daftar Lembaga Pemeringkat Diakui Bank Indonesia. Selain itu, dilakukan pula penyempurnaan terhadap Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (Sekda). Di samping itu, Bank Indonesia ikut memanfaatkan jejaring sosial Twitter dalam rangka memberi informasi lebih dekat dan lebih cepat kepada publik.

Komunikasi kepada masyarakat umum juga dilakukan melalui pemberitaan di media cetak dan media *online*, berbagai *talkshow* di televisi dan radio, seminar dan diskusi publik untuk menyampaikan pendalaman kebijakan dan isu lainnya, serta keikutsertaan pada Pekan Raya Jakarta. Laporan Tahunan Bank Indonesia, Laporan Perekonomian, *leaflet*, *newsletter* Gerai Info, dan publikasi lainnya juga menjadi media yang bisa menjadi referensi masyarakat. Komunikasi yang bercirikan keterbukaan menjadi semakin penting terutama sejak diimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai bagian dari kegiatan komunikasi publik, Bank Indonesia melakukan program edukasi, salah satunya melakukan program kunjungan masyarakat ke Bank Indonesia. Selama 2011, Bank Indonesia menerima kunjungan 89 sekolah/perguruan tinggi/instansi baik dari dalam maupun luar negeri ke Kantor Pusat. Dalam program kunjungan tersebut, Bank Indonesia melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang moneter, perbankan maupun sistem pembayaran. Program yang dilaksanakan setiap minggu pada Selasa dan Kamis tersebut dihadiri rata-rata oleh 100 orang/kunjungan. Masyarakat dapat mengakses prosedur dan tata cara kunjungan ke Bank Indonesia melalui situs Bank Indonesia.

*journalists to follow and cover a variety of Bank Indonesia communication programs.*

*The Bank Indonesia communications strategy to the general public involves adding and refining the information and new menus posted on Bank Indonesia's official website. The refinements have so far included developing a minisite hosting consumer information and education, MSME information, the Jakarta InterBank Offered Rate (Jibor), prime lending rates (SBDK) and a list of rating agencies approved by Bank Indonesia. Moreover, revisions were also made to Indonesian Economic Monetary Statistics (SEKI) and Regional Economic Monetary Statistics (Sekda). Additionally, Bank Indonesia uses social media site Twitter to quickly provide snippets of pertinent information to the general public.*

*Public communication is also achieved through notices published in the print and online media, through talk shows on television and radio as well as public seminars and discussions to convey policy deepening and other issues, as well as participation at the Jakarta Fair. Annual reports, economic reports, leaflets, newsletters, information outlets and other publications are all forms of media that can be used as a reference by the general public. Open and transparent communication is becoming increasingly important, especially since the introduction of public disclosure laws.*

*In its public communication activity, Bank Indonesia implements an education program, a part of which includes public visits to Bank Indonesia. In 2011, Bank Indonesia received visits from 89 international and domestic schools/colleges/institutions at head office. During such visits, Bank Indonesia conducts socialisation and educational activities regarding monetary, banking and payment system policy and task implementation. This program is conducted weekly on Tuesdays and Thursdays and is attended by an average of 100 visitors. The public can access visitation procedures through the official Bank Indonesia website.*

Selain program kunjungan masyarakat, Bank Indonesia juga menyediakan perpustakaan sebagai salah satu media edukasi kepada masyarakat umum. Perpustakaan Bank Indonesia memiliki 50 ribu buku dan jurnal di luar layanan elektronis yang lainnya. Pada 14 September 2011, perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia mendapatkan sertifikat ISO 90001 : 20008 dari lembaga sertifikasi ISO. Pemberian ISO dilakukan dengan pertimbangan perpustakaan Bank Indonesia telah memenuhi prinsip fokus terhadap konsumen dan menekankan pada pengembangan berkelanjutan. Dengan pemberian ISO, pelayanan perpustakaan Bank Indonesia kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan dan informasi, khususnya mengenai ekonomi moneter dan perbankan, diharapkan dapat semakin meningkat.

Program edukasi juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selama 2011, terdapat 490 program kegiatan dimana Bank Indonesia memberikan edukasi mengenai pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia, ciri-ciri keaslian uang rupiah, *website* Bank Indonesia, Gerai Info, dan sebagainya.

Komunikasi Bank Indonesia tidak hanya ditujukan kepada pihak eksternal namun juga kepada pihak internal. Hal tersebut bertujuan agar pegawai memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai strategi, pelaksanaan tugas, serta isu-isu Bank Indonesia. Dengan demikian, para pegawai dapat berperan sebagai duta komunikasi bagi masyarakat di sekitarnya. Komunikasi kepada internal semakin diperkuat, baik berupa komunikasi tatap muka, pertemuan tersegmentasi di level pimpinan dan pelaksana teknis, maupun komunitas penulis. Komunikasi kepada internal juga dilakukan melalui teknologi komunikasi dengan mengandalkan intranet.

Pada akhir 2011, Bank Indonesia melakukan survei kepada *stakeholders* untuk menilai apakah upaya komunikasi yang dilakukan telah memenuhi harapan sekaligus untuk memperoleh masukan perbaikan. Survei dilakukan kepada akademisi, perbankan, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga negara, media massa,

*In addition to community visits, Bank Indonesia also operates a library as one form of education media available to the general public. The Bank Indonesia Library maintains a collection exceeding 50 thousand books and journals and provides other electronic services. On 14th September 2011, the Bank Indonesia Library earned ISO 90001:20008 accreditation from the International Organisation of Standardisation thanks to consumer-focused principles and an emphasis on sustainable development. ISO accreditation is expected to improve the library's service to the general public who require knowledge and information, in particular economic, monetary and banking.*

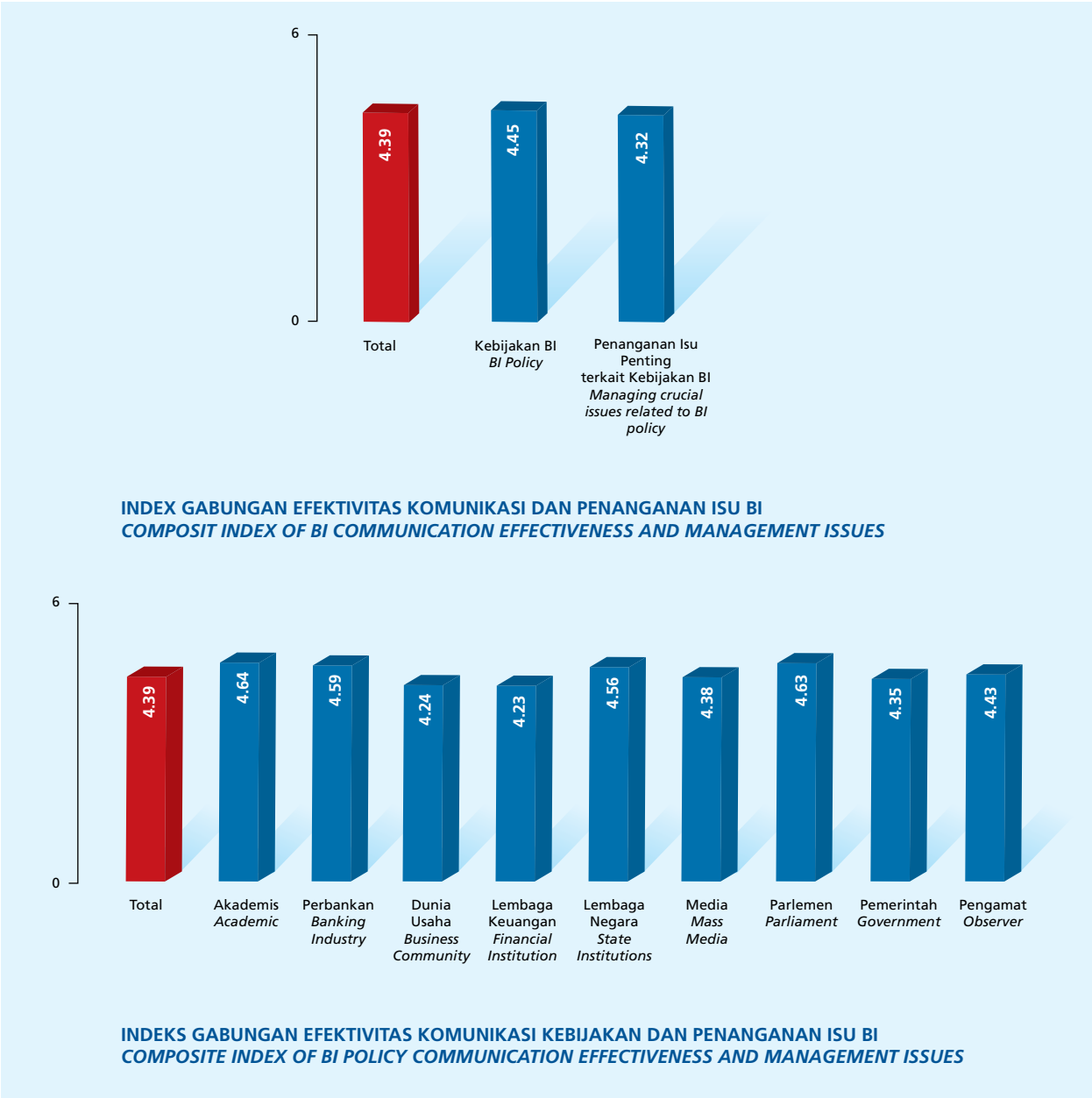
*The education program also involves activities organised by members of the general public. In 2011, 490 programs were arranged with Bank Indonesia providing education on a range of topics from Bank Indonesia's core purposes, to the characteristics of genuine rupiah banknotes, the official Bank Indonesia website, Gerai Info and so on.*

*Bank Indonesia's communication are not only directed at external parties but also internally. This aims to instil a common view and understanding shared by all Bank Indonesia employees regarding strategy, task implementation and other Bank Indonesia issues. Consequently, employees at Bank Indonesia can play a role as effective communication ambassadors to members of the general public in their own communities. Internal communications are constantly being strengthened through face-to-face communications, meetings segmented at the leadership and technical levels, as well as the internal writing community. Internal communications are disseminated through communication technology that relies on Bank Indonesia's intranet.*

*At year-end 2011, Bank Indonesia surveyed its stakeholders to assess whether the communications strategy met expectations while providing valuable inputs. Academics, the banking industry, the business community, financial institutions, the mass media, parliament, the government, observers and Bank Indonesia employees*



Komunikasi dan Edukasi Publik  
Communications and Public Education



parlemen, pemerintah, pengamat, dan internal Bank Indonesia. Hasil survei secara umum membuktikan komunikasi kebijakan Bank Indonesia selama 2011 cenderung efektif, baik dari sisi kualitas informasi maupun dari sisi peningkatan pemahaman sebagai hasil komunikasi. Aspek yang mendapatkan apresiasi tertinggi dari responden adalah kecepatan penyampaian informasi/penjelasan.

were all included in the survey. The results of which, in general, indicated that Bank Indonesia's communications strategy policy in 2011 tended to be effective in terms of information quality and raising understanding. The most appreciated aspect cited by the respondents was the speed at which information/explanations were published.

Sebagai salah satu media edukasi kepada masyarakat tentang fungsi dan tugas Bank Indonesia dari waktu ke waktu, serta sekaligus sebagai pelaksanaan pelestarian benda bersejarah, Museum Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan budaya bagi masyarakat umum. Sepanjang 2011 kegiatan tersebut antara lain meliputi *talkshow* dengan tema “Quo Vadis Museum Kita”, pameran, dan kuis jelajah Museum Bank Indonesia bagi masyarakat umum dalam rangka International Museum Day. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional 2011 bekerja sama dengan PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia), Lomba Foto Heritage Nasional 2011, dan sejumlah kegiatan sosial. Di samping itu, Museum Bank Indonesia juga telah dijadikan sebagai ajang pembelajaran bagi instansi di dalam negeri maupun luar negeri, yang bermaksud untuk mempelajari pembangunan dan pengelolaan museum.

Pada 2011 Museum Bank Indonesia meraih penghargaan dari Majalah *National Geographic Traveler* edisi April-Mei 2011, sebagai museum terfavorit dengan kategori sejarah/arkologi. Penilaian ini didasarkan pada riset yang dilakukan untuk 279 museum se-Indonesia. Sejak dibuka pertama kali pada Desember 2006 jumlah pengunjung Museum Bank Indonesia terus meningkat dengan pesat. Jumlah pengunjung mencapai 173.509 pengunjung pada 2010 dan meningkat hingga mencapai 218.228 pengunjung pada 2011.

As a form of educational media for the general public concerning the function and task of Bank Indonesia over time, as well as simultaneously preserving historical artefacts, the Bank Indonesia Museum hosts educational and cultural activities for the general public. In 2011 this included a talk show entitled *Quo Vadis Our Museum*, exhibitions and a quiz on International Museum Day. Other activities included a National Child Puppeteer Festival 2011 in conjunction with PEPADI (Indonesian Association of Puppeteers), the 2011 National Heritage Photography Competition and other social activities. In addition, the Bank Indonesia Museum was inaugurated as an institute of learning for domestic and foreign institutions, with the aim to study museum development and management.

The Bank Indonesia Museum won an award from the *National Geographic Traveler* magazine in its April-May 2011 edition, as the favourite museum in the historical/ archaeological category. This award was based on research of 279 museums in Indonesia. Since its official opening in December 2006, the number of visitors to the Bank Indonesia Museum has continually risen, reaching 173,509 in 2010 and totalling 218,228 in 2011.



## 08

# Bank Indonesia dan Komunitas

## *Bank Indonesia and Community*

Sebagai bagian dari komunitas sosial, Bank Indonesia menyadari kedudukannya untuk senantiasa menunjukkan kepekaan dan kepedulian kepada lingkungannya. Selama 2011, kepekaan dan kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program sosial yang diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam pengendalian inflasi serta pengembangan UMKM dan sektor riil. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kepedulian pada aspek-aspek yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Program sosial tersebut dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Indonesia melalui Kantor-Kantor Bank Indonesia di daerah.

Selama 2011, Bank Indonesia telah melaksanakan 946 program sosial. Berangkat dari upaya untuk mendukung stabilisasi harga, program sosial dilaksanakan untuk mendukung pengembangan komoditas yang menjadi sumber pendorong inflasi daerah. Program sosial juga dilakukan untuk pengembangan sektor riil dan UMKM, yaitu dalam bentuk pengembangan kluster komoditas nasional/regional. Selain itu, program sosial juga difokuskan pada pengembangan ekonomi daerah, termasuk pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan daerah, serta berlanjutnya program Desa Kita.

Salah satu program yang mendapat dukungan program sosial Bank Indonesia yaitu program kluster cabai di Cigombong-Cianjur Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memutus ketergantungan petani dengan tengkulak dan meningkatkan peran Bank Indonesia dalam mendukung stabilisasi harga melalui dukungan kluster untuk meningkatkan *supply* cabai. Selain memberikan *technical assistance*, Bank Indonesia juga memberikan bantuan pengadaan sarana prasana produksi. Dalam implementasinya, pengembangan kluster cabai melibatkan beberapa pihak sebagai mitra yaitu PT Mitratani Agro Unggul (PT. MAU) yang memiliki peran dalam menjamin

*As part of social responsibility, Bank Indonesia is aware of its position to always show care and concern for its environment. In 2011, this care and concern manifested in social programs prioritising core task implementation, namely controlling inflation, as well as developing the real sector and MSME. Furthermore, Bank Indonesia also showed concern for aspects that enhance the quality of life of the general public. These social programs were implemented throughout the Indonesian archipelago through Bank Indonesia local branch offices.*

*In 2011, Bank Indonesia implemented 946 social programs. In a departure from efforts to stabilise prices, newer social programs strive to develop commodities that drive regional inflation. Social programs were also rolled out to develop the real sector and MSME, namely in the form of developing regional/national commodity clusters. Furthermore, social programs also focused on regional economic development and developing leading regional products that can boost local production and revenues, as well as continue the Desa Kita (Our Village) program.*

*One program that received support from Bank Indonesia's social programs was the chilli economic cluster in Cigombong-Cianjur, West Java. This program aims to ameliorate the welfare of farmers, severing their dependence on middlemen, and expanding Bank Indonesia's role in stabilising prices through support from the cluster to increase the supply of chilli peppers. In addition to providing technical assistance, Bank Indonesia also helps procure production infrastructure. In its implementation, chilli cluster development involves a number of related parties as partners, for instance PT. Mitratani Agro Unggul (PT. MAU) that manages marketing, cultivation and post-harvest handling. Bank*



Bank Indonesia dan Komunitas  
*Bank Indonesia and Community*

Bank Indonesia turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi.

*Bank Indonesia continuously supports efforts to foster the quality of education by providing scholarships to outstanding students.*



pemasaran, pendampingan budidaya dan penanganan pasca panen. Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Masyarakat Mandiri Dompét Dhuafa untuk melakukan pendampingan guna penguatan kelompok dan monitoring program klaster cabai, sekaligus mempersiapkan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro.

Beberapa program lainnya yang diimplementasikan dalam rangka pengembangan komoditi dan mendapat dukungan program sosial Bank Indonesia antara lain pengembangan klaster sapi di Kendari dan Palembang, klaster bawang dan pokcoy di Cirebon, klaster rumput laut di Makassar dan klaster perikanan di Sibolga.

Sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat serta menyikapi masih adanya sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak, Bank Indonesia melakukan sinergi program Bedah Sekolah. Program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan TNI Kodam Jaya yang memiliki program TNI Manunggal Masuk Desa. Program Bedah Sekolah yang dilaksanakan di 27 lokasi sekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Jabodetabek merupakan terobosan untuk menggabungkan kegiatan sosial yang ada di masing-masing lembaga.

*Indonesia also collaborates with Dompét Dhuafa to provide guidance and monitor the chilli cluster, while preparing the establishment of microfinance institutions.*

*A number of other programs were also implemented to develop commodities and support Bank Indonesia's social responsibility program, among others, development of a cow cluster in Kendari and Palembang, an onion and bak choy cluster in Cirebon, a seaweed cluster in Makassar and a fisheries cluster in Sibolga.*

*In support of raising the quality of public education and to address the poor state of many classrooms, Bank Indonesia synergised the Bedah Sekolah program in conjunction with TNI Kodam Jaya, which has its own TNI Manunggal Masuk Desa program. This program was rolled out at 27 schools or early learning centres in Jabodetabek, representing quite a breakthrough in terms of combining social activities at different institutions.*

Peran Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga diwujudkan melalui program pemberian beasiswa kepada 2.960 mahasiswa di 63 Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, pada 3 Agustus 2011 Bank Indonesia menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa Bank Indonesia dengan Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beasiswa diberikan tanpa ikatan dinas kepada mahasiswa strata-1 yang kurang mampu, namun memiliki prestasi akademik yang baik. Jumlah beasiswa yang disalurkan pada 2011 adalah sebesar Rp 9.216.000.000.

*The role played by Bank Indonesia in terms of raising educational quality was further realised through scholarship programs awarded to 2,960 students at 63 state colleges nationwide. To support the implementation of the scholarship program, on 3rd August 2011 Bank Indonesia signed agreements with the University of Indonesia, the Agricultural Institute of Bogor, the State University of Jakarta and the Syarif Hidayatullah State Islamic University. Scholarships were awarded without further binding obligations for the poorer strata-1 students with strong academic aptitude. The number of scholarships awarded amounted to Rp 9,216,000,000 in 2011.*





# Strategi dan Prioritas Ke Depan

## *Strategy and Priorities Ahead*

Perekonomian nasional masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh tinggi pada 2012, meskipun menghadapi prospek perekonomian global yang masih kurang kondusif. Stabilitas makroekonomi yang telah berhasil diraih selama 2011 perlu semakin diperkuat sehingga dapat menjadi modal dalam menjaga kesinambungan perekonomian Indonesia ke depan.

Bank Indonesia menyadari bahwa masih terdapat tantangan yang akan mewarnai perekonomian Indonesia ke depan. Untuk itu, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia akan terus diperkuat disertai koordinasi erat bersama pemerintah, sehingga stabilitas makroekonomi tetap dapat terjaga dan membawa pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi lagi.

*The national economy still has the opportunity for stronger growth in 2012 despite the inauspicious outlook for the global economy. Macroeconomic stability enjoyed in 2011 must be strengthened looking ahead as means to ensure future domestic economic sustainability in Indonesia. Bank*

*Indonesia acknowledges a number of challenges that threaten domestic economic performance looking ahead. In this context, the policy mix applied by Bank Indonesia will continue to be strengthened, buttressed by tight coordination with the government, thereby maintaining macroeconomic stability and fostering stronger economic growth.*



## Outlook Perekonomian Indonesia

Meskipun perekonomian global tumbuh melambat, perekonomian Indonesia pada 2012 diperkirakan akan tetap kuat dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 6,3%-6,7%. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh kuatnya permintaan domestik dengan peran investasi dan konsumsi yang meningkat. Investasi diperkirakan tumbuh lebih tinggi yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga, iklim investasi dan peringkat investasi yang membaik, potensi pasar yang masih besar, dan suku bunga yang relatif rendah.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat yang didorong oleh membaiknya pendapatan, tingginya keyakinan konsumen, dan rendahnya suku bunga. Sementara itu, ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh cukup tinggi meski lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan permintaan domestik dan ekspor yang masih kuat, impor diperkirakan juga tumbuh tinggi. Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor-sektor yang terkait dengan permintaan domestik, seperti sektor pertanian dan sektor bangunan diperkirakan meningkat.

Pada 2012, Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus, yang terutama bersumber dari neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan meningkat dengan peran Penanaman Modal Asing yang semakin besar. Aliran modal dalam bentuk portofolio diperkirakan masih tinggi karena kuatnya fundamental perekonomian, menariknya imbal hasil, dan tingginya ekspek likuiditas global. Sementara itu, neraca transaksi berjalan diperkirakan sedikit mengalami defisit sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan permintaan domestik. Dengan kinerja NPI yang masih baik dan didukung dengan penerapan kebijakan makroekonomi yang berhati-hati (*prudent*), serta cadangan devisa yang cukup, nilai tukar rupiah diperkirakan relatif stabil.

Melalui penguatan koordinasi berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah, inflasi diperkirakan terkendali dan berada dalam kisaran sasaran 4,5%±1%. Kebijakan moneter dan nilai tukar diperkirakan mampu menurunkan tekanan inflasi, menjaga terkendalinya permintaan domestik, dan

## Indonesian Economic Outlook

*Despite languid global economic growth, the domestic economy is projected to expand robustly in 2012 with maintained macroeconomic stability. The Indonesian economy is estimated to grow in the range of 6.3%-6.7%. Economic growth will primarily stem from strong domestic demand with investment and consumption expected to play a larger role. Investment is projected to perform better on the back of well-maintained economic stability, a conducive investment climate coupled with an upgraded investment rating, large market potential and relatively low interest rates.*

*Household consumption will be driven by higher incomes, greater consumer confidence and low lending rates. Notwithstanding, growth in exports of goods and services will remain strong but lower than that in the previous year. In line with strong domestic demand and export growth, imports are also expected to grow exponentially. In terms of production, growth in sectors dependent on domestic demand, like agriculture and construction, will remain strong.*

*In 2012, the Indonesian balance of payments will post an adequate surplus, principally stemming from the capital and financial accounts, which are expected to increase as the role of foreign capital placements expands. A deluge of capital flows in the form of portfolio will remain due to solid economic fundamentals, attractive yields and abundant excess global liquidity. Meanwhile, the current account is expected to experience a deficit in line with the growth in domestic demand. Robust performance by the balance of payments will also be supported by the application of prudent macroeconomic policy as well as adequate foreign exchange reserves and a relatively stable rupiah exchange rate.*

*By reinforcing policy coordination between Bank Indonesia and the government, inflation will remain under control within its target corridor of 4.5%±1%. Monetary and exchange rate policy is expected to help alleviate inflationary pressures, keep domestic demand under control and anchor inflation expectations to*

menjangkar ekspektasi inflasi ke sasarannya. Rendahnya ekspektasi inflasi juga didukung oleh langkah pemerintah yang akan menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama terhadap bahan pangan dan energi. Langkah tersebut juga mendukung tetap terkendalinya inflasi kelompok *volatile food prices*. Kendati demikian, Bank Indonesia tetap mencermati dampak dari rencana kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di atas perkiraan semula. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk meminimalkan potensi kenaikan inflasi yang bersifat temporer tersebut dan mengendalikan tekanan inflasi ke depan sesuai kondisi fundamental agar berada dalam sasarannya, yakni sebesar 4,5%±1%.

Stabilitas sistem keuangan pada 2012 diharapkan tetap terjaga dengan dilanjutkannya bauran kebijakan makroprudential yang diterapkan selama 2011. Membaiknya fungsi intermediasi selama 2011 diperkirakan terus berlanjut pada 2012 dan menopang profitabilitas bank. Meski pertumbuhan kredit diperkirakan tumbuh tinggi, risiko kredit perbankan diperkirakan tetap terjaga. Likuiditas bank yang tetap dapat terjaga pada level yang cukup aman dan permodalan bank pada tingkat yang cukup tinggi dapat menyerap risiko yang timbul akibat ketidakpastian perekonomian global. Sementara itu, kinerja pasar keuangan diperkirakan tetap meningkat dengan ketahanan yang semakin kuat. Kondisi fundamental yang baik dan koordinasi yang efektif antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar keuangan diharapkan dapat mengurangi volatilitas di pasar obligasi negara dan menambah keyakinan investor pada pasar keuangan domestik.

*the corresponding target. Relatively low inflationary expectations are further supported by government measures taken to safeguard supply and distribution, in particular concerning food and energy. Such actions will be buttressed by measures to control inflation on volatile food prices. Nonetheless, Bank Indonesia continuously monitors the impact of planned government policy regarding subsidised fuels due to the potential for inflationary pressures to exceed those originally projected. To this end, Bank Indonesia optimises the policies required to minimise potential temporary escalations in inflationary pressures and control future inflation in line with fundamental conditions in order to meet the target of 4.5%±1%.*

*Financial system stability in 2012 will be maintained through a continuation of the macroprudential policy mix instituted in 2011. Improvements in the intermediation function during 2011 will continue into 2012, hence buoying bank profitability. Despite solid credit growth, credit risk will remain under control. Bank liquidity will be maintained at safe levels with bank capital preserved at a level sufficient to absorb the risks stemming from widespread global economic uncertainty. Meanwhile, financial market performance will continue to improve with stronger resilience. Solid fundamentals and effective coordination between Bank Indonesia and the government to preserve financial market stability is expected to ease volatility on the bond market and boost investor confidence in domestic financial markets.*



## Arah Kebijakan Bank Indonesia 2012

Pengelolaan makroekonomi masih menghadapi risiko global dan kompleksitas permasalahan domestik. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan Bank Indonesia 2012 diarahkan untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan untuk mengawal perekonomian nasional. Penguatan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia tersebut diharapkan mampu mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan terjadinya berbagai risiko dan memenuhi tuntutan masyarakat.

Secara garis besar, arah kebijakan Bank Indonesia pada 2012 difokuskan pada lima hal: (i) mengoptimalkan peran kebijakan moneter dan memantapkan koordinasi dalam menjaga kestabilan harga, mendorong kapasitas perekonomian, dan sekaligus memitigasi risiko perlambatan ekonomi global, (ii) meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian, dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan, (iii) meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran, baik dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri, (iv) memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam manajemen pencegahan dan penanganan krisis (PMK), dan (v) mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan akses perbankan (*financial inclusion*) kepada masyarakat.

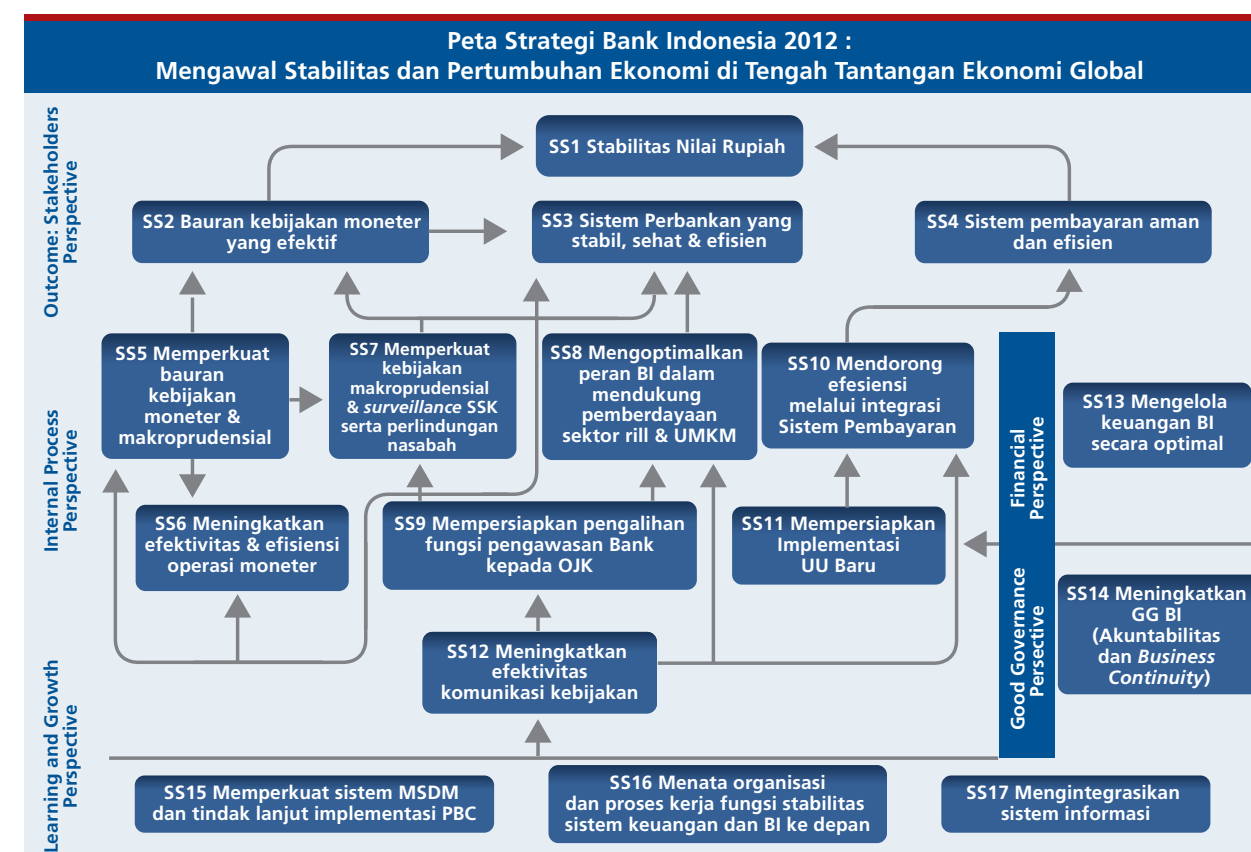
Berbagai arah kebijakan tersebut dirangkum dalam peta strategi Bank Indonesia 2012, yang menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah operasional yang akan ditempuh. Tujuan akhir yang akan dicapai dalam peta strategi Bank Indonesia 2012 yaitu stabilitas nilai rupiah, bauran kebijakan moneter yang efektif, sistem perbankan yang stabil, sehat dan efisien serta sistem pembayaran yang aman dan efisien. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, Dewan Gubernur telah menetapkan berbagai langkah strategis yang akan ditempuh selama 2012. Langkah strategis meliputi (i) memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, (ii) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi moneter, (iii) memperkuat kebijakan makroprudensial dan surveillance stabilitas sistem keuangan serta perlindungan

## Bank Indonesia's Policy Direction in 2012

Macroeconomic management will continue to face global risk and complex domestic issues. Accordingly, Bank Indonesia policy in 2012 will be directed towards strengthening policy and institutions to safeguard the national economy. This is expected to help anticipate and mitigate potential risks and answer the demands of the general public.

In broad terms, the direction of Bank Indonesia policy in 2012 will focus on five salient issues, namely: (i) optimising the role of monetary policy and improving coordination to maintain price stability, build economic capacity and concomitantly mitigate risk of a global economic downturn; (ii) boosting banking industry efficiency in order to optimise its contribution to the national economy, as well as strengthening bank resilience; (iii) enhancing the efficiency, reliability and security of the payment system nationally and through linkages with payment systems overseas; (iv) strengthening macro resilience by improving crisis prevention and resolution management (CMP); and (v) empowering the real sector, including the continuation of efforts to broaden financial inclusion.

Bank Indonesia's policy direction is detailed in the strategy map for 2012, which translates strategy into tangible operational measures to be implemented. The overarching goal of the Bank Indonesia strategy map for 2012 is rupiah exchange rate stability, an effective monetary policy mix, a banking system that is stable, sound and efficient as well as an efficient and secure payment system. In pursuit of the overarching goals, the Board of Governors has determined a number of strategic measures to be implemented in 2012 as follows: (i) strengthen the monetary and macroprudential policy mix; (ii) improve the effectiveness and efficiency of monetary operations; (iii) reinforce macroprudential policy and financial system stability surveillance as well as customer protection; (iv) optimise the role of Bank Indonesia in



nasabah, (iv) mengoptimalkan peran Bank Indonesia dalam mendukung pemberdayaan sektor riil dan UMKM, (v) mempersiapkan pengalihan fungsi pengawasan bank kepada OJK, (vi) mendorong efisiensi melalui integrasi Sistem Pembayaran, serta (vii) mempersiapkan SOP terkait Implementasi Undang-undang Mata Uang.

Selain itu, dilakukan pula langkah strategis guna memperkuat kapabilitas manajemen internal yaitu (i) meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan, (ii) mengelola keuangan Bank Indonesia secara optimal, (iii) meningkatkan Good Governance Bank Indonesia (Akuntabilitas dan Business Continuity), (iv) penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan program tindak lanjut *Performance-Based Culture* (PBC), (v) persiapan bisnis proses stabilitas sistem keuangan dan Bank Indonesia pasca Undang-undang OJK, serta (vi) integrasi sistem informasi untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter dan perbankan.

empowering the real sector and MSME; (v) prepare to hand over the bank supervision function to the FSA; (vi) promote efficiency through payment system integration; and (vii) formulate SOP for implementation of the new Currency Act.

In addition, strategic measures will also be put in place to enhance internal management, namely by (i) improving the efficacy of the communications policy; (ii) optimally managing Bank Indonesia's finances; (iii) improving Good Governance (accountability and business continuity); (iv) revising a human resource management system and follow-up programs towards performance-based culture (PBC); (v) preparing business processes pertaining to financial system stability in the new era of the Financial Services Authority; and (vi) integrating the information system in order to support financial system stability as well as monetary and banking stability.



# Informasi Tambahan

Additional Information

# Daftar Singkatan

Abbreviation

<b>ACAMS</b>	: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists	<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik <i>BPS-Statistics Indonesia</i>
<b>ACDM</b>	: ASEAN Central Bank Deputy Governors' Meeting	<b>bps</b>	: Basis Points
<b>ACGM</b>	: ASEAN Central Bank Governors' Meeting	<b>BRC</b>	: BPD Regional Champion
<b>AFMM</b>	: ASEAN Finance Ministers' Meeting	<b>BSA</b>	: Bilateral Swap Arrangement
<b>ALM</b>	: Asset Liabilities Management	<b>BSBI</b>	: Badan Supervisi Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Supervision Body</i>
<b>AMRO</b>	: ASEAN+3 Macroeconomic Research Office	<b>BSR</b>	: Bank Indonesia Social Responsibility
<b>APBN</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara <i>State Budget</i>	<b>BUS</b>	: Bank Umum Syariah <i>Islamic Banks</i>
<b>APBU</b>	: Asistensi Pengawasan Bank Umum <i>Assistance for Commercial Bank Supervision</i>	<b>CCR</b>	: Counterparty Credit Risk
<b>APEC</b>	: Asia-Pacific Economic Cooperation	<b>CCSA</b>	: Certification in Control Self-Assessment
<b>APMK</b>	: Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu <i>Card-based Payments</i>	<b>CFA</b>	: Chartered Financial Analyst
<b>AS</b>	: Amerika Serikat <i>United States</i>	<b>CGAP</b>	: Certified Government Auditing Professional
<b>ASEAN</b>	: The Association of Southeast Asian Nations	<b>CIA</b>	: Certified Internal Auditor
<b>ATBI</b>	: Anggaran Tahunan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Annual Budget</i>	<b>CISA</b>	: Certified Information Systems Auditor
<b>ATM</b>	: Anjungan Tunai Mandiri <i>Automated Teller Machines</i>	<b>CIT</b>	: Cash in Transit
<b>ATMR</b>	: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko <i>Risk-Weighted Assets</i>	<b>COS</b>	: Colleges of Supervisors
<b>Bakohumas</b>	: Badan Koordinasi Humas Pemerintah <i>Government Public Relations Coordination</i>	<b>DHE</b>	: Devisa Hasil Ekspor <i>Foreign Exchange Proceeds from Exports</i>
<b>BBM</b>	: Bahan Bakar Minyak <i>Fuel Oil</i>	<b>CCL</b>	: Coaching and Counseling for Leader
<b>BCBS</b>	: Basel Committee For Banking Supervision	<b>CMIM</b>	: Chiang-Mai Initiative Multilateralization
<b>BI-ISSP</b>	: Bank Indonesia-Information System Strategic Plan	<b>CMRF</b>	: Crisis Management and Resolution Framework
<b>BI-RTGS</b>	: Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement	<b>DIE</b>	: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
<b>BI-SSSS</b>	: Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System	<b>DPK</b>	: Dana Pihak Ketiga <i>Deposits</i>
<b>BPD</b>	: Bank Pembangunan Daerah <i>Regional Development Banks</i>	<b>DPR</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat <i>The House of Representatives</i>
<b>BPK RI</b>	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia <i>The State Audit Board of The Republic of Indonesia</i>	<b>DULN</b>	: Devisa Utang Luar Negeri <i>Foreign Debt</i>
<b>BPR</b>	: Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Banks</i>	<b>EMEAP</b>	: Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
		<b>FDI</b>	: Foreign Direct Investment
		<b>FGD</b>	: Focus Group Discussion
		<b>FK SSK</b>	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan <i>Coordination Forum of Financial System Stability</i>
		<b>FRM</b>	: Financial Risk Manager
		<b>FORSTRA</b>	: Forum Strategis <i>Strategic Forum</i>
		<b>GAP</b>	: Good Agriculture Practices
		<b>GIZ</b>	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
		<b>GWM</b>	: Giro Wajib Minimum <i>The Statutory Reserve Requirement</i>
		<b>GWM LDR</b>	: Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio <i>The Statutory Reserve Requirement Based on The Loan to Deposit Ratio</i>



<b>HIMBARA</b>	: Himpunan Bank-Bank Negara <i>Association of National Commercial Banks</i>
<b>HPP</b>	: Harga Pokok Pembelian <i>Cost of Purchase</i>
<b>IILM</b>	: International Islamic Liquidity Management Corporation
<b>IHK</b>	: Indeks Harga Konsumen <i>Consumer Price Index</i>
<b>IHT</b>	: In House Training
<b>IKI</b>	: Indikator Kinerja Individu <i>Individual Performance Indicators</i>
<b>IKU</b>	: Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicators</i>
<b>IMF</b>	: International Monetary Fund
<b>ITE</b>	: Informasi dan Transaksi Elektronik <i>Information and Electronic Transaction</i>
<b>ITF</b>	: Inflation Targeting Framework
<b>JIBOR</b>	: Jakarta Interbank Offered Rate
<b>JPSK</b>	: Jaring Pengaman Sektor Keuangan <i>Financial Sector Safety Net</i>
<b>KAP</b>	: Kualitas Aktiva Produktif <i>Earning Assets</i>
<b>KBI</b>	: Kantor Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Branch Offices</i>
<b>KIP</b>	: Keterbukaan Informasi Publik <i>Public Disclosure</i>
<b>KKBI</b>	: Kantor Koordinator Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Branch Offices Coordinator</i>
<b>KKMB</b>	: Konsultan Keuangan Mitra Bank <i>Partners Bank Financial Consultant</i>
<b>KKPE</b>	: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi <i>Food Security and Energy Credit</i>
<b>KPEN-RP</b>	: Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan <i>Bio Energy Development Debt and Plantation Revitalization</i>
<b>KPw BI</b>	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Representative Offices</i>
<b>KUPS</b>	: Kredit Usaha Pembibitan Sapi <i>The Animal Husbandry Credit Scheme for Cows</i>
<b>KUR</b>	: Kredit Usaha Rakyat <i>The Cooperatives Credit Scheme</i>
<b>LDR</b>	: Loan to Deposit Ratio
<b>LKM</b>	: Lembaga Keuangan Mikro <i>Micro Finance Institutions</i>
<b>LKTBI</b>	: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia <i>Annual Financial Statement of Bank Indonesia</i>
<b>LLD</b>	: Lalu Lintas Devisa <i>Foreign Exchange</i>
<b>LPS</b>	: Lembaga Penjamin Simpanan <i>Indonesia Deposit Insurance Corporation</i>

<b>LSPLKM</b>	: Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro <i>Professional Certification Agency for Microfinance Institutions</i>
<b>LTV</b>	: Loan to Value
<b>MDSP</b>	: Market Development Strategic Plan
<b>MKE</b>	: Majelis Kehormatan Etik <i>Honorary Council of Ethics</i>
<b>MRGG</b>	: Managing Regional and Global Governance
<b>NKRI</b>	: Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia</i>
<b>NG</b>	: Next Generation
<b>NPI</b>	: Neraca Pembayaran Indonesia <i>Indonesia Balance of Payments</i>
<b>NPG</b>	: National Payment Gateway
<b>NPL</b>	: Non Performing Loan
<b>OECD</b>	: The Organisation for Economic Co-Operation and Development
<b>O/N</b>	: Overnight
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>
<b>PBB</b>	: Performance-Based Budgeting
<b>PBC</b>	: Performance-Based Culture
<b>PD</b>	: Perusahaan Daerah <i>Regional company</i>
<b>PDB</b>	: Produk Domestik Bruto <i>Gross National Product</i>
<b>Pemda</b>	: Pemerintah Daerah <i>Local Government</i>
<b>PEPADI</b>	: Persatuan Pedalangan Indonesia <i>Indonesian Association of Puppeteers</i>
<b>PIN</b>	: Personal Identification Number
<b>PMK</b>	: Protokol Manajemen Krisis <i>Crisis Management Protocol</i>
<b>PMK DN</b>	: Peningkatan Mutu dan Ketrampilan Dalam Negeri <i>Improving Skills and Quality Domestically</i>
<b>PMK LN</b>	: Peningkatan Mutu dan Ketrampilan Luar Negeri <i>Improving Skills and Quality Abroad</i>
<b>PPA</b>	: Proyeksi dan Penyusunan Anggaran <i>Projections and Budgeting</i>
<b>PPKD</b>	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah <i>Regional Credit Guarantee Company</i>
<b>POLAIR</b>	: Kepolisian Perairan <i>Water police</i>
<b>POLRI</b>	: Kepolisian Republik Indonesia <i>Police of the Republic of Indonesia</i>
<b>PSAKS</b>	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah <i>Statement of Financial Accounting Standards Sharia</i>
<b>PT</b>	: Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>

<b>PTB</b>	: Program Tugas Belajar <i>Task Learning Program</i>
<b>PUAB</b>	: Pasar Uang Antar Bank <i>Interbank Rate</i>
<b>QIA</b>	: Qualified Internal Auditor
<b>RDG</b>	: Rapat Dewan Gubernur <i>Board of Governors' Meeting</i>
<b>RKU</b>	: Rencana Kebutuhan Uang <i>Plan of Required Money</i>
<b>ROA</b>	: Return on Asset
<b>RR SBN</b>	: Reverse Repo Surat Berharga Negara <i>State Securities Reverse Repo</i>
<b>RTE</b>	: Rincian Transaksi Ekspor <i>Export Transaction Details</i>
<b>RUU</b>	: Rancangan Undang-Undang <i>Proposed Laws or Bills</i>
<b>SBDK</b>	: Suku Bunga Dasar Kredit <i>Prime Lending Rate</i>
<b>SBI</b>	: Sertifikat Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Certificates</i>
<b>SBN</b>	: Surat Berharga Negara <i>Government Securities</i>
<b>SEACEN</b>	: The South East Asian Central Banks
<b>Sekda</b>	: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah <i>The Regional Economic Financial Statistics</i>
<b>SEKI</b>	: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia <i>Indonesian Financial Statistics</i>
<b>SDM</b>	: Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>
<b>SIP</b>	: Sistem Informasi Perbankan <i>Banking Information System</i>
<b>SKNBI</b>	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia <i>The National Clearing System</i>
<b>SKNNI</b>	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia <i>Indonesia's National Work Competence Standards</i>
<b>SMS</b>	: Short Message Services
<b>SPAMK</b>	: Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja <i>Planning, Budgeting and Performance Management System</i>

<b>SoD</b>	: Separation of Duties
<b>SSK</b>	: Stabilitas Sistem Keuangan <i>Financial System Stability</i>
<b>TD</b>	: Term Deposit
<b>TIPIBANK</b>	: Tindak Pidana Bank <i>Banking Crime</i>
<b>TIPITI</b>	: Tindak Pidana Teknologi Informasi <i>Information Technology Crime</i>
<b>TKI</b>	: Tenaga Kerja Indonesia <i>Indonesian Migrant Labor</i>
<b>TNI-AL</b>	: Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut <i>Indonesia National Army – Navy</i>
<b>ToT</b>	: Training of Trainers
<b>TPI</b>	: Tim Pengendalian Inflasi <i>Inflation Control Team</i>
<b>TPID</b>	: Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah <i>Regional Inflation Monitoring and Control Teams</i>
<b>TTL</b>	: Tarif Tenaga Listrik <i>Electricity Tariff</i>
<b>UKP4</b>	: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan <i>The Presidential Working Unit for Development Supervision and Control</i>
<b>ULE</b>	: Uang Layak Edar <i>Decent money</i>
<b>UMKM</b>	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah <i>Micro, Small and Medium Enterprises</i>
<b>UNCITRAL</b>	: United Nations Commision on International Trade Law
<b>USD</b>	: US Dollar
<b>UU</b>	: Undang-Undang <i>The Act</i>
<b>UUS</b>	: Unit Usaha Syariah <i>Islamic Business Units</i>
<b>UYD</b>	: Uang Yang Diedarkan <i>Cash Circulation</i>
<b>WC-PSS</b>	: Working Committee on Payment and Settlement Systems
<b>WG-PSS</b>	: Working Group on Payment and Settlement Systems
<b>WTO</b>	: World Trade Organisation
<b>yoy</b>	: Year on year



# Daftar Istilah

## Glossary

### Administered prices

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

### BI-RTGS

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

### BI-SSSS

Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan sistem BI-RTGS

### Cash in Transit

Jasa pengambilan dan pengantaran uang dan barang-barang berharga lainnya dengan kendaraan yang didisain secara khusus dari satu tempat ke tempat lainnya sebagaimana yang diinstruksikan oleh klien.

### Emerging Markets

Pasar modal dari negara-negara berkembang yang telah meliberalisasi sistem keuangannya untuk mendukung aliran modal dari non-residen dan dapat dijangkau oleh investor asing.

### Financial Inclusion

Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

### Financing to deposit ratio (FDR) atau Loan to deposit ratio (LDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum.

### Administered prices

The prices of goods/services that are controlled by the government, for instance fuel prices and the basic electricity tariff.

### BI-RTGS

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, is an electronic fund transfer system among participants of the BI-RTGS system in rupiah. Transactions are settled individually in real-time.

### BI-SSSS

Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System, is an electronic system for conducting transactions with Bank Indonesia, including the administration of these transactions as well as securities administration, seamlessly connected to participants, the operator and the BI- RTGS System.

### Cash In Transit

The terms used to refer to the physical transfer of banknotes, coins and items of value from one location to another. Traditionally, both terms refer to transfer of cash and valuables between cash centers and bank branches, ATM points, large retailers and other premises holding large amounts of cash.

### Emerging Markets

Capital markets in developing countries that have liberalised their financial systems to support the flow of capital from non-residents and are accessible to foreign investors.

### Financial Inclusion

A comprehensive activity that aims to remove all price and non-price constraints to disadvantaged and low-income segments of society in accessing financial services.

### Financing to deposit ratio (FDR) or Loan to deposit ratio (LDR)

The ratio of financing to deposits received by a bank. Islamic banks use FDR while LDR is used by commercial banks.

### Good Governance

Tata kelola organisasi yang baik dan sehat.

### Giro Wajib Minimum (GWM)

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

### Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

### Inflasi inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

### Inflation Targeting Framework

Kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan.

### Investment Grade

Peringkat yang menunjukkan bahwa obligasi negara atau korporasi memiliki risiko default yang relatif rendah.

### Kliring

Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

### Likuiditas

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).

### Linkage Program

Kerjasama bank umum dan BPR yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualistik dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

### Good Governance

Sound organisational governance.

### Statutory reserve requirement (GWM)

The minimum amount of funds required to be maintained by a bank determined by Bank Indonesia and expressed as a percentage of deposits.

### Consumer Price Index (headline inflation)

The increase in the prices of goods measured by changes in the consumer index, reflecting changes in the prices of common goods and services.

### Core Inflation

Headline inflation excluding volatile foods and administered prices.

### Inflation Targeting Framework

A working framework that explicitly announces the government-set inflation target to the public and monetary policy is geared towards achievement of this target.

### Investment Grade

A rating that indicates a relatively low risk of default for government or corporate bonds.

### Clearing

The centralised exchange of paper instruments among clearing participants, for which settlement takes place at a specified time.

### Liquidity

The ability to meet all outstanding liabilities; a company is said to be liquid if its current assets exceed its liabilities.

### Linkage Program

Cooperation between commercial banks and rural banks, which is a mutually symbiotic business-oriented partnership.



**Makroprudensial**

Kegiatan pemantauan dan analisis kinerja lembaga keuangan secara industri dalam kerangka pengawasan terhadap sistem keuangan.

**Mediasi**

Proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

**National Payment Gateway**

Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mengarahkan industri pembayaran untuk bekerja sama menciptakan *platform* standar sistem atau infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama.

**Neraca Pembayaran**

Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

**Operasi Moneter**

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).

**Pasar Primer**

Pasar emisi sekuritas baru; pasar ini dibedakan dari pasar sekunder yang memperjualbelikan sekuritas yang telah diterbitkan dan dijual sebelumnya (*primary market*).

**Pasar Uang Antar Bank (PUAB)**

Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (*overnight*).

**Sekuritisasi**

Pengonversian sekelompok piutang dan jenis yang sama (biasanya kredit) menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan, meliputi piutang pokok dan bunga; kredit yang disekuritisasikan biasanya ialah kredit yang berkualitas tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan tingkat risiko kredit; dengan konversi

**Macroprudential**

*Monitoring and analysis of financial institution performance for the industry as a whole as part of financial system supervision.*

**Mediation**

*Dispute settlement through a process of negotiation and agreement, assisted by a mediator that does not have the authority to decide or impose a settlement.*

**National Payment Gateway**

*Policy that focuses on efforts to steer the payment industry towards cooperation to create a standard platform or infrastructure to be used jointly.*

**Balance of Payments**

*An accounting record of transactions between the citizens of one country and the rest of the world during a given period (usually one year). The balance of payments incorporates a country’s exports and imports of goods and services, grants from individuals and foreign governments and financial transfers. In general the balance of payments includes the current account balance, capital and financial account and financial items.*

**Monetary Operations**

*The implementation of monetary policy by Bank Indonesia through open market operations and the interest rate corridor (Standing Facilities).*

**Primary Market**

*The market that deals with the issuance of new securities; it differs from the secondary market, which trades securities previously issued and sold.*

**Interbank Money Market (PUAB)**

*Overnight lending and borrowing of rupiah and foreign exchange between conventional banks.*

**Securitisation**

*The pooling of various similar debts (normally credit) into one security to be traded, including the principal and the interest. Loans that are securitised are usually high quality to increase income and lower credit risk; by converting credit a bank can boost its capital ratio and issue new credit. Securities sold by a bank to investors are*

kredit dan piutang, bank dapat meningkatkan rasio modal dan menerbitkan kredit-kredit yang baru; surat berharga yang akan dijual oleh bank kepada investor dijamin oleh aset yang akan dikonversikan sehingga sering disebut sebagai sekuritas terdukung aset (*asset backed securities*).

**Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**

Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

**Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kinerja (SPAMK)**

Sistem yang diterapkan di Bank Indonesia yang mengintegrasikan sistem perencanaan dengan anggaran dan manajemen kinerja, dengan menggunakan konsep *Balanced Scorecard*.

**Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)**

Suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank.

**Sovereign Rating**

Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. *Sovereign Rating* mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut.

**Term Deposit**

Penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. *Term deposit* dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan atas pencairan tersebut dikenakan biaya.

**Treasury Single Account**

Pengelolaan kas yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi keuangan negara melalui sentralisasi saldo kas berdasarkan *best practices*.

**Uang Kartal**

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

**Volatile food**

Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi.

*guaranteed against assets that can be converted (asset-backed securities).*

**Bank Indonesia Certificates (SBI)**

*A rupiah denominated security issued by Bank Indonesia as recognition of short-term debt.*

**Planning, Budgeting and Performance Management System (SPAMK)**

*A system applied at Bank Indonesia that integrates the planning system with budget and management performance, using the Balanced Scorecard concept.*

**Prime Lending Rate (SBDK)**

*The lowest interest rate used as a reference by banks to set their lending rates charged to the customer.*

**Sovereign Rating**

*The debt rating of a sovereign state institution, namely the government. The sovereign rating indicates the level of investment risk in a country used by foreign investors wishing to invest in that country.*

**Term Deposit**

*Rupiah based placements held at Bank Indonesia. Term deposits are eligible for early redemption if they adhere to specific requirements, for which a fee is incurred.*

**Treasury Single Account**

*A cash management system that creates state financial efficiency through a centralised account based on best practices.*

**Currency**

*Banknotes and coins issued and circulated by Bank Indonesia that are used as legal tender throughout the Republic of Indonesia.*

**Volatile food**

*A component of headline inflation that incorporates several food items whose prices often fluctuate.*

# Daftar Kontak

## Contact Lists

**KANTOR PUSAT HEAD OFFICE**

Jl. M. H. Thamrin No.2, Jakarta 10350  
Website : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)  
e-mail : [humasbi@bi.go.id](mailto:humasbi@bi.go.id)  
Telp. : 381 7187, 381 7317  
Fax. : 350 1867

**Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM)**

*Economic Research and Monetary Policy Department*  
Telp. : 350 1869, 381 8190  
Fax. : 380 0394

**Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM)**

*Economic and Monetary Statistics Department*  
Telp. : 345 2913, 381 8633  
Fax. : 350 1952

**Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)**

*Monetary Management Department*  
Telp. : 231 1956, 381 8332  
Fax. : 231 1462

**Departemen Pengelolaan Devisa (DPD)**

*Reserve Management Department*  
Telp. : 231 0755, 381 8100  
Fax. : 350 1871

**Departemen Internasional (DIInt)**

*International Department*  
Telp. : 231 0195, 381 8261  
Fax. : 231 1529

**Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP)**

*Banking Research and Regulation Department*  
Telp. : 231 0993, 381 7726  
Fax. : 231 1672

**Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP)**

*Bank Licencing and Banking Information Department*  
Telp. : 350 2003, 381 8009  
Fax. : 386 6029

**Departemen Pengawasan Bank 1 (DPB1)**

*Bank Supervision 1 Department*  
Telp. : 348 30117, 381 8469  
Fax. : 350 1976

**Departemen Pengawasan Bank 2 (DPB2)**

*Bank Supervision 2 Department*  
Telp. : 386 4970, 381 7372  
Fax. : 386 4971

**Departemen Pengawasan Bank 3 (DPB3)**

*Bank Supervision 3 Department*  
Telp. : 350 1961, 381 7046  
Fax. : 350 1890

**Departemen Kredit, BPR dan UKM (DKBU)**

*Credit, Rural Bank and Micro Small and Medium Enterprise Department*  
Telp. : 381 7525, 231 1832  
Fax. : 231 1237

**Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP)**

*Investigation and Banking Mediation Department*  
Telp. : 231 0419, 381 7170  
Fax. : 350 1918

**Departemen Perbankan Syariah (DPbS)**

*Islamic Banking Department*  
Telp. : 344 0472, 381 7513  
Fax. : 350 1989

**Departemen Pengedaran Uang (DPU)**

*Currency Circulation Department*  
Telp. : 231 0133, 381 7682  
Fax. : 386 6630

**Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)**

*Accounting and Payment System Department*  
Telp. : 386 4977, 381 7905  
Fax. : 348 30156

**Departemen Logistik dan Pengamanan (DLP)**

*Logistic and Security Department*  
Telp. : 231 1872, 381 7706  
Fax. : 231 1251

**Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI)**

*Information System Management Department*  
Telp. : 348 30161, 381 7619  
Fax. : 386 6072

**Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM)**

*Human Resources Department*  
Telp. : 231 1795, 381 7760  
Fax. : 231 0174

**Departemen Keuangan Intern (DKI)**

*Internal Financial Management Department*  
Telp. : 348 30118, 381 7603  
Fax. : 231 0662

**Departemen Hukum (DHk)**

*Legal Affairs Department*  
Telp. : 231 1423, 381 7861  
Fax. : 350 1835

**Departemen Audit Intern (DAI)**

*Internal Audit Department*  
Telp. : 231 0163, 381 7472  
Fax. : 384 1507

**Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat (PSHM)**

*Office of The Governor*  
Telp. : 386 4981, 381 7315  
Fax. : 386 6281

**Grup Sekretariat (GSK) Office of The Secretariat**

Telp. : 350 1853, 381 7117  
Fax. : 231 0592

**Departemen Museum Bank Indonesia (DMBI)**

*Bank Indonesia Museum Department*  
Telp. : 231 1371, 381 7604  
Fax. : 386 4935

**Departemen Penyelesaian Aset (DPA)**

*Asset Settlement Department*  
Telp. : 386 6348, 381 6957  
Fax. : 386 6546

**Departemen Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (DPSK)**

*Education and Central Banking Studies Department*  
Telp. : 350 1911, 381 7321  
Fax. : 350 1912

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA REGIONAL OFFICE**

**BALIKPAPAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 20, Balikpapan 76111  
Telp. : (0542) 411 350, 733 782,  
411 355, 411 356  
Fax. : (0542) 411 354

**BATAM**

Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432  
Telp. : (0778) 462 280, 462 253  
Fax. : (0778) 462 254

**CIREBON**

Jl. Yos Sudarso No.5-7, Cirebon  
Telp. : (0231) 202 684, 202 685,  
202 689, 205 044  
Fax. : (0231) 209 135



JEMBER

Jl. Gajah Mada No.224, Jember 62133  
Telp. : (0331) 485 478, 487 081, 484 487  
Fax. : (0331) 487 081

KEDIRI

Jl. Brawijaya No.2, Kediri  
Telp. : (0354) 681 559, 682 112  
Fax. : (0354) 682 951

LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24321  
Telp. : (0645) 43369, 44000  
Fax. : (0645) 43581

MALANG

Jl. Merdeka Utara No.7, Malang  
Telp. : (0341) 362 060, 366 054  
Fax. : (0341) 324 820

PEMATANG SIANTAR

Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematang Siantar  
Telp. : (062) 226 999  
Fax. : (062) 221 555

PURWOKERTO

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.98,  
Purwokerto 53116  
Telp. : (0281) 631 632, 631 635, 631 630  
Fax. : (0281) 636 201

PROVINSI ACEH

Jl. Jenderal Sudirman No.82, Banda Aceh  
Telp. : (0651) 42981, 42961  
Fax. : (0651) 41928, 45247

PROVINSI BANTEN

Jl. Jusuf Martadilaga No. 12, Serang, Banten  
Telp. : (0254) 223 788  
Fax. : (0254) 223 875

PROVINSI BENGKULU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1, Bengkulu 38116  
Telp. : (0736) 21734, 21735  
Fax. : (0736) 21736

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Panembahan Senopati No.4-6,  
Yogyakarta 55121  
Telp. : (0274) 377 286, 377 755, 371 766  
Fax. : (0274) 371 707

PROVINSI GORONTALO

Jl. D.I. Panjaitan No. 35, Gorontalo  
Telp. : (0435) 824 444  
Fax. : (0435) 827 993

PROVINSI JAMBI

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.14  
Telanaipura, Jambi 36122  
Telp. : (0741) 62277, 62445, 62578,  
63354, 63353  
Fax. : (0741) 62112

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111  
Telp. : (0561) 734 134, 734 018, 768 569,  
768 571, 736 637  
Fax. : (0561) 732 033

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Diponegoro No.17, Palangka Raya 73111  
Telp. : (0536) 322 2007, 322 2500,  
322 1133, 322 0742  
Fax. : (0536) 322 3855

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda 75122  
Telp. : (0541) 741 023, 741 375,  
741 022, 749 269  
Fax. : (0541) 732 644

PROVINSI LAMPUNG

Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung 35211  
Telp. : (0721) 486 355, 486 659, 489 611,  
487 775, 488 303  
Fax. : (0721) 481 131

PROVINSI MALUKU

Jl. Raya Pattimura No.7, Ambon  
Telp. : (0911) 352 761, 352 762, 352 763,  
351 423, 352 695  
Fax. : (0911) 356 517

PROVINSI MALUKU UTARA

Jl. Jos Sudarso, Ternate  
Telp. : (0921) 21217, 21218, 21983, 21219  
Fax. : (0921) 24017

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Pejanggik No.2, Mataram 83126  
Telp. : (0370) 623 600, 633 796,  
635 131, 635 132  
Fax. : (0370) 631 793, 639 123

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Tom Pello No.2, Kupang  
Telp. : (0380) 832 047, 832 931, 832 364,  
827 916, 833 085  
Fax. : (0380) 822 103

PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura  
Telp. : (0967) 534 581, 534 930,  
522 935, 533 266  
Fax. : (0967) 535 201

PROVINSI RIAU

Jl. Jenderal Sudirman No.464, Pekanbaru  
Telp. : (0761) 31055, 31098, 31010, 32000,  
31689, 31226  
Fax. : (0761) 31046

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu  
Telp. : (0451) 421 181, 423 484, 429 179  
Fax. : (0451) 421 180

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122  
Telp. : (0401) 321 878, 321 879,  
321 655, 322 717  
Fax. : (0401) 322 718

PROVINSI SULAWESI UTARA

Jl. 17 Agustus No.56, Manado  
Telp. : (0431) 868 102, 868 103,  
827 106, 868 720  
Fax. : (0431) 866 933

SIBOLGA

Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513  
Telp. : (0631) 22033, 328 925  
Fax. : (0631) 22383

SOLO

Jl. Jenderal Sudirman No.4, Solo 57111  
Telp. : (0271) 647 755, 641 837, 646 314  
Fax. : (0271) 647 132

TASIKMALAYA

Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112  
Telp. : (0265) 331 811, 331 813,  
335 040, 335 044  
Fax. : (0265) 333 528

TEGAL

Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal  
Telp. : (0283) 350 500  
Fax. : (0283) 356 560

WILAYAH I (SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA)

Jl. Jenderal Sudirman No.3, Makassar  
Telp. : (0411) 315 188, 315 189  
Fax. : (0411) 315 170

WILAYAH II (KALIMANTAN)

Jl. Lambung Mangkurat No.15,  
Banjarmasin 70111  
Telp. : (0511) 335 2027, 436 8182,  
436 6031, 436 8183  
Fax. : (0511) 335 4678

WILAYAH III (BALI DAN NUSA TENGGARA)

Jl. Letda Tantular No.4 Renon, Denpasar 80234  
Telp. : (0361) 221 199, 248 982  
Fax. : (0361) 248 993, 222 988

WILAYAH IV (JAWA TIMUR)

Jl. Pahlawan No.105, Surabaya  
Telp. : (031) 352 0011, 352 4708  
Fax. : (031) 352 0025

**WILAYAH V (JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA)**

Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang  
Telp. : (024) 831 0246, 831 0265, 831 0257  
Fax. : (024) 831 0339

**WILAYAH VI (JAWA BARAT DAN BANTEN)**

Jl. Braga No.108, Bandung 40111  
Telp. : (022) 423 5505, 423 0223,  
423 0224, 423 0227  
Fax. : (022) 423 7787

**WILAYAH VII (SUMATERA SELATAN, KEP. BANGKA  
BELITUNG, BENGKULU DAN LAMPUNG)**

Jl. Jenderal Sudirman No.510, Palembang  
Telp. : (0711) 352 126, 352 156, 354 258,  
352 864, 313 172  
Fax. : (0711) 312 013

**WILAYAH VIII (SUMATERA BARAT, RIAU, KEP. RIAU  
DAN JAMBI)**

Jl. Jenderal Sudirman No.22, Padang  
Telp. : (0751) 25409, 31700, 31702, 31703,  
30378, 30379, 39109  
Fax. : (0751) 27313

**WILAYAH IX (SUMATERA UTARA DAN ACEH)**

Jl. Balai Kota No.4, Medan  
Telp. : (061) 452 0800, 415 0500  
Fax. : (061) 415 2777, 453 6777

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
REPRESENTATIVE OFFICE**

**NEW YORK**

One Liberty Plaza  
165 Broadway, 31st Floor  
New York, N. Y. 10006  
Telp. : (212) 732 1958/59, 732 4011, 732 0467  
Fax. : (212) 732 4003

**LONDON**

10 City Road, London  
EC 1Y 2EH  
Telp. : (44-20) 7638 9043, 7638 2408  
Fax. : (44-20) 7374 2051

**TOKYO**

New Kokusai Building Room  
906 No.4-1, Marunouchi  
3-chome Chiyoda-ku  
Tokyo 100-0005 Japan  
Telp. : (03) 3201 2148, 3271 3415, 3271 3416,  
3271 3417  
Fax. : (03) 3285 0783

**SINGAPORE**

11 Collyer Quay #08-01  
The Arcade, Singapore 049317  
Telp. : (065) 6223 2700, 6223 2701, 6224 5806  
Fax. : (065) 6224 4290

# Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2011

*The 2011 Bank Indonesia Annual Financial Statements*



# Daftar Isi

## Contents

130	Kata Pengantar <i>Preface</i>
132	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan <i>Independent Auditor's Report on Financial Statements</i>
134	Neraca <i>Balance Sheet</i>
136	Laporan Surplus (Defisit) <i>Surplus (Deficit) Statement</i>
137	Laporan Perubahan Ekuitas <i>Statement of Changes in Equity</i>
138	Laporan Arus Kas <i>Cash Flow Statement</i>
140	Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan <i>Notes to the 2011 Financial Statements</i>
140	A. Umum <i>General</i>
147	B. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan <i>Significant Accounting Policies</i>
159	C. Penjelasan Pos-Pos Neraca, Laporan Surplus (Defisit) dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Rasio Modal <i>Notes to Balance Sheet, Surplus Deficit Statement and Statement of Changes in Equity</i>
210	D. Penjelasan Lainnya <i>Others</i>
213	E. Komitmen dan Kontijensi <i>Commitments and Contingencies</i>
	Lampiran <i>Appendices</i>
	Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bank Indonesia <i>Appendix 1: Organisation Structure of Bank Indonesia</i>
	Lampiran 2 : Daftar Singkatan <i>Appendix 2: List of Abbreviations and Acronyms</i>



## KATA PENGANTAR

### *Preface*

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan ini terdiri dari Neraca per 31 Desember 2011, Laporan Surplus Defisit, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, masing-masing untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011, berikut Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 ini memperoleh Pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK RI. Perolehan pendapat tersebut secara berturut-turut dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir ini merupakan sebuah pencapaian yang membesarkan hati dan mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa transparan dan akuntabel, dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (*good governance*). Upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik ini ditempuh, karena Bank Indonesia menyadari bahwa kredibilitas sebagai Bank Sentral dalam jangka panjang dapat terwujud dengan dukungan penerapan tata kelola penyelenggaraan Bank Sentral yang baik secara berkesinambungan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari penyalahgunaan sumber daya. Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*, sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas di masa yang akan datang dengan lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenalkan pula Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas saran dan masukannya bagi

*It is with thanks to the Almighty God that we herewith present the Annual Financial Statements of Bank Indonesia for 2011, as audited by the State Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The Financial Statements include the Balance Sheet as at December 31, 2011, as well as the Statements of Surplus Deficit, Changes in Equity, and Cash Flow for the period January 1 to December 31, 2011, along with the Notes to the Financial Statements.*

*The Annual Financial Statements of Bank Indonesia for 2011 have been given an Unqualified Opinion by the BPK RI. This marks the ninth consecutive year that Bank Indonesia's Financial Statements have received an Unqualified Opinion, an achievement that we can be proud of and which demonstrates Bank Indonesia's commitment to transparency and accountability in the context of implementing good governance. Through the application of good governance, Bank Indonesia will be able to perform its duties more effectively and efficiently, and avoid the misuse of resources. In turn, we expect that this will help increase stakeholder trust in Bank Indonesia so that it will be able to perform its duties in the future even more effectively.*

*On this occasion, the Board of Governors of Bank Indonesia would like to express sincere appreciation to the BPK RI for their advice and recommendations for*

perbaikan pelaksanaan tugas yang terus menerus di Bank Indonesia. Selanjutnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para pimpinan Satuan Kerja dan seluruh jajaran Bank Indonesia, yang telah menunjukkan kesungguhan, komitmen, dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas masing-masing serta dalam menindaklanjuti setiap saran dan masukan dari BPK RI, sehingga Bank Indonesia dapat mempertahankan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, sebagai wujud pelaksanaan pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 dipublikasikan pula dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui media massa dan situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).

Akhir kata, semoga laporan keuangan ini dapat menjadi referensi yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.

*the bringing about of continuing improvements at Bank Indonesia. Our sincere gratitude also goes to the heads of all line units and all employees of Bank Indonesia, who have shown consistent commitment and cooperation in performing their duties and implementing the advice and recommendations of the BPK RI with the result that Bank Indonesia has been able to maintain its Unqualified Opinion.*

*In addition, in implementation of article 61(4) of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as amended by Act Number 6 of 2009 on the Ratification into Law of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2008 concerning the Second Amendment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, the 2011 Annual Financial Statements have also been published by Bank Indonesia in the media and on the official website of Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>).*

*In conclusion, we hope that these financial statements will serve as beneficial references and will provide added value to the public.*

Jakarta, Mei 2012 May 2012  
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DEPUTY GOVERNOR OF BANK INDONESIA

Ardhayadi M.





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
*Independent Auditor's Report on the Financial Statements*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Neraca Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, serta Laporan Surplus (Defisit), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK RI juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern Bank Indonesia. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab Manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Bank Indonesia.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK RI yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi

*Pursuant to Law Number 15 of 2006 on the State Audit Board and Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as most recently amended by Law Number 6 of 2008, the BPK RI has audited the Bank Indonesia Balance Sheets per December 31, 2011 and December 31, 2010, and Surplus (Deficit) Statement, Changes in Equity, and Cash Flows for the years ended on the same dates. These financial statements are the responsibility of the management of Bank Indonesia. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.*

*The BPK RI also performed tests on Bank Indonesia's compliance with the provisions of the laws and regulations in effect, and its internal control regulations. The internal control structures and compliance with the laws and regulations in effect are the responsibility of the management of Bank Indonesia. The findings of these tests are presented separately from the Independent Auditor's Report on the Financial Statements of Bank Indonesia.*

*We conducted our audits in accordance with the State Financial Audit Standards (SPKN) adopted by the BPK-RI, which incorporate the Professional Public Accounting Standards (SPAP) established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The said standards require us to plan and perform our audits to obtain reasonable assurances that the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimations made by management, as well*

signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

**Menurut opini BPK RI, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan bank sentral seperti dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan butir B.**

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern disampaikan dalam Laporan No.10/01b/LHP/XV/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 dan No.10/01c/LHP/XV/05/2012 tanggal 8 Mei 2012.

*as evaluating the overall presentation of the financial statements. The BPK-RI believes that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

***In our opinion, the financial statements as mentioned above present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Indonesia as at December 31, 2011 and December 31, 2010, and the results of its operations, as well as cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles and specific accounting policies generally adopted by Central Banks, as discussed in Note B to the Financial Statements.***

*The findings of our test of compliance with the laws and regulations in effect, and Bank Indonesia's internal control regulations, are presented separately in Reports Number 10/01b/LHP/XV/05/2012 and Number 10/01c/LHP/XV/05/2012, both dated May 8, 2012.*

Jakarta, 8 Mei 2012 May 8, 2012  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**THE STATE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan** In Charge of Audit  
  
**Syafri Adnan Baharuddin, Ak. MBA**  
 Register Negara No.D-4844 State Register Number D-4844

BANK INDONESIA  
NERACA

Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010  
(dalam Jutaan Rupiah)

AKTIVA	Catatan <i>Notes</i>	31 Desember 2011	31 Desember 2010 (Disajikan kembali)	ASSETS
		<i>December 31, 2011</i>	<i>December 31, 2010 (Reclassification)</i>	
1. Emas	B.6, C.2	33.510.109	29.759.509	1. Gold
2. Uang Asing	B.4, B.7, C.3	4.010	9.482	2. Foreign Currencies
3. Hak Tarik Khusus	B.4, B.8, C.4	24.445.657	24.398.707	3. Special Drawing Rights
4. Giro	B.4, B.9, C.5	22.514.306	11.840.208	4. Demand Deposits
5. Deposito	B.4, B.10, C.6	76.659.783	30.918.204	5. Time Deposits
6. Surat Berharga	B.4, B.11, C.7	843.126.744	766.098.413	6. Marketable Securities
7. Surat Utang Negara Republik Indonesia	B.12, C.8	82.402.779	27.479.241	7. Government Bonds
8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	B.13, C.9	0	0	8. Securities Purchased under Resale Agreements
9. Tagihan		258.789.993	264.291.743	9. Claims
9.1 Kepada Pemerintah	B.14, C.1, C.10	247.552.945	251.497.191	9.1 on Government
9.2 Kepada Bank	B.15, C.1, C.11	4.398.970	5.564.489	9.2 on Banks
9.3 Kepada Lainnya	B.16, C.1, C.12	6.838.078	7.230.063	9.3 on Others
10. Penyertaan	B.17, C.13	628.952	582.297	10. Equity Participation
11. Aktiva Lain-Lain	B.18, B.32, B.33 C.1, C.14, C.30	41.022.806	40.284.416	11. Other Assets
12. Penyisihan Aktiva	B.20, C.15	(11.263.320)	(15.649.892)	12. Allowance for bad debts
JUMLAH AKTIVA		1.371.841.819	1.180.012.328	TOTAL ASSETS

BANK INDONESIA  
BALANCE SHEET

As at December 31, 2011 and December 31, 2010  
(IDR millions)

BANK INDONESIA  
NERACA

Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010  
(dalam Jutaan Rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	31 Desember 2011	31 Desember 2010 (Disajikan kembali)	LIABILITIES AND EQUITY
	<i>Notes</i>	<i>December 31, 2011</i>	<i>December 31, 2010 (Reclassification)</i>	
A. KEWAJIBAN				A. LIABILITIES
1. Uang Dalam Peredaran	B.21, C.16	372.982.462	318.585.280	1. Currency in Circulation
2. Giro		343.132.261	258.697.530	2. Demand Deposits
2.1 Pemerintah	B.4, B.22, C.17	90.371.330	90.994.083	2.1 Government
2.2 Bank	B.4, B.22, C.18	251.387.574	166.163.309	2.2 Bank
2.3 Lainnya	B.4, B.22, C.19	1.373.357	1.540.138	2.3 Others
3. Sertifikat Bank Indonesia	B.23, C.20	117.367.163	195.500.837	3. Bank Indonesia Certificates
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	B.24, C.21	3.476.000	2.997.000	4. Bank Indonesia Sharia Certificates
5. Penempatan Berjangka	B.25, C.22	152.839.020	171.192.385	5. Term Deposits
6. Penempatan Dana	B.26, C.23	152.474.286	92.038.216	6. Deposit Facilities
7. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	B.27, C.24	17.403.100	9.175.700	7. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
8. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	B.28, C.25	68.752.428	7.000.320	8. Securities Sold under Repurchase Agreements
9. Pinjaman Dari Pemerintah	B.4, B.29, C.26	119.084	140.395	9. Loans from Government
10. Pinjaman Luar Negeri	B.4, B.30, C.27	4.477.603	5.217.852	10. Foreign Borrowings
11. Alokasi Hak Tarik Khusus	B.8, C.1, C.28	27.483.875	27.421.967	11. Allocation of Special Drawing Rights
12. Kewajiban Lain-Lain	B.19, B.32, C.1, C.29, C.30	21.762.262	23.246.045	12. Other Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		1.282.269.544	1.111.213.527	TOTAL LIABILITIES
B. EKUITAS				B. EQUITY
1. Modal	C.31	16.876.926	7.610.885	1. Capital
2. Cadangan Umum	C.32	41.555.776	62.250.542	2. General Reserves
3. Cadangan Tujuan	C.32	13.906.146	14.370.568	3. Statutory Reserves
4. Keuntungan Atau Kerugian yang Belum Direalisasi	B.31, C.33	42.382.140	5.725.994	4. Unrealized Gains/Losses
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan		(25.148.713)	(21.159.188)	5. Current Year Surplus (Deficit)
JUMLAH EKUITAS		89.572.275	68.798.801	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.371.841.819	1.180.012.328	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahunan.  
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahunan.  
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.



**BANK INDONESIA  
LAPORAN SURPLUS (DEFISIT)**

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011  
dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2010  
(dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	1 Januari – 31 Desember 2011	1 Januari – 31 Desember 2010 (Disajikan kembali)
	Notes	1 January – December 31, 2011	1 January – December 31, 2010 (Reclassification)
<b>PENERIMAAN</b>			<b>REVENUES</b>
1. Pengelolaan Moneter		<b>15.999.584</b>	<b>4.544.447</b>
1.1 Pengelolaan Devisa	C.34	23.421.345	17.969.953
1.2 Pengelolaan SSB Dalam Negeri	C.1, C.35	3.756.152	2.726.377
1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan	C.36	515.888	283.870
1.4 Selisih Kurs karena Transaksi Valuta Asing	C.37	(11.693.801)	(16.435.753)
2. Pengelolaan Sistem Pembayaran	C.38	<b>223.897</b>	<b>201.130</b>
3. Pengawasan Perbankan	C.1, C.39	<b>17.467</b>	<b>28.422</b>
4. Lainnya	C.1, C.40	<b>1.108.197</b>	<b>1.277.911</b>
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		<b>17.349.145</b>	<b>6.051.910</b>
<b>BEBAN</b>			<b>EXPENSES</b>
1. Pengendalian Moneter		<b>30.357.609</b>	<b>24.402.367</b>
1.1 Operasi Pasar Terbuka	C.41	30.092.015	24.176.801
1.2 Pengelolaan Devisa	C.42	67.827	38.787
1.3 Pinjaman Luar Negeri	C.43	178.422	158.643
1.4 Lainnya		19.345	28.136
2. Jasa Giro Pemerintah	C.44	<b>4.666.712</b>	<b>2.434.310</b>
3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran	C.45	<b>2.010.016</b>	<b>2.703.376</b>
3.1 Sistem Pembayaran Tunai		1.987.204	2.692.494
3.2 Sistem Pembayaran Non Tunai		22.812	10.882
4. Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	C.46	<b>174.917</b>	<b>149.878</b>
5. Umum dan Lainnya	C.47	<b>5.352.895</b>	<b>4.344.435</b>
5.1 SDM dan Logistik		4.294.839	4.066.347
5.2 Lainnya		1.058.056	278.088
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>42.562.149</b>	<b>34.034.366</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK</b>		<b>(25.213.004)</b>	<b>(27.982.456)</b>
<b>PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>64.291</b>	<b>6.823.268</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>(25.148.713)</b>	<b>(21.159.188)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahunan.  
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

**BANK INDONESIA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Periode 1 Januari – 31 Desember 2011  
(dalam Jutaan Rupiah)

**BANK INDONESIA  
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**

For the period of January 1 to December 31, 2011  
(IDR Millions)

I. EKUITAS	31 Desember 2010 <i>December 31, 2010</i>	Penambahan <i>Addition</i>	Pengurangan <i>Deduction</i>	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>	I. <i>EQUITIES</i>
1. Modal	7.610.885	9.266.041	0	16.876.926	1. <i>Capital</i>
2. Cadangan Umum	62.250.542	464.422	21.159.188	41.555.776	2. <i>General Reserves</i>
3. Cadangan Tujuan	14.370.568	0	464.422	13.906.146	3. <i>Statutory Reserves</i>
4. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	5.725.994	36.656.146	0	42.382.140	4. <i>Unrealized Gains (Losses)</i>
5. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(21.159.188)	(25.148.713)	(21.159.188)	(25.148.713)	5. <i>Current Year Surplus (Deficit)</i>
	<b>68.798.801</b>	<b>21.237.896</b>	<b>464.422</b>	<b>89.572.275</b>	
<b>I. KEWAJIBAN MONETER (Catatan C.48)</b>				<b>1.227.288.311</b>	<b>I. MONETARY LIABILITIES (Note C.48)</b>
<b>II. RASIO MODAL SEBELUM DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH (Catatan C.48)</b>				<b>2,71%</b>	<b>II. CAPITAL RATIO BEFORE DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS (Note C.48)</b>
<b>V. SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH</b>				<b>0</b>	<b>V. TRANSFER OF SURPLUS TO GOVERNMENT</b>
<b>IV. RASIO MODAL SETELAH DIKURANGI SISA SURPLUS YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH</b>				<b>2,71%</b>	<b>IV. CAPITAL RATIO AFTER DEDUCTED BY GOVERNMENT'S SHARE OF BI'S SURPLUS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahunan.  
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA  
LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011  
(dalam Jutaan Rupiah)

1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			1. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM OPERATIONS
1.1	Defisit	(25.148.713)	1.1 Deficit
1.2	Kenaikan Emas	(3.750.600)	1.2 Increase in Gold
1.3	Penurunan Uang Asing	5.472	1.3 Decrease in Foreign Currencies
1.4	Kenaikan Hak Tarik Khusus	(46.950)	1.4 Increase in Special Drawing Rights
1.5	Kenaikan Giro	(10.674.098)	1.5 Increase in Demand Deposits
1.6	Kenaikan Deposito	(45.741.579)	1.6 Increase in Deposits
1.7	Kenaikan Surat Berharga	(77.028.331)	1.7 Increase in Marketable Securities
1.8	Kenaikan Surat Utang Negara Republik Indonesia	(54.923.538)	1.8 Increase in Government Bonds
1.9	(Kenaikan) Penurunan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	0	1.9 (Increase) Decrease in Securities Purchased under Resale Agreements
1.10	Penurunan Tagihan	5.501.750	1.10 Decrease in Claims
1.10.1	Penurunan Tagihan kepada Pemerintah	3.944.246	1.10.1 Decrease in Claims on Government
1.10.2	Penurunan Tagihan kepada Bank	1.165.519	1.10.2 Decrease in Claims on Banks
1.10.3	Penurunan Tagihan kepada Lainnya	391.985	1.10.3 Decrease in Claims on Others
1.11	Penurunan Aktiva Lain-Lain	8.547.673	1.11 Decrease in Other Assets
1.12	Penyesuaian-penyesuaian:	(4.855.212)	1.12 Adjustments:
1.12.1	Penyisihan Aktiva	(4.386.572)	1.12.1 Allowance for Bad Debts
1.12.2	Penyusutan Aktiva Tetap	(489.693)	1.12.2 Fixed Asset Depreciation
1.12.3	Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud	21.053	1.12.3 Intangible Asset Amortization
1.12.4	Amortisasi Aktiva Sewa Guna Usaha	0	1.12.4 Capital Lease Amortization
1.13	Kenaikan Uang Dalam Peredaran	54.397.182	1.13 Increase in Currency in Circulation
1.14	Kenaikan Giro	84.434.731	1.14 Increase in Demand Deposits
1.14.1	Penurunan Giro Pemerintah	(622.753)	1.14.1 Decrease in Government Demand Deposits
1.14.2	Kenaikan Giro Bank	85.224.265	1.14.2 Increase in Bank Demand Deposits
1.14.3	Penurunan Giro Lainnya	(166.781)	1.14.3 Decrease in Other Demand Deposits
1.15	Penurunan Sertifikat Bank Indonesia	(78.133.674)	1.15 Decrease in Bank Indonesia Certificates
1.16	Kenaikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	479.000	1.16 Increase in Bank Indonesia Sharia Certificates
1.17	Penurunan Penempatan Berjangka	(18.353.365)	1.17 Decrease in Term Deposits
1.18	Kenaikan Penempatan Dana	60.436.070	1.18 Increase in Deposit Facilities
1.19	Kenaikan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	8.227.400	1.19 Increase in Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities
1.20	Kenaikan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	61.752.108	1.20 Increase in Securities Sold under Repurchase Agreements
1.21	Kenaikan Alokasi Hak Tarik Khusus	61.908	1.21 Increase in Special Drawing Rights
1.22	Penurunan Kewajiban Lain-Lain	(1.483.783)	1.22 Decrease in Other Liabilities
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			Net Cash Flows/Cash Equivalents from Operating Activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahunan.  
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

BANK INDONESIA  
LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011  
(dalam Jutaan Rupiah)

2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			2. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM INVESTMENTS		
2.1	Kenaikan Penyertaan	(46.655)	2.1	Increase in Equity Participation	
2.2	Kenaikan Aktiva Tetap	(8.784.215)	2.2	Increase in Fixed Assets	
2.3	(Kenaikan) Penurunan Aktiva Sewa Guna Usaha	0	2.3	(Increase) Decrease in Finance-Leased Assets	
2.4	Kenaikan Aktiva Tidak Berwujud	(33.208)	2.4	Increase in Intangible Assets	
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(8.864.078)	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Investments		
3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			3. CASH FLOWS/CASH EQUIVALENTS FROM FINANCING ACTIVITIES		
3.1	Kenaikan Modal	9.266.041	3.1	Increase in Capital	
3.2	Penurunan Pinjaman dari Pemerintah	(21.311)	3.2	Decrease in Loans from Government	
3.3	Penurunan Pinjaman Luar Negeri	(740.249)	3.3	Decrease in Foreign Borrowings	
3.4	Penurunan Cadangan Umum	(20.694.766)	3.4	Decrease in General Reserve	
3.5	Penurunan Cadangan Tujuan	(464.422)	3.5	Decrease in Statutory Reserve	
3.6	Kenaikan Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi	36.656.146	3.6	Increase in Unrealized Gains/Losses	
3.7	Defisit Tahun Lalu	21.159.188	3.7	Previous Year's Deficit	
Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		45.160.627	Net Cash Flows/Cash Equivalents from Financing Activities		
4. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/ SETARA KAS			4. NET INCREASE/DECREASE IN CASH FLOWS/ CASH EQUIVALENTS		
		0			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahunan.  
See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

A. UMUM

1. Organisasi Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia.

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial untuk mencari keuntungan, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian nilai Rupiah dan terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior, serta sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

A. GENERAL

1. Organisation of Bank Indonesia

*Bank Indonesia is the Central Bank of the Republic of Indonesia and was established based Republic of Indonesia Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, as amended by Act Number 6 of 2009 on the Ratification into Law of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2008 concerning the Second Amendment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia.*

*In accordance with Article 7 of Republic of Indonesia Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, the objective of Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of the Rupiah. To accomplish the objective, Bank Indonesia has the following duties:*

- a. To formulate and implement monetary policy;*
- b. To regulate and to safeguard the smooth operation of the payment system; and*
- c. To regulate and to supervise the banking sector.*

*In relation to those duties, the activities of Bank Indonesia are not performed on a commercial basis, but are aimed at controlling the Rupiah and maintaining financial system stability.*

*In performing its duties, Bank Indonesia is led by the Board of Governors, which consists of a Governor, a Senior Deputy Governor and at least 4 (four) and a maximum of 7 (seven) Deputy Governors. The members of the Board of Governors as at December 31, 2010 were as follows:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

- Gubernur *Governor* : Darmin Nasution
- Deputi Gubernur Senior *Senior Deputy Governor* : -
- Deputi Gubernur *Deputy Governor* : Hartadi A. Sarwono  
Muliaman D. Hadad  
Ardhayadi M.  
Budi Mulya  
Halim Alamsyah  
Ronald Waas

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, diatur bahwa Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Khusus untuk Deputi Gubernur, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.

Sejak 1 September 2010, Bank Indonesia tidak memiliki Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. DGS sebelumnya dijabat oleh Sdr. Darmin Nasution yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010 telah diberhentikan dengan hormat sebagai DGS dan diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagai Gubernur Bank Indonesia yaitu pada tanggal 1 September 2010.

Selama tahun 2011, terdapat perubahan keanggotaan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Perubahan tersebut sehubungan dengan wafatnya Sdr. S. Budi Rochadi pada tanggal 10 Juli 2011. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011, Sdr. Muliaman D. Hadad diangkat kembali dan Sdr. Ronald Waas diangkat sebagai Anggota Dewan Gubernur terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011. Pada tanggal 14 Oktober 2011, Sdr. Budi Mulya mengajukan permohonan non aktif dalam pelaksanaan tugas. Dewan Gubernur Bank Indonesia menyetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 13/51/KEP.GBI/

*Under Article 41(1) of the Bank Indonesia Act, it is provided that the Governor, Senior Deputy Governor and Deputy Governors be proposed and appointed by the President with the approval of the House of Representatives (DPR). In the particular case of the Deputy Governor, under Article 41(2) a candidate for appointment as Deputy Governor is proposed by the President on the recommendation of the Governor.*

*Since September 1, 2010, the post of Bank Indonesia Senior Deputy Governor (SDG) has been vacant. It was previously occupied by Mr. Darmin Nasution, who, by virtue of Presidential Decision Number 95/P of 2010, dated August 21, 2010, was honorably discharged from his position as SDG and appointed Bank Indonesia Governor. The said Presidential Decision entered into effect on Mr. Nasution's swearing in as Bank Indonesia Governor on September 1, 2010.*

*A change occurred in the membership of the Bank Indonesia Board of Governors during 2011 in connection with the death of Mr. S. Budi Rochadi on July 10, 2011. By virtue of Presidential Decision Number 75/P of 2011, dated December 21, 2011, Mr. Muliaman D. Hadad was reappointed to the Board of Governors, and Mr. Ronald Waas appointed to the Board of Governors for the first time, counting from December 29, 2011. On October 14, 2011, Mr. Budi Mulya submitted a request to be made non-active. This request was approved by the Board of Governor by virtue of Resolution Number 13/51/KEP.GBI/INTERN/2011,*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

INTERN/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dengan masa non aktif paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan dimaksud.

Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 41 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia dan empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.481 pegawai.

2. Kebijakan Bank Indonesia yang Berimplikasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Tahunan

a. Kebijakan Moneter dan Perbankan

- 1) Bank Indonesia melakukan langkah-langkah penguatan operasi moneter dalam pengelolaan eksekusi likuiditas melalui pendalaman pasar uang domestik, meminimalkan dampak negatif aliran modal asing jangka pendek, serta mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mendukung kebijakan moneter dengan sasaran akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2011 Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE) Nomor 13/13/DPM tanggal 9 Mei 2011 dan SE Nomor 13/20/DPM tanggal 8 Agustus 2011 untuk menyempurnakan SE Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka. Penyempurnaan SE tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembatasan jangka waktu minimal (*minimum holding period*) kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari semula satu bulan menjadi enam bulan.
- b) Penyempurnaan ketentuan terkait *early redemption Term Deposit* sebagai berikut:
  - (1) Perubahan persyaratan pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) transaksi *Term Deposit*

*dated October 20, 2011, with the non-active period being set at a maximum of six months counting from the date of the Decision.*

*Bank Indonesia's headquarters are located at Jl. MH Thamrin Number 2 Jakarta, and it has 41 branches around Indonesia and four overseas representative offices. Bank Indonesia currently employs a total of 5,481 persons.*

2. Bank Indonesia Policies with Implications for the Presentation of the Financial Statements

a. Monetary and Banking Policy

- 1) *Bank Indonesia adopted a number of measures to strengthen its monetary operations in managing excess liquidity through deepening the domestic money market, minimizing the negative effects of short-term foreign capital flows, and optimizing the use of Open Market Operation instruments (OMO) in supporting monetary policy with the ultimate objective of ensuring and maintaining the stability of the Rupiah.*

*In this respect, during 2011 Bank Indonesia issued Bank Indonesia Circular Number 13/13/DPM, dated May 9, 2011, and Number 13/20/DPM, dated August 8, 2011 so as to amend and improve Circular Number 12/18/DPM, dated July 7, 2010, on Open Market Operations. The amendments in question included the following:*

- a) *Changing the minimum holding period of Bank Indonesia Certificates from one month previously to six months.*
- b) *Changing the rules governing the early redemption of Term Deposits as described below:*
  - (1) *Changing the requirements for the early redemption of Term Deposits, which originally stated that early*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

dari yang semula mensyaratkan bahwa *early redemption* hanya dapat dilakukan terhadap *Term Deposit* dengan jangka waktu paling kurang satu bulan pada saat diterbitkan dan hanya dapat dilakukan apabila Peserta OPT yang bersangkutan tidak memiliki Surat Berharga yang tercatat di Rekening Surat Berharga, disempurnakan menjadi hanya dapat dilakukan terhadap *Term Deposit* dengan jangka waktu paling kurang satu bulan pada saat diterbitkan.

- (2) Penyempurnaan rumus biaya *early redemption Term Deposit*.
- c) Skema transaksi baru, yaitu Transaksi Penjualan Valas Terhadap Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam Operasi Moneter Syariah, pada tahun 2011 Bank Indonesia telah melakukan pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek di pasar perdana untuk mendukung pencapaian target operasional pengendalian moneter syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menerbitkan SE Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011 perihal Tata Cara Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut Bank Indonesia dapat membuka *window* transaksi *Reverse Repo* SBSN secara lelang.

Pada tahun 2011 Bank Indonesia melakukan beberapa kali perubahan tingkat BI rate. Pada tanggal 4 Februari 2011, tingkat BI rate meningkat dari 6,50% menjadi 6,75%, namun tanggal 11 Oktober 2011 tingkat BI rate diturunkan menjadi 6,50%, dan tanggal 10 November 2011 tingkat BI rate diturunkan kembali menjadi 6,00% yang berlaku sampai dengan akhir tahun 2011.

*redemption could only be effected in respect of Term Deposits with terms of at least one month at the time of issuance, and provided that the OMO participant in question did not have securities listed in a securities account. Since the issuance of the new policy, early redemption can only be effected in respect of Term Deposits with terms of not later than one month at the time of issuance.*

- (2) *Changes to the Term Deposit early redemption cost formula.*
- c) *New transaction scheme, namely, Sale of Foreign Exchange to Government Bonds (SBN).*

*In Sharia Money Market Operations in 2011, Bank Indonesia has purchased short-term Sharia Government Bonds (SBSN) on the primary market to support the achievement of sharia monetary control operations. In addition, Bank Indonesia also issue Circular Number 13/27/DPM, dated December 1, 2011, on procedures for reverse repo sharia government bond transactions with Bank Indonesia in the context of sharia open market operations. Based on these new rules, Bank Indonesia can open the window for SBSN reverse repo auctions.*

*In 2011, Bank Indonesia also changed the BI rate on a number of occasions. On February 4, 2011, the BI rate was increased from 6.50% to 6.75%, but was lowered again on October 11, 2011 to 6.50% and then on November 10, 2011 to 6.00%, which level prevailed until the end of 2011.*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Dalam rangka mendorong kegiatan di pasar uang antar bank di tengah besarnya ekses likuiditas selama ini, pada tanggal 8 September 2011 Bank Indonesia memperlebar batas bawah koridor suku bunga operasi moneter yang semula 100 bps menjadi 150 bps di bawah BI rate.

2) Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (valas) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan GWM dalam valas.

- a) GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari:
- (1) GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah.
  - (2) GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah.
  - (3) GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dan KPMM Insentif. Kewajiban pemenuhan GWM LDR berlaku sejak tanggal 1 Maret 2011.

- b) Ketentuan pemenuhan GWM dalam valas diatur sebagai berikut:
- (1) Sejak 4 Oktober 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 sebesar 1% dari DPK dalam valas.
  - (2) Sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 3 Mei 2011 sebesar 5% dari DPK dalam valas.
  - (3) Sejak 1 Juni 2011 ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valas.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*For the purpose of encouraging activities on the interbank money market among excess liquidity, on September 8, 2011 Bank Indonesia widened the lower level of the interest rate corridor for money market operations from 100 bps originally to 150 bps lower than the BI rate.*

2) *Under Bank Indonesia Regulation Number 12/19/PBI/2010, dated October 4, 2010, concerning Bank Minimum Reserve Requirements (Giro Wajib Minimum - GWM) at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency, as most recently amended by Bank Indonesia Regulation Number 13/10/PBI/2011, dated February 9, 2011, banks are required to maintain GWM denominated both in Rupiah and in foreign currency.*

- a) *The GWM that must be maintained in Rupiah consists of:*
- (1) *Primary GWM in Rupiah of 8% of Rupiah third party funds.*

(2) *Secondary GWM in Rupiah of 2.5% of Rupiah third party funds*

(3) *GWM Loan to Deposit Ratio (LDR) is calculated using below or above disincentive parameter of the differences between Bank LDR and Targeted LDR, differences between Capital Adequacy Ratio (CAR) of Bank and CAR of Incentive. LDR GWM obligation has been enforced since March 1, 2011.*

- b) *Rules governing GWM in foreign currencies:*
- (1) *From October 4, 2010 to February 28, 2011: 1% of DPK in foreign currency;*
  - (2) *From March 1, 2011 to May 3, 2011: 5% of DPK in foreign currency;*
  - (3) *From June 1, 2011: 8% of DPK in foreign currency.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah diatur di dalam SE Nomor 11/29/DPNP tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah. Sesuai SE Nomor 11/29/DPNP dimaksud, komponen yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah SBI untuk seluruh jangka waktu, Surat Utang Negara (SUN) berupa Obligasi Negara (ON) dan/atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan), SBSN untuk seluruh jenis dan jangka waktu (tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan), dan kelebihan saldo rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LDR yang wajib dipelihara di Bank Indonesia (*Excess Reserve*).

Bank Indonesia memberikan jasa giro dengan tingkat bunga sebesar 2,5% per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah. Bagian tertentu yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah.

Kewajiban untuk memelihara GWM dalam Rupiah maupun valas dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan PBI Nomor 6/21/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valas bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*The procedures to conform Secondary GWM in Rupiah are stated in Circular Letter Number 11/29/DPNP dated October 16, 2009 concerning Calculation of Secondary GWM in Rupiah. According to Circular Letter Number 11/29/DPNP, the components that can be calculated as reserves in complying with Secondary GWM in Rupiah is SBI for all time frames, SUN in the form of ON and/or SPN for all types and time frames (not including non-tradable SUN), SBSN of all types and time frames (not including non-tradable SBSN), and Excess Reserves.*

*Bank Indonesia provides interest for bank demand deposits on working days of 2.5% per annum for particular amount of compulsory Primary GWM in Rupiah. This particular number is determined at 3% from DPK in Rupiah. Interest is given when Bank has satisfied all obligation of GWM in Rupiah.*

*The obligation to maintain GWM in Rupiah and in foreign currency is also applied to banks that perform their activities based on Sharia Principles, that is Commercial Sharia Banks and Shariah Business Units (Unit Usaha Syariah - UUS).*

*According to Bank Indonesia Regulation Number 6/21/2004 dated August 3, 2004 concerning Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for commercial banks that perform their*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah bagi perbankan syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valas sebesar 1% dari DPK dalam valas. Di samping itu, bagi perbankan syariah yang memiliki DPK diatas Rp 1 triliun dan memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah (*financing to deposit ratio*) kurang dari 80%, berlaku pula kewajiban tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1%, 2% dan 3%, tergantung kepada besarnya DPK bank yang bersangkutan. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp 1 triliun sampai dengan Rp 10 triliun maka Bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 1% dari DPK. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun maka bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 2% dari DPK. Jika bank memiliki DPK lebih besar dari Rp 50 triliun maka Bank wajib memelihara tambahan GWM sebesar 3% dari DPK. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas saldo rekening giro bank syariah.

b. Kondisi Keuangan Bank Indonesia

Sebagai dampak dari kondisi perekonomian global, dalam tahun 2011 Indonesia masih dihadapkan dengan derasnya dana masuk (*capital inflow*) dan akses likuiditas yang tinggi. Atas kondisi tersebut Bank Indonesia merespon dengan bauran kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan *capital flows*, dan kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan likuiditas serta koordinasi kebijakan dengan Pemerintah.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia tersebut telah mampu

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*activities based on sharia principles, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008, GWM in Rupiah for Sharia Banks is determined at 5% of Third Party Funds in Rupiah and GWM in foreign currency is determined at 1% of Third Party Funds in foreign currency. Other than that, for Sharia banks with Third Party Funds of more than IDR 1 trillion and the ratio of funding in Rupiah to Third Party Funds in Rupiah is less than 80%, additional GWM in Rupiah is applied at 1%, 2%, and 3%, depending on the amount of Third Party Funds of the banks. If a bank has a DPK of between IDR 1 trillion and IDR 10 trillion, then it is obliged to maintain an additional GWM of 1% of DPK. If the bank has a DPK of between IDR 10 trillion and IDR 50 trillion, then it is obliged to maintain an additional GWM of 2% of DPK. If the bank has a DPK of more than IDR 50 trillion, then it is obliged to maintain an additional GWM of 3% of DPK. Bank Indonesia does not provide yield to the balance of bank demand deposits account of Sharia banks.*

b. Bank Indonesia's Financial Condition

*As an impact of the global economic conditions, in 2011 Indonesia was still faced with strong capital inflows and a high level of excess liquidity. In response to these conditions, Bank Indonesia responded with a range of policies consisting of interest rate policy, exchange rate policy, macro prudential policy in the context of managing capital flows, macro prudential policies in the context of managing liquidity, and coordinating policy with the Government.*

*The policies implemented by Bank Indonesia were able to control the rate of inflation and*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

mengendalikan laju inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,79% menurun tajam jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2010 sebesar 6,96%. Sedangkan nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 secara rata-rata mengalami apresiasi 3,56% dibandingkan rata-rata tahun 2010.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah memerlukan biaya yang menjadi beban Bank Indonesia, dan menyebabkan Bank Indonesia kembali mengalami defisit pada tahun 2011, sebagaimana tahun sebelumnya. Laporan Surplus (Defisit) Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 menunjukkan defisit setelah pajak sebesar Rp 25.148.713 juta. Defisit tersebut terutama karena beban Operasi Pasar Terbuka (OPT) sebesar Rp 30.092.015 juta atau 70,70% dari keseluruhan beban Bank Indonesia tahun 2011.

Beban OPT dengan BI rate selama tahun 2011 berada pada tingkat 6% sampai dengan 6,75% tersebut, meningkat sebesar Rp 5.915.214 juta atau 24,47% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 24.176.801 juta.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). PAKBI disusun dengan mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Accounting Standard* (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia, dan praktik-praktik yang lazim dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan antara Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Agar senantiasa sejalan dengan perkembangan bisnis Bank Indonesia, PAKBI selalu disempurnakan, terakhir dengan SE Nomor 13/47/INTERN tanggal 23 Desember 2011 tentang Perubahan

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*stabilize the exchange rate. Inflation in 2011 stood at 3.79%, a sharp decline from 2010, when it was 6.96%. Meanwhile, the average Rupiah exchange rate in 2011 showed an appreciation of 3.56% compared with the average for 2010.*

*The policies pursued by Bank Indonesia in maintaining the stability of the Rupiah required significant expenditures by Bank Indonesia, which resulted in the Bank once again experiencing a deficit in 2011, as in the previous year. The Bank Indonesia Surplus (Deficit) Statement for the period from January 1, 2011 to December 31, 2011 shows an after-tax deficit of IDR 25,148,713 million, which was primarily due to the cost of mounting Open Market Operations, which accounted for IDR 30,092,015 million, or 70.70% of Bank Indonesia's overall expenses in 2011.*

*The cost of Open Market Operations at a BI rate in 2011 of between 6% and 6.75% increased by IDR 5,915,214 million, or 24.47%, compared with 2010 when the equivalent figure was IDR 24,176,801 million.*

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

*The Bank Indonesia Annual Financial Statements (LKTBI) have been prepared based on the Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines (PAKBI). PAKBI is in conformity with the generally accepted accounting principles as set out in the Indonesian Financial Accounting Standards (Standar Akuntansi Keuangan - SAK), International Accounting Standards (IAS), Bank Indonesia's internal regulations and best practices in other central banks, as well as the agreements between Bank Indonesia, the State Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK RI) and the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (Ikatan Akuntan Indonesia - IAI). In order to ensure conformity with the development of Bank Indonesia's business, PAKBI is continuously revised, most recently as declared in the*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

PAKBI. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam PAKBI, Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

*Circular Letter Number 13/47/INTERN dated December 23, 2011 concerning the Amendment of the Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines. In the case of any matters not provided for in the PAKBI, Bank Indonesia's Accounting Policy adheres to generally accepted accounting principles.*

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan LKTBI untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

LKTBI disajikan dalam mata uang pelaporan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

2. Taksiran Manajemen

Penyusunan LKTBI sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan, serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

3. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari penanaman dana Bank Indonesia diakui secara akrual. Akrualisasi pendapatan bunga dihentikan dan bunga yang telah diakui sebelumnya namun belum tertagih dibatalkan pada saat penanaman dana yang bersangkutan digolongkan sebagai *non-performing*.

4. Transaksi dalam Valuta Asing (Valas)

Bank Indonesia membukukan transaksi valas dengan metode pembukuan *multi currency accounting*. Transaksi valas dibukukan dalam

1. Basis for Preparation of Financial Statements

*The financial statements of Bank Indonesia are presented in Rupiah, and prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for certain accounts that are presented using other measurements as stated in the accounting policy of each account.*

2. Management Estimations

*The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that may affect the amount of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the amount of revenues and expenses reported during the year. The actual results may differ from those estimations.*

3. Recognition of Interest Income

*Interest income from the investment of Bank Indonesia's funds is recognized on an accrual basis. Accrued interest income that was previously recognized is reversed at the time when the placements are classified as nonperforming.*

4. Transactions in Foreign Currencies

*Bank Indonesia records transactions in foreign currencies using multi currency account. Transactions in foreign currencies are recorded in*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*original currency* maupun dalam valuta Rupiah. Transaksi valas dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat transaksi. Guna penyusunan Laporan Keuangan, aktiva dan pasiva dalam valas dijabarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca (kurs tengah valas yang dijadikan referensi) yang berlaku pada tanggal yang bersangkutan. Selisih penjabaran tersebut dicatat dalam rekening Cadangan Selisih Kurs dan disajikan di neraca pada pos Keuntungan atau Kerugian Yang Belum Direalisasi dalam kelompok Ekuitas sampai dengan valas yang bersangkutan berkurang. Bank Indonesia menggunakan metode *Net Currency Position* (NCP) dalam menatausahakan dan mencatat valas. Dalam metode tersebut, hasil revaluasi aktiva dan pasiva valas dihitung dari perkalian antara posisi *netto* valas dengan selisih antara kurs neraca dengan harga pokok rata-rata valas.

*the original currency or in Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah using the exchange rate prevailing at the transaction date. For the financial reporting purposes, assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rates prevailing at the balance sheet date (median exchange rate used as reference). The differences of amount arising from the periodical translations are recorded at the Exchange Rate Revaluation Reserves account, which is presented on the balance sheet in the Unrealized Gains/Losses in the Equity section, until the foreign exchanges are decreased. Bank Indonesia uses the Net Currency Position (NCP) method in administrating and recording foreign currency assets and liabilities. With this method, the result of the revaluation of foreign currency assets and liabilities is calculated from the multiplication of the net position of the foreign currency assets and liabilities with the difference between the balance sheet exchange rate and average cost of the foreign exchange currencies.*

Kurs Neraca Bank Indonesia untuk valas utama pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp 9.068,00/USD, Rp 11.738,99/EUR, Rp 13.969,26/GBP, Rp 13.877,67/SDR, dan Rp 11.680,32/JPY100.

*The rates of major foreign exchanges as at December 31, 2011 were IDR 9,068.00/USD, IDR 11,738.99/EUR, IDR 13,969.26/GBP, IDR 13,877.67/SDR, and IDR 11,680.32/JPY 100.*

5. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank Indonesia adalah:

- a. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Keuangan. Hubungan istimewa dengan Kementerian Keuangan diwujudkan antara lain dengan adanya kewajiban pemenuhan modal Bank Indonesia, pemberian jasa giro atas penyimpanan dana di Bank Indonesia serta kesepakatan persyaratan dan *rate* khusus untuk Surat Utang Pemerintah.
- b. Karyawan Bank Indonesia dan Badan/Yayasan/ Perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Bank Indonesia

5. Transactions with Related Parties

*Related parties of Bank Indonesia are as follows:*

- a. *Government of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Ministry of Finance. The special relationship with the Ministry of Finance is manifested in, among other things, the obligation to fulfill Bank Indonesia's capital requirements, to provide demand deposit services, and conditional agreements and special rates for Government Bonds.*
- b. *The employees of Bank Indonesia and entities/ foundations/enterprises that represent the interests of the employees of Bank Indonesia. These include among others the Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia – DAPENBI) and Bank Indonesia*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

(DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan  
Karyawan Bank Indonesia (YKKBI).

- c. Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan untuk  
menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia.  
Dalam pengertian ini antara lain Yayasan  
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Transaksi dengan pihak yang mempunyai  
hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan  
atau tidak dengan tingkat harga, persyaratan,  
dan kondisi yang sama dengan pihak yang tidak  
mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan  
dalam Laporan Keuangan.

6. Emas

Emas dinilai secara periodik berdasarkan harga  
pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga  
perolehan diakui sebagai Keuntungan atau  
Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan  
dalam kelompok Ekuitas.

7. Uang Asing

Uang Asing disajikan di Neraca sebesar nilai  
nominal.

8. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus atau *Special Drawing Rights*  
(SDR) merupakan potensi klaim Indonesia sebagai  
anggota *International Monetary Fund* (IMF) atas  
*freely usable currencies* (USD, JPY, GBP, dan EUR)  
milik negara anggota IMF lain sesama partisipan  
*SDR Department*, apabila negara anggota tersebut  
setuju untuk dilakukan konversi. Hak Tarik Khusus  
disajikan di Neraca sebesar nilai nominal ditambah  
hasil akrualisasi *interest on SDR holdings* dan  
*remuneration* yang masih harus diterima dan  
dikurangi dengan hasil akrualisasi *assessment fee*  
dan *charges*. Alokasi Hak Tarik Khusus merupakan  
rekening lawan atas klaim di IMF, dicatat sebesar  
nilai nominal dan disajikan di Neraca sebagai  
kewajiban pada pos Alokasi Hak Tarik Khusus.

*Employees Welfare Foundation* (Yayasan  
*Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia –*  
*YKK-BI*).

- c. *Entities/institutions/foundations that are*  
*established to support activities of Bank*  
*Indonesia. These include, among others, the*  
*Indonesian Banking Development Foundation*  
*(Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia*  
*– YPPI).*

*All significant transactions with related parties,*  
*whether or not made under similar terms and*  
*conditions as those conducted with third parties,*  
*are disclosed in the financial statements.*

6. Gold

*Gold is revalued periodically at fair market values.*  
*The differences due to the gold market price*  
*changes are recorded in the Equity Account under*  
*Unrealized Gains/Losses.*

7. Foreign Currencies

*Foreign Currencies are presented on the balance*  
*sheet at nominal value.*

8. Special Drawing Rights

*Special Drawing Rights (SDRs) Holding represents*  
*a potential claim to International Monetary Fund*  
*(IMF) countries on freely usable currencies (USD,*  
*JPY, GBP, EUR) owned by other IMF member as*  
*SDR Department member when those countries*  
*agree to convert. SDR are presented at their*  
*nominal value plus interest accruing on SDR*  
*holdings and Remuneration receivable, minus*  
*assessment fees and charges. The allocation of*  
*special drawing rights takes the form of a counter*  
*account to IMF claims, and are recorded based on*  
*their nominal value as presented on the Balance*  
*Sheet as liabilities in the Special Drawing Right*  
*Allocations item.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

9. Giro

Giro Bank Indonesia dalam valas pada bank  
sentral negara lain atau pada bank komersial  
di luar negeri disajikan di Neraca sebesar nilai  
nominal.

10. Deposito

Deposito Bank Indonesia dalam valas pada bank  
di luar negeri disajikan di Neraca sebesar nilai  
nominal ditambah akrualisasi bunga yang masih  
harus diterima.

11. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) dalam Rupiah dan  
dalam valas yang dimiliki oleh Bank Indonesia  
dikelompokkan berdasarkan tujuan pemilikan,  
yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Hold to*  
*Maturity*), Diperdagangkan (*Trading*), dan  
Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale*). SSB  
kelompok Dimiliki Hingga Jatuh Tempo disajikan  
berdasarkan harga perolehan setelah amortisasi  
premi/diskonto. SSB kelompok Diperdagangkan  
disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga  
pasar dengan harga perolehan diakui sebagai  
keuntungan (kerugian) tahun berjalan. SSB  
kelompok Tersedia untuk Dijual disajikan sebesar  
harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan  
harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau  
Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan  
dalam kelompok Ekuitas.

Dalam kelompok SSB dimiliki hingga jatuh tempo  
terdapat SSB yang ditempatkan kepada agen  
peminjam dalam transaksi peminjaman surat  
berharga (*securities lending*) sebesar nilai tercatat.  
Atas transaksi peminjaman surat berharga tersebut,  
Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk  
*cash* dan *non-cash*. Perolehan agunan tunai (*cash*  
*collateral*) yang diinvestasikan kembali dicatat  
sebagai nilai nominal dana yang diinvestasikan,  
sedangkan agunan non-tunai dari agen peminjam  
tidak diakui sebagai aset Bank Indonesia.

12. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia  
yang dimiliki Bank Indonesia terdiri dari Surat  
Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi

9. Demand Deposits

*Bank Indonesia Demand Deposits in foreign*  
*currencies in other central banks or correspondent*  
*banks are presented on the balance sheet at*  
*nominal value.*

10. Time Deposits

*Bank Indonesia Time Deposits in foreign currencies*  
*in correspondent banks are presented on the*  
*balance sheet at nominal value together with the*  
*accrued interest.*

11. Marketable Securities

*Marketable Securities (SSB) in Rupiah and*  
*foreign currencies are classified based on*  
*the purpose of ownership; i.e. Held to*  
*Maturity (HTM), which is presented at cost*  
*after premium/discount amortization, and*  
*Trading and Available for Sale (AFS), which are*  
*presented at fair market value. The differences*  
*due to the market price changes of Available for*  
*Sale securities are recorded in the Marketable*  
*Securities Revaluation Reserves Account, and*  
*presented in Unrealized Gains/Losses item, in*  
*the Equity section, while the differences due to*  
*the market price changes of Trading securities*  
*are recorded as gains or losses for the current*  
*year. Accrued interests are presented as a part*  
*of the Marketable Securities account.*

*Within the held-to-maturity group are securities*  
*that are placed with agents as part of securities*  
*lending transactions. These are recorded at*  
*listing value. In respect of such securities lending*  
*transactions, Bank Indonesia receives both cash*  
*and non-cash collateral. A gain on cash collateral*  
*that is reinvested is recorded at the nominal value*  
*of the invested funds, while non-cash collateral*  
*from agents is not recognized as a Bank Indonesia*  
*asset.*

12. Government Bonds

*Government Bonds consist of Treasury Bills (SPN)*  
*and Marketable Treasury Bonds. Treasury Bills are*  
*State Debt Securities with up to a one-year tenor,*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Negara (ON). SPN adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. Sedangkan ON adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Selain SUN, Bank Indonesia juga memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

SPN, ON dan SBSN untuk operasi moneter diklasifikasikan sebagai Tersedia untuk Dijual dan disajikan sebesar harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga perolehan diakui sebagai Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi dan disajikan dalam kelompok Ekuitas. Bunga ON yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Surat Utang Negara Republik Indonesia.

13. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo) terdiri dari surat berharga milik bank yang dijual secara bersyarat kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali disajikan sebesar harga penjualan oleh bank. Selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian kembali oleh bank diakui sebagai penerimaan bunga.

14. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Surat Utang Pemerintah, Obligasi Negara, dan Tagihan Lainnya kepada Pemerintah.

- a. Surat Utang Pemerintah  
Surat Utang Pemerintah adalah surat pengakuan utang jangka panjang Pemerintah kepada Bank Indonesia, yang tidak dapat

while marketable treasury bonds are State Debt Securities with a tenor of more than one year.

In addition to Government Bonds, Bank Indonesia also holds Sharia Government Bonds (SBSN), that is, Government Bonds issued according to Sharia principles as proof of participation in SBSN assets. These Sharia Bonds may be denominated in Rupiah or foreign currency, in accordance with the relevant legislation.

SPN, ON and SBSN for monetary operations are classified as available-for-Sale and presented at fair market value. The difference due to the market value changes is recorded in the Unrealized Gains or Losses item in the Equity section. The accrued interest on ON is presented in the Government Bonds item.

13. Securities Purchased Under Resale Agreements

Securities Purchased under Resale Agreements are securities owned by banks that are sold to Bank Indonesia with an agreement to repurchase under a specific price and terms. These securities are presented at their selling price. The differences between the selling price and the repurchase price are recognized as interest income.

14. Claims on Government

Claims on Government consist of State Debt Securities (Surat Utang Pemerintah – SUP), Government Bonds (Obligasi Negara – ON), and other claims on government.

- a. State Debt Securities  
State Debt Securities are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain dan pembayaran pokok beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi.

- b. Obligasi Negara  
ON yang termasuk dalam pos ini adalah Surat Utang Negara dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak dapat diperjualbelikan dan disajikan sebesar nilai nominal yang masih outstanding.
- c. Tagihan Lainnya kepada Pemerintah  
Tagihan Lainnya kepada Pemerintah, termasuk bunga atas tagihan kepada Pemerintah, disajikan di Neraca sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

15. Tagihan kepada Bank

Tagihan kepada Bank disajikan di Neraca sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh bank ditambah bunga yang masih harus diterima.

16. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya antara lain terdiri dari tagihan atas pemberian kredit *channeling*, serta sisa kredit program, yang disajikan di Neraca sebesar jumlah bruto yang belum dilunasi nasabah.

17. Penyertaan

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan persetujuan DPR RI.

Penyertaan dengan kepemilikan saham kurang dari 20% disajikan sebesar harga perolehan (cost), sedangkan penyertaan dengan kepemilikan saham sebesar 20% ke atas disajikan sebesar harga perolehan ditambah bagian laba atau rugi dari perusahaan anak setelah penyertaan tersebut dilakukan.

marketable, with regulated payment schedule of outstanding value and interest. State Debt Securities are presented at their outstanding nominal value.

- b. Government Bonds  
Government Bonds in this item are long-term bonds issued by the Government to Bank Indonesia which are non-transferable and non-marketable, and presented at their outstanding nominal value.
- c. Other Claims on Government  
Other claims on Government, including interest claims, are presented on the balance sheet at the outstanding value of the claims.

15. Claims on Banks

Claims on Banks are presented on the balance sheet at the outstanding value plus accrued interest.

16. Claims on Others

Claims on Others, which include claims in respect of channeling credits, and remaining program credits, are presented on the balance sheet at their gross outstanding value.

17. Equity Participation

In accordance with the Bank Indonesia Act, Bank Indonesia may conduct equity participation in legal entities or other entities deemed necessary in the implementation of the tasks of Bank Indonesia, with the approval of the Republic of Indonesia House of Representatives (DPR).

Equity participation with less than 20 percent ownership is presented at cost; meanwhile equity participation with ownership more than 20 percent is presented at cost price added by profit or loss of the subsidiary company subsequent to the equity participation.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Apabila terdapat penurunan nilai secara permanen, maka nilai tercatat penyertaan harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

*In case of permanent impairment in the value of equity participation, the recorded value of equity participation is adjusted accordingly.*

18. Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disajikan di Neraca pada pos Aktiva Lain-lain sebesar nilai perolehan aktiva tetap/aktiva tidak berwujud dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi, kecuali aktiva tetap yang dinilai kembali disajikan sesuai nilai revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

18. Fixed Assets/Intangible Assets

*Fixed Assets/Intangible Assets are presented on the balance sheet as part of other assets at cost less accumulated depreciation, save in the case of revalued fixed assets, which are stated at the revalued amount less accumulated depreciation.*

Aktiva Tetap/Aktiva Tidak Berwujud disusutkan/diamortisasi berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

*Fixed assets/intangible assets are depreciated/amortized based on estimated useful life of the asset concerned using the straight-line method.*

19. Imbalan Kerja

Bank Indonesia membentuk cadangan atas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja dari pegawai yang telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Bank Indonesia memiliki program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI dan Tunjangan Hari Tua berupa Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) serta Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (BKP) yang dikelola oleh YKKBI.

19. Employee Benefits

*Bank Indonesia provides an allowance for long-term benefits and post-employment benefits for the employees who have rendered their services and are entitled to accept the future benefits. Bank Indonesia has a defined benefit plan, which is funded through contributions to Bank Indonesia Pension Fund (Dana Pensiun Bank Indonesia), and Housing Loan (Baperum) as well as Pensioner Health Facilities (BKP) which are funded through contributions to YKKBI.*

Jumlah biaya dan kewajiban imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan secara berkala.

*The amount of contribution and benefit liabilities are calculated periodically by an independent actuary.*

Biaya dan kewajiban imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *projected unit credit* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 (revisi 2004).

*The costs and liabilities of employee benefits are determined separately for each plan by using the projected unit credit actuary method in accordance with the Statement of Financial Account Standard (PSAK) 24 (revised 2004).*

20. Penyisihan Aktiva

Bank Indonesia membentuk penyisihan aktiva secara gabungan atas tagihan, penanaman dana, dan aktiva lainnya baik dalam Rupiah

20. Allowance for Bad Debts

*Bank Indonesia provides a combined allowance for bad debts, including allowance for claims, placements, and other assets, in order to present*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

maupun valas, sehingga aktiva tersebut disajikan secara wajar. Penetapan persentase penyisihan aktiva dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktiva tersebut yang tercermin antara lain dari *rating* penanaman dana, kondisi keuangan peminjam, kelancaran pembayaran pada masa lampau, peringkat komposit bank, hubungan dan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan peminjam, dan faktor-faktor relevan lainnya.

*the assets fairly. The allowance percentage is decided by considering the inherent rate of risk in each particular asset, which are reflected by some factors e.g. investment rating, debtors' financial position, performance of prior payment, bank's composite grade, relationship and agreement between Bank Indonesia and debtors, and other relevant factors.*

21. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia.

21. Currency in Circulation

*Currency in circulation is presented as liabilities at total nominal value of bank notes and coins that has been declared as legal tender by Bank Indonesia and is not in the possession of Bank Indonesia.*

22. Giro

Giro atau simpanan pihak lain pada Bank Indonesia baik dalam Rupiah maupun dalam valas disajikan sebesar nilai nominal.

22. Demand Deposits

*Demand deposits of other parties in Bank Indonesia consist of demand deposits in Rupiah and demand deposits in foreign currencies, which are presented at nominal value.*

23. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI disajikan di Neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

23. Bank Indonesia Certificates

*Bank Indonesia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia – SBI) are securities in Rupiah that are issued by Bank Indonesia to recognize short-term payables. SBIs are presented on the balance sheet at nominal value deducted by a discount paid in advance.*

24. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus SBIS dicatat secara *cash basis*.

24. Bank Indonesia Sharia Certificates

*Bank Indonesia Sharia Certificates (Sertifikat Bank Indonesia Syariah – SBIS) are short-term certificates issued by Bank Indonesia based on sharia principles in Rupiah. SBISs are presented at nominal value. SBIS bonuses are recorded on a cash basis.*

25. Penempatan Berjangka (*Term Deposit*)

Merupakan penempatan dana Rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka (paling singkat satu hari dan paling lama 12 bulan

25. Term Deposits

*A Term Deposit is one of the Open Market Operation instruments where Monetary Operation participants place their funds in Bank Indonesia*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

yang dinyatakan dalam hari) di Bank Indonesia. Penempatan Berjangka disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

26. Penempatan Dana (*Deposit Facility*)

Merupakan penempatan dana Rupiah milik bank di Bank Indonesia (*Deposit Facility*), berjangka waktu *overnight* dan disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

27. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facility* syariah. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah disajikan sebesar nilai nominal. Imbalan bonus Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dicatat secara *cash basis*.

28. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali adalah surat berharga milik Bank Indonesia yang dibeli secara bersyarat oleh bank, dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto yang belum diamortisasi.

29. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah antara lain terdiri dari pinjaman dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL) dalam Rupiah dan obligasi Pemerintah dalam valas yang disajikan di Neraca sebesar nilai yang belum ditarik oleh Pemerintah setelah dikurangi diskonto.

30. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri atau fasilitas pinjaman yang diterima Bank Indonesia dari pihak lain di luar negeri dalam valas, disajikan sebesar nilai nominal

*Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011*

*for a certain period of time, with the minimum period being one day and the maximum being 12 months. A Term Deposit is presented at nominal value deducted by discount.*

26. *Deposit Facilities*

*Deposit Facilities are the facilities given to banks to place their funds overnight in Bank Indonesia. Deposit Facilities are presented at nominal value deducted by discount.*

27. *Bank Indonesia Shariah Deposit Facilities*

*Bank Indonesia Deposit Facilities (FASBIS) are deposit facilities provided by Bank Indonesia to the Banks for placing funds in Bank Indonesia in the framework of the Sharia standing facilities. FASBIS are presented at nominal value. FASBIS bonuses are recorded on a cash basis.*

28. *Securities Sold Under Repurchase Agreements*

*Securities Sold under Repurchase Agreements are Bank Indonesia securities that are purchased by banks with an agreement to resell under an agreed price and terms. These securities are presented at cost, less unamortized discount.*

29. *Loans from Government*

*Loans from Government consist of loans as part of the Two Step Loan (TSL) program in Rupiah and Government bonds in foreign currencies, which are presented on the Balance Sheet at the outstanding amount after discount.*

30. *Foreign Borrowings*

*Foreign borrowings or loan facilities received by Bank Indonesia from foreign parties in foreign*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

yang belum dilunasi dengan memperhitungkan bunga yang masih harus dibayar.

31. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi

Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi merupakan penyajian atas hasil revaluasi surat berharga, selisih hasil penjabaran aktiva dan pasiva valas ke dalam nilai Rupiah, dan hasil revaluasi aktiva lainnya dan disajikan dalam kelompok Ekuitas.

32. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Bank Indonesia merupakan subyek pajak. Oleh karena itu, surplus Bank Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan (PPH).

Bank Indonesia sejak tahun 2009 telah mengadopsi PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Berdasarkan PSAK 46, entitas menyajikan dampak pajak penghasilan baik kini maupun tanguhan terhadap Surplus (Defisit) tahun berjalan.

Pengaturan pengenaan PPh atas surplus Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan:

- 1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan obyek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*) setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli 2011.

BANK INDONESIA

*Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011*

*currencies are presented at the outstanding amount after calculation of accrued interest.*

31. *Unrealized Gains/Losses*

*Unrealized Gains/Losses present the recognition of securities revaluation, translation of assets and liabilities in foreign exchange into Rupiah, and other assets revaluation, and is presented in the Equity section.*

32. *Taxation*

*In accordance with Republic of Indonesia Act Number 36 of 2008, Bank Indonesia is a Tax Subject. Therefore, Bank Indonesia's surplus (deficit) is an object of Income Tax (Pajak Penghasilan – PPh).*

*Starting 2009, Bank Indonesia has adopted PSAK Number 46 concerning Accounting of Income Tax. Based on PSAK 46, income tax is calculated based on the accounting surplus (deficit) for the current year.*

*Bank Indonesia's income tax liability is further regulated by Government Regulation Number 94 of 2010 concerning the Calculation and Redemption of Income Tax in the Current Year, specifically through article 7:*

- 1) *Bank Indonesia's surplus object of income tax is a BI's surplus according to audited financial statements after adjustment or fiscal correction based on the income tax regulations and having regard to BI's characteristics.*
- 2) *Procedures for calculating and paying income tax applied to BI's surplus as stated in paragraph (1) is regulated in Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.03/2011, dated July 11, 2011.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam tahun berjalan disebutkan bahwa karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia antara lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

Pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang, yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan atau banding, pada saat keputusan atas keberatan atau banding tersebut telah ditetapkan.

33. Aktiva Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan Metode Aktiva dan Kewajiban (*Asset and Liability Method*). Metode ini juga mengatur untuk mengakui manfaat pajak tangguhan atas kompensasi rugi fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah surplus fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aktiva pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*The Elucidation on Article 7 of Government Regulation Number 94 of 2010, dated December 30, 2010, explains that BI's characteristics related to surplus consist of exchange rate differences, allowance for bad debts, and fixed assets depreciation.*

*Current tax for the operative and previous periods are recognized as the amount of tax payable, calculated using the prevailing tax rate (tax regulation) or that which was substantively applicable on the date of the Balance Sheet.*

*A correction of tax liabilities is recognized when Tax Imposition Letter is received, or, if Bank Indonesia raises an objection or appeal, at the time a decision is made on the objection or appeal.*

33. Deferred Tax Assets

*Deferred tax is calculated using the prevailing tax rate at the time when the asset was recovered or the obligation was settled, that is, using the prevailing tax rate (tax regulation) or the tax rate that was substantively applicable on the date of the Balance Sheet.*

*All temporary differences between the asset and liabilities amounts recorded for the financial statements on the basis of tax liability shall be recognized as deferred taxes using the Asset and Liability Method. This method also provides for the recognition of deferred tax benefits as compensation for fiscal losses.*

*Deferred tax assets are recognized if there is a significant possibility that a fiscal surplus during the coming period will be sufficient to compensate for the deferred tax assets that have been recognized.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN SURPLUS (DEFISIT), DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DAN RASIO MODAL

1. Penyajian Kembali atas Pos-pos dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2010

Pada LKTBI Tahun 2010 dilakukan penyajian kembali berupa reklasifikasi beberapa pos karena adanya penyesuaian format neraca dan surplus (defisit) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia, dan adanya kebutuhan untuk menempatkan kembali beberapa pos pada pos yang seharusnya. Reklasifikasi LKTBI Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

C. NOTES TO THE BALANCE SHEET, SURPLUS DEFICIT STATEMENT AND STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

1. Reclassification of Items in the 2010 Bank Indonesia Financial Statements

*The 2010 Financial Statements contain reclassifications of a number of items due to changes in the Balance Sheet and Surplus (Deficit) formats in accordance with the rules prevailing in Bank Indonesia, as well as the need to make changes to a number of items. The said reclassifications are as follows:*

31 Desember 2010 December 31, 2010					
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya As previously reported			Reklasifikasi Reclassified		
Pos	Rp Juta IDR millions		Pos	Rp Juta IDR millions	Item
<b>Aktiva:</b>		<b>Assets:</b>			
Reinvestasi Cash Collateral	19.683.577	Reinvestasi Cash Collateral	-	-	
Tagihan Kepada Pemerintah	251.506.198	Claims on Government	Tagihan Kepada Pemerintah	251.497.191	Claims on Government
Tagihan Kepada Bank	10.886.737	Claims on Banks	Tagihan Kepada Bank	5.564.489	Claims on Banks
Tagihan Kepada Lainnya	7.221.056	Claims on Others	Tagihan Kepada Lainnya	7.230.063	Other Assets
Aktiva Lain-lain	15.278.591	Other Assets	Aktiva Lain-lain	40.284.416	Other Assets
<b>Jumlah Reklasifikasi Aktiva</b>	<b>304.576.159</b>	<b>Total Reclassified Assets</b>	<b>Jumlah Reklasifikasi Aktiva</b>	<b>304.576.159</b>	<b>Total Reclassified Assets</b>
<b>Kewajiban:</b>		<b>Liabilities:</b>			
-	-	-	Alokasi Hak Tarik Khusus	27.421.967	Allocation of Special Drawing Rights
Kewajiban Lain-lain	50.668.012	Other liabilities	Kewajiban Lain-lain	23.246.045	Other Liabilities
<b>Jumlah Reklasifikasi Kewajiban</b>	<b>50.668.012</b>	<b>Total Reclassified Liabilities</b>	<b>Jumlah Reklasifikasi Kewajiban</b>	<b>50.668.012</b>	<b>Total Reclassified Liabilities</b>
<b>Surplus (Defisit):</b>		<b>Surplus (Deficit):</b>			
<b>Penerimaan:</b>		<b>Revenues:</b>			
Pengelolaan Moneter: - Kegiatan Pasar Uang	2.726.592	Monetary Management: - Money Market Operations	Pengelola Moneter: - Pengelola SSB Dalam Negeri	2.726.377	Monetary Management: - Management of Marketable Securities
Pengawasan Perbankan	0	Banking Supervision	Pengawasan Perbankan	28.422	Banking Supervision
Penerimaan Lainnya	1.306.118	Other Revenues	Penerimaan Lainnya	1.277.911	Other Revenues
<b>Jumlah Reklasifikasi Penerimaan</b>	<b>4.032.710</b>	<b>Total Reclassified Revenues</b>	<b>Jumlah Reklasifikasi Penerimaan</b>	<b>4.032.710</b>	<b>Total Reclassified Revenues</b>



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Penjelasan atas reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi pos Reinvestasi *Cash Collateral* menjadi bagian dari pos Aktiva Lain-lain.
2. Reklasifikasi pos Tagihan Kepada Pemerintah, pos Tagihan Kepada Bank, dan pos Tagihan Kepada Lainnya karena:
  - a. Reklasifikasi tagihan bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) sebesar Rp 5.322.248 juta yang semula dicatat dalam pos Tagihan Kepada Bank menjadi bagian dari pos Aktiva Lain-Lain.
  - b. Reklasifikasi tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp 9.007 juta yang semula dicatat dalam pos Tagihan Kepada Pemerintah menjadi bagian dari pos Tagihan Kepada Lainnya.
3. Reklasifikasi pos Alokasi Hak Tarik Khusus, yang semula disajikan sebagai bagian dari pos Kewajiban Lain-Lain menjadi pos Alokasi Hak Tarik Khusus.
4. Reklasifikasi pos Kegiatan Pasar Uang, pos Pengelolaan SSB Dalam Negeri, Penerimaan Perbankan dan Penerimaan Lainnya karena:

- a. Perubahan nama pos Kegiatan Pasar Uang menjadi pos Pengelolaan SSB Dalam Negeri.
- b. Reklasifikasi penerimaan “Sanksi Pelanggaran GWM” dan “Penerimaan Sanksi Administratif - Perbankan” sebesar Rp 28.422 juta yang semula disajikan sebagai bagian dari pos Penerimaan Lainnya menjadi bagian dari pos Penerimaan Pengawasan Perbankan.
- c. Reklasifikasi penerimaan “Jasa Pemberian Informasi Uang” sebesar Rp 215 juta yang semula disajikan sebagai bagian dari pos Pengelolaan SSB Dalam Negeri menjadi bagian dari pos Penerimaan Lainnya.

Total aktiva, kewajiban, ekuitas, penerimaan, dan beban serta defisit per 31 Desember 2010 tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun sesudah penyajian kembali, yaitu masing-masing

*The above reclassifications are explained as follows:*

1. *Reinvestment of Cash Collateral was reclassified to Other Assets.*
2. *Claims to Government, Claims to Banks and Claims to Others were reclassified for the following reasons:*
  - a. *Reclassification of Debit Balance Facility (FSD) interest of IDR 5,322,248 million, originally recorded in Claims to Banks, to Other Assets.*
  - b. *Reclassification of claim to Peruri Perum of IDR 9.007 million, originally recorded in Claims to Government, to Claims to Others.*

3. *Reclassification of Special Drawing Rights Allocations, originally recorded as part of the Other Liabilities account, to the Special Drawing Rights Allocation account.*
4. *Reclassification of Money Market Operations, originally recorded as Domestic Bonds Management, Banking Revenues and Other Revenues because of the following:*
  - a. *Change in the name of Money Market Activities to Domestic Bonds Management.*
  - b. *Reclassification of “GWM violation sanctions” and “Revenue from Administrative Sanctions – Banking” amounting to IDR 28,422 million, originally presented as part of the Other Revenues account, to the Banking Supervision Revenues account.*
  - c. *Reclassification of “Financial Information Services” revenue of IDR 215 million, originally classified as part of the Domestic Bonds Management account, to the Other Revenues account.*

*Total assets, liabilities, equities, revenues and costs and the deficit per December 31, 2010 did not experience any change either prior to or after the reclassifications, remaining at IDR 1,180,012,328*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

sebesar Rp 1.180.012.328 juta, Rp 1.111.213.527 juta, Rp 68.798.801 juta, Rp 6.051.910 juta dan Rp 34.034.366 juta, serta Rp 21.159.188 juta.

*million, IDR 1,111,213,527 million, IDR 68,798,801 million, IDR 6,051,910 million and IDR 34,034,366 million, and IDR 21,159,188 million.*

2. Emas

Saldo emas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing TOZ 2,347,046.3100 atau setara dengan Rp 33.510.109 juta dan TOZ 2,347,046.3100 atau setara dengan Rp 29.759.509 juta.

Nilai emas disajikan berdasarkan harga emas terkini yang tersedia di pasar London pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu sebesar USD 1,574.50/TOZ.

2. Gold

*The gold balance as at December 31, 2011 and as at December 31, 2010 was TOZ2,347,046.3100 or the equivalent of IDR 33,510,109 million and TOZ2,347,046.3100 or equivalent to IDR 29,759,509 million, respectively.*

*The value of gold was presented based on the current market price for gold available on the London market as per December 31, 2011, which was USD1,574.50/TOZ.*

3. Uang Asing

Saldo uang asing per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp 4.010 juta dan Rp 9.482 juta.

3. Foreign Currencies

*The balances of foreign currencies as at December 31, 2011, and December 31, 2010, were equal to IDR 4,010 million and IDR 9,482 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011		31 Desember 2010		
	Valas	Rp juta	Valas	Rp juta	
	December 31, 2011		December 31, 2010		
	OCY	IDR millions	OCY	IDR millions	
Uang Asing dalam persediaan:					
USD	437,533.00	3.967	1,051,886.23	9.458	Foreign currencies in vault: USD
JPY	236,128.00	28	136,799.00	15	JPY
GBP	1,074.79	15	635.24	9	GBP
SGD	45.76	0	45.76	0	SGD
	4.010		9.482		

4. Hak Tarik Khusus

Hak Tarik Khusus diperhitungkan sebagai cadangan devisa. Saldo Hak Tarik Khusus berasal dari alokasi SDR dan bertambah jika terdapat penambahan alokasi SDR, pembelian SDR, serta penerimaan dalam SDR seperti *interest on SDR holdings, remuneration*, dan *refund of charges*. Saldo Hak Tarik Khusus berkurang jika terdapat pembayaran dalam SDR seperti *commitment fee, service charges, periodic charges, charges*

4. Special Drawing Rights

*SDR is part of foreign exchange reserves. The SDR balance is derived from the SDR allocation. Its increase is due to addition of SDR allocation, purchase of SDR and income denominated in SDR, such as interest on SDR holdings, remuneration and refunds of charges. The balance decreases due to various payments denominated in SDR such as commitment fee, service charges, periodic*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

alokasi SDR, dan *assessment fee*. Alokasi Hak Tarik Khusus dijelaskan dalam Catatan C.28.

*charges, SDR allocation charges and assessment fees. SDR allocation is explained in Note C.28.*

Saldo Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2011 sebesar SDR 1,761,510,149.00 atau setara dengan Rp 24.445.657 juta dan per 31 Desember 2010 sebesar SDR 1,762,096,220.00 atau setara dengan Rp 24.398.707 juta.

*The balance of SDR as at December 31, 2011 was SDR1,761,510,149.00 or the equivalent of IDR 24,445,657 million and as at December 31, 2010 was SDR 1,762,096,220.00 or the equivalent of IDR 24,398,707 million.*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Hak Tarik Khusus	24.446.489	24.400.038	- <i>Special Drawing Rights</i>
- Penerimaan YMH Diterima	7.796	15.535	- <i>Accrued Income</i>
- Biaya YMH Dibayar	(8.628)	(16.866)	- <i>Payments Due</i>
<b>Saldo Hak Tarik Khusus</b>	<b>24.445.657</b>	<b>24.398.707</b>	<b><i>Special Drawing Rights Balance</i></b>

5. Giro

Jumlah giro valas Bank Indonesia yang disimpan pada bank sentral dan bank komersial di luar negeri per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp 22.514.306 juta dan Rp 11.840.208 juta dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2011 <i>December 31, 2011</i>		31 Desember 2010		
	Valas	OCY	Rp juta	Rp juta	
	Bank Sentral <i>Central Banks</i>	Bank Komersial <i>Commercial Banks</i>	<i>IDR millions</i>	<i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
USD	1,623,172,031.54	23,789,312.37	14.934.645	7.450.704	<i>USD</i>
JPY	22,246,017,956.00	9,918,556,686.00	3.756.925	2.404.677	<i>JPY</i>
EUR	137,815,718.84	4,442,024.67	1.669.962	534.292	<i>EUR</i>
GBP	18,938,357.68	17,749,951.48	512.509	440.974	<i>GBP</i>
Valas lainnya			1.640.265	1.009.561	<i>Other Currencies</i>
			<b>22.514.306</b>	<b>11.840.208</b>	

Di antara saldo giro pada bank sentral tersebut, terdapat giro yang oleh Federal Reserve Bank of New York, New York, dan Bank of Japan, Tokyo, ditempatkan pada *Repo and Overnight* masing-masing sebesar USD 1,618,000,000.00 atau setara dengan Rp 14.672.024 juta, dan sebesar JPY 22,239,459,084.00 atau setara dengan

*The demand deposits in central banks including placements in Repo and Overnight, among them in the Federal Reserve Bank of New York, New York, and the Bank of Japan, Tokyo, amounting to USD1,618,000,000.00 or the equivalent of IDR 14,672,024 million, and JPY 22,239,459,084.00 or the equivalent of IDR 2,597,640 million. Income*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Rp 2.597.640 juta. Pendapatan atas *Repo and Overnight* tersebut diakui pada saat jatuh tempo.

*from Repo & Overnight was recognized on the due date.*

6. Deposito

Saldo deposito dalam valas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp 76.659.783 juta dan Rp 30.918.204 juta dengan rincian sebagai berikut:

6. Time Deposits

*The balances of time deposits in foreign currencies as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR 76,659,783 million and IDR 30,918,204 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011 Valas Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>OCY IDR millions</i>		31 Desember 2010 Valas Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>OCY IDR millions</i>		
USD	4,145,500,000.00	37.591.394	1,922,000,000.00	17.280.702	<i>USD</i>
AUD	2,524,900,000.00	23.235.821	370,000,000.00	3.382.729	<i>AUD</i>
NZD	811,220,000.00	5.683.732	1,411,000,000.00	9.788.770	<i>NZD</i>
EUR	792,500,000.00	9.303.150	0.00	0	<i>EUR</i>
Valas lainnya	25,500,000.00	359.833	0.00	0	<i>Other Currencies</i>
		<b>76.173.930</b>		<b>30.452.201</b>	
Deposito Khusus:					<i>Deposits:</i>
IMF PRGF (SDR)	25,000,000.00	346.942	25,000,000.00	346.160	<i>IMF PRGF (SDR)</i>
IMF Trust for Special PRGF (SDR)	4,850,030.00	67.307	4,850,030.00	67.156	<i>IMF Trust for Special PRGF (SDR)</i>
		<b>414.249</b>		<b>413.316</b>	
Bunga Deposito yang Masih Harus Diterima		71.604		52.687	<i>Accrued Interest</i>
<b>Total Deposito</b>		<b>76.659.783</b>		<b>30.918.204</b>	<b><i>Total Time Deposits</i></b>

Diantara saldo tersebut, terdapat Deposito khusus pada IMF yang terdiri dari:

- Deposito khusus pada IMF merupakan *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF) pada IMF sebesar SDR 25,000,000.00 atau setara dengan Rp 346.942 juta per tanggal 31 Desember 2011 dan setara dengan Rp 346.160 juta pada tanggal 31 Desember 2010.
- Deposito khusus lainnya pada IMF merupakan *Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and PRGF Subsidy Operations ("the Trust")* sebesar SDR 4,850,030.00 atau setara dengan Rp 67.307 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan setara Rp 67.156 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

*Among the said balances were special time deposits with the IMF, which consisted of:*

- Special time deposits with the IMF in the form of the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) amounting to SDR25,000,000.00 or the equivalent of IDR 346,942 million as at December 31, 2011 and the equivalent of IDR 346,160 million as at December 31, 2010.*
- The other special time deposit with the IMF was in the form of the Trust for Special PRGF Operations for the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) and Interim PRGF Subsidy Operations ("the Trust"), amounting to SDR4,850,030.00, or the equivalent of IDR 67,307 million as at December 31, 2011, and the equivalent of IDR 67,156 million as at December 31, 2010.*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Jangka waktu dan kisaran tingkat suku bunga rata-rata deposito tersebut adalah sebagai berikut:		The tenors and average interest rate range of the time deposits were as follows:	
	<b>31 Desember 2011</b> Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	<b>31 Desember 2010</b> Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
a. Deposito pada Bank koresponden			a. Time deposits in correspondent banks
- kurang dari 1 bulan	75.844.629	2.697.300	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	329.301	15.935.360	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	0	11.819.541	- More than 3 months
b. Deposito khusus			b. Special Time Deposits
- kurang dari 1 bulan	0	0	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	0	0	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	414.249	413.316	- More than 3 months
	<b>76.588.179</b>	<b>30.865.517</b>	

	<b>31 Desember 2011</b> <b>Bunga Setahun</b> <i>December 31, 2011</i> <i>Interest p.a.</i>	<b>31 Desember 2010</b> <b>Bunga Setahun</b> <i>December 31, 2010</i> <i>Interest p.a.</i>	
<b>Kisaran Tingkat suku bunga setahun</b>			<b>Interest Rate Range</b>
a. USD			a. USD
- kurang dari 1 bulan	0,12%	0,24%	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	-	0,28%	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	0,27%	- More than 3 months
b. AUD			b. AUD
- kurang dari 1 bulan	4,35%	-	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	-	4,70%	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	4,53%	- More than 3 months
c. NZD			c. NZD
- kurang dari 1 bulan	2,63%	-	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	2,83%	3,05%	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	3,03%	- More than 3 months
d. EUR			d. EUR
- kurang dari 1 bulan	0,30%	-	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	-	-	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
e. GBP			e. GBP
- kurang dari 1 bulan	0,51%	-	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	-	-	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	<b>31 Desember 2011</b> <b>Bunga Setahun</b> <i>December 31, 2011</i> <i>Interest p.a.</i>	<b>31 Desember 2010</b> <b>Bunga Setahun</b> <i>December 31, 2010</i> <i>Interest p.a.</i>	
f. CAD			f. CAD
- kurang dari 1 bulan	0,93%	-	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	-	-	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	-	-	- More than 3 months
g. SDR			g. SDR
- kurang dari 1 bulan	-	-	- Less than 1 month
- 1-3 bulan	-	-	- 1- 3 months
- Lebih dari 3 bulan	0,11%	0,29%	- More than 3 months

7. Surat Berharga

Surat-Surat Berharga (SSB) yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah SSB dalam valas. Saldo SSB per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing setara dengan Rp 843.126.744 juta dan Rp 766.098.413 juta dengan rincian sebagai berikut:

7. Marketable Securities

The marketable securities held by Bank Indonesia were in foreign currency with a balance at December 31, 2011 and December 31, 2010 of IDR 843,126,744 million and IDR 766,098,413 million, respectively, with the details being as follows:

	<b>31 Desember 2011</b>			<b>31 Desember 2010</b>			
	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	
	<i>December 31, 2011</i>			<i>December 31, 2010</i>			
	Acquisition cost (after premium/ discount amortization)	Revaluation	Fair Value and Accrued Interest	Acquisition cost (after premium/ discount amortization)	Revaluation	Fair Value and Accrued Interest	
	<i>IDR millions</i>	<i>IDR millions</i>	<i>IDR millions</i>	<i>IDR millions</i>	<i>IDR millions</i>	<i>IDR millions</i>	
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Tersedia Untuk Dijual:	68.161.609	-	68.161.609	72.994.091	-	72.994.091	Held to Maturity Available for Sale:
• Portofolio BI							• BI Portofolio
• Manajer Portofolio Eksternal :	721.183.814	16.234.551	737.418.365	665.503.715	4.137.575	669.641.290	• External Portfolio Manager:
- Counterparty	26.835.324	176.702	27.012.026	10.506.591	250.423	10.757.014	- Counterparty
- Asian Bond Fund	1.360.200	744.630	2.104.830	1.348.650	624.959	1.973.609	- Asian Bond Fund
• Automatic Investment	2.092.777	1.360.136	3.452.913	5.847.295	1.311	5.848.606	• Automatic Investment
Bunga Yang Masih Harus Diterima			4.977.001			4.883.803	Accrued Interest
	<b>819.633.724</b>		<b>843.126.744</b>	<b>756.200.342</b>		<b>766.098.413</b>	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

SSB ini merupakan penempatan dalam denominasi valas USD, GBP, EUR, AUD, NZD, JPY, MYR, MXN, dan ZAR.

Untuk SSB Dimiliki Hingga Jatuh Tempo per 31 Desember 2011 sebesar Rp 68.161.609 juta, terdiri dari: 1) sebesar Rp 7.738.765 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp 54.152.071 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp 6.270.773 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 5-10 tahun. Dalam SSB dimiliki hingga jatuh tempo tersebut termasuk penempatan pada *Third Party Securities Lending* (TPSL) sebesar Rp 30.467.091 juta. Atas penempatan tersebut, Bank Indonesia menerima *collateral* dalam bentuk *cash* sebesar Rp 16.841.761 juta sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.14 dan Catatan C.29, serta dalam bentuk SSB (*non cash*) sebesar Rp 14.365.573 juta yang ditatausahakan secara *extra comptable*.

TPSL dilakukan dengan cara meminjamkan sementara SSB milik Bank Indonesia kepada peminjam (*borrower*) melalui lembaga perantara (*securities lending agent*). TPSL dimaksudkan untuk memperluas pemanfaatan peluang pasar dalam rangka optimalisasi pengelolaan cadangan devisa. Atas transaksi TPSL, Bank Indonesia menerima jaminan (*collateral*) dalam bentuk *cash collateral* dan *non cash collateral*.

*Cash collateral* yang diterima melalui *securities lending agent* direinvestasikan, sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan. Untuk transaksi TPSL tersebut, Bank Indonesia mendapatkan penjaminan ganda (*double indemnification*) dari *securities lending agent* baik dari sisi peminjaman SSB (*lending side*) maupun dari sisi reinvestasi. Dalam hal ini, apabila *borrower* mengalami *default*, maka kerugian akan ditanggung oleh *securities lending agent*.

Untuk SSB Tersedia untuk Dijual kategori Portofolio Bank Indonesia dan *Automatic Investment*, per 31 Desember 2011 sebesar Rp 740.871.278 juta, terdiri dari: 1) sebesar

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

*Marketable securities are placements denominated in foreign currencies, predominantly in USD, GBP, EUR, AUD, NZD, JPY, MYR, MXN and ZAR.*

*Held-to-Maturity securities outstanding as at December 31, 2011, amounted to IDR 68,161,609 million, consisting of: 1) IDR 7,738,765 million due within 1 year; 2) IDR 54,152,071 million due within 1 to 5 years; and 3) IDR 6,270,773 million due within 5 to 10 years. Included in Held-to-Maturity securities was Third Party Securities Lending (TPSL) amounting to IDR 30,467,091. For the TPSL deals, Bank Indonesia received cash collateral of IDR 16,841,761 million as explained in Notes C.14 and C.29, while non cash securities collateral amounted to IDR14,365,573 million, which was administered on an extra comptable basis.*

*TPSL deals were carried by lending on a temporary basis securities held by Bank Indonesia to borrowers through securities lending agents. These deals were conducted so as to expand market opportunities in the context of optimizing the management of foreign exchange reserves. In respect of TPSL transactions, Bank Indonesia received collateral either in cash or non cash forms.*

*The cash collateral received through securities lending agents was reinvested so that Bank Indonesia obtained additional revenues. In respect of such TPSL transactions, Bank Indonesia received a double indemnification from securities lending agents on both the lend side and the reinvestment side. In this respect, should a borrower default, then the resulting loss would be borne by the securities lending agent.*

*Among the Available for Sale securities categorized in the BI Portfolio and Automatic Investments, as at December 31, 2011, these amounted to IDR 740,871,278 million, consisting*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Rp 209.596.545 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; 2) sebesar Rp 363.285.817 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; dan 3) sebesar Rp 167.988.916 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun.

8. Surat Utang Negara Republik Indonesia

Bank Indonesia memiliki Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON). Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN dan SBSN dapat diperjualbelikan dan dikelompokkan sebagai SSB Tersedia untuk Dijual.

Saldo SUN dan SBSN per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 82.402.779 juta dan Rp 27.479.241 juta dengan rincian sebagai berikut:

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

*of: 1) IDR 209,596,545 million due within less than 1 year; 2) IDR 363,285,817 million due within 1 to 5 years; and 3) IDR 167,988,916 million due within 5 to 10 years.*

8. Government Bonds

*Bank Indonesia holds Government of Indonesia securities (SUN) consisting of Treasury Notes (SPN) and Bonds (ON). In addition, Bank Indonesia also holds Government Sharia Securities (SBSN). SUN and SBSN are capable of being traded and are classified as Marketable Securities.*

*The balances of for SUN and SBSN as at December 31, 2011, and December 31, 2010, were IDR 82,402,779 million and IDR 27,479,241 million, respectively, with the details being as follows:*

31 Desember 2011			31 Desember 2010		
Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Acquisition Cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	Acquisition Cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest
IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions
a. Surat Utang Negara:			a. Government Securities :		
1) Obligasi Negara			1) Government Bonds		
- Tersedia utk dijual	69.712.469	8.693.178	78.405.647	18.370.561	2.514.529
- Bunga yang Masih Harus Diterima	0	0	1.995.874	0	0
	69.712.469	8.693.178	80.401.521	18.370.561	2.514.529
2) Surat Perbendaharaan Negara			2) Treasury Bills		
- Tersedia utk dijual	1.710.923	30.271	1.741.194	5.662.653	235.178
- Bunga yang Masih Harus Diterima	0	0	0	0	0
	1.710.923	30.271	1.741.194	5.662.653	235.178



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

31 Desember 2011			31 Desember 2010		
Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima	Harga Perolehan	Hasil Revaluasi	Harga Pasar dan Bunga Yang Masih Harus Diterima
Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
December 31, 2011			December 31, 2010		
Acquisition Cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest	Acquisition Cost	Revaluation	Fair value and Accrued Interest
IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions	IDR Millions
<b>b. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)</b>			<b>b. Government Sharia Securities Sharia Treasury Bills (SPNS)</b>		
- Tersedia utk dijual	256.483	3.581	260.064	-	-
- Bunga yang Masih Harus Diterima	0	0	0	-	-
<b>256.483</b>	<b>3.581</b>	<b>260.064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71.679.875</b>	<b>82.402.779</b>	<b>24.033.214</b>	<b>27.479.241</b>		

SUN dan SBSN diperoleh Bank Indonesia dalam rangka *building stock*, untuk digunakan sebagai instrumen moneter yang akan menggantikan SBI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SUN jenis ON diperoleh melalui pembelian di pasar sekunder sejak bulan April 2005, SUN jenis SPN diperoleh Bank Indonesia di pasar perdana sejak bulan Mei 2008, dan SBSN jangka pendek atau SPNS diperoleh di pasar perdana sejak bulan Agustus 2011.

SUN Tersedia untuk Dijual jenis SPN sebesar Rp 1.741.194 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun. Surat berharga jenis ON sebesar Rp 78.405.647 juta terdiri dari: (1) sebesar Rp 819.075 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun; (2) sebesar Rp 8.067.199 juta akan jatuh tempo dalam periode antara 1-5 tahun; (3) sebesar Rp 7.380.644 juta akan jatuh tempo dalam periode 5-10 tahun; dan (4) sebesar Rp 62.138.729 juta akan jatuh tempo di atas 10 tahun. Sedangkan SBSN jangka pendek atau SPNS per 31 Desember 2011 sebesar Rp 260.064 juta akan jatuh tempo dalam periode kurang dari satu tahun.

*SUN and SBSN were acquired by Bank Indonesia for the purpose of building stock, which was intended to replace Bank Indonesia Certificates (SBI) as monetary instruments as required by the State Treasury Act (Number 1 of 2004). ON were acquired on the secondary market starting from April 2005, whereas SPN were acquired by Bank Indonesia through the primary market starting from May 2008, and short-term SBSN and SPNS on the primary market since August 2011.*

*SPN classified as Available for Sale amounted to IDR 1,741,194 million due in less than one year. ON amounted to IDR 78,405,647 million, consisting of: 1) IDR 819,075 million due within less than one year, 2) IDR 8,067,199 due within 1 to 5 years; 3) IDR 7,380,644 million due within 5 to 10 years; and 4) IDR 62,138,729 million due over 10 years. Meanwhile, short-term SBSN or SPNS per December 31, 2011 stood at IDR 260,064 million, due within one year.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

9. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Repo*) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar nihil.

9. Securities Purchased under Resale Agreements

*The balance for Securities Purchased under Resale Agreements as of December 31, 2011, and December 31, 2010, was zero.*

10. Tagihan kepada Pemerintah

Tagihan kepada Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 247.552.945 juta dan Rp 251.497.191 juta, terdiri dari:

10. Claims on Government

*Claims on Government as at December 31, 2011, and December 31, 2010, amounted to IDR 247,552,945 million and IDR 251,497,191 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp juta	Rp juta
	December 31, 2011	December 31, 2010
	IDR millions	IDR millions
- Surat Utang Pemerintah	117.938.490	121.734.229
- Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003	126.697.948	126.697.948
- Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya	2.916.507	3.065.014
<b>247.552.945</b>	<b>251.497.191</b>	

a. Surat Utang Pemerintah (SUP)

Nilai SUP per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

a. Government Bonds (SUP)

*The values of SUP as at December 31, 2011, and December 31, 2010, were as follows:*

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp juta	Rp juta
	December 31, 2011	December 31, 2010
	IDR millions	IDR millions
Nilai Nominal :		Nominal value:
- SUP Nomor: SU-002/MK/1998	18.781.776	19.420.583
- SUP Nomor: SU-004/MK/1999	50.701.147	52.315.360
- SUP Nomor: SU-007/MK/2006	48.455.567	49.998.286
<b>117.938.490</b>	<b>121.734.229</b>	

1) SUP Nomor SU-002/MK/1998 (SU-002)

SU-002 diterbitkan tanggal 23 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke

1) SUP Number SU-002/MK/1998 (SU-002)

*SU-002 was issued on October 23, 1998 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the form of Debt Securities in conjunction with Government Regulation Number 60 of 1998 concerning Addition of The Republic of Indonesia's Equity*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT BEII).

Nilai nominal SU-002 adalah sebesar Rp 20.000.000 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-002 yang mengubah suku bunga dari 1% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-002 dengan total sebesar Rp 1.218.224 juta sejak 1 April 2010 s.d. 1 Oktober 2011, sehingga baki debet SU-002 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 18.781.776 juta.

**2) SUP Nomor SU-004/MK/1999 (SU-004)**  
SU-004 diterbitkan tanggal 28 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang jo. Persetujuan Bersama Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 6 Februari 1999.

Nilai nominal SU-004 adalah sebesar Rp 53.779.500 juta yang tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan *addendum* kelima SU-004 yang mengubah suku bunga dari 3% menjadi 0,1% per tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-004 dengan total sebesar

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

*Participation in PT Bank Ekspor Impor Indonesia (PT. BEII).*

*The nominal value of SU-002 was IDR 20,000,000 million, non-transferable and non-marketable.*

*Based on Act Number 41 of 2008 dated November 10, 2008 concerning the Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum to SU-002, which amends the interest rate from 1% to 0.1% per annum and has been effective since January 1, 2009.*

*The Government has paid the installments of SU-002 with a total amount of IDR 1,218,224 million for the period of April 1, 2011, to October 1, 2011, so that the outstanding balance of SU-002 as at December 31, 2011, was IDR 18,781,776 million.*

**2) SUP Number SU-004/MK/1999 (SU-004)**  
*SU-004 was issued on May 28, 1999 based on Presidential Decree Number 55 of 1998 concerning Domestic Loans in the Form of Debt Securities in conjunction with the Agreement between the Government and Bank Indonesia dated February 6, 1999.*

*The nominal value of SU-004 was IDR 53,779,500 million, non-transferable and non-marketable.*

*Based on Act Number 41 of 2008, dated November 10, 2008, concerning the Government Income and Expenditure Budget for the year 2009, the Minister of Finance issued the fifth addendum to SU-004 which amends the interest rate from 3% to 0.1% per annum and has been effective since January 1, 2009.*

*The Government has paid the installments on SU-004 in the total amount of IDR 3,078,353*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Rp 3.078.353 juta sejak 1 Juni 2010 s.d. 1 Desember 2011, sehingga baki debet SU-004 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 50.701.147 juta.

**3) SUP Nomor SU-007/MK/2006 (SU-007)**  
SU-007 diterbitkan tanggal 24 November 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Surat Utang Nomor SU-002/MK/1998 dan SU-004/MK/1999 tanggal 18 April 2006. Nilai nominal SU-007 adalah sebesar Rp 54.862.150 juta dan tidak dapat diperdagangkan.

SU-007 diterbitkan untuk mendudukkan tunggakan bunga dan hasil indeksasi SU-002 dan SU-004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tunggakan bunga SU-002 sebesar Rp 4.637.583 juta.
- b) Tunggakan bunga SU-004 sebesar Rp 12.291.887 juta.
- c) Hasil indeksasi SU-002 sebesar Rp 11.231.072 juta.
- d) Hasil indeksasi SU-004 sebesar Rp 26.701.608 juta.

Adapun persyaratan Surat Utang ini adalah sebagai berikut:

- a) SU-007 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2025.
- b) Bunga SU-007 sebesar 0,1% per tahun yang dihitung dari sisa pokok dan dibayar secara tunai oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia setiap enam bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Pembayaran bunga pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 2006 untuk pembayaran bunga yang jatuh tempo tanggal 1 Februari 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006.

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

*million for the period of June 1, 2010, to December 1, 2011, so that the outstanding balance of SU-004 as at December 31, 2011 was IDR 50,701,147 million.*

**3) SUP Number SU-007/MK/2006 (SU-007)**  
*SU-007 was issued on November 24, 2006, based on Act of the Republic of Indonesia Number 24 of 2002 concerning Government Bonds and the Agreement between the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia concerning the Restructuring of Government Bonds Number SU-002/MK/1998 and Number SU-004/MK/1999 dated April 18, 2006. The nominal value of SU-007 is IDR 54,862,150 million and it is non-tradable.*

*SU-007 was issued to substitute interest and indexation arrears on SU-002 and SU-004 until December 31, 2005, with the details being follows:*

- a) *SU-002 interest arrears amounting to IDR 4,637,583 million.*
- b) *SU-004 interest arrears amounting to IDR 12,291,887 million.*
- c) *SU-002 indexation arrears amounting to IDR 11,231,072 million.*
- d) *SU-004 indexation arrears amounting to IDR 26,701,608 million.*

*The terms and conditions of SU-007 are as follows:*

- a) *SU-007 became effective on January 1, 2006, and falls due on August 1, 2025.*
- b) *The SU-007 interest rate is 0.1% per annum calculated based on the remaining principal balances, and paid in cash by the Government to Bank Indonesia semi-annually on February 1 and August 1. The first interest payment was settled on December 1, 2006, to pay for interest due on February 1, 2006 and August 1, 2006.*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

c) Pokok SU-007 diangsur sebanyak 38 kali. Angsuran pertama jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Februari 2007 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Februari setiap tahunnya sehingga angsuran terakhir jatuh tempo dan dibayar tanggal 1 Agustus 2025. Pembayaran angsuran pokok dilakukan secara tunai atau dibayar dengan Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SU-007 dengan total sebesar Rp 6.406.583 juta sejak 1 Februari 2007 s.d. 1 Agustus 2011, sehingga baki debet SU-007 pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 48.455.567 juta.

**b. Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)**  
SRBI-01 diterbitkan sebagai pengganti SUP Nomor SU-001/MK/1998 dan Nomor SU-003/MK/1999 dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003. Nilai nominal SRBI-01 adalah sebesar Rp 144.536.094 juta.

- Adapun persyaratan SRBI-01 adalah sebagai berikut:
- 1) SRBI-01 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003, tanpa indeksasi, berjangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang.
  - 2) SRBI-01 dikenakan bunga tahunan sebesar 0,1% dari sisa pokok, yang dibayar oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.
  - 3) Pelunasan pokok SRBI-01 bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

c) *Principal repayment is divided into 38 installments. The first installment was due on February 1, 2007, the next installments will be due on August 1 and February 1 of each year until the final installment is due on August 1, 2025. Principal repayment may be settled in form of cash or marketable treasury bonds.*

*The Government has paid installments on SU-007 amounting to a total of IDR 6,406,583 million for the period from February 1, 2007 to August 1, 2011, so that the outstanding balance on SU-007 as at December 31, 2011 was IDR 48,455,567 million.*

**b. Treasury Bond (ON) Number SRBI-01/MK/2003 (SRBI-01)**  
*SRBI-01 was issued as the substitute for SUP Number SU-001/MK/1998 and SU-003/MK/1999 in relation to the implementation of the Agreement between the Government and Bank Indonesia concerning the Settlement of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003. The nominal value of the Bond is IDR 144,536,094 million.*

- The terms and conditions of ON SRBI-01 are as follows:*
- 1) *SRBI-01 became effective on August 1, 2003, without indexation, has a 30-year maturity period and is extendable.*
  - 2) *Interest on SRBI-01 is 0.1% per annum calculated based on the remaining principal balance, which will be paid by the Government semi-annually in February and August.*
  - 3) *SRBI-01 redemption is funded from the surplus of Bank Indonesia which is accruing to the Government and shall be performed in the event that the capital to*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Bank Indonesia di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Dalam hal SRBI-01 telah dilunasi dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah sebelum jangka waktu 30 tahun, maka SRBI-01 tersebut dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pemerintah telah melakukan pembayaran angsuran SRBI-01 dengan total sebesar Rp 17.838.146 juta, sehingga baki debet pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp 126.697.948 juta.

Pada tanggal 21 November 2011, Komisi XI DPR RI menyetujui perubahan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai Penyelesaian BLBI serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 selanjutnya disebut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2003 yang memuat:

- 1) Menghapus ketentuan mengenai *charge* yang menetapkan bahwa dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah membayar *charge* kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut, dan ketentuan lain dalam SKB Tahun 2003 yang terkait dengan pengenaan *charge* dimaksud.
- 2) Menambah ketentuan mengenai prosedur penambahan modal Bank Indonesia, dalam hal modal Bank Indonesia kurang dari Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).
- 3) Merestrukturisasi Obigasi Negara Nomor Seri SRBI-01/MK/2003 dari semula pembayaran sekaligus (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo tahun 2003

*monetary liabilities ratio of Bank Indonesia has exceeded 10%. If the capital to monetary liabilities ratio is less than 3%, the Government is obliged to pay a charge in order to maintain the ratio at the 3% level. If the redemption of the SRBI-01 is accomplished before 30 years from the surplus of Bank Indonesia that is accruing to the Government, then SRBI-01 will be declared settled and will be no longer effective.*

*The Government has paid installments on SRBI-01 amounting to IDR 17,838,146 million, so that the outstanding balance per December 31, 2011, stood at IDR 126,697,948 million.*

*On November 21, 2011, the DPR's Commission XI approved a changed in the Joint Agreement between the Government and Bank Indonesia on the resolution of BLBI and the Financial Relationship between the Government and Bank Indonesia dated August 1, 2003 (subsequently referred to as the Joint Agreement of 2003) so as to:*

- 1) *abolish the provision for the payment of a charge should the ratio of Bank Indonesia's capital to monetary obligations be less than 3%, in which case the Government was required to pay a charge in order to maintain the ratio at the 3% level, as well as other provisions in the Joint Agreement of 2003 concerning the said charge.*
- 2) *add a provision on the procedures for increasing Bank Indonesia's capital should it be less than IDR 2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah).*
- 3) *restructure Treasury Bond Series Number SRBI-01/MK/2003 from the original bullet payment upon maturity in 2003 to a self-liquidating system so that*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

dengan system *self-liquidating*, menjadi pembayaran dengan metode cicilan (*amortized*) sampai dengan jatuh tempo tahun 2043.

*amortized payments would continue to be made until maturity in 2043.*

Revisi SKB Tahun 2003 tersebut merupakan bagian dari pembahasan *asset-liability management* antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk rencana restrukturisasi SU-002, SU-004, dan SU-007 menjadi Surat Utang yang dapat diperdagangkan.

*The above amendments to the Joint Agreement of 2003 were part of the discussions on asset-liability management between the Ministry of Finance and Bank Indonesia, including the planned restructuring of SU-002, SU-004, and SU-007 into marketable securities.*

c. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya

c. Other Claims on Government in Rupiah

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
1) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional	2.826.956	2.826.956	1) <i>Claims due to Government membership Of international institutions</i>
2) Tagihan bunga kepada Pemerintah	89.360	237.867	2) <i>Claims due to loan interest</i>
3) Tagihan Lainnya dalam Rupiah	191	191	3) <i>Other claims in Rupiah</i>
<b>Jumlah</b>	<b>2.916.507</b>	<b>3.065.014</b>	

Kecuali Tagihan Bunga kepada Pemerintah, Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Bank Indonesia. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam Lembaga Internasional sebesar Rp 2.826.956 juta, terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada IMF sebesar Rp 2.764.861 juta, keanggotaan pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar Rp 57.434 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp 4.661 juta. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan telah mencatat Dana Talangan tersebut sebagai kewajiban/pasiva dalam pos “Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya”. Pemerintah dan

*Other than claims due to loan interest, other claims on Government in Rupiah were claims effective before the enactment of the Bank Indonesia Act, with the details being as follows:*

- a) *Claims due to Government membership in International Institutions amounted to IDR 2,826,956 million, consisting of IMF membership fee of IDR 2,764,861 million, membership in the IBRD amounting to IDR 57,434 million and other memberships amounted to IDR 4,661 million. In the Central Government’s Financial Statements for 2010, the Government, through the Ministry of Finance, recognized these claims as liabilities under “Other Domestic Long Term Liabilities”. Resolution of the claims is*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

Bank Indonesia saat ini sedang melakukan pembahasan penyelesaian dana talangan tersebut.

*being discussed between Bank Indonesia and the Government.*

- b) Tagihan bunga kepada Pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar Rp 89.360 juta terdiri dari:
- Tagihan bunga SU-002, SU-004, dan SU-007 sebesar Rp 29.403 juta.
  - Tagihan bunga SRBI-01 sebesar Rp 52.676 juta.
  - Tagihan dalam rangka Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp 7.281 juta.

- b. *Claims due to loan interest per December 31, 2011 amounted to IDR 89,360 million, consisting of:*
- *Interest claims on SU-002, SU-004, and SU-007 amounting to IDR 29,403 million.*
  - *Interest claims on SRBI-01 amounting to IDR 52,676 million.*
  - *Claims arising from loan subsidy program of IDR 7,281 million.*

11. Tagihan kepada Bank

11. Claims on Banks

Saldo Tagihan Kepada Bank per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 4.398.970 juta dan Rp 5.564.489 juta dengan rincian sebagai berikut:

*Claims on banks in Rupiah as at December 31, 2011, and December 31, 2010, amounted to IDR 4,398,970 million and IDR 5,564,489 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Pinjaman Subordinasi (SOL)	2.927.101	3.697.856	- <i>Subordinated loans (SOL)</i>
- Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) <i>executing</i>	1.365.149	1.849.076	- <i>Executing Bank Indonesia Liquidity Credit (KLBI)</i>
- Pinjaman Dua Tahap (TSL)	10.142	11.269	- <i>Two Step Loans (TSL)</i>
- Tagihan Bunga SOL, KLBI, dan TSL	96.578	6.288	- <i>Interest claims on SOL, KLBI, and TSL</i>
	<b>4.398.970</b>	<b>5.564.489</b>	

Tagihan kepada Bank berupa *Subordinated Loan* (SOL), KLBI dan TSL diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. KLBI adalah Kredit atau pembiayaan kepada bank yang sumber dananya berasal dari Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah. TSL adalah pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah yang diteruspinjamkan kepada bank pelaksana atau proyek melalui Bank Indonesia. Pinjaman Subordinasi (SOL) merupakan kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka penyehatan bank. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperbolehkan memberikan kredit

*Claims on banks in the form of SOL, KLBI and TSL were extended based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. KLBI is credit or financing provided to banks from Bank Indonesia’s own funds to support the implementation of government programs. TSL are foreign loans received by the government which are on lend to implementing or project banks through Bank Indonesia. Subordinated loans, subsequently referred to as SOL, as credits to are provided to banks in the context of bank recovery efforts. Since the enactment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, Bank Indonesia has been*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

berupa SOL, KLBI dan TSL. Saat ini Bank Indonesia masih mengelola SOL, KLBI dan TSL tersebut sampai dengan jatuh tempo.

*prohibited from providing SOL, KLBI and TSL credits. However, the bank is currently managing existing SOL, KLBI and TSL until their maturities.*

12. Tagihan kepada Lainnya

Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 6.838.078 juta dan Rp 7.230.063 juta, terdiri dari:

12. Claims on Others

*Claims on others in Rupiah as at December 31, 2011 and December 31, 2010, were IDR 6,838,078 million and IDR 7,230,063 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program	420.990	999.552	- <i>Claims on appointed State-Owned Enterprises due to credit program hand-over</i>
- Tagihan karena pemberian kredit <i>channeling</i>	5.842.935	5.851.580	- <i>Claims on channeling loans</i>
- Tagihan Lainnya	574.153	378.931	- <i>Other claims</i>
<b>Jumlah</b>	<b>6.838.078</b>	<b>7.230.063</b>	

Tagihan pada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pengalihan sisa kredit program adalah tagihan atas KLBI yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang selanjutnya sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tagihan tersebut dialihkan pengelolaannya kepada PT Permodalan Nasional Madani sebagai BUMN Koordinator.

*Claims on appointed state owned enterprises due to credit program handover consisted of claims in respect of KLBI that had been extended based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank. Since the enactment of Act Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, these claims have been transferred to PT Permodalan Nasional Madani as coordinator.*

Tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tagihan atas KLBI yang disalurkan melalui bank sebagai *channeling agent* namun hingga jatuh tempo tagihan tersebut masih belum terselesaikan. Termasuk dalam tagihan karena pemberian kredit *channeling* adalah tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp 5.702.027 juta.

*Claims on channeling loans are claims in respect of KLBI that was channeled through banks as channeling agents but which had not be settled as per the due dates. Included in claims on channeling laons are areas from the Agriculture Enterprise Credit (KUT) scheme amounting to IDR 5,702,027 million.*

BPK RI telah melakukan penelitian atas tunggakan KUT untuk memenuhi permintaan Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-152/MK.05/2008 tanggal 3 April 2008. Tujuan penelitian tersebut adalah menilai tunggakan KUT tahun penyediaan 1998/1999 pola *channeling*

*The BPK RI has conducted an audit on the KUT arrears in accordance with the request from the Minister of Finance set out in Letter Number S-152/MK.05/2008 dated 3 April 2008. The purpose of the audit was to assess the arrears from KUT channeling credits provided*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

per 31 Desember 2009 sesuai prosedur yang disepakati bersama (*agreed upon procedure*) dalam rangka *risk sharing* antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Perum Jamkrindo.

*in 1998/1999 as per December 31, 2009 in accordance with the procedures agreed in the context of risk sharing between the Government, Bank Indonesia and Perum Jamkrindo.*

BPK RI dengan surat Nomor 06/S/IV/01/2011 tanggal 14 Januari 2011 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Utama Jamkrindo. Sesuai LHP BPK RI, dari nilai tunggakan KUT sebesar Rp 5.702.027 juta diketahui antara lain:

- a. Sebesar Rp 1.539.052,03 juta tidak didukung dengan dokumen penyaluran KUT yang lengkap di bank pelaksana, seperti surat perjanjian kredit, bukti transfer, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) atau rekomendasi Kepala Kantor Departemen Koperasi (Kakandepkop).
- b. Sebesar Rp 266.869,13 juta merupakan tabungan beku di bank pelaksana.

*The BPK RI, through its Letter Number 06/S/IV/01/2011 dated January 14, 2011, submitted its audit report to the Minister of Finance, the Governor of Bank Indonesia and the Chief Executive of Jamkrindo. According to the BPK RI report, of the KUT arrears of IDR 5,702,027 million, the following matters had been identified:*

- a. IDR 1,539,052.03 million was not supported by full KUT documentation in the implementing banks, such as loan agreements, proof of transfer, Farmers' Group Needs Definitive Plans (RDKK) and recommendations from the Head of the Department of Cooperatives Office.*

- b. IDR 266,869.13 million was parked in frozen accounts in the implementing banks.*

Selanjutnya dalam rangka *risk sharing* BPK RI menyarankan agar Bank Indonesia, Pemerintah, dan Perum Jamkrindo, antara lain:

*As part of the risk sharing effort, the BPK RI subsequently recommended that Bank Indonesia, the Government and Perum Jamkrindo take the following actions, among others:*

- a. Menyepakati status tunggakan KUT Tahun Pengadaan (TP) 1998/1999 pola *channeling* yang tidak didukung dokumen penyaluran yang lengkap.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemda dan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian saldo rekening milik Pemda pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pelunasan KUT TP 1998/1999 pola *channeling*.

- a. Agree on the status of KUT channeling arrears for 1998/1999 that are not backed by full supporting documentation.*

- b. Coordinate with the relevant local governments and implementing banks for the purpose of settling the account balances of the local governments in the implementing banks used to accommodate the payment of channeling KUT loans in 1998/1999.*

Bank Indonesia telah meminta tanggapan kepada Kementerian Keuangan atas LHP BPK RI dan penegasan mengenai penyelesaian *risk sharing* tunggakan KUT 1998/1999 pola *channeling* melalui surat Nomor 13/3/GBI/DKBU tanggal 22 Juni 2011 namun belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan.

*Bank Indonesia has sought the response of the Ministry of Finance to the BPK RI report and stressed the need for risk sharing in respect of the 1998/1999 channeling KUT arrears through Letter Number 13/3/GBI/DKBU dated 22 June 2011, but no official response from the Ministry has been forthcoming thus far.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Selain itu, dalam Tagihan Lainnya juga terdapat tagihan kepada PT Rekakarya Mardi Sarana (RMS) sebesar Rp 1.071,9 juta, USD 761,661.10, dan £36,556.88 atau secara total setara Rp 8.489 juta. Tagihan tersebut terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2011 yang menetapkan bahwa PT RMS wajib membayar ganti rugi kepada Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia dengan surat Nomor 13/193/DPU tanggal 21 Desember 2011 telah menyampaikan putusan pengadilan dan melakukan penagihan kepada PT RMS.

Termasuk di dalam Tagihan Lainnya terdapat tagihan kepada Perum Peruri. Hal tersebut terkait dengan telah disepakatinya biaya cetak final atas pencetakan uang tahun 2010 sebesar Rp 1.409.595 juta dan tahun 2011 sebesar Rp 1.052.139 juta. Berdasarkan perhitungan antara biaya cetak final dan biaya cetak sementara, terdapat kelebihan bayar kepada Perum Peruri untuk pencetakan uang tahun 2010 sebesar Rp 104.520 juta dan kekurangan bayar untuk pencetakan uang tahun 2011 sebesar Rp 42.706 juta, sehingga masih terdapat tagihan kepada Perum Peruri sebesar Rp 61.814 juta. Atas tagihan tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan tagihan kepada Perum Peruri pada tanggal 11 April 2012 – lihat Catatan C.45.

13. Penyertaan

Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

*In addition, Other Claims also contains claims against PT Rekakarya Mardi Sarana (RMS) of IDR 1,071.9 million, USD 761,661.10, and GBP 36,556.88, or the equivalent of IDR 8,489 million. The said claim is related to the decision of the Central Jakarta District Court Number 83/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, dated 15 August 2011, which held that PT RMS must pay compensation to Bank Indonesia. Subsequently, Bank Indonesia, through Letter Number 13/193/DPU, dated December 21, 2011, forwarded the court decision and submitted its claim to PT RMS.*

*Other Claims also contains a claim against Perum Peruri in connection with an agreement on the final cost for the printing of currency in 2010 in the amount of IDR 1,409,595 million, and for 2011 in the amount of IDR 1,052,139 million. Based on the calculation of the final printing costs and the interim printing costs, Perum Peruri was overpaid for printing in 2010 by IDR 104,520 million, and underpaid for printing in 2011 by IDR 42,706 million. Thus, Bank Indonesia has a claim against Perum Peruri of IDR 61,814 million. In respect of this claim, Bank Indonesia submitted a demand on April 11, 2012 – see Note C.45.*

13. Equity Participation

*Bank Indonesia holds equity stakes in a number of banks and other financial institutions, with the details being as follows:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	Persentase kepemilikan	31 Desember 2011	Persentase kepemilikan	31 Desember 2010
	%	Rp juta	%	Rp juta
	Percentage Ownership	December 31, 2011	Percentage Ownership	December 31, 2010
	%	IDR millions	%	IDR millions
Penyertaan pada :				Equity participation in:
- Bank for International Settlements	0,55	583.612	0,55	582.297
- International Islamic Liquidity Management	6,67	45.340	0,00	0
		628.952		582.297

a. Penyertaan pada Bank for International Settlements (BIS)  
Tujuan penyertaan pada BIS adalah untuk memperoleh akses lebih besar terhadap kegiatan BIS dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan fasilitas yang disediakan, meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, meningkatkan kerjasama di bidang kebanksentralan yang berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan. Bank Indonesia membeli 3.000 lembar saham (0,55% dari total saham yang beredar) pada tanggal 29 September 2003 dengan nilai nominal SDR 5,000.00/saham dengan total harga perolehan SDR 42,054,000.00. Posisi penyertaan tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 setara dengan Rp 583.612 juta.

b. International Islamic Liquidity Management (IILM)  
IILM merupakan lembaga yang didirikan untuk mendorong perkembangan perbankan syariah khususnya dan industri keuangan syariah secara umum melalui peningkatan efisiensi pengelolaan likuiditas secara *cross-border*. Bank Indonesia dapat berinvestasi pada sukuk atau instrumen keuangan syariah lainnya yang diterbitkan oleh IILM.

a. *Participation in Bank for International Settlements (BIS)*  
*The purpose of the equity participation is to gain more access in BIS decision-making activities, to utilize the provided facilities, as well as to increase international investors' confidence towards Indonesia and cooperation with other central banks concerning monetary policy, financial system stability, payment system and banking regulation. On September 29, 2003, Bank Indonesia purchased 3,000 shares (0.55% of total issued shares) with a nominal value of SDR 5,000/shares and total acquisition cost of SDR 42,054,000.00. The balance of the equity participation as at December 31, 2011 is equivalent to IDR 583,612 million.*

b. *International Islamic Liquidity Management (IILM)*  
*IILM is an institution that was established to encourage the development of sharia banking in particular and the sharia financial services industry in general through increased efficiency in the cross-border management of liquidity. Bank Indonesia may invest in sukuk or other sharia financial instrument issued by IILM.*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Bank Indonesia melakukan penyertaan pada tanggal 30 Maret 2011 sebesar USD 5,000,000.00. Per 31 Desember 2011 nilai penyertaan tersebut setara dengan Rp 45.340 juta.

Bank Indonesia made an investment on March 30, 2011 in the amount of USD 5,000,000.00. As of December 31, 2011, the value of this investment amounted to the equivalent of IDR 45,340 million.

**14. Aktiva Lain-lain**  
  
Posisi Aktiva Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 41.022.806 juta dan Rp 40.284.416 juta, dengan rincian sebagai berikut:

**14. Other Assets**  
  
The balances of Other Assets as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR 41,022,806 million and IDR 40,284,416 million respectively, with the details being as follows:

	31 Desember 2011 Rp juta December 31, 2011 IDR millions	31 Desember 2010 Rp juta December 31, 2010 IDR millions	
- Reinvestasi <i>Cash Collateral</i>	16.841.761	19.683.577	- <i>Reinvestment of Cash Collateral</i>
- Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud (Nilai buku)	15.953.662	6.667.599	- <i>Fixed assets and intangible assets (book value)</i>
- Aktiva Lain-lain pada IPBV	362.039	359.810	- <i>Other assets in IPBV</i>
- Persediaan Bahan Uang dan Uang Muka Pengadaan Uang	289.367	721.894	- <i>Currency Inventory and Currency Procurement advances</i>
- Aktiva Pajak Tangguhan	7.014.689	6.950.398	- <i>Deferred Tax Assets</i>
- Lainnya	561.288	5.901.138	- <i>Other assets</i>
	<b>41.022.806</b>	<b>40.284.416</b>	

- a. Reinvestasi *Cash Collateral***  
Saldo reinvestasi *cash collateral* yang berasal dari *cash collateral* program TPSL per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 16.841.761 juta dan Rp 19.683.577 juta - lihat Catatan C.7 dan Catatan C.29.
- a. Reinvestment of *Cash Collateral***  
The balance for Reinvestment of Cash Collateral originating from cash collateral under the TPSL program per December 31, 2011, and December 31, 2010, were respectively IDR 16,841,761 million and IDR 19,683,577 million – see Notes C.7 and C.29.
- b. Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud**  
Nilai buku Aktiva Tetap dan Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 15.953.662 juta dan Rp 6.667.599 juta, dengan rincian sebagai berikut:
- b. Fixed Assets and Intangible Assets**  
The book value of fixed assets and intangible assets as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR 15,953,662 million and IDR 6,667,599 million respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	31 Desember 2011 Rp juta December 31, 2011 IDR millions	31 Desember 2010 Rp juta December 31, 2010 IDR millions	
Harga Perolehan/Revaluasi			Cost of Fixed Assets/Revaluation of Fixed Assets
Aktiva Tetap:			Fixed Assets:
- Tanah dan Bangunan	14.888.080	6.332.382	- Land and Buildings
- Selain Tanah dan Bangunan	1.581.177	1.464.412	- Non-Land and Buildings
Aktiva Tidak Berwujud	215.176	206.616	Intangible Assets
Aktiva dalam Penyelesaian	498.284	361.883	Assets in Process
	<b>17.182.717</b>	<b>8.365.293</b>	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi			Accumulated Depreciation/Amortization
Aktiva Tetap:			Fixed Assets :
- Bangunan	34.082	657.764	- Buildings
- Selain Bangunan	1.060.517	926.527	- Non-Buildings
Aktiva Tidak Berwujud	134.456	113.403	Book Value
	<b>1.229.055</b>	<b>1.697.694</b>	
<b>Nilai Buku</b>	<b>15.953.662</b>	<b>6.667.599</b>	<b>Book Value</b>

Nilai Aktiva Tetap berupa tanah dan bangunan di Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia disajikan sebesar nilai setelah revaluasi.

The value of fixed assets in the form of land and buildings at Head Office and Bank Indonesia Offices is presented based on value after revaluation.

Pada tahun 2011 Bank Indonesia telah melakukan penyesuaian kembali (revaluasi) atas nilai persil (tanah) dan bangunan. Tujuan dilakukannya revaluasi tersebut adalah agar nilai persil (tanah) dan bangunan lebih wajar (sesuai harga pasar), mengingat revaluasi persil (tanah) dan bangunan oleh Bank Indonesia terakhir dilaksanakan tahun 2000. Revaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Bank Indonesia.

In 2011, Bank Indonesia revalued its parcels of land and its buildings. The objective of the revaluation was to ensure that the value of the said parcels and buildings was fairer based on market values bearing in mind that the last revaluation was conducted in 2000. The revaluation was carried out based on article 6 of the Bank Indonesia Act.

Pelaksana pekerjaan revaluasi (*appraisal*) aktiva tetap Bank Indonesia adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto dan Rekan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 13/15/DLP/BPrI tanggal 30 Desember 2011. Sesuai laporan hasil revaluasi Nomor: V.PP.11.00.0376 tanggal 15 Maret 2012, nilai revaluasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp 14.710.873,7 juta. Selisih antara nilai tercatat sebelum dan sesudah revaluasi adalah sebesar

The appraisal of Bank Indonesia's fixed assets was carried out by the Public Appraisers Office of Toto Suharto and Partners, as set out in the Work Agreement Number 13/15/DLP/BPrI dated December 30, 2011. Based on the Revaluation Report (Number V.PP.11.00.0376, dated March 15, 2012, the value of the assets per December 31, 2011 was IDR 14,701,873.7 million. The difference between the value recorded previously and the revaluation value was IDR 9,190,565 million. The value consists

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Rp 9.190.565 juta. Nilai tersebut terdiri dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 9.266.042 juta yang dicatat di neraca dalam pos Modal (lihat Catatan C.30 dan Catatan C.31) dikurangi selisih kurang penilaian kembali (kerugian hasil revaluasi aktiva tetap) sebesar Rp 75.477 juta yang dicatat di surplus (defisit) dalam pos Beban Umum dan Lainnya lihat Catatan C.47

Revaluasi Aktiva Tetap meliputi persil dan bangunan di seluruh Bank Indonesia di dalam negeri. Sedangkan persil dan bangunan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri akan dilakukan revaluasi pada tahun 2012.

c. Aktiva Lain-lain pada IPBV

Aktiva Lain-lain pada IPBV merupakan tagihan kepada IPBV, suatu perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola *Non Performing Loans* (NPL) eks Indover Bank, yang terdiri dari tagihan *Floating Principal Note* (FPN) dan tagihan lainnya yang digunakan sebagai cadangan untuk biaya operasional IPBV.

Tagihan FPN merupakan tagihan yang berasal dari NPL eks Indover Bank yang dialihkan pengelolaannya kepada IPBV. Secara periodik (triwulanan), IPBV memutakhirkan nilai FPN tersebut untuk menggambarkan nilai NPL terkini yang dikelola. Untuk pertama kali nilai FPN yang dikeluarkan IPBV pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar USD 294,232,949.00.

Berdasarkan laporan triwulanan IPBV tanggal 31 Desember 2011, IPBV masih mengelola NPL dari 11 debitur senilai USD38,598,104.78 atau setara dengan Rp 350.008 juta, dengan nilai FPN sebesar nilai NPL tersebut.

Sementara itu, nilai tagihan lainnya kepada IPBV adalah sebesar USD 66,194.03 atau setara dengan Rp 600 juta dan EUR 973,765.36 (ekuivalen USD 1,260,587.95) atau setara dengan Rp 11.431 juta. Dari jumlah tagihan lainnya tersebut oleh IPBV disimpan di Indover Bank Amsterdam sebesar EUR 393,960.20

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*of the difference between the revaluation value of fixed assets value of IDR 9,266,042 million as recorded in the balance sheet under Capital (see Notes C.30 and Note C.31, less the difference in the revaluation (loss on the revaluation of fixed assets) of IDR 75,477 million, which is recorded in Surplus (Deficit) in the General and Other Costs account – see Note C. 47.*

*The revaluation of fixed assets covers all Bank Indonesia parcels of land and buildings throughout Indonesia. Lands and buildings at Bank Indonesia’s overseas representative offices will be revalued in 2012.*

c. Other Assets in IPBV

*Other Assets in IPBV are claims against IPBV, a company appointed to manage non-performing loans ex Indover Bank, which consist of the Floating Principle Note (FPN) claim and other claims used as a reserve for IPBV’s operational expenditures.*

*FPN claims are claims from Non-Performing Loans (NPL) of ex-Indover Bank that have been transferred to IPBV. Quarterly, IPBV renews the FPN values to represent the current NPL value that it manages. The First FPN was issued on January 26, 2004, in the amount of USD 294,232,949.00.*

*Based on IPBV’s latest quarterly report dated December 31, 2011, IPBV continues to manages NPLs from 11 debtors in the amount of USD38,598,104.78, or the equivalent of IDR 350,008 million, with the value of the FPN being the same as the value of the NPLs.*

*Meanwhile, the balance of other claims on IPBV was USD 66,194.03 or the equivalent of IDR 600 million and EUR 973,765.36 (or the equivalent of USD 1,260,587.95), which is equal to IDR 11,431 million. Of the said, those kept by IPBV in Indover Bank amount to EUR 393,960.20, while those in ING Bank*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

serta di ING Bank Amsterdam sebesar USD 66,194.03 dan EUR579,805.16.

d. Aktiva Pajak Tangguhan

Posisi Aktiva Pajak Tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 7.014.689 juta dan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 6.950.398 juta.

Sesuai SE Nomor 13/47/INTERN tanggal 23 Desember 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 8/50/INTERN tanggal 28 September 2006 tentang PAKBI disebutkan bahwa nilai tercatat aktiva pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal neraca (31 Desember) dengan memperhatikan prediksi surplus (defisit) fiskal di tahun tahun berikutnya.

Pada tahun 2011, Bank Indonesia tidak memperhitungkan Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2011 yang berasal dari rugi fiskal karena Aktiva Pajak Tangguhan yang sudah diakui diperkirakan cukup untuk dikompensasi dengan perkiraan surplus lima tahun yang akan datang. Penjelasan lebih rinci mengenai Aktiva Pajak Tangguhan dijelaskan dalam Catatan C.30.

e. Lainnya

Termasuk dalam Pos Lainnya adalah penempatan dana pada Indover Bank Amsterdam (IBA) yang terdiri dari USD 48,797,259.98 atau setara dengan Rp 442.494 juta dan EUR 4,987,667.93 atau setara dengan Rp 58.550 juta per 31 Desember 2011 serta Aktiva Lainnya sebesar Rp 502.738 juta.

Pada tanggal 5 November 2009, dalam *Creditors Meeting* di Pengadilan Amsterdam, Belanda, tagihan Bank Indonesia di IBA ditetapkan sebagai *disputed claim* also *provisionally acknowledged*. Selanjutnya pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia telah mengajukan *Statement of Claim* ke Pengadilan Amsterdam meminta agar *claim* Bank Indonesia di IBA tersebut dapat sepenuhnya diakui menjadi *acknowledged claim*.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*Amsterdam amount to USD66,194.03 and EUR 579,805.16.*

d. Deferred Tax Assets

*The balance of Deferred Tax Assets as at December 31, 2011 was IDR 7,014,689 million and as at December 31, 2010 was IDR 6,950,398 million.*

*Under Circular Number 13/47/INTERN, dated December 23, 2011 on the amendment of Circular Number 8/50/INTERN, dated September 28, 2006 on TAKBI, the recorded value of deferred tax assets were to reviewed as per the date of the Balance Sheet (December 31) having regard to the predicted fiscal surplus (deficit) for the subsequent year.*

*In 2011, Bank Indonesia did not calculated deferred tax assets for 2011 originating from the fiscal loss as Deferred Tax Assets as recognized is considered sufficient to compensate based on the estimated surpluses in the coming five years. Further explanations on Deferred Tax Assets are provided in Note C.30.*

e. Others

*Included in Others is the placement of funds in Indover Bank Amsterdam (IBA) in the amount of USD 48,797,259.98 or the equivalent of IDR 442,494 million and EUR 4,987,667.93 or equivalent to IDR 58,550 million as at December 31, 2011, and Other Assets amounting to IDR 502,738 million.*

*On November 5, 2009, at the Creditors Meeting in the Amsterdam Court in the Netherlands, Bank Indonesia’s claims in IBA were recognized as “disputed claims also provisionally acknowledged.” In March 2010, Bank Indonesia proposed a Statement of Claim to the Amsterdam Court requesting that Bank Indonesia’s claim in IBA be declared an acknowledged claim. According to the*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Berdasarkan *Eleventh Public Liquidation Report* dari Stibbe tanggal 28 Februari 2012, proses pengadilan atas *claim* Bank Indonesia tersebut masih berlangsung – lihat Catatan E.4.

*Eleventh Public Liquidation Report from Stibbe, dated February 28, 2012, the hearing on Bank Indonesia’s claim is still in process – see Note E.4.*

Tagihan Bunga FSD eks BTO PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebesar Rp 5.322.248 juta yang semula disajikan dalam pos Tagihan kepada Bank direklasifikasi menjadi pos Aktiva Lain-lain. Bank Indonesia sesuai Keputusan Rapat Dewan Gubernur tanggal 26 April 2012 telah meng-*off balance sheet*-kan tagihan bunga FSD tersebut – lihat Catatan C.15 dan E.8.

*The claim on FSD interest ex BTO PT Bank Danamon Indonesia Tbk in the amount of IDR 5,322,248 million, which was originally presented on Claims on Banks, has been reclassified to the Other Assets account. Bank Indonesia, in accordance with the Board of Governors’ Resolution dated April 26, 2012, has removed the said FSD interest claim from the Balance Sheet – see Notes C.15 and E.8.*

15. Penyisihan Aktiva

Total penyisihan aktiva pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 11.263.320 juta dan Rp 15.649.892 juta, dengan rincian sebagai berikut:

*15. Allowance for Bad Debts*

*Total allowances for bad debts as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were IDR 11,263,320 million and IDR15,649,892 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Saldo awal	15.649.892	15.409.756	- <i>Beginning Balance</i>
- Pemulihan penyisihan aktiva	0	0	- <i>Asset Recovery</i>
- Penggunaan untuk penghapusbukuan aktiva	(5.323.327)	(799)	- <i>Assets write-off</i>
- Pengurangan (penambahan) pembentukan penyisihan aktiva	936.755	240.935	- <i>Decrease (addition) of allowance for bad debts</i>
- Saldo akhir	11.263.320	15.649.892	- <i>Ending Balance</i>

Pada tahun 2011 Bank Indonesia meng-*off balance sheet*-kan tagihan bunga FSD eks BTO PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. sebesar Rp 5.322.248 juta – lihat Catatan C.14 dan E.8.

*In 2011, Bank Indonesia removed from the balance sheet its FSD interest claim ex BTO PT Bank Danamon Indonesia Tbk in the amount of IDR 5,322,248 million – see Notes C.14 and E.8.*

16. Uang dalam Peredaran

Uang dalam Peredaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia dengan posisi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 372.982.462 juta dan Rp 318.585.280 juta dengan rincian sebagai berikut:

*Currency in Circulation consists of valid payment instruments not under the possession of Bank Indonesia, and had a position as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounting to IDR 372,982,462 million and IDR 318,585,280 million respectively, with details as follows:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
Uang yang dicetak:	463.026.198	441.530.239	<i>Printed Money:</i>
- Uang Kertas	458.859.086	437.056.520	- <i>Banknotes</i>
- Uang Logam	4.156.584	4.463.191	- <i>Coins</i>
- Uang Khusus	10.528	10.528	- <i>Special Editions</i>
Uang yang telah dicabut dan ditarik dari Peredaran	(1.003)	(3.158)	<i>Currency withdrawn from circulation</i>
Uang dalam Persediaan Lainnya	(90.027.554) (15.179)	(122.926.647) (15.154)	<i>Currency Inventory Others</i>
Jumlah Uang dalam Peredaran	372.982.462	318.585.280	<i>Currency in Circulation</i>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang antara lain diatur bahwa dalam kegiatan pemusnahan uang Rupiah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah, dan pelaksanaan pemusnahannya didasarkan pada nota kesepahaman, yang berisi teknis pelaksanaan pemusnahan Rupiah, termasuk pembuatan berita acara pemusnahan Rupiah. Selain itu jumlah dan nilai nominal Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia dalam suratnya kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 13/9/GBI/DHk tanggal 15 September 2011 tentang Laporan Dampak Penerapan Undang-Undang Mata Uang, menyampaikan bahwa sambil menunggu nota kesepahaman dimaksud, Bank Indonesia tetap melakukan pemusnahan uang Rupiah sebagaimana mestinya. Ketentuan yang masih berlaku saat ini antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Rupiah, sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007.

Pemerintah dan Bank Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan penyelesaian nota kesepahaman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Mata Uang. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.05/2012 tanggal 20

*Act Number 7 of 2011 on Currency governs, among other things, the destruction of Rupiah currency. This must be carried out by Bank Indonesia in coordination with the government based on an MoU, setting out the technical details of the destruction operation, including the need to prepare an official report. In addition, the amount and nominal value of the Rupiah destroyed must be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia.*

*The Governor of Bank Indonesia in his letter to the President of the Republic of Indonesia, Number 13/9/GBI/DHk, dated September 15, 2011, which contained a report on the impact of the application of the Currency Act, stated that while awaiting the said MoU Bank Indonesia would continue to destroy Rupiah as required. The provisions that continue to be effective include Bank Indonesia Regulation Number 6/14/PBI/2004, dated June 22, 2004 on the issuance, circulation, withdrawal and destruction of Rupiah, as amended by Bank Indonesia Regulation Number 9/10/PBI/2007 dated August 30, 2007.*

*The Government and Bank Indonesia are currently still in the process of finalizing the MoU, as mandated by the Currency Act. Based on the Minister of Finance’s letter Number S-113/MK.05/2012, dated February 20, 2012,*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Februari 2012, Menteri Keuangan menyatakan setuju terhadap draft nota kesepahaman yang telah disiapkan dan dibahas oleh Tim Teknis. Namun demikian Bank Indonesia berpendapat bahwa lampiran surat Menteri Keuangan tersebut (berupa draft nota kesepahaman) terdapat sedikit perbedaan dengan hasil pembahasan Tim Teknis. Atas dasar ini, Gubernur Bank Indonesia telah menanggapi surat Menteri Keuangan tersebut yaitu dengan surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/2/GBI/DHk tanggal 16 April 2012 yang pada intinya Gubernur Bank Indonesia mendukung agar draft nota kesepahaman segera difinalisasi, dengan menghapus pasal 7 draft nota kesepahaman yang berisi ketentuan mengenai proses penggunaan gambar pahlawan dan/atau Presiden dalam desain Rupiah.

BI melaksanakan kegiatan pemusnahan uang terhadap uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) dan mengganti dengan uang baru. Proses pemusnahan tersebut dilakukan melalui suatu prosedur dan pengawasan pelaksanaan pemusnahan uang yang ketat serta menetapkan tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan. Penetapan UTLE tersebut melalui *setting* mesin sortasi berupa penentuan *soil level* (tingkat kelusuhan) dan secara manual melalui standarisasi visual uang layak edar. Pemusnahan uang kertas oleh Bank Indonesia menggunakan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dan mesin racik uang kertas (MRUK), sedangkan pemusnahan uang logam dilakukan melalui peleburan yang berada di bawah pengawasan penuh Bank Indonesia.

Pemusnahan uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebesar 2.991.797.544 bilyet uang kertas dan 71.015.500 keping uang logam dengan total nilai nominal sebesar Rp 83.280.777 juta dengan rincian sebagai berikut:

*the Minister of Finance has agreed to the draft MoU that was prepared and agreed upon by the Technical Team. Nevertheless, Bank Indonesia is of the opinion that attachment to the said Minister of Finance’s letter (in the form of a draft MoU) differs slightly from what was agreed upon during the Technical Teams discussions. As a consequence, the Governor of Bank Indonesia responded to the Minister of Finance’s letter through Governor of Bank Indonesia letter Number 14/2/GBI/DHk, dated April 16, 2012, which in essence supports the speedy finalization of the MoU through the deletion of article 7 of the draft MoU, which contains rules governing the use of images of heroes and/or the President in the design of Rupiah.*

*Bank Indonesia has destroyed Rupiah that is no longer fit to circulate and replaced it with new Rupiah. The destruction process was based on strict procedures and supervision, and an evaluation of the condition of the money to be destroyed. This was done through the use of a sorting machine set to “soil level”, as well as manually through the application of visual standards. The destruction of paper money by Bank Indonesia is carried out using a paper money sorting machine and a paper money shredding machine, while coins are destroyed by melting down under tight supervision by Bank Indonesia.*

*Between June 28, 2011 and December 31, 2011, a total of 2,991,797,544 bank notes and 71,015,500 coins (with a total of nominal value of IDR 83,280,777 million) were destroyed, with the details being as follows:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Uraian	Bilyet	Keping	Nominal (Rp juta)	Description
	Notes	Coins	Nominal Value (IDR millions)	
Uang Tidak Layak Edar	2.989.726.063	33.888.000	83.209.538	Money unfit for circulation
Uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran	2.071.481	37.127.500	71.239	Money withdrawn from circulation
	2.991.797.544	71.015.500	83.280.777	

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Mata Uang yaitu bahwa jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan harus ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka Bank Indonesia telah menyampaikan surat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Januari 2012 untuk meminta agar jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Namun demikian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga saat ini belum dapat menempatkan jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia karena yang dapat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia hanya peraturan perundangan. Dalam kaitan ini sedang dilakukan pembahasan antara Bank Indonesia dengan pihak Pemerintah (c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mencari solusi agar informasi mengenai jumlah dan nilai nominal uang yang dimusnahkan dapat ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

*For the purpose of fulfilling the requirement of the Currency Act to the effect that the amount and nominal value of destroyed currency be published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia submitted a letter to the Ministry of Law and Human rights on January 30 , 2012 asking that the amount and nominal value of destroyed currency be published in the Official Gazette. However, the Ministry has yet to publish the currency figures as to date only laws and regulations may be published in the Official Gazette. In this respect, discussions are currently underway between Bank Indonesia and the Government (through the Ministry of Law and Human Rights) for the purpose of seeking a solution so that information on the amount and nominal value of destroyed currency may be published in the Official Gazette.*

17. Giro Pemerintah

Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas Pemerintah, mengelola giro Pemerintah dengan rincian:

17. Government Demand Deposits

*In performing its function as the account holder of the Government, Bank Indonesia manages Government demand deposits, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011 Rp juta	31 Desember 2010 Rp juta	
	December 31, 2011 IDR millions	December 31, 2010 IDR millions	
- Dalam Rupiah	56.494.255	62.137.088	- In Rupiah
- Dalam valas	33.877.075	28.856.995	- In Foreign Currency
	90.371.330	90.994.083	



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

- a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2011, antara lain terdiri dari:

1) Rekening Kementerian Keuangan yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia terdiri dari:

a) Rekening Kas Umum Negara (RKUN) senilai Rp 2.347.823 juta.

b) Rekening Penempatan terdiri dari:

(1) Rekening Kas Penempatan sebesar Rp 4.790.148 juta

(2) Rekening lainnya yang dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 49.314.591 juta, antara lain terdiri dari:

(a) Rekening giro Sub Bendahara Umum Negara dalam rangka program penjaminan sebesar Rp 83.469 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP Nomor SU-004/MK/1999.

(b) Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebesar Rp 48.505.945 juta, antara lain untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).

2) Rekening Pemerintah Lainnya yang tidak diberikan jasa giro sebesar Rp 41.693 juta.

b. Giro Pemerintah dalam valas per 31 Desember 2011, antara lain terdiri dari:

1) Rekening Kementerian Keuangan yang diberikan jasa giro oleh Bank Indonesia, terdiri dari:

a) Rekening Kas Umum Negara terdiri dari RKUN sebesar USD5,627,362.40 dan JPY9,144,976,104 atau setara dengan Rp 1.119.191 juta.

b) Rekening Penempatan terdiri dari:

(1) Rekening Kas Penempatan dalam USD sebesar USD 2,569,653,825.12 atau setara dengan Rp 23.301.620 juta.
- a. Government demand deposits in Rupiah as at December 31, 2011, included the following:

1) Accounts of Ministry of Finance provided with demand deposit services by Bank Indonesia, consisting of:

a) General State Cash Account (Rekening Kas Umum Negara – RKUN) amounting to IDR 2,347,823 million.

b) Placement accounts consisting of

(1) Placement Cash Accounts amounting to IDR 4,790,148 million,

(2) Other accounts categorized as Placement Accounts by the Ministry of Finance amounting to IDR 49,314,591 million, consisting of:

(a) Sub BUN demand deposits for the purpose of guarantee program amounting to IDR 83,469 million, with funds raised from the issuance of SUP Number SU-004/IMK/1999.

(b) Directorate General of Treasury accounts amounting to IDR 48,505,945 million, among others to keep excess funds from Budget Surplus (Sisa Anggaran Lebih – SAL).

2) Other Government Accounts not provided with demand deposit services, amounting to IDR 41,693 million.

b. Government demand deposits in foreign currency as at December 31, 2011, consisting of:

1) Ministry of Finance Accounts provided with demand deposit services by Bank Indonesia, with details as follow:

a) State Cash Account amounting to USD5,627,362,40 and JPY9,144,976,104, or equivalent to IDR 1,119,191 million.

Mengawal Ketahanan Perekonomian di Tengah  
Ketidakpastian Ekonomi Global

Safeguarding Domestic Economic Resilience Amid  
Global Economic Uncertainty

189

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

(2) Rekening lainnya yang telah dikategorikan sebagai Rekening Penempatan oleh Kementerian Keuangan dalam valuta USD dan non USD setara dengan Rp 9.185.544 juta.

2) Rekening Pemerintah Lainnya dalam valas yang tidak diberikan jasa giro setara dengan Rp 270.720 juta.

Tingkat bunga atas RKUN Rupiah, RKUN valuta USD, dan RKUN valas non USD per tahun adalah 0,1%. Sementara itu tingkat bunga atas rekening penempatan dalam Rupiah, rekening penempatan dalam valuta USD, dan rekening penempatan valas non USD per tahun adalah 65% dari suku bunga acuan. Tingkat bunga atas Rekening Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang mengatur mengenai koordinasi pengelolaan Uang Negara dan untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/KEP.GBI/2009.

(2) Other accounts categorized as Placement Accounts by the Ministry of Finance in USD and non USD equivalent to IDR 9,185,544 million.

2) Other Government Accounts without demand deposit facilities in foreign currency equivalent to IDR 270,720 million.

The interest rate for RKUN in Rupiah, RKUN in USD, and RKUN in non USD is 0.1% per annum. The interest rates for placement accounts in Rupiah, placement accounts in USD, and placement accounts in non USD per annum is 65% of the reference interest rate and is determined based on an Agreement between The Ministry of Finance and the Governor of Bank Indonesia concerning Coordination of the Management of State Funds, and for the first time based on the Joint Decree of the Ministry of Finance and the Governor of Bank Indonesia Number 17/ KMK.05/2009 and Number 11/3/KEP.GBI/2009.

18. Giro Bank

Giro Bank adalah saldo giro bank umum minimal berisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai PBI Nomor 13/10/ PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valas.

Saldo Giro Bank per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011 Rp juta December 31, 2011 IDR millions	31 Desember 2010 Rp juta December 31, 2010 IDR millions	
Dalam Rupiah	207.537.910	159.105.607	In Rupiah
Dalam Valas	43.849.664	7.057.702	In Foreign Currency
	251.387.574	166.163.309	

18. Bank Demand Deposits

Bank demand deposits are the balance of demand deposits of commercial banks in order to comply with Minimum Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum - GWM). GWM is regulated by Bank Indonesia Regulation Number 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2010, on Minimum Reserve Requirements of Commercial Banks in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency.

Bank Demand Deposits as at December 31, 2011 and December 31, 2010 were as follows:

Bank Indonesia Laporan Tahunan 2011

Bank Indonesia 2011 Annual Report

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

19. Giro Lainnya	19. Other Demand Deposits	
	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp juta	Rp juta
	December 31, 2011	December 31, 2010
	IDR millions	IDR millions
Rekening Giro IMF	1.003.592	1.023.825
Rekening Giro Bank Dunia	57.421	16.167
Rekening Giro ADB	196.480	15.831
Rekening Giro Lainnya	115.864	484.315
	1.373.357	1.540.138

Rekening giro IMF merupakan gabungan dari IMF Account Nomor 1 dan IMF Account Nomor 2. IMF Account Nomor 1 digunakan untuk transaksi keuangan dengan IMF antara lain terkait dengan pembayaran kuota Indonesia dalam Rupiah, purchases dan repurchases fasilitas IMF, sedangkan IMF Account Nomor 2 digunakan untuk transaksi administratif IMF di Indonesia.

Rekening giro IMF direvaluasi setiap tanggal 30 April berdasarkan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal tutup buku IMF. Penyesuaian kurs ini atas beban atau untuk untung Bank Indonesia dan Pemerintah. Revaluasi yang menjadi bagian Pemerintah tersebut, apabila diselesaikan dengan menerbitkan promissory note, akan menambah atau mengurangi nilai promissory note Pemerintah yang diadministrasikan dan disimpan oleh Bank Indonesia. Total kuota Indonesia dan total nilai promissory note per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar SDR 2,079,300,000.00 dan Rp 25.871.091 juta.

20. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp 117.367.163 juta dan Rp 195.500.837 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

The IMF Demand Deposit accounts consist of IMF Account Number 1 and IMF Account Number 2. IMF Account Number 1 is used for financial transactions related to Indonesia's quota payments in Rupiah, and purchases and repurchases of IMF facilities, whereas IMF Account Number 2 is used for IMF administrative transactions in Indonesia.

The balance of IMF Demand Deposits Account is revalued every April 30 based on the exchange rate at the date of closing of the IMF books. This exchange rate adjustment concerns expenses or gains accruing to Bank Indonesia and the Government. The revaluation that the Government is liable for, if settled by Promissory Note, will increase or reduce the balance of the Government's promissory notes administered and kept by Bank Indonesia. Indonesia's total quota and the total value of promissory notes as at December 31, 2011, were SDR 2,079,300,000.00 and IDR 25,871,091 million.

20. Bank Indonesia Certificates

Bank Indonesia Certificates as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR 117,367,163 million and IDR 195,500,837 million respectively, with the details being as follows:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp juta	Rp juta
	December 31, 2011	December 31, 2010
	IDR millions	IDR millions
Nilai nominal menurut jangka waktu:		Nominal Value by Tenor:
- 3 bulan	0	10.000.000
- 6 bulan	0	135.219.999
- 9 bulan	119.776.999	54.892.997
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(2.409.836)	(4.612.159)
	117.367.163	195.500.837

21. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp 3.476.000 juta dan Rp 2.997.000 juta. Rincian Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:

21. Bank Indonesia Sharia Certificates

Bank Indonesia Sharia Certificates as at December 31, 2011 and December 31, 2010, amounted to IDR 3,476,000 million and IDR 2,997,000 million respectively, with the details being as follows:

	31 Desember 2011	31 Desember 2010
	Rp juta	Rp juta
	December 31, 2011	December 31, 2010
	IDR millions	IDR millions
Nilai nominal menurut jangka waktu:		Nominal value by tenor:
- 3 bulan	0	1.576.000
- 6 bulan	0	1.421.000
- 9 bulan	3.476.000	0
	3.476.000	2.997.000

22. Penempatan Berjangka

Penempatan Berjangka (Term Deposit) yang berjangka waktu paling singkat satu hari dan paling lama 12 bulan, pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing tercatat sebesar Rp 152.839.020 juta dan Rp 171.192.385 juta, dengan rincian sebagai berikut:

22 Term Deposits

Term Deposits, with minimum terms of one day and maximum terms of 12 months, as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR 152,839,020 million and IDR 171,192,385 million respectively, with the details being as follows:



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
<b>Nilai Nominal</b>	<b>154.381.100</b>	<b>172.645.500</b>	<i>Nominal Value</i>
- 1 hari <i>overnight</i>	0	0	- <i>overnight</i>
- 2 s/d 90 hari	22.002.000	102.523.500	- 2 - 90 days
- >90 hari	132.379.100	70.122.000	- >90 days
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(1.542.080)	(1.453.115)	<i>Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)</i>
	<b>152.839.020</b>	<b>171.192.385</b>	

<b>Tingkat Diskonto</b>			<i>Discount Rate</i>
- 1 hari <i>overnight</i>	-	-	- <i>Overnight</i>
- 2 s/d 90 hari	4,54% - 7,19%	6,07% - 6,35%	- 2 - 90 days
- >90 hari	4,59% - 7,40%	6,22% - 6,32%	- >90 days

23. Penempatan Dana

Penempatan Dana (*Deposit Facility*) yang berjangka waktu *overnight* pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing tercatat sebesar Rp 152.474.286 juta dan Rp 92.038.216 juta. Rincian Penempatan Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
Nilai nominal	152.512.400	92.080.400	<i>Nominal value</i>
Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi	(38.114)	(42.184)	<i>Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)</i>
	<b>152.474.286</b>	<b>92.038.216</b>	

24. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang berjangka waktu *overnight* pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp 17.403.100 juta dan Rp 9.175.700 juta.

23. Deposit Facilities

*Overnight Deposit Facilities per December 31, 2011 and December 31, 2010, respectively amounted to IDR 152,474,286 million and IDR 92,038,216 million, with the details being as follows:*

24. Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities

*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah - FASBIS) as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR 17,403,100 million and IDR 9,175,700 million respectively.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

25. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (*Reverse Repo*) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 tercatat masing-masing sebesar Rp 68.752.428 juta dan Rp 7.000.320 juta.

25. Securities Sold Under Repurchase Agreements

*Securities Sold Under Repurchase Agreements (Reverse Repo) as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR 68,752,428 million and IDR 7,000,320 million respectively.*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
a. SUN yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	68.857.208	7.058.243	a. <i>SUN sold under repurchase agreement</i>
- Nilai Nominal <i>Outstanding Reverse Repo</i>			- <i>Reverse Repo Outstanding Nominal Value</i>
- Dikurangi: bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi	(313.693)	(57.923)	- <i>Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)</i>
	<b>68.543.515</b>	<b>7.000.320</b>	
b. SBSN yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali			b. <i>SBSN sold under repurchase agreement</i>
- Nilai Nominal <i>Outstanding Reverse Repo</i>	209.325	-	- <i>Reverse Repo Outstanding Nominal Value</i>
- Dikurangi: bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi	(412)	-	- <i>Less: Un-amortized discount (interest paid in advance)</i>
	<b>208.913</b>	<b>-</b>	
	<b>68.752.428</b>	<b>7.000.320</b>	

Jangka waktu transaksi *Reverse Repo* adalah satu hari sampai dengan satu tahun. Bank Indonesia membuka *window time* transaksi lelang *Reverse Repo* SBSN untuk pertama kalinya pada tanggal 7 Desember 2011. Transaksi ini diselenggarakan berdasarkan SE Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011 perihal Tata Cara Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah.

*Reverse Repo transactions have a time limit of one day up to one year. Bank Indonesia opened the time window for SBSN reverse repo auction transactions for the first time on 7 December 2011. This transaction was conducted based on Circular Number 13/27/DPM, dated December 1, 2011, on procedures for reverse repo transactions with Bank Indonesia involving Sharia securities as part of Sharia open market operations.*

26. Pinjaman dari Pemerintah

Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari:

26. Loans from Government

*Loans from Government consisted of:*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Dalam Rupiah	103.731	117.561	- <i>In Rupiah</i>
- Dalam valas	15.353	22.834	- <i>In foreign currency</i>
	<b>119.084</b>	<b>140.395</b>	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah antara lain terdiri dari penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program *Two Step Loan* (TSL), yaitu ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) sebesar Rp 103.112 juta dan bunga sebesar Rp 619 juta. Pinjaman dari Pemerintah dalam valas per 31 Desember 2011 adalah pinjaman dari Pemerintah dalam rangka TSL dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD1,693,080.00 atau setara dengan Rp 15.353 juta. Pinjaman tersebut merupakan sisa dari pinjaman Bank Indonesia yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

*Loans from Government in Rupiah consisted of Government loans revenue due to Two Step Loans (TSL), i.e. ASEAN Japan Development Fund for Indonesia (AJDF) for Major Commercial Plantations (Perkebunan Besar Swasta Nasional - PBSN) program in the amount of IDR 103,112 million. Loans from Government in foreign currency as at December 31, 2011 consisted of loans from Government due to Two Step Loans from the Asian Development Bank (ADB) amounting to USD1,693,080.00 or the equivalent of IDR 15,353 million. The said amount represents the outstanding balance on a loan obtained by Bank Indonesia based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank.*

27. Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011 IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010 IDR millions</i>	
a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri	4.445.423	5.182.599	a. Syndicated loans from foreign banks
b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri	29.365	32.350	b. Non-syndicated loans from foreign banks
c. Bunga yang masih harus dibayar	2.815	2.903	c. Deferred interest payable
	4.477.603	5.217.852	

Pinjaman Luar Negeri tersebut merupakan sisa dari pinjaman Bank Indonesia yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yaitu:

**a. Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri**

Pinjaman Sindikasi dari bank luar negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk cadangan devisa nasional. Pinjaman Sindikasi terdiri dari:

27. Foreign Borrowings

Foreign borrowings consisted of:

*The above amounts represent the outstanding balances on loans obtained by Bank Indonesia based on Act Number 13 of 1968 on the Central Bank, namely:*

**a. Syndicated Loans from Foreign Banks**

*Syndicated loans from foreign banks represent syndicated loans from international banks to Bank Indonesia on behalf of the Government for monetary reserve purposes. Syndicated loans consisted of:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011 IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010 IDR millions</i>	
1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994	650.955	1.001.984	1) Syndicated loan of 1994
2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995	3.794.468	4.180.615	2) Syndicated loan of 1995
	4.445.423	5.182.599	

1) Pinjaman Sindikasi Tahun 1994

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hongkong *Branch* yang bertindak sebagai *agent*, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00. Pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 28 Maret 1994.

1) Syndicated Loan of 1994

*Represents a syndicated loan from foreign creditors with Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Hong Kong Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.00, and was signed on March 28, 1994.*

Dalam kesepakatan *London Club II* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 28 September 2000, yakni menjadwalkan ulang pinjaman pokok sebesar USD150,000,000.00 untuk periode pembayaran 28 Maret 2002 sampai dengan 28 Maret 2013. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

*Under the London Club II agreement, the second amendment took place on September 28, 2000, i.e., to reschedule loan principal amounting to USD150,000,000.00 for the payment period of March 28, 2002 to March 28, 2013. The interest rates amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.*

Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD47,621,700.03 atau setara dengan Rp 431.834 juta dan JPY1,875,988,168.00 atau setara dengan Rp 219.121 juta.

*The balance as at December 31, 2011, amounted to USD47,621,700.30 or the equivalent of IDR 431,834 million and JPY1,875,988 or the equivalent of IDR 219,121 million.*

2) Pinjaman Sindikasi Tahun 1995

Merupakan pinjaman sindikasi dari kreditur luar negeri dengan The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch yang bertindak sebagai *agent*, dengan jumlah pinjaman sebesar USD500,000,000.00. Pinjaman tersebut ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1995.

2) Syndicated Loan of 1995

*Represents a syndicated loan from foreign banks with The Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch as the agent, amounted to USD500,000,000.00, and was signed on June 14, 1995.*

Dalam kesepakatan *London Club III* telah dilakukan amandemen kedua tanggal 6 September 2002 yakni menjadwalkan ulang pokok pinjaman sebesar USD300,000,000.00 untuk periode pembayaran 14 Desember 2008 sampai

*Under the London Club III Agreement, the second amendment took place on September 6, 2002, i.e., to reschedule loan principal amounting to USD300,000,000.00 for payment period of December 14, 2008, to December 14, 2019. The interest rates*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

dengan 14 Desember 2019. Tingkat bunga pinjaman yang diamandemen adalah LIBOR + 0,875% dan TIBOR + 0,875%.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar USD310,886,400.00 atau setara dengan Rp 2.819.118 juta dan JPY8,350,368,596.00 atau setara dengan Rp 975.350 juta.

b. Pinjaman Non Sindikasi dari Bank di Luar Negeri

Pinjaman Non Sindikasi diberikan oleh International Cooperation and Development Fund (pengalihan dari The Export Import Bank of the Republic of China, Taipei) dengan plafon sebesar USD10,000,000.00 dan tingkat bunga 3,5% setahun. Pinjaman ini diangsur dalam 36 cicilan secara semesteran mulai tanggal 27 April 2003 dan akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2020.

Posisi pinjaman non sindikasi adalah sebesar USD3,238,287.48 atau setara dengan Rp 29.365 juta per 31 Desember 2011, dan sebesar USD3,598,097.20 atau setara dengan Rp 32.350 juta per 31 Desember 2010. Bank Indonesia telah menyalurkan kembali kepada Bank Bukopin sebesar Rp 20.457 juta.

28. Alokasi Hak Tarik Khusus

IMF mempunyai kewenangan mengalokasikan Hak Tarik Khusus atau SDR (*Article XV Section 1 dan Article XVIII*) untuk menambah likuiditas global jika dibutuhkan dan untuk menambah cadangan devisa negara-negara anggota dengan biaya relatif murah. Keputusan Alokasi SDR tersebut memerlukan dukungan 85% hak suara negara anggota IMF. Tidak seperti halnya fasilitas pinjaman IMF pada umumnya, Alokasi SDR tidak mengandung *conditionality*. Besaran suku bunga Alokasi SDR sama dengan suku bunga Hak Tarik Khusus, sehingga negara anggota akan

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*amended were LIBOR + 0.875% and TIBOR + 0.875%.*

*The balance as at December 31, 2011, amounted to USD310,886,400.00 or the equivalent of IDR 2,819,118 million and JPY 8,350,368,596.00 or the equivalent of IDR 975,350 million.*

b. Non-Syndicated Loans from Foreign Banks

*The non-syndicated loan was provided by the International Cooperation and Development Fund (was The Export Import Bank of the Republic of China - Taipei) with the ceiling amounting to USD10,000,000.00 and an interest rate of 3.5% per annum. The loan is to be repaid in 36 semiannual installments, starting on April 27, 2003, with the final installment due on October 27, 2020.*

*The balance for non-syndicated loans amounted to USD3,238,287.48 or the equivalent of IDR 29,365 million as per December 31, 2011, and USD3,598,097.20 or the equivalent of IDR 32,250 million as at December 31, 2010. Bank Indonesia has channeled back IDR 20,457 million to Bank Bukopin.*

28. Special Drawing Rights Allocation

*The IMF has the authority to allocate SDR (Article XV Section 1 and Article XVIII) to add global liquidity if needed and augment the foreign reserves of member countries at minimum cost. A decision to allocate SDRs needs the voting support of 85% of IMF member countries. SDR allocations are not subject o conditionalities. The interest on SDR allocations is the same as the interest on Special Drawing Rights so that member countries will get interest income of their SDR balance is bigger than their SDR Allocation. On the other*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

memperoleh pendapatan bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih besar dibandingkan dengan Alokasi SDR, dan sebaliknya negara anggota akan membayar bunga bila saldo Hak Tarik Khusus lebih kecil dibandingkan dengan Alokasi SDR. Atas pengelolaan SDR tersebut, IMF mengenakan biaya administrasi yang besarnya kurang dari 0,01% per tahun.

Sejak diciptakannya SDR pada tahun 1969, IMF telah tiga kali memberikan Alokasi Umum SDR kepada negara anggota yaitu: 1) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1970-1972; 2) Alokasi SDR yang disampaikan secara bertahap pada periode tahun 1979-1981; dan 3) Alokasi SDR yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2009. Di samping Alokasi Umum SDR, IMF juga telah memberikan Alokasi Khusus SDR yang dilakukan satu kali pada tahun 1997, namun baru dialokasikan kepada negara anggota pada tanggal 9 September 2009 karena persetujuan 85% hak suara negara anggota baru diperoleh pada bulan Agustus 2009. Alokasi khusus ini dilakukan untuk memberikan alokasi SDR kepada negara-negara anggota yang bergabung dengan IMF setelah alokasi umum tahun 1981 dan untuk menyeimbangkan alokasi negara-negara anggota lainnya sejalan dengan perkembangan ekonominya.

Berdasarkan surat IMF tanggal 3 September 2009, pencatatan Alokasi SDR diklasifikasikan sebagai *other debt liabilities* dalam kelompok *long-term liabilities* sesuai *Balance of Payment Manual 6* (BPM6). Klasifikasi ini sesuai dengan karakteristik Alokasi SDR yang memiliki jangka waktu panjang sehingga dikategorikan sebagai utang jangka panjang.

Saldo Alokasi Hak Tarik Khusus per 31 Desember 2011 sebesar SDR1,980,435,720.00 atau setara dengan Rp 27.483.875 juta dan per 31 Desember 2010 sebesar SDR1,980,435,720.00 atau setara dengan Rp 27.421.967 juta.

*hand, members will have to pay interest when their SDR balance is smaller than their SDR Allocation. The IMF charges an administration fee of less than 0.01% annually to manage SDRs.*

*Since the inception of SDRs in 1969, the IMF has allotted SDR General Allocations to member countries three time: 1) SDR Allocations allotted in several phases during the period 1970 – 1972; 2) SDR Allocations allotted in several phases during the period 1979 – 1981; and 3) the SDR Allocations allotted on August 28, 2009. Other than General SDR Allocations, the IMF also added Special SDR Allocations once in 1997, but these were only allotted to member countries on September 9, 2009 after it was approved by 85% of the voting rights of IMF member countries in August 2009. This special allotment was intended to provide SDR allocations to countries that joined the IMF after the general allocation of 1981, and to bring the allocations of other countries into line with their economic growth.*

*Based on the IMF letter dated September 3, 2009, SDR Allocations are classified as other debt liabilities in the long-term liabilities section according to the guidance in The Balance of Payment Manual 6 (BPM6). This classification is in accordance with the characteristics of SDR Allocations, which are long term and categorized as long-term liabilities.*

*The Special Drawing Rights Allocation balance per December 31, 2011, stood at SDR 1,980,435,720.000, or the equivalent of IDR 27,483,875 million, and per December 31, 2010 at SDR 1,980,435,720, or the equivalent of IDR 27,421,967 million.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

29. Kewajiban Lain-Lain

Kewajiban Lain-Lain per 31 Desember 2011 dan  
31 Desember 2010 terdiri dari:

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011 IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010 IDR millions</i>	
- <i>Cash Collateral</i>	16.841.761	19.683.577	- <i>Cash Collateral</i>
- Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas	17.501	601.981	- <i>Collateral for opening L/C in foreign currency</i>
- Kewajiban Imbalan Kerja	2.085.926	1.790.777	- <i>Employee Benefits Liabilities</i>
- Utang pajak	123.323	23.448	- <i>Tax Payables</i>
- Lainnya	2.693.751	1.146.262	- <i>Other</i>
	<b>21.762.262</b>	<b>23.246.045</b>	

a. Cash Collateral

Cash collateral merupakan jaminan yang diterima oleh Bank Indonesia atas transaksi peminjaman SSB milik Bank Indonesia (*Third Party Securities Lending*) kepada pihak ketiga (*borrower*) melalui *securities lending agent*. Selanjutnya *cash collateral* di-reinvestasikan sebagaimana dijelaskan pada Catatan C.7 dan Catatan C.14.

b. Kewajiban Imbalan Kerja

Bank Indonesia menyelenggarakan program imbalan kerja yang terdiri dari imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen pada posisi 31 Desember 2011 dengan tingkat diskonto sebesar 7,25% untuk Manfaat Pensiun serta 6,5% untuk Tunjangan Hari Tua (THT), Imbalan Pasca Kerja, dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya.

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja terdiri dari program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh DAPENBI, Tunjangan Hari Tua (THT) Baperum yang dikelola oleh YKKBI, dan kewajiban imbalan pasca kerja tanpa pendanaan antara lain berupa Uang Perpisahan Pegawai. Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya antara lain berupa Uang Cuti Besar dan Uang Penghargaan Pengabdian.

29. Other Liabilities

Other Liabilities as at December 31, 2011 and  
December 31, 2010 consisted of:

a. Cash Collateral

Cash collateral is collateral received by Bank Indonesia in respect of third party securities lending to borrowers through securities lending agents. Such cash collateral is then reinvested, as explained in Notes C.7 and C.14.

b. Employee Benefits

Bank Indonesia provides post and long-term employment benefit program. The actuarial calculation on post and long-term employment benefit program was performed by an independent actuary for the position as per December 31, 2011 with a discount rate of 7.25% for pension benefits and 6.5% for Retirement Benefits (*Tunjangan Hari Tua - THT*), *Post and Long-Term Employment Benefits*.

The post employment programs consist of a defined benefit pension plan managed by DAPENBI, Retirement Benefit Program (*Tunjangan Hari Tua - BKP and Baperum*) managed by YKKBI, and other post employment benefits programs without funding, which consist of Employee Farewell Paid Leave. Other long-term benefits include Extended Leave and Long Service Payments.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Kewajiban imbalan kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sebesar 32,5% dari kekayaan pendanaan YKKBI sesuai dengan keputusan rapat pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Mutasi aktiva, kewajiban, dan beban imbalan kerja pada periode Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	Manfaat Pensiun Rp juta	THT Rp juta	Imbalan Pasca Kerja Rp juta	Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Rp juta	Pajak untuk Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Rp juta	Jumlah Rp juta	
	<i>Pension Benefits IDR millions</i>	<i>THT IDR millions</i>	<i>Other Post Employment benefits IDR millions</i>	<i>Other Long term Benefits IDR millions</i>	<i>Tax IDR millions</i>	<i>Total IDR millions</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Saldo Aktiva/(Kewajiban)							Assets/(Liabilities) balance as at
31 Desember 2010	(394.051)	46.206	(309.644)	(970.798)	(162.490)	(1.790.777)	December 31, 2010
Beban Imbalan Kerja	(138.649)	(120.025)	(56.221)	(398.905)	(56.143)	(769.943)	Employee Benefit Expenses
Kontribusi							Bank Indonesia's
Bank Indonesia	112.587	120.025	0	0	0	232.612	contribution
Pembayaran Manfaat	0	0	29.071	176.693	36.418	242.182	Benefit payments
							Assets/(Liabilities)
Saldo Aktiva/(Kewajiban)							balance as at
31 Desember 2011	(420.113)	46.206	(336.794)	(1.193.010)	(182.215)	(2.085.926)	December 31, 2011

Adapun total kewajiban imbalan kerja manfaat pensiun, THT, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pajak untuk imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 2.085.926 juta. Kewajiban Imbalan Kerja THT telah disesuaikan dengan komposisi kekayaan pendanaan Baperum sesuai dengan keputusan rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011 – lihat Catatan D.3.

Pada posisi 31 Desember 2011, pendanaan DAPENBI berasal dari iuran pegawai dan pemberi kerja masing-masing sebesar 7% dan 13,3% dari penghasilan dasar pensiun.

THT obligations have been adjusted in accordance with the Baperum funding composition in the amount of 32.5% of the funding assets of the YKKBI based on the decision of the YKKBI Trustees' meeting of April 25, 2011 – see Note D.3.

Changes in employee benefit assets, liabilities and expenses for the period of January to December 2011 were as follows:

Total Employee Benefits liabilities for pension benefits, Other Post Employment Benefits, Tax and Other Long-Term Benefits as at December 31, 2011 amounted to IDR 2,085,926 million. The balance of THT has been adjusted in accordance with the Baperum funding composition based on the decision of the meeting of the YKKBI Trustees on April 25, 2011 - see note D.3.

As at December 31, 2011, DAPENBI's funding was derived from employee and Bank Indonesia contributions amounting to 7% and 13.3% respectively, based on basic pension



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Berdasarkan laporan Aktuaris Berkala DAPENBI oleh aktuaris independen, pada posisi 31 Desember 2011 DAPENBI berada pada kondisi Kualitas Pendanaan tingkat II, sehingga Bank Indonesia memberikan iuran tambahan sebesar Rp 4.473 juta per bulan yang dibayarkan selama 24 bulan atau sampai dengan rasio pendanaan DAPENBI mencapai 100%.

Pada posisi 31 Desember 2011, iuran THT dari Bank Indonesia kepada YKKBI adalah sebesar 20% dari gaji pokok pegawai dengan memperhatikan indeks kota.

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 123.323 juta dan Rp 23.448 juta. Penjelasan lebih rinci mengenai utang pajak dijelaskan dalam Catatan C.30.

d. Lainnya

Bagian terbesar dari kewajiban lainnya adalah pembayaran kumulatif *Domestic Market Obligation* (DMO) fee Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas dan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 2.527.631 juta, yang masih harus diselesaikan oleh Bank Indonesia terkait dengan tugas Bank Indonesia sebagai kasir Pemerintah.

30. Perpajakan

a. Penerimaan (Beban) Pajak Penghasilan

Penerimaan (Beban) pajak penghasilan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	Jan-Des 2011 Rp juta <i>Jan-Dec 2011 IDR millions</i>	Jan-Des 2010 Rp juta <i>Jan-Dec 2010 IDR millions</i>
- Pajak Kini	0	0
- Pajak Tangguhan	64.291	6.823.268
Jumlah Penerimaan (Beban) Pajak Tangguhan	64.291	6.823.268

b. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara Surplus (Defisit) sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Penerimaan (Beban) pajak penghasilan:

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*salary. According to the DAPENBI Periodic Actuary Statement from an Independent Actuary, as at December 31, 2011 DAPENBI was classified as having Funding Quality Second Grade, therefore Bank Indonesia paid an additional premium amounting to IDR 4,473 million to DAPENBI for 24 months or until the funding ratio of DAPENBI reaches 100%.*

*As at December 31, 2011, YKKBI's premiums from Bank Indonesia amounted to 20% of basic salary having regard to the city index.*

c. Taxes Payable

*The balance of taxes payable as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR 123,323 million and IDR 23,448 million respectively. Detailed explanations on taxes payable can be found in Note C.30.*

d. Others

*The biggest part of Other Liabilities consisted of the cumulative payment of domestic market obligation (DMO) fees to contract of work contractors (KKKS) in the oil and gas sector and PT Peramina (Persero), which amounted to IDR 2,527,631 million and still must be settled by Bank Indonesia in connection with Bank Indonesia's duties as the Government cashier.*

30. Taxation

a. Income Tax Revenues (Expenses)

*Income tax revenues (expenses) for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2009 were as follows:*

b. Reconciliation

*The reconciliation between the surplus (deficit) before income tax shown in the financial statements and the income tax revenues (expenses) account is as follows:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	Jan-Des 2011 Rp juta <i>Jan-Dec 2011 IDR millions</i>	Jan-Des 2010 Rp juta <i>Jan-Dec 2010 IDR millions</i>	
Surplus (defisit) sebelum pajak penghasilan	(25.213.004)	(27.982.456)	<i>Surplus (deficit) before income tax</i>
Koreksi Fiskal Positif			<i>Positive Fiscal Correction</i>
Beda Tetap:			<i>Permanent Differences:</i>
1) Natura dan Kenikmatan	551.916	535.574	<i>1) Benefits</i>
2) Bantuan atau Sumbangan	47.958	26.952	<i>2) Grants and Assistance</i>
3) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	24.201	28.536	<i>3) Fixed Asset and Inventory Depreciation</i>
4) Lainnya	124.064	100.485	<i>4) Others</i>
Jumlah	748.139	691.547	<i>Total</i>
Beda Waktu:			<i>Temporal Differences:</i>
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	704.404	738.509	<i>1) Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits</i>
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	2.159	49.892	<i>2) Fixed Asset and Inventory Depreciation</i>
Jumlah	706.563	788.401	<i>Total</i>
Koreksi Fiskal Negatif			<i>Negative Fiscal Correction</i>
Beda Tetap:	(3.102)	(2.162)	<i>Permanent Differences:</i>
	(3.102)	(2.162)	
Beda Waktu:			<i>Temporary Differences:</i>
1) Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	(433.566)	(420.971)	<i>1) Post Employment and Other Long-Term Employment Benefits</i>
2) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(15.832)	(5.359)	<i>2) Fixed Asset and Inventory Depreciation</i>
	(449.398)	(426.330)	
Selisih Lebih Hasil Revaluasi Aktiva Tetap	9.266.042	0	<i>Difference after Revaluation of Fixed Assets</i>
Surplus (Defisit) Kena Pajak	(14.944.760)	(26.931.000)	<i>Taxable Surplus (Deficit)</i>
Perhitungan Pajak Terutang			<i>Calculation of Current Tax</i>
25% x Rp0	0	0	<i>25% x Rp0</i>
Jumlah Pajak Terutang	0	0	<i>Current Tax</i>
Kredit Pajak:			<i>Tax Credit:</i>
Angsuran PPh pasal 22	0	19.431	<i>Article 22 Income Tax installments</i>
Angsuran PPh pasal 25	0	0	<i>Article 25 Income Tax Installments</i>
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	0	19.431	<i>Income Tax Payable</i>

c. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Posisi Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 merupakan pengaruh beda waktu dengan rincian sebagai berikut:

c. Deferred Tax Assets (Liabilities)

*The position for deferred tax assets (liabilities) as at December 31, 2011 and December 31, 2010 was the result of time differences as shown below:*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
1) Imbalan Pasca Kerja	23.393	18.058	1) <i>Post Employment Benefits</i>
2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	221.382	121.882	2) <i>Other Long Term Employment Benefits</i>
3) Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun	26.063	(11.046)	3) <i>Post Employment Benefits – Pension</i>
4) Tunjangan Hari Tua	0	188.644	4) <i>Retirement Benefits</i>
5) Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	(13.673)	44.533	5) <i>Fixed Assets and Inventory Depreciation</i>
			<i>Total Temporary Differences Fiscal Correction</i>
Jumlah Koreksi Fiskal Beda Waktu	<b>257.165</b>	<b>362.071</b>	
Rugi Fiskal	14.944.760	26.931.000	<i>Fiscal Loss</i>
Jumlah	<b>15.201.925</b>	<b>27.293.071</b>	<i>Total</i>
Aktiva (kewajiban) Pajak Tangguhan tahun berjalan	64.291	6.823.268	<i>Deferred tax assets (liabilities) in current year</i>
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan tahun sebelumnya	6.950.398	127.130	<i>Deferred tax assets (liabilities) in previous year</i>
Saldo Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan	<b>7.014.689</b>	<b>6.950.398</b>	<i>Deferred tax assets (liabilities) Balance</i>

Bank Indonesia pada tahun 2011 mengalami defisit fiskal, sehingga PPh terutang nihil.

As Bank Indonesia incurred a fiscal deficit in 2011, the taxes payable balance was zero.

Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2010 sebesar Rp 6.823.268 juta memperhitungkan defisit fiskal dan perbedaan temporer yaitu masing-masing 25% x rugi fiskal sebesar Rp 26.931.000 juta dan 25% x perbedaan temporer (beda waktu) sebesar Rp 362.071 juta. Aktiva Pajak Tangguhan tahun 2011 sebesar Rp 64.291 juta hanya memperhitungkan perbedaan temporer yaitu 25% x perbedaan temporer sebesar Rp 257.165 juta, dengan pertimbangan aktiva pajak tangguhan sudah memadai untuk dikompensasi dengan surplus fiskal pada masa mendatang – lihat Catatan C.14.d.

*Deferred Tax Assets in 2010 of IDR 6,823,268 also included the fiscal deficit and time differences, namely 25% x fiscal loss of IDR 26,931,000 million and 25% x time difference amounting to IDR 362,071 million, respectively. Deferred Tax Assets of IDR 64,291 for 2011 million only included time differences, namely, 25% x time difference amounting to IDR 257,165 million, based on the consideration that deferred tax assets were already sufficient to compensate for fiscal surpluses in the future – see Note C.14.d.*

d. Utang Pajak

d. Tax Liabilities

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
PPh Pasal 25/29	0	0	<i>Article 25/29</i>
Pasal 21	16.851	19.547	<i>Article 21</i>
Pasal 22	24	958	<i>Article 22</i>
Pasal 23	1.309	967	<i>Article 23</i>
Pasal 26	218	93	<i>Article 26</i>

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
Pasal 4 ayat 2	25.415	1.850	<i>Article 4 (2)</i>
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	79.506	33	<i>Value Added Tax (VAT)</i>
Jumlah	<b>123.323</b>	<b>23.448</b>	<i>Total</i>

Bank Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN).

*Bank Indonesia has been registered as a Taxable Enterprise based on the Taxable Enterprise Registration Registration Certificate Number PEM-00167/WJP.07/KP.103/2006 dated December 1, 2006, which was issued by the Tax Office for State-Owned Enterprises (KPP BUMN).*

Bank Indonesia melaksanakan kewajiban sebagai PKP mulai Januari 2012. Untuk kewajiban sebagai PKP dari periode Desember 2006 s.d Desember 2011, Bank Indonesia telah melakukan *self assessment* utang PPN yaitu sebesar Rp 79.379 juta, belum termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan denda - lihat Catatan E.9.

*Bank Indonesia will fulfill its obligations as a Taxable Enterprise commencing January 2012. As regards its obligations as a Taxable Enterprise from December 2006 to December 2011, Bank Indonesia has conducted a self-assessment of VAT liabilities and determined these to be IDR 79,379 million, not including administrative sanctions in the form of interest and penalties – see Note E.9.*

31. Modal

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil revaluasi aset. Modal pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp 16.876.926 juta dan Rp 7.610.885 juta. Dalam modal per 31 Desember 2011 sudah termasuk penambahan berupa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 9.266.042 juta – lihat Catatan C.14.

31. Capital

*Based on the Bank Indonesia Act, the capital of Bank Indonesia shall be at least IDR 2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah). This capital must be increased to up to 10% (ten percent) of total monetary liabilities, with funds to be derived from general reserves or asset revaluation reserves. The capital of Bank Indonesia as at December 31, 2011 and December 31, 2009 was IDR 16,876,926 million and IDR 7,610,885, respectively. Bank Indonesia’s capital as at December 31, 2011 included an increase of IDR 9,266,042, the surplus arising from the revaluation of fixed assets – see Note C.14.*

32. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia diatur bahwa surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:  
a. 30% untuk Cadangan Tujuan; dan  
b. Sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum

32. General and Statutory Reserves

*According to Article 62 of the Bank Indonesia Act 6 of 2009, a surplus arising from Bank Indonesia’s operations shall be distributed as follows:  
a. 30% for the Statutory Reserves;  
b. The remainder to be reinvested as General*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

*Reserves so that the sum of capital and General Reserves becomes 10% of the monetary liabilities as referred to in Article 6(2).*

Selanjutnya dalam Pasal II angka 3 diatur bahwa selama penyelesaian BLBI belum berakhir, Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 10%.

*Furthermore, as stated in Article II Number 3, as long as the settlement of BLBI has not been completed, Statutory Reserves shall be set at 10%.*

Pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan pula bahwa Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan harta tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penggunaan Cadangan Tujuan periode Januari sampai dengan Desember 2011 adalah sebesar Rp 464.422 juta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembaruan/penggantian harta tetap sebesar Rp 393.901 juta.
- b. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 25.181 juta.
- c. Penyertaan sebesar Rp 45.340 juta.

*According to the elucidation on Article 62 of the Bank Indonesia Act, Statutory Reserves are to be used for, among other things, financing the replacement and or renewal of fixed assets, the procurement of equipment, and organisational and human resources development as part of the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia, as well as the investments needed to implement the duties of Bank Indonesia. The Statutory Reserves utilized in the period of January up to December 2011 amounted to IDR 464,422 million, with the details being as follows:*

- a. Replacement/renewal of fixed assets amounting to IDR 393,901 million.*
- b. Organisational and human resources development amounting to IDR 25,181 million.*
- c. Equity protections amounting to IDR 45,340 million.*

Posisi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 41.555.776 juta dan Rp 13.906.146 juta.

*The balances of General Reserves and Statutory Reserves as at December 31, 2011, amounted to IDR 41,555,776 million and IDR 13,906,146 million.*

33. Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi

Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 42.382.140 juta dan Rp 5.725.994 juta yang terdiri atas:

33. Unrealized Gains/Losses

*The balances of Unrealized Gains/Losses as at December 31, 2011 and December 31, 2010 amounted to IDR 42,382,140 million and IDR 5,725,994 million respectively, with the details being as follows:*

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011</i> <i>IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Revaluasi harga emas	32.667.619	28.917.019	- Revaluation of gold price
- Revaluasi SSB dalam valas	18.516.019	5.014.268	- Revaluation of marketable securities in foreign currency
- Revaluasi SSB dalam Rupiah	8.727.030	2.749.708	- Revaluation of marketable securities in Rupiah
- Selisih kurs valas	(17.528.528)	(30.955.001)	- Differences in foreign exchange rate
	<b>42.382.140</b>	<b>5.725.994</b>	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Peningkatan keuntungan yang belum direalisasi dari Rp 5.725.994 juta menjadi Rp 42.382.140 juta karena kenaikan harga pasar emas, kenaikan harga pasar SSB dalam valas, dan kenaikan selisih kurs valas akibat melemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap valas EUR, USD, dan XAU.

*The increase in unrealized gains from IDR 5,725,994 million to IDR 42,382,140 million was due to an increase in the market price of gold, an increase in the market price of foreign currency marketable securities and an increase in the exchange rate differential as a result of Rupiah weakness against the EUR, USD and XAU.*

34. Penerimaan Pengelolaan Devisa

Penerimaan dari Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 terdiri atas:

34. Revenues from Foreign Reserves Management

*Revenues from foreign reserves management for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 consisted of:*

	Jan-Des 2011 Rp juta <i>Jan-Dec 2011</i> <i>IDR millions</i>	Jan-Des 2010 Rp juta <i>Jan-Dec 2010</i> <i>IDR millions</i>	
- Bunga sektor valas	16.855.434	13.512.496	- Interest in foreign exchange sector
- Provisi sektor valas	142.235	1.762	- Provisions in foreign exchange sector
- Penerimaan valas lainnya	6.423.676	4.455.695	- Other foreign exchange revenues
	<b>23.421.345</b>	<b>17.969.953</b>	

Penerimaan valas lainnya tahun 2011 terutama berasal dari keuntungan SSB sebesar Rp 6.320.522 juta.

*Other foreign exchange revenues in 2011 primarily consisted of securities capital gains amounting to IDR 6,320,522 million.*

35. Penerimaan Pengelolaan SSB dalam Negeri

Penerimaan dari Pengelolaan SSB Dalam Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 3.756.152 juta dan Rp 2.726.377 juta.

35. Revenues from Money Market

*Revenues from Money Market for the periods January 1 to December 31, 2011 and January 1 to December 31, 2010 amounted to IDR 3,756,152 million and IDR 2,726,377 million respectively.*

36. Penerimaan Pemberian Kredit dan Pembiayaan

Penerimaan dari Pemberian Kredit dan Pembiayaan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 515.888 juta dan Rp 283.870 juta. Penerimaan sebagian besar berasal dari bunga Surat Berharga yang dikeluarkan Pemerintah sebesar Rp 246.562 juta.

36. Revenues from Credit and Financing

*Revenues from credit and financing for the period of January 1 to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR 515,888 million and IDR 283,870 million respectively. Included in that amount were accrued revenues from Government Bond interest, amounting to IDR 246,562 million.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

37. Selisih Kurs karena Transaksi Valas

Selisih kurs karena transaksi valas pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar negatif Rp 11.693.801 juta dan negatif Rp 16.435.753 juta.

Penurunan kerugian selisih kurs dari Rp 16.435.753 juta menjadi Rp 11.693.801 juta karena melemahnya nilai tukar rupiah terutama terhadap valuta EUR, USD, dan XAU.

38. Penerimaan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 223.897 juta dan Rp 201.130 juta. Penerimaan dari Pengelolaan Sistem Pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 berasal dari Jasa Penyelenggaraan Transfer sebesar Rp 223.882 juta dan Jasa Pengelolaan Rekening sebesar Rp 15 juta.

39. Penerimaan Pengawasan Perbankan

Penerimaan dari Pengawasan Perbankan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 17.467 juta dan Rp 28.422 juta.

40. Penerimaan Lainnya

Penerimaan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 1.108.197 juta dan Rp 1.277.911 juta.

Dalam penerimaan lainnya tahun 2011, termasuk di dalamnya keuntungan uang kertas/uang logam yang ditarik dari peredaran sebesar Rp 840.074 juta.

41. Beban Operasi Pasar Terbuka

Beban Operasi Pasar Terbuka terdiri atas:

37. Exchange Rate Differences

The value of Exchange Rate Differences for the period of January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010 amounted to negative IDR 11,693,801 million and negative IDR 16,435,753 million respectively.

The decline in the loss on Exchange Rate Differences from IDR 16,435,753 million to IDR 11,693,801 was due to a weakening in the Rupiah, particularly against EUR, USD and XAU.

38. Revenues from Payment System Services

Revenues from payment system services for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR 223,897 million and IDR 201,130 million respectively. Revenues from payment system services for the period of January 1 to December 31, 2011 were derived from transfer service fees of IDR 223,882 million and account administration fees of IDR 15 million.

39. Banking Supervision Revenues

Banking supervision revenues for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR 17,467 million and IDR 28,422 million.

40. Other Revenues

Other Revenues for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR 1,108,197 million and IDR 1,277,911 million.

Other Revenues in 2011 included gains from the withdrawal of banknotes/coins in the amount of IDR 840,074 million.

41. Open Market Operations Expenses

Open Market Operations Expenses consisted of:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

	Jan-Des 2011 Rp juta Jan-Dec 2011 IDR millions	Jan-Des 2010 Rp juta Jan-Dec 2010 IDR millions
- Pengembangan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar	30.074.985	24.163.726
- Penelitian Uang Beredar	17.030	13.075
	30.092.015	24.176.801

Beban Operasi Pasar Terbuka merupakan bagian pengeluaran terbesar Bank Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 30.092.015 juta (70,70%) dari total beban dan Rp 24.176.801 juta (71,04%) dari total beban.

Termasuk dalam Pengembangan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan Uang Beredar adalah Biaya Diskonto untuk SBI, Penempatan Dana, Penempatan Berjangka, dan Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - SUN sebesar Rp 28.521.353 juta, beban imbalan untuk SBIS dan FASBIS sebesar Rp 478.309 juta, serta beban jasa giro atas pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp 1.047.260 juta.

42. Beban Pengelolaan Devisa

Beban Pengelolaan Devisa pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 67.827 juta dan Rp 38.787 juta.

43. Beban Pinjaman Luar Negeri

Beban Pinjaman Luar Negeri pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 178.422 juta dan Rp 158.643 juta.

44. Beban Jasa Giro Pemerintah

Beban Jasa Giro Pemerintah pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 4.666.712 juta dan Rp 2.434.310 juta. Jasa Giro diberikan atas Giro

Open market operations expenses was Bank Indonesia's largest expense during the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010, amounting to IDR 30,092,015 million (70.70%) of total expenses, and to IDR 24,176,801 million (71.04%) of total expenses, respectively.

Included in Policy Execution Expenses were SBI discounts, Term Deposit discounts, Deposit Facilities discount, Term Deposit discounts and Reverse Repo Transaction - SUN discounts amounting to IDR 28,521,353 million, SBIS and FASBIS Bonus expenses amounting to IDR 478,309 million, and GWM interest expenses in rupiah amounting to IDR 1,047,260 million.

42. Foreign Reserves Management Expenses

Foreign Reserves Management Expenses for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR 67,827 million and IDR 38,787 million.

43. Foreign Loans Management Expenses

Foreign Loans Management Expenses for the periods from January 1 to December 31, 2011, and January 1 to December 31, 2010, amounted respectively to IDR 178,422 million and IDR 158,643 million.

44. Government Account Interest Expenses

Government Account Interest Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR 4,666,712 million and IDR 2,434,310 million respectively. Such interest



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Pemerintah yang berupa Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Penempatan. Peningkatan jasa giro terjadi karena meningkatnya rata-rata bulanan volume giro Pemerintah di Bank Indonesia dari Rp 145.059.896 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 203.678.537 juta pada tahun 2011 atau meningkat 40,41%.

was attributed to General State Cash Account and Placement Accounts. An increase in account services occurred because of the increase in the average monthly volume of government giro transactions from IDR 145,059,896 million in 2010 to IDR 203,678,537 million in 2011, which represents an increase of 40.41%.

45. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 2.010.016 juta dan Rp 2.703.376 juta. Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran tahun 2011 antara lain terdiri dari Beban Pelaksanaan Pengadaan Bahan Uang sebesar Rp 617.607 juta dan Pelaksanaan Pencetakan Uang sebesar Rp 1.259.573 juta. Dalam beban pelaksanaan pencetakan uang sebesar Rp 1.259.573 juta terdapat pembayaran biaya cetak kepada Perum Peruri sebesar Rp 1.252.887 juta yang terdiri dari pembayaran atas pencetakan uang tahun 2011 sebesar Rp 1.052.139 juta dan pembayaran atas pencetakan uang tahun 2010 (carry over) sebesar Rp 200.748 juta. Biaya cetak kepada Perum Peruri sebesar Rp 1.252.887 juta sudah memperhitungkan kelebihan pembayaran untuk pencetakan uang tahun 2010 sebesar Rp 104.520 juta dan kekurangan pembayaran untuk pencetakan uang tahun 2011 sebesar Rp 42.706 juta – lihat Catatan C.12.

46. Beban Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

Beban Pengaturan dan Pengawasan Perbankan pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 174.917 juta dan Rp 149.878 juta.

47. Beban Umum dan Lainnya

Pos Beban Umum dan Lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 terdiri atas:

45. Payment System Operating Expenses

Payment system services expenses for the periods of January 1 up to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR 2,010,016 million and IDR 2,703,376 million respectively. Payment system services expenses for 2011 included currency procurement expenses amounting to IDR 617,607 million, and currency printing expenses of IDR 1,259,573 million which included a payment for currency printing to Perum Peruri of IDR 1,252,887 million which consisted of payment for currency printing in 2011 in the amount of IDR 1,052,139 million and payment for 2010 (carry over) in the amount of IDR 200,748 million. The cost of printing at Perum Peruri (IDR 1,252,887 million) also takes account of overpayment for printing services in 2010 of IDR 104,520 million and underpayment in 2011 of IDR 42,706 million – see Note C.12.

46. Banking Regulation and Supervision Expenses

Banking Regulation and Supervision Expenses for the periods of January 1 up to December 31, 2011 and 2010 amounted to IDR 174,917 million and IDR 149,878 million respectively.

45. General and Other Expenses

General and Other Expenses for the periods of January 1 to December 31, 2011 and 2009 consisted of:

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

	Jan-Des 2011 Rp juta Jan-Dec 2011 IDR millions	Jan-Des 2010 Rp juta Jan-Dec 2010 IDR millions	
- Sumber Daya Manusia	3.401.743	3.245.503	- Human resources
- Logistik dan Pengamanan	878.532	783.025	- Logistics and security
- Sistem Teknologi Informasi	14.564	37.819	- IT system
- Lainnya	1.058.056	278.088	- Other
	5.352.895	4.344.435	

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur ditetapkan paling banyak dua kali gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia.

Under the Bank Indonesia Act, the salary, other income and facilities of the Governor, Senior Deputy Governor and Deputy Governors shall be prescribed by the Board of Governors. The amount of such salary and other income of the Governor shall be determined at a maximum of two times the salary and other income of an employee of the highest grade in Bank Indonesia.

Dalam beban SDM termasuk juga imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp 769.943 juta sebagaimana dijelaskan dalam pos Kewajiban Lain-lain, serta gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan, dan uang cuti tahunan bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 17.184 juta dan Rp 16.862 juta.

Included in Human Resources expenses were post employment and other long-term employment expenses for the period from January 1 to December 31, 2011, amounting to IDR 769,943 million as explained in the Other Liabilities item, as well as salaries, incentives, holiday bonuses (tunjangan hari raya), and annual leave payments to the Board of Governors for the period of January 1 to December 31, 2011 and 2010, which amounted to IDR 17,184 million and IDR 16,862 million, respectively.

Di dalam beban SDM tersebut, termasuk juga Tunjangan Hari Tua berupa Program Bantuan Pemilikan Rumah dan Program Jamsostek sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Included in the Human Resources expenses were Bank Indonesia's membership expenses in the Housing Ownership program and Jamsostek program, which are compulsory under the Jamsostek Act (Number 3 of 1992), including accident insurance, life insurance and retirement insurance.

Dalam beban Logistik dan Pengamanan, sebesar Rp 75.477 juta merupakan selisih kurang penilaian kembali (kerugian hasil revaluasi aktiva tetap) – lihat Catatan C.14.

The Logistics and Security Expenses item included IDR 75,477 million arising out of the difference from revaluation (loss on revaluation of fixed assets) – see Note C.14.

48. Rasio Modal

Rasio Modal (Modal, Cadangan Umum dan Defisit tahun berjalan) terhadap Kewajiban Moneter

48. Capital Ratio

The ratio of Capital (Capital, General Reserves, and Current Year Deficit) to Monetary Liabilities

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

per tanggal 31 Desember 2011 adalah 2,71%. Jumlah Modal dan Kewajiban Moneter yang diperhitungkan dalam perhitungan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2011 masing-masing adalah Rp 33.283.989 juta dan Rp 1.227.288.311 juta. Modal, Kewajiban Moneter, dan Rasio Modal per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

as at December 31, 2011 was 2.71%. The Capital and Monetary Liabilities used in the Capital Ratio calculation at December 31, 2011 amounted to IDR 33,283,989 million and IDR 1,226,288,311 million, respectively. The Capital, Monetary Liabilities, and Capital Ratio as at December 31, 2011 were as follows:

31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011 Rp juta</i>			
a. Modal		a. Capital	
- Modal	16.876.926	- Capital	
- Cadangan Umum	41.555.776	- General Reserves	
- 100% Defisit Tahun Berjalan (setelah pajak)	(25.148.713)	- 100% of Current Year Deficit (after tax)	
Jumlah	33.283.989	Total	
b. Kewajiban Moneter		b. Monetary Liabilities	
- Uang dalam Peredaran	372.982.462	- Currency in Circulation	
- Giro Pemerintah	90.371.330	- Government Demand Deposits	
- Giro Bank	251.387.574	- Bank Demand Deposits	
- Giro Lainnya (kecuali Giro IMF, Bank Dunia, dan ADB)	115.864	- Other demand deposits (excluding IMF, World Bank, and ADB demand deposits)	
- Surat Berharga yang Diterbitkan (SBI, SBIS, Penempatan Berjangka, Penempatan Dana, FASBIS, Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali)	512.311.997	- Issued Securities (SBI, SBIS, Long Term Placements, Fund Placements, FASBIS, Securities Sold Under Repurchase Attorneys General )	
- Pinjaman dari Pemerintah	119.084	- Loans from Government	
Jumlah	1.227.288.311	Total	
c. Rasio Modal		c. Capital Ratio	
Modal + Cadangan Umum + 100% Defisit Tahun Berjalan Kewajiban Moneter	= 2,71%	Capital + General Reserves + 100% of Current Year Deficit Monetary Liabilities	

D. PENJELASAN LAINNYA

D. OTHERS

1. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa

1. Related Party Transactions

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Related party transactions consisted of:

	31 Desember 2011 Rp juta <i>December 31, 2011 IDR millions</i>	31 Desember 2010 Rp juta <i>December 31, 2010 IDR millions</i>	
- Tagihan pada Indover Bank	501.044	498.368	- Claims on Indover Bank
- Pinjaman karyawan	439.704	373.331	- Employee Loans
	940.748	871.699	

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2011

Notes to Financial Statements As at December 31, 2011

Tagihan pada Indover Bank per 31 Desember 2011 sebesar Rp 501.044 juta sebagaimana dijelaskan pada C.14.

The claims on Indover Bank per December 31, 2011 stood at IDR 501,044, as explained in C.14.

Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada karyawan berdasarkan PDG Nomor 4/9/PDG/2002 jo.PDG Nomor 8/12/PDG/2006 tentang Pinjaman Multiguna bagi Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia Indonesia provides loans to employees based on Board of Governors Decisions Number 4/9/PDG/2002 and Number 8/12/PDG/2006 on multipurpose loans to Bank Indonesia employees and members of the Board of Governors.

Di samping itu, terdapat tanah/bangunan yang digunakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)/Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)/Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI)/Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia (YASPORBI)/Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) dengan cara pinjam pakai/sewa/bangun guna serah.

In addition, there are Lands/Buildings used by the Indonesia Banking Development Foundation (Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia - YPPI), Bank Indonesia's Employee Welfare Foundation (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia - YKKBI), Bank Indonesia Retired Employees Association (Persatuan Pensiunan Bank Indonesia - PPBI), the Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation (Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia - YASPORBI), and Bank Indonesia Employees' Wives association (Persatuan Isteri Pegawai Bank Indonesia - PIPEBI) under loan, rental or build operate transfer (BOT) agreements.

2. Dana Kesejahteraan Pegawai

Berdasarkan Pasal 47 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk Dana Kesejahteraan Pegawai (DKP). DKP digunakan sebagai sumber pinjaman pegawai dan selebihnya ditempatkan dalam bentuk deposito dan surat berharga Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 tanggal 29 Juni 2001, pengelolaan DKP dilakukan oleh YKKBI.

2. Employee Welfare Funds

Under Article 47(6) of the Republic of Indonesia Central Bank Act (Number 13 of 1968), Bank Indonesia is obliged to allocate 7.5% of its after-tax net profit that has been validated to the employee welfare fund (Dana Kesejahteraan Pegawai - DKP). The DKP is used as a source of employee loans. Meanwhile, idle funds are placed in time deposits and government bonds. Based on the Governor of Bank Indonesia Decision Number 3/11/KEP/GBI/INTERN/2001 dated June 29, 2001, the YKK-BI was appointed as the fund manager of the DKP.

Posisi DKP per 31 Desember 2011 adalah Rp 875.770 juta terdiri dari pinjaman pegawai Bank Indonesia sebesar Rp 439.704 juta, dana di Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada pegawai sebesar Rp 12.758 juta dan dana yang dikelola oleh YKKBI sebesar Rp 423.308 juta.

As at December 31, 2011, the DKP balance amounted to IDR 875,770 million, which consisted of Bank Indonesia employee loans amounting to IDR 439,704 million, undistributed funds for employees amounting to IDR 12,758 million and funds managed by the YKK-BI amounting to IDR 423,308 million.



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

3. Dana Tunjangan Hari Tua

Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia mengadakan Tunjangan Hari Tua (THT) untuk pegawai dalam rangka memiliki rumah tempat tinggal. Program THT dikelola oleh YKKBI dan dikenal dengan program Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum). Dalam rapat Pembina YKKBI tanggal 25 April 2011, telah ditetapkan pemisahan kekayaan pendanaan YKKBI untuk program THT (Baperum) dan program YKKBI lainnya (non-Baperum) terhitung sejak 1 Januari 2011 dengan komposisi untuk Baperum sebesar 32,5% dan untuk non Baperum sebesar 67,5%. Pada tahun 2011, YKKBI sedang mengkaji pemisahan kekayaan pendanaan.

4. Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan mulai tanggal 31 Desember 2013 beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persiapan yang diperlukan dalam rangka pembentukan OJK diatur sebagaimana Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 43/KMK.010/2012 dan Nomor 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam Rangka Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Uang Titipan PT Bank Global Internasional, Tbk. Dalam Likuidasi

Berdasarkan Berita Acara Penitipan Barang Bukti, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menitipkan barang bukti perkara tindak pidana pada PT Bank Global Internasional, Tbk. (dalam likuidasi) berupa uang tunai sebesar Rp 16.550 juta.

3. Retirement Benefit Fund

*Under Article 43 (1) of the Central Bank Act (Number 13 of 1968), Bank Indonesia operates a Retirement Benefit (Tunjangan Hari Tua - THT) program to support employees acquire houses. The THT program is managed by YKKBI and is known as House Ownership Fund (Bantuan Pemilikan Rumah - Baperum) program. At the YKKBI trustees meeting held on April 25, 2011, it was decided to separate the YKKBI funds for the THT program % and other YKKBI program funds (non Baperum), with the ratio being 32.5% for Baperum and 67.5% for non-Baperum starting from January 1, 2011. In 2011 YKKBI was in the process of studying the implementation of such separation.*

4. Financial Services Authority

*Under Article 55(2) of Act Number 21 of 2011, dated 22 November 2011, on the Financial Services Authority, the functions, duties and powers of regulating and supervising financial services in the banking sector will be transferred from Bank Indonesia to the Financial Service Authority (OJK) on December 31, 2013.*

*The preparation required for the establishment of the OJK are provided for in the Joint Decision of the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia, number 43/KMK.010/2012 and Number 14/6/KEP.GBI/INTERN/2012 dated February 14, 2012 on the establishment of a joint team from the Ministry of Finance and Bank Indonesia in the context of the establishment of the Financial Service Authority.*

5. Funds belonging to PT Bank Global Internasional Tbk, in liquidation

*As evidenced by the Official Report on the Entrustment of Evidence, the Jakarta Provincial Prosecutor's Office entrusted evidence in the form of IDR 16,550 million to Bank Indonesia. The said evidence is related to a criminal case involving PT Bank Global Internasional Tbk (in liquidation).*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

6. Hibah

Berdasarkan dokumen *Greenbook* Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk periode proyek tahun 2010-2012 Bank Indonesia memperoleh hibah Pemerintah dalam bentuk *Technical Assistance* sebesar USD 1,318,000.00 untuk pelaksanaan proyek *Capacity Development for Supporting Industry Development: Credit Guarantee System* yang berasal dari lembaga donor *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *Extension of Promotion of Small Financial Institution (ProFi)* yang berasal dari lembaga donor *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*. Di tahun 2011 alokasi hibah yang diberikan dalam bentuk *technical assistance* dinilai sebesar USD 1,000,000.00 dengan rincian sebesar USD 800,000.00 dari JICA dan sebesar USD 200,000.00 dari GTZ.

E. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

1. Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans)

Merupakan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Japan Bank for International Cooperation, dan ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk diteruspinjamkan kepada bank melalui Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah sebagai pemegang kas Pemerintah, untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skim-skim ini, oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit.

Peminjam (*borrower*) dalam penerusan TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan yang bertindak

6. Grants

*According to the Green Book produced by the National Planning Agency (Bappenas), during the project years 2010-2012 Bank Indonesia received government grants in the form of Technical Assistance amounting to USD 1,318,000.00 for the implementation of the Capacity Development for Supporting Industry Development: Credit Guarantee System (the said funds originated from donor agency Japan International Cooperation Agency (JICA)) and the Extension of Promotion of Small Financial Institution (ProFi), which funds originated from donor agency Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. IN 2011, Bank Indonesia received USD 1,000,000.00 in technical assistance, with USD 800,000.00 originating from the JICA and USD 200,000.00 from GTZ.*

E. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

1. Two Step Loans

*Two Step Loans (TSL) are loans from financial foreign institutions, such as the World Bank, Japan Bank for International Cooperation and the Asian Development Bank, to the Government of the Republic of Indonesia to be channeled to banks through Bank Indonesia. The role of Bank Indonesia in these credit schemes is as the account holder of the Government, to distribute the loans and to collect payments from the national banks. Thus, these national banks bear the credit risk and distribute the loans to qualified borrowers.*

*The letter of the Minister of Finance Number S-2147/LK/2000 dated May 16, 2000, states that Bank Indonesia only acts as the executing agent of these schemes and therefore bears no credit risk.*

*The borrower in a TSL is the Government of Republic of Indonesia, except for the borrower of loans from EXIM Taiwan, which is Bank Indonesia,*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruspinjamkan kepada Bank Bukopin. Pinjaman TSL diteruskan kepada bank dalam valuta Rupiah, USD, dan EUR dengan posisi saldo pinjaman per 31 Desember 2011 setara dengan Rp 664.033 juta.

Di samping itu, terdapat tagihan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda dengan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang ditandatangani oleh Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Menteri Keuangan dalam rangka *Project Aid* yang sumber dananya berasal dari *Foreign Exchange Loan* dan Rekening Dana Investasi dengan nilai *outstanding* per 31 Desember 2011 setara dengan Rp 273.412 juta.

Saldo pinjaman masing-masing skim tersebut diatas merupakan sisa saldo penerusan pinjaman sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan penatausahaannya tidak dicatat dalam neraca Bank Indonesia namun dicatat pada rekening *off balance sheet* Bank Indonesia.

2. Transaksi Valas

Pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah komitmen tagihan dan komitmen kewajiban surat-surat berharga, deposito, dan *swap* Bank Indonesia setara dengan Rp 21.590.260 juta dan Rp 20.758.491 juta.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaksana Tugas Kedinasan (PTK)

Bank Indonesia atas dasar Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia (PDG) Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Perlindungan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia terkait dengan kasus BLBI. Selanjutnya, berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*with the loan in turn being channeled to Bank Bukopin. TSL are distributed to recipient banks in IDR, USD and EUR with balance as at December 31, 2011 standing at IDR 664,003 million.*

*There are also Government claims against State-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Negara - BUMN)/Local Government-owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah - BUMD), where the Subsidiary Loan Agreements (SLA) were signed by Bank Indonesia based on authorization from the Minister of Finance for the purpose of project aid. The funds originated from Foreign Exchange Loans (FEL) and Investment Fund Accounts (Rekening Dana Investasi - RDI) with the outstanding value as at December 31, 2011 being IDR 273,412 million.*

*The loan balances for each of the above schemes represents the balances that were channeled prior to the entry into effect of the Bank Indonesia Act (Number 23 of 1999). Their administration is not recorded on the Bank Indonesia Balance Sheet but rather on the Bank Indonesia Off Balance Sheet Account.*

2. Foreign Currency Transactions

*As at December 31, 2011, commitment receivables and commitment payables of marketable securities, time deposits, and swaps were equal to IDR 21,590,260 million and IDR 20,758,491 million, respectively.*

3. Legal Protection for Persons Performing Official Duties (PTK)

*In accordance with the Board of Governors Regulation (PDG) Number 4/13/PDG/2002 dated October 22, 2002, concerning "Bank Indonesia Legal Protection for Persons Performing Official Duties," Bank Indonesia provides legal protection for three ex-members of Bank Indonesia's Board Directors in connection with the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) case. With the cassation decision in the Republic of Indonesia's*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Republik Indonesia (MARI) tanggal 10 Juni 2005, tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah.

Sejalan dengan PDG Nomor 4/13/PDG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Dewan Gubernur (DG) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 20 Juni 2005 telah menyetujui agar seluruh biaya penanganan perkara yang telah diterima oleh tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk dikembalikan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya dalam RDG tanggal 11 April 2006 telah disetujui secara prinsip bagi tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan penundaan kewajiban mengembalikan seluruh biaya penanganan perkara sampai adanya putusan PK.

Upaya hukum PK dimaksud hingga saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat tiga mantan anggota Direksi Bank Indonesia tersebut mengajukan permohonan penundaan pengajuan upaya hukum PK, yang terakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2012. Permohonan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi dan kondisi Bank Indonesia saat ini dirasakan belum mendukung upaya hukum PK dimaksud.

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

Sejak tanggal 6 Oktober 2008, Indover Bank dikenakan tindakan darurat (*emergency measures*) karena adanya kesulitan likuiditas yang dialaminya. Pada tanggal 1 Desember 2008, Indover Bank telah dinyatakan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Amsterdam dan berstatus dilikuidasi dalam wilayah kedaulatan Belanda. Alasan dilikuidasinya Indover Bank adalah ekuitas yang telah negatif dan tidak ada tambahan modal yang dapat diharapkan untuk menutup ekuitas negatif tersebut, baik melalui tambahan modal dari Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank maupun dari investor lainnya.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*Supreme Court (Mahkamah Agung Republik Indonesia - MA RI), dated June 10, 2005, the said three ex members of the Board of Governors were found guilty.*

*Based on PDG Number 4/13/PDG/2002, dated October 22, 2002, Bank Indonesia's Board of Directors at the Board of Governors Meeting on June 20, 2005, resolved that all of the costs involved in the handling of the case on behalf of the three former members of Bank Indonesia's Board of Directors must be returned. Furthermore, the Board of Governors at its Meeting on April 11, 2006, agreed in principle that the three ex members of Bank Indonesia's Board of Directors seek a Final Review (Peninjauan Kembali - PK) of their case, and suspended the obligation to return all court expenses until the process of Final Review had been completed.*

*Until now, the process of Final Review has not been completed as the three ex members of Bank Indonesia's Board of Directors sought a suspension of the Final Review process until, at the latest, the end of December 2012. Their grounds for doing so was that the circumstances and condition of Bank Indonesia at the present time were felt to be not conducive to the Final Review.*

4. N.V. De Indonesische Overseeze Bank (Indover Bank)

*Since October 6, 2008, emergency measures have been applied to Indover Bank due to a shortage of liquidity. On December 1, 2008, Indover Bank was declared bankrupt by the Amsterdam Court and its status was being liquidated in the Netherlands. The reason for Indover Bank's liquidation was its negative equity and a lack of additional capital that could be expected to cover that negative equity, by way of additional capital from Bank Indonesia as the sole shareholder of Indover Bank or from other investors.*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Dengan telah dipailitkannya Indover Bank oleh Pengadilan Belanda, maka Indover Bank berada di bawah pengelolaan dan pengawasan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Amsterdam Belanda.

Sampai dengan saat ini, masih terdapat *dispute* antara Bank Indonesia dan kurator mengenai hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dan kreditur terkait dengan pelaksanaan likuidasi Indover Bank. Pada bulan Maret 2010, Bank Indonesia sebagai kreditur telah mengajukan *statement of claim* atas deposito dan giro Bank Indonesia di Indover Bank ke Pengadilan Amsterdam. Atas klaim Bank Indonesia tersebut di atas, pada bulan April 2010 Kurator menyampaikan *statement of counterclaim* di Pengadilan Belanda mendalilkan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal Indover Bank berkewajiban untuk menanggung defisit Indover Bank dan men-*set off* tagihan Bank Indonesia yang ada di Indover Bank. Dalam hal ini, Bank Indonesia tetap berpendirian bahwa sesuai hukum perusahaan, tanggung jawab Bank Indonesia sebagai pemegang saham tunggal pada Indover Bank hanya sebatas penyertaan Bank Indonesia pada Indover Bank.

Dalam perkembangannya, sebagaimana yang disampaikan Stibbe dalam *Eleventh Public Liquidation Report* bulan Februari 2012, proses penyelesaian *dispute* tersebut masih berlangsung di Pengadilan Amsterdam.

5. Perkara Hukum yang Ditangani Bank Indonesia

Pada tahun 2011, Bank Indonesia menangani lima perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam. Selain itu, Bank Indonesia juga menangani 57 perkara di dalam negeri, yang terdiri dari perkara Perdata sebanyak 52 perkara, perkara Tata Usaha Negara sebanyak empat perkara, dan sengketa informasi sebanyak satu perkara. Dari 57 perkara di dalam negeri, telah diputus oleh pengadilan sebanyak 43 perkara.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*With the declaration of bankruptcy of Indover Bank by the Amsterdam Court, Indover bank was placed under the control and supervision of Trustees appointed by the Amsterdam Court.*

*To date, there is still a dispute outstanding between Bank Indonesia and the Trustees concerning the rights and liabilities of Bank Indonesia as the sole shareholder and the creditors in the liquidation of Indover Bank. In March 2010, Bank Indonesia as a creditor filed a statement of claim to its time and demand deposits with Indover Bank with the Amsterdam Court. Related to that claim, on April 2010 the Trustees filed a statement of counterclaim with the Amsterdam Court, arguing that Bank Indonesia as the sole shareholder must bear the deficit in Indover Bank and set off of Bank Indonesia's claims against Indover Bank. In this regard, Bank Indonesia is of the opinion that based on company law, Bank Indonesia's responsibility as the sole shareholder of Indover Bank is limited to Bank Indonesia's equity participation in Indover Bank.*

*In the latest development, as reported by Stibbe in the Eleventh Public Liquidation Report in February 2012, the process of resolving the dispute is still underway in the Amsterdam Court.*

5. Legal Matters

*In 2011, Bank Indonesia was dealing with five overseas legal cases related to the Indover Bank bankruptcy settlement in the Netherlands, and 57 cases in Indonesia, consisting of 52 civil cases, and four administrative law cases, and one freedom of information case. Of the 57 domestic cases, 43 have been decided by the courts.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Pada tahun 2011, Bank Indonesia menghadapi gugatan di pengadilan sebanyak 64 perkara, masing-masing terdiri dari lima perkara perdata yang berada di luar negeri terkait penyelesaian kewajiban Indover Bank Amsterdam di Pengadilan Distrik Amsterdam, 51 perkara perdata dan lima perkara Tata Usaha Negara serta satu perkara sengketa informasi di dalam negeri.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka dari 51 perkara perdata yang ditangani dapat dirinci berdasarkan sektornya sebagai berikut:

- a. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Perbankan sebanyak 43 perkara (mengenai fungsi pengawasan bank, Sistem Informasi Debitur, dan proses likuidasi bank).
- b. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Sistem Pembayaran sebanyak lima perkara terkait APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yaitu sengketa antara nasabah dengan bank, dan Bank Indonesia ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut karena Bank Indonesia adalah sebagai otoritas perbankan dan sistem pembayaran.
- c. Gugatan perdata terkait dengan tugas Bank Indonesia di sektor Manajemen Intern sebanyak tiga perkara yaitu terkait dengan kepemilikan hak atas tanah (aset Bank Indonesia) dan kelogistikan.

Sementara lima perkara Tata Usaha Negara terdiri dari dua Perkara terkait dengan hasil proses *Fit and Proper Test* Pengurus Bank dan tiga perkara terkait dengan kepegawaian dan pembatalan sertifikat Hak Milik. Sedangkan satu perkara sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat terkait dengan permintaan data dan informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Aset Bank Indonesia yang Dalam Proses Penyelesaian

- a. Aset Bank Indonesia yang Diperoleh Dari Putusan Pengadilan

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*In 2011, Bank Indonesia was defending 64 court actions, consisting of five overseas legal cases related to the Indover Bank bankruptcy settlement in the Netherlands, and 51 civil cases in Indonesia, five administrative law cases, and one freedom of information case.*

*If we relates these to Bank Indonesia's duties, the 51 civil cases may be classified as follows:*

- a. *43 civil actions related to the duties of Bank Indonesia in the banking sector (bank supervision, debtor information system, and bank liquidation process).*
- b. *Five cases related to the duties of Bank Indonesia in the Payments System sector. These cases concern Card-Based Payment Equipment (APMK) and involve disputes between banks and their customers, with Bank Indonesia being joined as a defendant as it is the payments system and banking regulator.*
- c. *Three cases related to Bank Indonesia's duties in the Internal Management sector. These three cases involve disputes over land ownership (Bank Indonesia assets) and logistical matters.*

*The five administrative law cases consist of two cases involving the outcomes of fit and proper tests for bank executives and three cases related to personnel matters and the cancellation of freehold title certificates. Finally, the one freedom of information case involves a request for information under the Access to Public Information Act.*

6. Safeguarding Bank Indonesia Assets

- a. *Bank Indonesia Assets Secured by Judicial Decision*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, telah ada Putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992. Dalam amar putusan MARI tidak ada klausula denda apabila uang pengganti tidak dibayar dan tidak ada batas waktu pembayaran uang pengganti dimaksud. Eksekusi putusan pengadilan tersebut merupakan kewenangan pihak Kejaksaan sedangkan Bank Indonesia hanya menerima penyerahan uang pengganti hasil eksekusi dari Kejaksaan. Adapun putusan MARI Nomor 1662K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp 85.000 juta  
Sesuai keputusan MARI tersebut ditetapkan bahwa terdakwa Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat harus membayar uang pengganti kepada negara c.q. Bank Indonesia sebesar Rp 85.000 juta.

Dalam amar putusan MARI tidak ada klausula denda apabila uang pengganti tidak dibayar dan tidak ada batas waktu pembayaran uang pengganti dimaksud. Eksekusi putusan pengadilan tersebut merupakan kewenangan pihak Kejaksaan, sedangkan Bank Indonesia hanya menerima penyerahan uang pengganti hasil eksekusi dari Kejaksaan.

Sejak putusan MARI tanggal 21 Maret 1992 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga April 2011, Bank Indonesia belum menerima hasil eksekusi uang pengganti. Bank Indonesia telah mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 12/193/DHk tanggal 24 Mei 2010 dan Nomor 12/400/DHk tanggal 6 Oktober 2010 yang isinya menanyakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dengan surat Nomor B-4383/O.1.12/

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*In the corruption case involved convicted defendant Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat, the Supreme Court (MA) of the Republic of Indonesia has handed down Decision Number 1662K/Pid/1991 dated March 21, 1992. The court order, however, does not impose penalties if compensation is not paid, and sets no time limit for the payment of compensation. Execution of the decision is the responsibility of the Prosecution Service, while Bank Indonesia only receives the compensation funds resulting from execution by the Prosecution Service. The said Supreme Court Decision rules as follows:*

- 1) Execution of Payment of Compensation amounting to IDR 85,000 million  
In its decision, the Supreme Court stated that the defendant Lee Dharmawan Kertaraharja Haryanto aka Lee Chin Kiat should pay compensation to the state, in this case Bank Indonesia, in the amount of IDR 85,000 million.*

*The court order, however, does not impose penalties if compensation is not paid, and sets no time limit for the payment of compensation. Execution of the decision is the responsibility of the Prosecution Service, while Bank Indonesia only receives the compensation funds resulting from execution by the Prosecution Service.*

*Since the decision of the Supreme Court on March 21, 1992, which has had permanent legal force since April 2011, Bank Indonesia has received the proceeds of execution of compensation. Therefore, Bank Indonesia has submitted letters to the Head of the West Jakarta District Prosecution Office (Number 12/193/DHk dated May 24, 2010) and Number12/400/DHk dated October 6, 2010, asking for the compensation order to be enforced.*

*The Head of the West Jakarta District Prosecution Office, through letter Number*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Fu.1/10/2010 tanggal 20 Oktober 2010, menyatakan bahwa terkait eksekusi pembayaran uang pengganti sebesar Rp 85.000 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat telah dilakukan pembayaran kepada kas negara sejumlah Rp 1.384 juta. Pembayaran tersebut masih kurang sebesar Rp 83.616 juta dari putusan uang pengganti yang ditetapkan MARI.

Melalui surat Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kepada Direktur UKPA Nomor B-2661/O.1.12/Ft1/05/2011 tanggal 27 Mei 2011, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menginformasikan bahwa hasil eksekusi atas aset terpidana Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat sebesar Rp 4.263 juta telah disetor ke Kas Negara.

Surat Bank Indonesia kepada Dirjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor 13/4/DpG/UKPA tanggal 30 Desember 2011, Bank Indonesia meminta agar hasil eksekusi sebesar Rp 4.263 juta yang merupakan hak Bank Indonesia disetorkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan Rapat di Kementerian Keuangan pada tanggal 16 Januari 2012 yang dihadiri Kementerian Keuangan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Bank Indonesia serta surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-910/PB/2012 tanggal 27 Januari 2012, diinformasikan bahwa Uang Pengganti atas kasus Lee Darmawan yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat dikembalikan kepada pihak yang menderita kerugian (Bank Indonesia). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia dapat mengajukan surat permohonan pengembalian atas Uang Pengganti tersebut melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*B-4383/O.1.12/Fu.1/10/2010, dated October 20, 2010, stated that in connection with the payment of compensation of IDR 85,000 million, the convicted defendant Lee Darmawan alias Lee Chin Kiat has made cash payments into the State Cash Account amounting to IDR 1,384 million, leaving a shortfall of IDR 83,616 million in respect of the compensation that the Supreme Court ordered be paid.*

*Through its letter to the UKPA Director (Number B-2661/O.1.12/Ft1/05/2011 dated May 27, 2011), the West Jakarta District Prosecution Office informed Bank Indonesia that IDR 4,263 had been raised from execution against the assets of Lee Darmawan Kertaraharja Haryanto alias Lee Chin Kiat, and that the funds had been paid into the State Cash Account.*

*In its letter to the Director General of the Treasury at the Ministry of Finance (Number 13/4/DpG/UKPA dated December 30, 2011), Bank Indonesia requested that the abovementioned IDR 4,263, to which Bank Indonesia is entitled, be paid over to Bank Indonesia.*

*Following a meeting at the Ministry of Finance on January 16, 2012, which was attended by the Minister of Finance, West Jakarta District Prosecutor, and representatives of Bank Indonesia, and based on the letter of the Minister of Finance Number S-910/PB/2012 dated January 27, 2012, it was agreed that the funds that had been paid into the State Cash Account by the West Jakarta District Prosecution Office should be handed over to the party that suffered loss (Bank Indonesia), and that Bank Indonesia should submit a request for the handover of the funds to the West Jakarta District Prosecution Office.*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

2) Rampasan Barang Bukti Berupa Tanah dan/ atau Bangunan  
Sesuai keputusan MARI Nomor 1662K/ Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 tersebut di atas, ditetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan/atau bangunan dirampas untuk Negara c.q. Bank Indonesia yang apabila dijumlahkan mencapai ±1.193 Ha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1993, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) telah menyerahkan sebagian barang bukti rampasan kepada Negara c.q. Bank Indonesia yang berupa dokumen-dokumen untuk bidang tanah seluas ±1.001 Ha. Pada saat ini, aset rampasan tersebut masih dalam proses penyelesaian, bekerja sama dengan Yayasan Tridaya. Aset rampasan tersebut tersebar di beberapa lokasi, dan pada posisi 31 Desember 2011, Bank Indonesia telah melakukan penjualan aset rampasan sebanyak 61 bidang senilai Rp 4.463 juta.

b. Aset Bank Indonesia yang masih perlu diselesaikan dengan Pihak Lain

Nilai (Rp juta) Value (IDR millions)	
Jl. Juanda - Jakarta (proses tukar menukar dengan PT Bank Mandiri)	70.820
Jl. Raden Saleh No.11 – Jakarta	9.356
Jl. Tubagus Ismail – Bandung	2.302
Jl. Taman Kebon Sirih No.I/8 (No.125) dan III/30 - Jakarta Pusat	9.035
	<b>91.513</b>

7. Tagihan Kepada PT Bank IFI

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia mencabut izin usaha PT Bank IFI terhitung sejak tanggal 17 April 2009. Bank Indonesia mempunyai tagihan atas dana kelolaan PT Ustraindo yang ada di PT Bank IFI sebesar Rp 50.817 juta yang terdiri dari pokok sebesar Rp 38.850 juta dan bunga sebesar Rp 11.967 juta.

2) Confiscation of Evidence in the Form of Lands and/or Buildings  
Supreme Court Decision Number 1662K/ Pid/1991 dated March 21, 1992 ordered that evidence in the form of lands and/or buildings be forfeit to the State, in this case Bank Indonesia. The said lands extend to approximately 1193 hectares. On March 30, 1993, the West Jakarta District Prosecution Office handed over some of the seized evidence to Bank Indonesia in the form of land documents for approximately 1001 hectares. At the present time, the process of resolving problems related to these assets is still underway in collaboration with the Yayasan Tridaya. The said assets are located in a number of different places. As of December 31, 2011, Bank Indonesia had sold 61 lots of the confiscated assets, raising IDR 4,463 million in proceeds.

b. Bank Indonesia Assets Under Resolution with Third Parties

7. Claims on PT Bank IFI

Through Governor of Bank Indonesia Decision Number 11/19/KEP.GBI/2009, dated April 17, 2009, Bank Indonesia has revoked the license of PT Bank IFI starting on April 17, 2009. Based on that decision, Bank Indonesia has a claim on PT Bank IFI's liabilities in the form of a Subordinated Loan (SOL) amounting to IDR 50,000 million and A claim on funds managed by PT Ustraindo from PT Bank IFI amounting to IDR 50,817 million that consists of principal of IDR 38,850 million and interest of IDR 11,967 million.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

8. Tagihan Bunga FSD

Pada tahun 1998/1999 Bank Indonesia telah memberikan BLBI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia sebesar Rp 144.536.094 juta.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, telah dilakukan pengalihan BLBI posisi tanggal 29 Januari 1999 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah c.q. BPPN sebesar Rp 144.536.094 juta dengan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Akta Cessie) tanggal 22 Februari 1999, dan di sisi lain Pemerintah menerbitkan Surat Utang SU-001/ MK/1998, sebesar Rp 80.000.000 juta dan SU-003/MK/1999, sebesar Rp 64.536.094 juta.

Dari total BLBI yang telah dialihkan kepada Pemerintah q.q. BPPN sebesar Rp 144.536.094 juta, termasuk didalamnya FSD sebesar Rp 54.460.896 juta. Dalam jumlah FSD tersebut terdapat FSD eks. Bank Take Over (BTO) yaitu PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., dan PT Bank Tiara Asia Tbk., sebesar Rp 20.129.741 juta. Terhadap FSD sebesar Rp 20.129.741 juta tersebut terdapat beban bunga FSD sebesar Rp 5.322.248 juta dengan rincian sebagai berikut:

Pokok FSD (Rp juta) FSD Principal (IDR millions)		Bunga FSD (Rp juta) FSD Interest (IDR millions)	
- PT Bank Danamon Tbk.	16.691.825	4.379.861	- PT Bank Danamon Tbk.
- PT Bank PDFCI Tbk.	1.995.000	534.959	- PT Bank PDFCI Tbk.
- PT Bank Tiara Asia Tbk.	1.442.916	407.428	- PT Bank Tiara Asia Tbk.
	<b>20.129.741</b>	<b>5.322.248</b>	

Atas tagihan bunga sebesar Rp 5.322.248 juta tidak ikut dialihkan kepada pemerintah karena tidak tercatat dalam pembukuan *on balance sheet* Bank Indonesia per tanggal 29 Januari 1999.

Sesuai Pasal 6 Persetujuan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999 dinyatakan bahwa

8. FSD Interest Claims

In 1998/1999, Bank Indonesia provided Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) to banks experiencing liquidity problems at the time of the monetary crisis in Indonesia in 1998. The said assistance amounted to IDR 144,536,094 million.

As a follow-up to the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999, the BLBI position per January 29, 1999 was transferred from Bank Indonesia to the Government through the BPPN in the amount of IDR 144,536,094 million based on the Deed of Surrender and Transfer of Title (Cessie Deed) dated February 25, 1999. For its part, the Government issued Treasury Bond SU-001/ MK/1998 in the amount of IDR 80,000,000 million and Treasury Bond SU-003/MK/1999 in the amount of IDR 64,536,094 million.

The BLBI of IDR 144,536,094 million that was transferred to the Government via the BPPN included FSD amounting to IDR 54,460,896 million. This figure included FSD ex Bank Takeovers (BTO) of PT Bank Danamon Tbk., PT Bank PDFCI Tbk., and PT Bank Tiara Asia Tbk., in the amount of IDR 20,129,741 million. In respect of this FSD, interest of IDR 5,322,248 million has accrued, with the details being as follows:

The claims in respect of this IDR 5,322,248 in interest were not transferred to the Government as they were not recorded on the Bank Indonesia balance sheet per January 29, 1999.

Article 6 of the Joint Agreement between the Governor of Bank Indonesia and the Minister of Finance dated February 6, 1999 stated that

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

pembayaran oleh Pemerintah atas tagihan BLBI yang timbul setelah tanggal 29 Januari 1999 masih dimungkinkan dilaksanakan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah. Sehubungan dengan itu, pada bulan Mei 1999 tagihan bunga FSD kepada eks. BTO dibukukan oleh Bank Indonesia sebagai “Tagihan kepada BPPN”.

a. Penyajian tagihan bunga FSD pada LKTBI

- Pada LKTBI Tahun 1999-2002 (*audited*), tagihan Bunga FSD disajikan sebagai bagian dari pos “Tagihan Kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya”. Dalam Catatan atas LKTBI Tahun 2002 (*Audited*) dijelaskan bahwa:
  - Tambahan BLBI berupa tagihan kepada BPPN sebesar Rp 9.125.397 juta dan tagihan karena saldo debit giro BBO/BBKU sebesar Rp 5.324.396 juta atau seluruhnya sebesar Rp 14.449.793 juta merupakan tambahan BLBI sampai dengan tanggal 13 Maret 1999 yang telah dijaminakan dengan SUP Nomor SU-004/MK/1999, namun pengalihan secara *cessie* kepada Pemerintah atas tambahan BLBI tersebut belum dilaksanakan. Bank Indonesia, terakhir dengan surat Nomor 3/3/DG/BK<sub>r</sub> tanggal 15 Februari 2001 menyatakan bahwa seluruh persyaratan pengalihan BLBI telah terpenuhi yaitu Bank Indonesia telah melakukan penagihan dan Departemen Keuangan telah menunjuk BPPN sebagai kuasa Pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan isi Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa atas pengambilalihan hak tagih (*cessie*) akan dilakukan verifikasi yang disepakati kedua belah pihak. Demikian pula dengan akta *cessie* masing-masing bank yang menyatakan bahwa kegiatan verifikasi dimaksudkan dalam rangka kepastian hak tagih (*cessie*) disamping juga untuk kepastian hak jaminan, apabila ada.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*payment by the Government of BLBI claims arising after January 29, 1999 could still be effected based on the submission of claims by Bank Indonesia to the Government. In this regard, in May 1999 the FSD interest ex BTO was recorded by Bank Indonesia as “Claims on BPPN.”*

a. *Presentation of FSD interest in the Bank Indonesia Annual Financial Statements*

- *In the 1999-2002 audited Bank Indonesia Financial Statements, the FSD interest claims were presented as part of “Other Rupiah Claims on Government,” while in the Notes to the Financial Statements it was explained as follows:*
  - *“Additional BLBI in the form of claims on the BPPN amounting to IDR 9,125,397 million and claims of IDR 5,324,396 million arising out of BBO/BBKU demand deposit debit balance, or a total of IDR 14,449,793 million represent additional BLBI up to March 13, 1999 which has been guaranteed by SUP Number SU-004/MK/1999, although the transfer of the additional BLBI by way of cessie to the Government has not be carried out. Bank Indonesia, most recently by Letter Number 3/3/DG/BK<sub>r</sub>, dated February 15, 2001, stated that all of the requirements for the transfer of BLBI had been fulfilled, that is, Bank Indonesia had submitted a claim and the Ministry of Finance had appointed the BPPN as the Government representative. This is in accordance with Articles 2 and 3 of the Joint Agreement dated February 6, 1999, which stated that verification of the cessie arrangement will be conducted as agreed by the parties. Thus, through the Deed of Cessie, each bank stated that verification was intended to ensure certainty of rights under the cessie and verify guarantees, if any.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

- Menteri Keuangan dengan Surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa pengalihan secara *cessie* atas BLBI BBKU sebesar Rp 14,4 triliun oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi atas jumlah BLBI dan hal-hal lain. Adapun mengenai kewajiban atas bunga Fasilitas Saldo Debet sebesar Rp 13,9 triliun masih menunggu hasil verifikasi atas jumlah BLBI sebesar Rp 14,4 triliun.
- Pada LKTBI Tahun 2003 (*Audited*), terdapat pengalihan penyajian atas tagihan Bunga FSD yang semula disajikan sebagai bagian dari pos “Tagihan Kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya” menjadi bagian dari pos “Tagihan Kepada Bank dalam Rupiah”. Hal ini dikarenakan adanya penyelesaian permasalahan tambahan BLBI antara Bank Indonesia dan pemerintah serta pembubaran BPPN (sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 BPPN telah dibubarkan oleh pemerintah karena masa kerjanya telah selesai).
- Dalam LKTBI Tahun 2010 (*unaudited*), Bank Indonesia melakukan reklasifikasi penyajian tagihan bunga FSD dari semula sebagai bagian dari pos “Tagihan kepada Bank” menjadi bagian dari pos “Tagihan kepada Pemerintah”. Hal ini sejalan dengan surat-surat yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada BPPN dan Pemerintah, terakhir surat kepada Menkeu Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010. Namun demikian surat-surat Bank Indonesia tidak mendapat jawaban/tanggapan dari pemerintah.
- Pada LKTBI Tahun 2011 Bank Indonesia menyajikan tagihan bunga FSD BTO tersebut dalam pos Aktiva Lain-Lain dan telah membentuk cadangan penyisihan aktiva yang memadai.

b. Kronologis penyelesaian tagihan bunga FSD

- Sesuai lampiran surat Menkeu Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999, bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) termasuk

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

- *By virtue of Letter Number S-174/MK.06/2001, dated April 3, 2001, the Minister of Finance stated that the the assignment by way of cessie of BLBI BBKU in the amount of IDR 14.4 trillion by Bank Indonesia could be carried out after verification of the BLBI amount and other matters had been conducted. However, as regards FSD interest of IDR 13.9 trillion, the process would have to await the outcome of verification on BLBI amounting to IDR 14.4 trillion.*
- *In the audited Bank Indonesia Financial Statements for 2003, the FSD interest was reclassified from “Other Rupiah Claims on Government” to “Rupiah Claims on Banks.” This was due to the fact that the problem of additional BLBI between Bank Indonesia and the Government had been resolved, and the dissolution of the BPPN (in accordance with Presidential Decree Number 15 of 2004, dated February 27, 2004, the BPPN was dissolved by the Government as its term of existence had come to an end).*
- *In the 2010 unaudited Bank Indonesia Financial Statements, the presentation of FSD interest was again reclassified from “Claims on Banks” to “Claims on Government.” This was in line with the letters sent by Bank Indonesia to the BPPN and Government, most recently the letter to letter to the Minister of Finance, Number 12/1/GBI/DKBU dated April 30, 2010. However, no response was forthcoming from the Government to these letters.*
- *In the 2011 Bank Indonesia Financial Statements, FSD BTO interest has been presented in the “Other Assets” account, and a sufficient provision has been established.*

b. *Chronology of FSD Interest Claims*

- *In accordance with the attachment to Minister of Finance Letter Number SR-176/MK.01/1999 dated March 31, 1999, Debit*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

dalam angka sementara rincian kewajiban bank yang dapat dibiayai penjaminan Pemerintah namun dengan catatan pelaksanaan pembayaran masih akan dibicarakan kembali.

- BPPN dengan surat Nomor PB-443/BPPN/0799 tanggal 15 Juli 1999 tentang Pembebanan Bunga FSD menjawab surat Bank Indonesia Nomor 1/121/UK, Nomor 1/122/UK, Nomor 1/123/UK dan nomor 1/24/UK tertanggal 6 Juli 1999, yang masing-masing ditujukan kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank PDFCI, Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., dan PT Bank Danamon Tbk. tentang Pembebanan Bunga Fasilitas Saldo Debet. Dalam surat BPPN butir 3-5 menyatakan bahwa:
  - 1) “... beban bunga FSD PT Bank PDFCI Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk. dan PT Bank Danamon Tbk., yang dalam surat Saudara dinyatakan timbul selama Agustus 1998 sampai dengan Januari 1999, telah menjadi hak pemerintah q.q. BPPN”
  - 2) Atas beban bunga tersebut, selanjutnya Pemerintah q.q. BPPN akan memperhitungkan dengan bank-bank tersebut secara terpisah.
  - 3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bank Indonesia tidak melakukan pendebetan rekening atas beban bunga Fasilitas Saldo Debet bank-bank dimaksud kecuali terhadap PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 3/1/DGS/BKr tanggal 19 Februari 2001 meminta agar Pemerintah menyelesaikan kewajiban bunga FSD mengingat pokok FSD telah diakui dan menjadi beban Pemerintah.
- Menanggapi surat Bank Indonesia tersebut, Menkeu melalui surat Nomor S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*Balance Facility (FSD) interest was included in the interim bank liabilities amount that could be financed by Government guarantee, subject to the provision that payment implementation would be further discussed.*

- *The BPPN, through its letter Number PB-443/BPPN/0799, dated July 15, 1999, on FSD interest, responded to Bank Indonesia Letters Number 1/121/UK, Number 1/122/UK, number 1/123/UK and number 1/24/UK dated July 6, 1999, which were addressed respectively to PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), PT Bank PDFCI, Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk., and PT Bank Danamon Tbk. In the said BPPN letter, items 3-5 stated that:*
  - 1) “... the FSD interest in respect of PT Bank PDFCI Tbk., PT Bank Tiara Asia Tbk. And PT Bank Danamon Tbk., which in your letter was stated to have accrued between August 1998 and January 1999, has become the entitlement of the Government through the BPPN.”
  - 2) *In respect of the said interest, the Government, in this case the BPPN, will calculate it separately with each of the banks involved.*
  - 3) *In the light of the above, Bank Indonesia should not debit the FSD interest for the said banks, save in the case of PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).*
- *Bank Indonesia in its letter to the Minister of Finance Number 3/1/DGS/BKr, dated February 19, 2001, asked that the government resolve the matter of FSD interest obligations bearing in mind that the FSD principal had been recognized and taken over by the Government.*
- *In response to the said letter from Bank Indonesia, the Minister of Finance through Letter Number S-174/MK.06/2001, dated*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

menyatakan bahwa penyelesaian atas kewajiban bunga FSD menunggu hasil verifikasi atas jumlah tambahan BLBI sebesar Rp 14,45 triliun.

- Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 3/6/DpG/DHk/Rahasia tanggal 30 April 2001 berpendapat bahwa penyelesaian bunga FSD tidak perlu menunggu pendapat Komisi IX DPR RI atas penyelesaian BLBI sebesar Rp 144,5 triliun.
- Bank Indonesia dengan surat kepada BPPN Nomor 6/32/BKr tanggal 6 Februari 2004 menyatakan bahwa mengingat BPPN telah memperhitungkan tagihan bunga FSD PT BDI dalam program rekapitalisasi, maka diharapkan agar BPPN membayar kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Presiden RI Nomor 6/1/GBI/DPIP dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6/2/GBI/DPIP masing-masing tanggal 24 Februari 2004 antara lain menginformasikan bahwa masih terdapat tagihan bunga FSD kepada bank-bank yang merger ke PT Bank Danamon Tbk. sebesar Rp 5,32 triliun yang telah diperhitungkan oleh BPPN secara set off dengan obligasi rekapitalisasi, sehingga mengurangi obligasi rekapitalisasi yang diterima oleh PT Bank Danamon Tbk.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Deputi Ketua Keuangan, Audit dan Likuidasi BPPN Nomor 6/63/BKr tanggal 10 Maret 2004 meminta agar BPPN membayar kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia, mengingat BPPN telah memperhitungkan kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. dalam program rekapitalisasi.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 6/4/GBI/BKr tanggal 12 Mei 2004 menyatakan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tugas BPPN dan mengingat kewajiban bunga FSD PT

*April 3, 2001, stated that the settlement of FSD interest liabilities would have to await verification of the additional BLBI of IDR 14.45 trillion.*

- *In this regard, Bank Indonesia through its letter Number 3/6/DHk/Rahasia, dated April 30, 2001, expressed the view that the settlement of FSD interest did not need to await the opinion of Commission IX of the DPR on BLBI amounting to IDR 144.5 trillion.*
- *Bank Indonesia in its letter to the BPPN Number 6/32/BKr, dated February 6, 2004, stated that bearing in mind that the BPPN had calculated the FSD interest claim in respect of PT BDI as part of the recapitalization program, Bank Indonesia hoped that the BPPN would pay the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon Tbk to Bank Indonesia.*
- *In its letters to the President Number 6/1/GBI/DPIP and the Coordinating Minister for the Economy Number 6/2/GBI/DPIP, both dated February 24, 2004, Bank Indonesia informed that there were still outstanding FSD interest claims in respect of the banks that merged with PT Bank Danamon Tbk amounting to IDR 5.32 trillion that had been calculated by the BPPN as a set off against recapitalization bonds so as to reduce the recapitalization bonds received by PT Bank Danamon Tbk.*
- *In its letter to the BPPN's Deputy Chairman for Finance, Auditing and Liquidations, Number 6/63/BKr, dated March 10, 2004, Bank Indonesia asked that the BPPN pay the FSD interest liabilities of PT Bank Danamon to Bank Indonesia bearing in mind that the BPPN had calculated the said FSD interest obligations in the recapitalization program.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 6/4/GBI/BKr, dated May 12, 2004, Bank Indonesia stated that in relation to the expiry of the BPPN's mandate and the fact that the FSD obligations of PT Bank*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Bank Danamon Tbk. telah diperhitungkan dalam program rekapitalisasi, maka Bank Indonesia mengharapkan agar Pemerintah dapat memberikan tanggapan dan penjelasan atas kewajiban bunga FSD PT Bank Danamon Tbk. kepada Bank Indonesia.

- Surat Keputusan Bersama Menkeu dengan GBI Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005 mencakup permasalahan bunga FSD dalam agenda yang dibahas antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Kerja. Namun demikian sampai dengan SKB dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, belum diperoleh penyelesaian atas permasalahan bunga FSD.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 9/8/DpG/BKr tanggal 1 Agustus 2007 meminta penjelasan apakah tagihan bunga FSD eks.BTO dapat dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 10/15/DpG/DKBU tanggal 12 Desember 2008 meminta penjelasan apakah tagihan bunga FSD eks.BTO dapat dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dengan surat kepada Menkeu Nomor 12/1/GBI/DKBU tanggal 30 April 2010 meminta bantuan mengenai penyelesaian tagihan bunga FSD eks.BTO.

- Menkeu melalui surat Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 menyatakan bahwa mengingat dalam LKTBI tahun 2009, tagihan FSD dicatat sebagai tagihan kepada Bank (dan bukan kepada Pemerintah), dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berikut penjelasannya yang tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, hingga laporan tahun 2009 tidak terdapat pengakuan terhadap tagihan dimaksud, maka bunga FSD kepada BTO seyogyanya dibebankan kepada BI dan bukan APBN.

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

*Danamon Tbk had already been included as part of the recapitalization program, Bank Indonesia hoped that the Government would provide a response and clarification as regards the FSD interest obligations of PT Bank Danamon Tbk to Bank Indonesia.*

- *The Joint Decision of the Minister of Finance and the Board of Governors Number 7/23/KEP.GBI/2005, dated April 29, 2005, included the issue of FSD interest as part of the agenda to be discussed by the Government and Bank Indonesia through a Working Committee. Nevertheless, by the expiry of the Joint Decision on December 31, 2005, there had still been no resolution to the FSD interest issue.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 9/8/DpG/BKr, dated August 1, 2007, Bank Indonesia requested that its claim to FSD interest ex BTO be paid by the Government to Bank Indonesia.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 10/15/DpG/DKBU, dated December 12, 2008, Bank Indonesia requested confirmation as to whether its claim to FSD interest ex BTO would be paid by the Government to Bank Indonesia.*
- *In its letter to the Minister of Finance Number 12/1/GBI/DKBU, dated April 30, 2010, Bank Indonesia asked for assistance as regards the resolution of the FSD interest ex BTO issue.*
- *Through his letter Number S-228/MK.01/2011, dated May 5, 2011, the Minister of Finance stated that bearing in mind that in the Bank Indonesia Financial Statements for 2009, the FSD claims had been recorded as claims on banks rather than as claims on government, up until the 2009 Central Government's annual financial statements and the Notes to the Financial Statements, there had been no recognition of the claims so that the FSD interest should be borne by Bank Indonesia rather than the National Budget.*

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

- Menanggapi surat Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011 tersebut, Bank Indonesia telah menyampaikan surat Nomor 14/1/GBI/DKBU tanggal 26 Maret 2012. Dalam surat tersebut Bank Indonesia menyatakan bahwa:
  - Dalam LKTBI Tahun 2009 dan 2010 (*audited*) tagihan bunga FSD kepada eks. BTO memang disajikan sebagai “Tagihan kepada Bank sesuai angka 2 surat Kementerian Keuangan Nomor S-228/MK.01/2011 tanggal 5 Mei 2011. Namun demikian, berdasarkan catatan atas LKTBI dimaksud dijelaskan bahwa tagihan bunga FSD kepada eks. BTO telah diperhitungkan oleh Pemerintah c.q. BPPN dalam proses rekapitalisasi eks. BTO tersebut.
  - Dengan telah diperhitungkannya tagihan bunga FSD kepada eks. BTO dalam proses rekapitalisasi oleh Pemerintrah c.q. BPPN dan berdasarkan penelitian terhadap dokumen pendukung yang diserahkan oleh PT Bank Danamon Tbk., maka tagihan bunga FSD kepada eks. BTO yang semula “Tagihan kepada Bank” menjadi “Tagihan kepada Pemerintah”.

Pada tanggal 26 April 2012, Bank Indonesia sesuai Keputusan Rapat Dewan Gubernur meng-*off balance sheet*-kan tagihan bunga FSD tersebut. Namun demikian, Bank Indonesia tetap melanjutkan tugas pengelolaan tagihan bunga FSD eks. BTO termasuk upaya penagihan, dengan mempertimbangkan bahwa tagihan tersebut merupakan aset yang masih memerlukan tindak lanjut yang komprehensif – lihat Catatan C.14 dan C.15.

9. Utang PPN

Atas utang PPN periode Desember 2006 s.d. Desember 2009 dan Januari s.d. Desember 2011, Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda sesuai

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

- *In response to the said letter number S-228/MK.01/2011, dated May 5, 2011, Bank Indonesia sent letter Number 14/1/GBI/DKBU dated March 26, 2012 in which Bank Indonesia stated the following:*
  - *That it was true that the Bank Indonesia Financial Statements for 2009 and 2010 (audited presented the FSD interest claim as “Claims on Banks”, as stated in the Minister of Finance’s Letter Number S-228/MK.01/2011, dated May 5, 2011. However, in the Notes to the Financial Statements it was explained that the FSD interest claims had been included by the Government (through the BPPN) in the recapitalization process.*
  - *With the inclusion of the FSD interest claims in the recapitalization process by the Government (through the BPPN) and based on a study of supporting documents provided by PT Bank Danamon Tbk, the FSD interest claims on the ex BTO had been reclassified as “Claims on Government” rather than “Claims on Banks.”*

*On April 26, 2012, Bank Indonesia, in accordance with a Resolution of the Board of Governors, removed the FSD interest claims from the balance sheet. Nevertheless, Bank Indonesia will continue to perform its duty to manage the FSD interest claims, including endeavoring to ensure their recovery, based on the consideration that these claims constitute assets that require comprehensive resolution – see Notes C.14 and C.15.*

9. VAT Arrears

*In respect of VAT arrears for the periods of December 2006 to December 2009 and January to December 2011, Bank Indonesia is liable to administrative sanctions in the form of interest*



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

and penalties under Act Number 28 of 2007 on the Third Amendment to Act Number 6 of 1983 on General Taxation Provisions and Procedures.

10. Tagihan Kepada PT MNN

PT MNN melakukan wanprestasi pekerjaan pemeliharaan mesin sortasi uang kertas. Sesuai perjanjian, Bank Indonesia berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang belum diselesaikan oleh PT MNN, apabila biaya penyelesaian pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang wajib dibayarkan kepada PT MNN, maka pihak PT MNN membayar selisih biaya tersebut. Saat ini sedang dilakukan klarifikasi atas kewajiban PT MNN.

10. Claims on PT MNN

PT MNN failed to perform its obligations under a contract to maintain money sorting machines. Under the agreement, Bank Indonesia is entitled to appoint a third party to continue the maintenance work that was not completed by PT MNN. In such circumstances, should the cost of contracting a third party to finish the work be greater than the cost that should be paid to PT MNN, then PT MNN is required to indemnify Bank Indonesia in respect thereof. Bank Indonesia is currently seeking clarification as regards this matter with PT MNN.

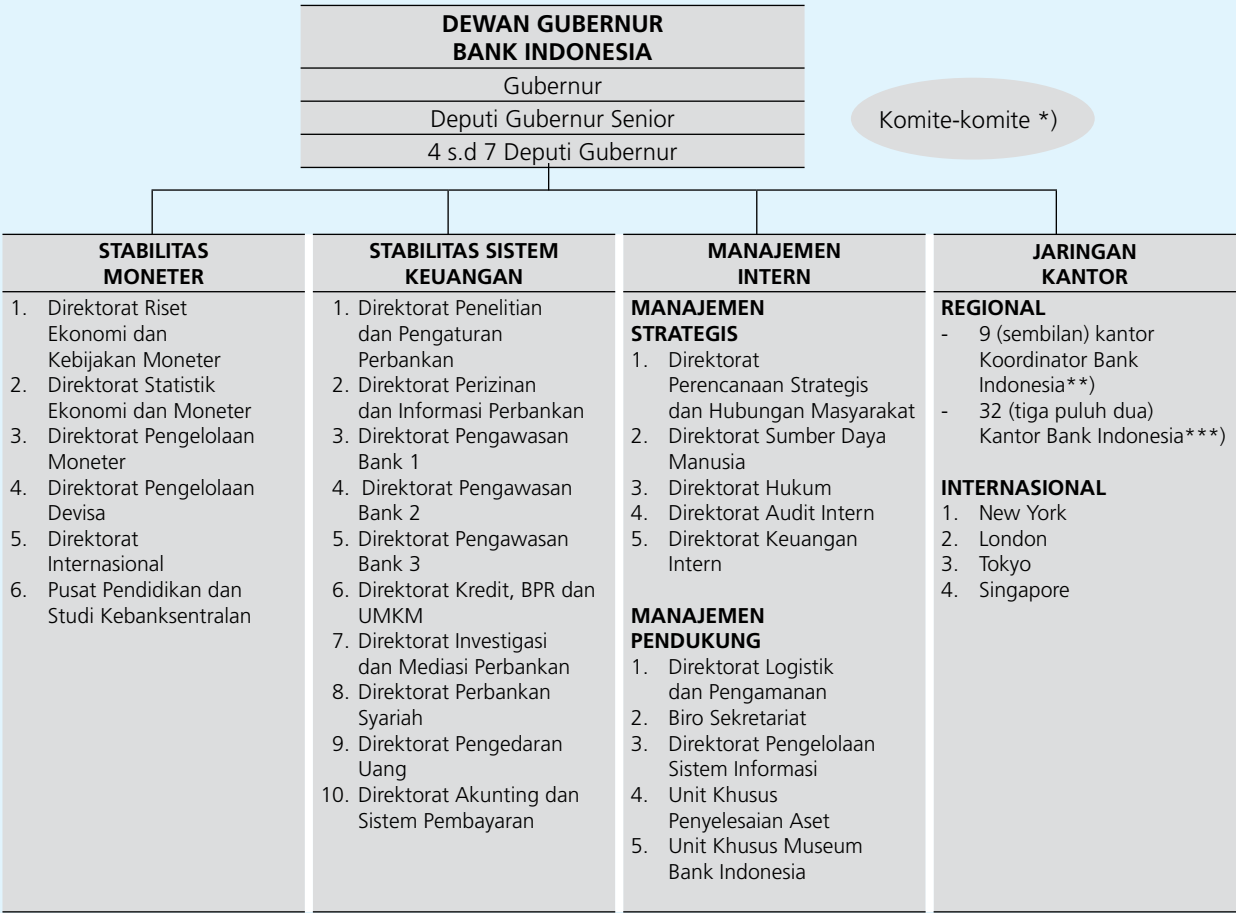
BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF BANK INDONESIA



\*)KOMITE DI BANK INDONESIA

1) Komite Kebijakan Moneter, 2) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 3) Komite Pengaturan dan Pengawasan Perbankan, 4) Komite Internasional, 5) Komite Perencanaan Anggaran dan Manajemen Kinerja (PAMK), 6) Komite Sumber Daya Manusia.

\*\*)9 KANTOR KOORDINATOR BANK INDONESIA

1) Surabaya; 2) Bandung, 3) Semarang, 4) Medan, 5) Denpasar, 6) Makassar, 7) Palembang, 8), Padang, 9) Banjarmasin.

\*\*)32 KANTOR BANK INDONESIA

1) Solo, 2) Pekanbaru, 3) Yogyakarta, 4) Cirebon, 5) Malang, 6) Manado, 7) Bandar Lampung, 8) Samarinda, 9) Mataram, 10) Tasikmalaya, 11) Pontianak, 12) Kediri, 13) Jayapura, 14) Purwokerto, 15) Jambi, 16) Jember, 17) Banda Aceh, 18) Bengkulu, 19) Batam, 20) Ambon, 21) Kupang, 22) Palu, 23) Kendari, 24) Palangkaraya, 25) Balikpapan, 26) Lhokseumawe, 27) Ternate, 28) Sibolga, 29) Serang, 30) Gorontalo, 31) Tegal, 32) Pematang Siantar.

\*)BANK INDONESIA COMMITTEES

1) Monetary Stability Committee, 2) Financial System Stability Committee, 3) Banking Regulation and Supervision Committee, 4) International Committee, 5) Budget Planning and Performance Management Committee (PAMK), 6) Human Resources Committee.

\*\*)9 BANK INDONESIA REGIONAL COORDINATING OFFICES

1) Surabaya, 2) Bandung, 3) Semarang, 4) Medan, 5) Denpasar, 6) Makassar, 7) Palembang, 8), Padang, 9) Banjarmasin.

\*\*)32 BANK INDONESIA REGIONAL OFFICES

1) Solo, 2) Pekanbaru, 3) Yogyakarta, 4) Cirebon, 5) Malang, 6) Manado, 7) Bandar Lampung, 8) Samarinda, 9) Mataram, 10) Tasikmalaya, 11) Pontianak, 12) Kediri, 13) Jayapura, 14) Purwokerto, 15) Jambi, 16) Jember, 17) Banda Aceh, 18) Bengkulu, 19) Batam, 20) Ambon, 21) Kupang, 22) Palu, 23) Kendari, 24) Palangkaraya, 25) Balikpapan, 26) Lhokseumawe, 27) Ternate, 28) Sibolga, 29) Serang, 30) Gorontalo, 31) Tegal, 32) Pematang Siantar.

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

DAFTAR SINGKATAN *LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS*

<b>ADB</b>	: Asian Development Bank	<b>DMO</b>	: Domestic Market Obligation
<b>AJDF</b>	: ASEAN Japan Development Fund for Indonesia	<b>DpG</b>	: Deputy Gubernur <i>Deputy Governor</i>
<b>APMK</b>	: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	<b>DPK</b>	: Dana Pihak Ketiga <i>Third Party Deposits</i>
<b>AUD</b>	: Australian Dollar	<b>DPM</b>	: Direktorat Pengelolaan Moneter <i>Directorate of Monetary Management</i>
<b>Baperum</b>	: Bantuan Pemilikan Rumah <i>Housing Assistance</i>	<b>DPNP</b>	: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan <i>Directorate of Banking Research and Regulation</i>
<b>Bappenas</b>	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional <i>National Development Planning Agency</i>	<b>DPR RI</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia House of Representatives</i>
<b>BBKU</b>	: Bank Beku Kegiatan Usaha <i>Suspended Bank Business Operations</i>	<b>EUR</b>	: Euro
<b>BBO</b>	: Bank Beku Operasi <i>Operation-Suspended Bank</i>	<b>FASBIS</b>	: Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah <i>Bank Indonesia Sharia Deposit Facility</i>
<b>BKP</b>	: Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan <i>Pensioner Health Assistance</i>	<b>FPN</b>	: Floating Principal Notes
<b>BI</b>	: Bank Indonesia	<b>FSD</b>	: Fasilitas Saldo Debet <i>Debit Balance Facility</i>
<b>BIS</b>	: Bank for International Settlements	<b>GBP</b>	: Great Britain Poundsterling
<b>BLBI</b>	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Liquidity Assistance</i>	<b>GTZ</b>	: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
<b>BPR RI</b>	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia State Audit Board</i>	<b>GWM</b>	: Giro Wajib Minimum <i>Minimum Reserve Requirement</i>
<b>BPM6</b>	: Balance of Payment Manual 6	<b>HCU</b>	: Hak Cetak Uang <i>Currency Printing Right</i>
<b>BPPN</b>	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional	<b>HIPC</b>	: Heavily Indebted Poor Countries
<b>Bps</b>	: Basis point(s)	<b>IAS</b>	: International Accounting Standard
<b>BTO</b>	: Bank Take Over	<b>IBA</b>	: Indover Bank Amsterdam
<b>BUMD</b>	: Badan Usaha Milik Daerah <i>Local Government-Owned Enterprise</i>	<b>IBRD</b>	: International Bank for Reconstruction and Development
<b>BUMN</b>	: Badan Usaha Milik Negara <i>State-Owned Enterprise</i>	<b>IILM</b>	: International Islamic Liquidity Management
<b>BUN</b>	: Bendaharawan Umum Negara <i>General State Treasurer</i>	<b>IMF</b>	: International Monetary Fund
<b>CAD</b>	: Canadian Dollar	<b>Indover Bank</b>	: N.V. De Indonesische Overseeze Bank
<b>CaLK</b>	: Catatan atas Laporan Keuangan <i>Notes to the Financial Statements</i>	<b>ING</b>	: International Netherlands Group
<b>DAPENBI</b>	: Dana Pensiun Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Pension Fund</i>	<b>IPBV</b>	: Indo Plus Besloten Vennootschap
<b>DG</b>	: Dewan Gubernur <i>Board of Governors</i>	<b>Jamkrindo</b>	: Jaminan Kredit Indonesia <i>Credit Insurance Indonesia</i>
<b>DGS</b>	: Deputy Gubernur Senior <i>Senior Deputy Governor</i>	<b>JICA</b>	: Japan International Cooperation Agency
<b>DKBU</b>	: Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM <i>Directorate of Credit, Rural Banks and Micro, Small and Medium Enterprise</i>	<b>JPY</b>	: Japanese Yen
<b>DKP</b>	: Dana Kesejahteraan Pegawai <i>Employee Welfare Fund</i>	<b>Kakandepkop</b>	: Kepala Kantor Departemen Koperasi <i>Head of Department of Cooperatives Office</i>
		<b>Kejari Jakbar</b>	: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat <i>West Jakarta District Prosecution Office</i>
		<b>KJPP</b>	: Kantor Jasa Penilai Publik <i>Public Appraiser's Office</i>

BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

<b>KKKS</b>	: Kontraktor Kontrak Kerjasama <i>Contractor Under Collaboration Contract</i>	<b>PBSN</b>	: Perkebunan Besar Swasta Nasional <i>Major Domestic Private Sector Plantation</i>
<b>KLBI</b>	: Kredit Likuiditas Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Liquidity Credit</i>	<b>PDG</b>	: Peraturan Dewan Gubernur <i>Board of Governors Regulation</i>
<b>KMK</b>	: Keputusan Menteri Keuangan <i>Minister of Finance Decree/Decision</i>	<b>Pemda</b>	: Pemerintah Daerah <i>Regional Government</i>
<b>KPMM</b>	: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum <i>Capital Adequacy Ratio</i>	<b>Persero</b>	: Perusahaan Perseroan <i>Limited Liability Company</i>
<b>KPP BUMN</b>	: Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara <i>Tax Office For State-Owned Enterprises</i>	<b>Perum</b>	: Perusahaan Umum <i>Public Service Company</i>
<b>KUT</b>	: Kredit Usaha Tani <i>Farm Credit Scheme</i>	<b>Peruri</b>	: Percetakan Uang Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia Security Printing Company</i>
<b>L/C</b>	: Letter of Credit	<b>PIPEBI</b>	: Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Employees Wives Association</i>
<b>LDR</b>	: Loan to Deposit Ratio	<b>PK</b>	: Peninjauan Kembali <i>Final Supreme Court Review</i>
<b>LHP</b>	: Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Audit Report</i>	<b>PKP</b>	: Pengusaha Kena Pajak <i>Taxable Enterprise</i>
<b>LIBOR</b>	: London Inter-Bank Offered Rate	<b>PPBI</b>	: Persatuan Pensiunan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Pensioners' Association</i>
<b>LKPP</b>	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat <i>Central Government Financial Statements</i>	<b>PPh</b>	: Pajak Penghasilan <i>Income Tax</i>
<b>LKTBI</b>	: Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Financial Statements</i>	<b>PPN</b>	: Pajak Pertambahan Nilai <i>Value Added Tax</i>
<b>Ltd.</b>	: Limited	<b>PRGF</b>	: Poverty Reduction and Growth Facility
<b>MARI</b>	: Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia Supreme Court</i>	<b>ProFi</b>	: Extension of Promotion of Small Financial Institution
<b>Menkeu</b>	: Menteri Keuangan <i>Minister of Finance</i>	<b>PSAK</b>	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan <i>Statement of Financial Accounting Standards</i>
<b>MRUK</b>	: Mesin Racik Uang Kertas <i>Paper Currency Shredding Machine</i>	<b>PT</b>	: Perseroan Terbatas <i>Limited Liability Company</i>
<b>MSUK</b>	: Mesin Sortasi Uang Kertas <i>Paper Currency Sorting Machine</i>	<b>PT BEII</b>	: PT Bank Ekspor Impor Indoensia
<b>MYR</b>	: Ringgit Malaysia	<b>PT IFI</b>	: PT Indonesia Finance and Investment
<b>MXN</b>	: Mexican Peso	<b>PTK</b>	: Pelaksana Tugas Kedinasan <i>Persons Performing Official Duties</i>
<b>NCP</b>	: Net Currency Position	<b>PT MNN</b>	: PT Murni Nusantara Niaga
<b>NPL</b>	: Non Performing Loan	<b>PT RMS</b>	: PT Rekakarya Mardi Sarana
<b>N.V.</b>	: Naamloze Vennootschap	<b>RDG</b>	: Rapat Dewan Gubernur <i>Board of Governors' Meeting</i>
<b>NZD</b>	: New Zealand Dollar	<b>Repo</b>	: Repurchase Agreement
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Service Authority</i>	<b>RI</b>	: Republik Indonesia <i>Republic of Indonesia</i>
<b>ON</b>	: Obligasi Negara <i>Treasury Bond</i>	<b>RKUN</b>	: Rekening Kas Umum Negara <i>General State Cash Account</i>
<b>OPT</b>	: Operasi Pasar Terbuka <i>Open Market Operation</i>	<b>Rp</b>	: Rupiah
<b>PAKBI</b>	: Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Financial Accounting Guidelines</i>	<b>SAK</b>	: Standar Akuntansi Keuangan <i>Financial Accounting Standards</i>
<b>PBI</b>	: Peraturan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Regulation</i>		



BANK INDONESIA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan  
Tahun 2011

Notes to Financial Statements  
As at December 31, 2011

<b>SAL</b>	: Sisa Anggaran Lebih <i>Budget Surplus</i>	<b>THT</b>	: Tunjangan Hari Tua <i>Retirement Benefit Program</i>
<b>SBI</b>	: Sertifikat Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Certificate</i>	<b>TIBOR</b>	: Tokyo Inter-Bank Offered Rate
<b>SBIS</b>	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Bank Indonesia Sharia Certificate</i>	<b>TOZ</b>	: Troy Ounce
<b>SBSN</b>	: Surat Berharga Syariah Negara <i>State Sharia Marketable Securities</i>	<b>TP</b>	: Tahun Pengadaan
<b>SDM</b>	: Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>	<b>TPSL</b>	: Third-Party Securities Lending
<b>SDR</b>	: Special Drawing Rights	<b>TSL</b>	: Two Step Loan
<b>SE</b>	: Surat Edaran Bank Indonesia <i>Circular</i>	<b>UFJ</b>	: United Financial of Japan
<b>SGD</b>	: Singapore Dollar	<b>UKPA</b>	: Unit Khusus Penyelesaian Aset
<b>SKB</b>	: Surat Keputusan Bersama	<b>USD</b>	: United States Dollar
<b>SLA</b>	: Subsidiary Loan Agreement	<b>UU</b>	: Undang-Undang <i>Act of Parliament</i>
<b>SOL</b>	: Subordinated Loan	<b>UTLE</b>	: Uang Tidak Layak Edar <i>Money that is Unfit for Circulation</i>
<b>SPN</b>	: Surat Perbendaharaan Negara <i>Treasury Bill</i>	<b>Valas</b>	: Valuta Asing <i>Foreign Exchange</i>
<b>SPNS</b>	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah	<b>XAU</b>	: Gold Change Rate
<b>SRBI</b>	: Special Rate Bank Indonesia	<b>YASPORBI</b>	: Yayasan Perguruan KORPRI Unit Bank Indonesia <i>Bank Indonesia KORPRI Unit Foundation</i>
<b>SSB</b>	: Surat-Surat Berharga <i>Marketable Securities</i>	<b>YKKBI</b>	: Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Employee Welfare Foundation</i>
<b>SU</b>	: Surat Utang <i>Treasury Bonds</i>	<b>YPPI</b>	: Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia <i>Indonesian Banking Development Foundation</i>
<b>SUN</b>	: Surat Utang Negara <i>Marketable Treasury Bonds</i>	<b>ZAR</b>	: South African Rand
<b>SUP</b>	: Surat Utang Pemerintah <i>Government Bond</i>		
<b>TAMJ</b>	: Tunjangan Akhir Masa Jabatan <i>End-of-Service Allowance</i>		



Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Tel : (62-21) 381 7187, 381 7317

Fax : (62-21) 350 1867

Email: [humas@bi.go.id](mailto:humas@bi.go.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)